KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

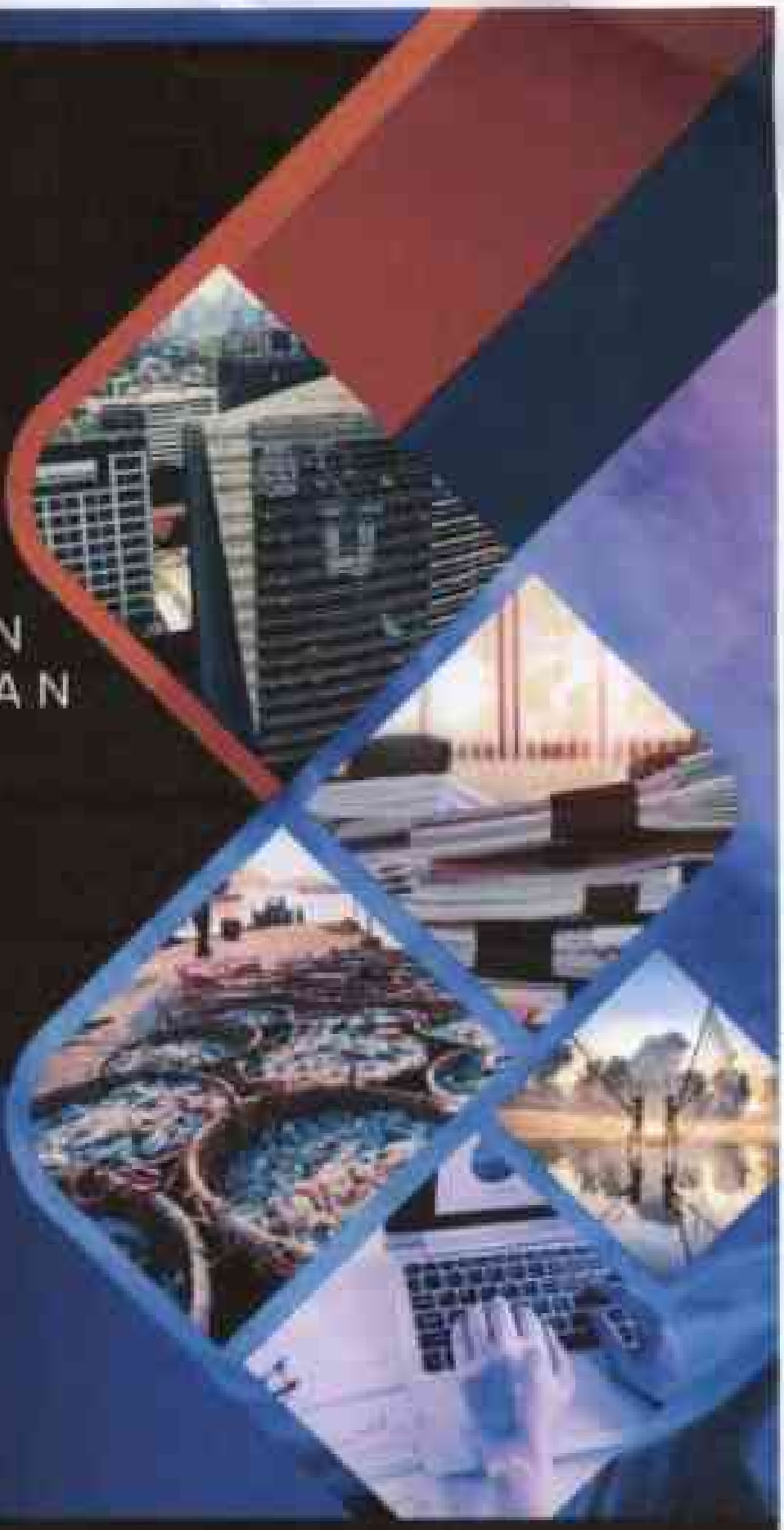
LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tahun Anggaran

2023

Audited



BerAKHLAK

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaga Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para penggguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mei 2024
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Representasi Tertulis Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 iv-v
Pernyataan Tanggung Jawab vi
Pernyataan Telah Direviu vii
Daftar Tabel viii-xxx
- Penjelasan Umum viii
- LRA ix-xiii
- Neraca xiv-xxiii
- LO xxiv-xxvii
- LPE xxviii-xxix
- Pengungkapan Penting Lainnya xxx

Daftar Gambar xxxi-xxxiv
Daftar Lampiran xxxv
Ringkasan xxxvi-xxxvii
I. Laporan Realisasi Anggaran xxxviii
II. Neraca xxxix-xli
III. Laporan Operasional xlii
IV. Laporan Perubahan Ekuitas xliii
Catatan atas Laporan Keuangan
- A. Penjelasan Umum A.1-57
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1-59
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1-144
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1-43
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1-15
- F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1-36

Lampiran – lampiran

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

2 2
2

LAPORAN KEUANGAN

2 2 2

TAHUNAN

2 2

AUDITED

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Mei 2024

Nomor : B.862/MEN-KP/V/2024
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Representasi Tertulis Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Yth. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta 10210

Kami menyampaikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarannya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yakni:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Rekening-rekening atas nama Pemerintah sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
    a. Kesandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
    b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 *Audited* sebagai aseni final Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522809 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522809
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL: itjen@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kehandalan, dan kebenaran informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu, kami yakin bahwa tidak terdapat perbedaan yang menjadikan Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2024
Inspektur Jenderal,

Fernanda Syafullah
NIP. 19720203 199603 1 003

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DAFTAR TABEL

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

DAFTAR TABEL

PENJELASAN UMUM

Tabel	Judul	Hal.
A.1	Perhitungan Penyisihan Piutang	A.19
A.2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	A.22
A.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	A.28
A.4	Perbandingan Jumlah Satker Yang Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 dan 2023	A.33
A.5	Jumlah Rekening Bank	A.34
A.6	Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan	A.35
A.7	Aplikasi-Aplikasi Yang Digunakan dan Dikembangkan Oleh KKP	A.38
A.8	Satuan Kerja Lingkup KKP yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU	A.51

DAFTAR TABEL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel	Judul	Hal.
B.1	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I TA 2023	B.1
B.2	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2023	B.1
B.3	Jumlah Satker KKP Per Unit Eselon I per Kewenangan	B.2
B.4	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja TA 2023	B.2
B.5	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I Akhir TA 2023	B.5
B.6	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja Akhir TA 2023	B.6
B.7	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja Akhir TA 2023	B.6
B.8	Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.8
B.9	Rincian Realisasi PNBP Per Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.8
B.10	Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.9
B.11	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perikanan Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.10

Tabel	Judul	Hal.
B.12	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	B.12
B.13	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.14
B.14	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.15
B.15	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha Pada Masing-Masing Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.17
B.16	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022	B.20
B.17	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022	B.22
B.18	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022	B.23
B.19	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022	B.24
B.20	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, Dan Pengelolaan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022	B.27
B.21	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.28

Tabel	Judul	Hal.
B.22	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal Per 31 Desember 2023 dan 2022	B.30
B.23	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.31
B.24	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.31
B.25	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.32
B.26	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.33
B.27	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.33
B.28	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.34
B.29	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.35
B.30	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.36
B.31	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.38

Tabel	Judul	Hal.
B.32	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.38
B.33	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	B.39
B.34	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.40
B.35	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.42
B.36	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.43
B.37	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.45
B.38	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja BLU Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.47
B.39	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.47
B.40	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.50
B.41	Rincian Realisasi Belanja Modal Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.51

Tabel	Judul	Hal.
B.42	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023	B.51
B.43	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.52
B.44	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.53
B.45	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.54
B.46	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.56
B.47	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.57
B.48	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022	B.58

DAFTAR TABEL

NERACA

Tabel	Judul	Hal.
C.1	Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.1
C.2	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.2
C.3	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023	C.2
C.4	Rincian Perbedaan Data SPRINT dengan Rekening Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.3
C.5	Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pada Masing-Masing Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.3
C.6	Rincian Penyetoran Saldo Penerimaan Tahun 2023 Disetor Tahun 2024 Pada Ditjen Perikanan Tangkap	C.4
C.7	Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.5
C.8	Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.6
C.9	Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.6
C.10	Ringkasan Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening pada Sekretariat Jenderal Per 31 Desember 2023	C.7

Tabel	Judul	Hal.
C.11	Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah JICA Tahun 2023	C.8
C.12	Ringkasan Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah Fase I dan II	C.9
C.13	Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening Pada Sekretariat Jenderal Per 31 Desember 2023	C.11
C.14	Rincian Mutasi Kas Hibah pada DJPT Tahun Anggaran 2023	C.13
C.15	Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.15
C.16	Rincian Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.15
C.17	Rincian Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.16
C.18	Rincian Saldo Rekening Operasional BLU Per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022	C.17
C.19	Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca dengan Saldo Rekening BLU per 31 Desember 2023	C.19
C.20	Rincian Perbedaan Data SPRINT dengan Rekening Pada Setiap Satker BLU Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.19
C.21	Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.21
C.22	Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.21

Tabel	Judul	Hal.
C.23	Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.22
C.24	Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.23
C.25	Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.26
C.26	Perhitungan Penyisihan Piutang	C.30
C.27	Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.31
C.28	Rincian saldo Piutang PNBP pada PPS Nizam Zachman Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.33
C.29	Mutasi Piutang PT Sido Indonesia Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2023	C.34
C.30	Skema Pelunasan Piutang PT Sido Indonesia Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2023	C.35
C.31	Mutasi Piutang PT Sido Indonesia Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2023	C.35
C.32	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.49
C.33	Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.50
C.34	Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU-Pengelolaan Dana Bergulir Berdasarkan Kualitas Piutang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.51

Tabel	Judul	Hal.
C.35	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Kegiatan Operasional BLU Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.51
C.36	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan kualitas Per 31 Desember 2023	C.52
C.37	Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.53
C.38	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Opr BLU Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.54
C.39	Rincian Saldo Persediaan Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.55
C.40	Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi Usang dan Rusak Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023	C.56
C.41	Rincian Saldo Persediaan Untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.56
C.42	Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.58
C.43	Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual Atau Diserahkan kepada Masyarakat Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.59
C.44	Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.60
C.45	Rincian Saldo Aset Tetap Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.61

Tabel	Judul	Hal.
C.46	Rincian Saldo Tanah Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.62
C.47	Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.63
C.48	Rincian Tanah Dikuasai dan/atau Bersengketa dengan Pihak Lain Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023	C.65
C.49	Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.68
C.50	Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Per Bidang Barang Per 31 Desember 2023	C.69
C.51	Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.69
C.52	Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.76
C.53	Daftar Rinci Gedung dan Bangunan Per Bidang Barang Per 31 Desember 2023	C.76
C.54	Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.76
C.55	Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.83
C.56	Daftar Rinci Nilai Tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Bidang Barang Per 31 Desember 2023	C.83
C.57	Ringkasan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.83
C.58	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.87

Tabel	Judul	Hal.
C.59	Daftar Rinci Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Per Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember 2023	C.88
C.60	Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.90
C.61	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.92
C.62	Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.94
C.63	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.97
C.64	Ringkasan Nilai Penyusutan Aset Tetap Per Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember 2023	C.97
C.65	Rincian Saldo Properti Investasi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.99
C.66	Daftar Rinci Properti Investasi Per Bidang Barang Per 31 Desember 2023	C.101
C.67	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.102
C.68	Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.103
C.69	Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.104
C.70	Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2022	C.105

Tabel	Judul	Hal.
C.71	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.105
C.72	Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.106
C.73	Perhitungan Kontribusi Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa	C.107
C.74	Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023	C.108
C.75	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.109
C.76	Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.109
C.77	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.110
C.78	Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Akun Per 31 Desember 2023	C.111
C.79	Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.112
C.80	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.114
C.81	Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.115

Tabel	Judul	Hal.
C.82	Rincian Saldo Dana Rekening Penampungan-K/L Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.116
C.83	Rincian dan Mutasi Dana di Rekening Penampungan-K/L Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023	C.118
C.84	Rincian Saldo Aset Lain-Lain Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.119
C.85	Rincian Aset Tetap Lain-Lain Per Golongan Barang Per 31 Desember 2023	C.120
C.86	Ringkasan Mutasi Aset Lain-Lain Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023	C.120
C.87	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.123
C.88	Ringkasan Nilai Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember 2023	C.123
C.89	Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.125
C.90	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.126
C.91	Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.127
C.92	Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.130
C.93	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.132

Tabel	Judul	Hal.
C.94	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.132
C.95	Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.134
C.96	Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.135
C.97	Rincian Saldo Hibah Yang Belum Disahkan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.136
C.98	Rincian Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.136
C.99	Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.137
C.100	Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.137
C.101	Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.140
C.102	Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.141
C.103	Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.142
C.104	Rincian Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Per Akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.142

Tabel	Judul	Hal.
C.105	Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.143
C.106	Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	C.143

DAFTAR TABEL

LAPORAN OPERASIONAL

Tabel	Judul	Hal.
D.1	Rincian Pendapatan – LO Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.2
D.2	Rincian Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.2
D.3	Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 pada LRA dan LO	D.3
D.4	Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.4
D.5	Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.6
D.6	Perbedaan Saldo Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 pada LRA dan LO	D.10
D.7	Rincian Perbedaan Saldo Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 pada LRA dan LO	D.10
D.8	Rincian Beban Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.11
D.9	Rincian Saldo Beban Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.11
D.10	Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.12
D.11	Perbedaan Saldo Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO) pada 31 Desember 2023	D.14
D.12	Rincian Perbedaan Saldo Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO) pada 31 Desember 2023	D.14

Tabel	Judul	Hal.
D.13	Rincian Saldo Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.14
D.14	Rincian Saldo Beban Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.15
D.15	Perbedaan Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Persediaan (LRA) Per 31 Desember 2023	D.16
D.16	Rincian Perbedaan Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Persediaan (LRA) Per 31 Desember 2023	D.16
D.17	Rincian Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.17
D.18	Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.18
D.19	Perbedaan Beban Barang dan Jasa (LO) dengan Belanja Barang Jasa (LRA)	D.20
D.20	Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa (LO) dengan Belanja Barang Jasa (LRA)	D.20
D.21	Rincian Saldo Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.23
D.22	Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.23
D.23	Perbedaan Beban Pemeliharaan (LO) dengan Belanja Pemeliharaan (LRA)	D.26
D.24	Rincian Perbedaan Beban Pemeliharaan (LO) dengan Belanja Pemeliharaan (LRA)	D.26
D.25	Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.27
D.26	Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.28

Tabel	Judul	Hal.
D.27	Perbedaan Saldo Belanja Perjalanan Dinas (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas (LO)	D.29
D.28	Rincian Perbedaan Saldo Belanja Perjalanan Dinas (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas (LO)	D.29
D.29	Rincian Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.29
D.30	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.30
D.31	Perbedaan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LO) dan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LRA)	D.31
D.32	Rincian Perbedaan Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LO) dan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (LRA)	D.31
D.33	Rincian Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.32
D.34	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.33
D.35	Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.34
D.36	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.35
D.37	Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.36
D.38	Rincian Saldo Beban Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.37

Tabel	Judul	Hal.
D.39	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.38
D.40	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.38
D.41	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada PSDKP Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.39
D.42	Rincian Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.40
D.43	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.40
D.44	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.41
D.45	Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.42
D.46	Rincian Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	D.42

DAFTAR TABEL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel	Judul	Hal.
E.1	Rincian Saldo Awal Ekuitas pada Masing-Masing Eselon I per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022	E.1
E.2	Perbandingan Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022	E.1
E.3	Perbandingan Surplus/Defisit LO Tahun 2023 dan Tahun 2022	E.2
E.4	Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.3
E.5	Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.4
E.6	Rincian Saldo Koreksi Aset Non Reviluasi pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.5
E.7	Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.6
E.8	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.7
E.9	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.7
E.10	Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.8
E.11	Rincian Diberikan ke Entitas Lain Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.9

Tabel	Judul	Hal.
E.12	Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023	E.10
E.13	Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk dari Kementerian Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023	E.10
E.14	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022	E.11
E.15	Perbandingan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	E.14
E.16	Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	E.14

DAFTAR TABEL

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Tabel	Judul	Hal.
F.1	Rekapitulasi Entitas Akuntansi yang Dikonsolidasi di Lingkungan KKP Tahun 2023	F.2
F.2	Rincian Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan KKP	F.5
F.3	Rincian Hibah Dalam dan Luar Negeri Lingkup KKP	F.5
F.4	Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Tahun 2023	F.6
F.5	Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Tahun 2023	F.6
F.6	Nilai Piutang Negara yang Diserahterimakan PUPN Per 31 Desember 2023	F.11

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DAFTAR GAMBAR

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

DAFTAR GAMBAR

PENJELASAN UMUM

Gambar	Judul	Hal.
A.1	Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	A.6
A.2	Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	A.10

DAFTAR GAMBAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Gambar	Judul	Hal.
B.1	*Automatic Adjustment* Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023	B.3
B.2	Rekomposisi *Automatic Adjustment* Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023	B.4
B.3	Nilai Realokasi Belanja Pegawai KKP ke BA BUN TA 2023	B.4
B.4	Realokasi Belanja Non Pegawai KKP ke BA BUN TA 2023	B.5

DAFTAR GAMBAR

NERACA

Gambar	Judul	Hal.
1	Rencana Progres Fisik Pembangunan Proyek Hibah JICA sampai dengan Tahun 2024	C.17

DAFTAR GAMBAR

LAPORAN OPERASIONAL

Gambar	Judul	Hal.
D.1	Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs Belum Terealisasi Phase I	D.43
D.2	Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs Belum Terealisasi Phase II	D.43

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023
LAMPIRAN II	Daftar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023
LAMPIRAN III	Daftar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023
LAMPIRAN IV	Daftar Kasus Hukum sampai dengan TA 2023
LAMPIRAN V	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
LAMPIRAN VI	Daftar Piutang Negara sampai dengan TA 2023
LAMPIRAN VII	Daftar Pengelola Pinjaman dan Hibah sampai dengan TA 2023
LAMPIRAN VIII	Daftar Penyelesaian Dana Bergulir sampai dengan TA 2023
LAMPIRAN IX	Daftar Capaian Rincian Output Prioritas Nasional (hasil Rekon Kemkeu dan Bapenas tgl 21 Februari 2024) sampai dengan TA 2023

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Ringkasan

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

Laporan Keuangan Kementertan Kelautan dan Perikanan Tahunan TA 2023 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

   Realisasi Pendapatan Negara bersih sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.699.152.504.614,00 atau mencapai 41,56% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.088.397.466.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Negara Bersih sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.335.595.925.317,00 atau mencapai 98,15% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp6.455.200.145.000,00.

2. **NERACA**

   Neraca menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp25.594.904.922.106,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp759.248.960.856,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp23.902.007.287.513,00; Properti Investasi sebesar Rp410.764.540.901,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp103.186.303.929,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp418.977.908.907,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp65.603.529.844,00 dan Rp25.529.221.392.262,00.

3. **LAPORAN OPERASIONAL**

   Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.680.725.517.497,00 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp6.562.869.760.308,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.892.144.242.811,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar defisit (Rp3.970.502.600,00). Dengan demikian, entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp4.886.114.745.419,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp23.420.240.996.441,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp4.806.114.745.410,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp52.349.387.504,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp4.992.745.753.674,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.529.221.392.262,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Rupiah Nominal)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	B.1						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	4.089.307.440.000	1.699.192.504.614	42,00	1.906.182.968.000	1.871.111.943.849	98,16
Jumlah Pendapatan		4.089.307.440.000	1.699.192.504.614	41,56	1.906.182.968.000	1.871.111.943.849	98,16
BELANJA	B.2						
1. Belanja Pegawai	B.2.1	1.801.000.979.000	1.777.327.968.274	98,69	1.829.476.500.000	1.813.136.613.109	99,12
2. Belanja Barang	B.2.2	3.970.968.474.000	3.879.529.145.559	98,00	3.036.428.654.000	2.988.571.631.207	98,36
3. Belanja Modal	B.2.3	663.310.692.000	678.668.874.687	99,00	606.974.606.500	598.360.131.603	98,53
Jumlah Belanja Neto		6.435.280.145.000	6.335.305.828.317	98,15	5.468.879.164.000	5.397.767.396.919	98,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Jakarta, Mei 2024
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Neraca

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Tahun Rupiah)

URAIAN		31 Des 2023	31 Des 2022
ASET LANCAR	**C.1**		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	206.500	182.819.306
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	81,500,000	134,123,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	481.649.921.126	640.403.683.327
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	36.779.421.870	99.619.298.427
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.1.5	110.850.000.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.6	1.856.360.206	35.738.647.201
Pembebatan yang Masih Harus Diterima	C.1.7	33.106.014.631	19.118.371.819
Piutang Bukan Pajak	C.1.8	47.500.916.438	60.886.632.134
Penyishan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.9	(36.242.472.804)	(42.252.186.631)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		**11.258.443.634**	**18.883.685.503**
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.10	38.745.892.705	-
Penyishan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.11	(20.472.226.818)	-
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		**6.322.395.881**	**0**
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	35.235.000	5.921.918
Penyishan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.13	(35.235.000)	(29.110)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)		**0**	**5.792.808**
Persediaan	C.1.14	91.344.821.830	77.857.222.097
JUMLAH ASET LANCAR		**709.340.660.854**	**841.782.883.833**
ASET TETAP	**C.2**		
Tanah	C.2.1	16.011.305.710.883	16.096.132.571.343
Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.502.210.836.685	6.080.014.765.454
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5.302.978.449.379	5.571.798.722.003
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	3.824.815.114.324	3.683.695.205.091
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	229.954.882.360	239.515.339.474
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	91.116.357.351	294.592.314.809
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(8.178.775.149.565)	(7.742.577.498.332)
JUMLAH ASET TETAP		**33.982.887.347.513**	**34.115.941.352.183**
Properti Investasi	**C.3**		

URAIAN		31 Des 2023	31 Des 2022
Properti Investasi	C.3.1	477.776.353.820	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	(67.013.812.119)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**410.764.542.901**	**0**
PIUTANG JANGKA PANJANG	**C.4**		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.1	201.014.544	167.324.544
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.2	(157.051.745)	(156.845.795)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (NETTO)		**43.962.799**	**4.478.749**
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.4.3	102.582.342.333	101.285.588.981
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.4	(517.601.203)	(319.477.856)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)		**102.082.341.130**	**182.586.126.873**
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**103.106.303.929**	**182.584.589.724**
ASET LAINNYA	**C.5**		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.5.1	214.231.398.172	214.231.398.172
Aset Tak Berwujud	C.5.2	204.921.981.791	208.977.461.298
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.5.3	2.745.000	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.5.4	32.493.421.982	-
Aset Lain-lain	C.5.5	443.267.348.262	543.799.585.841
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.5.6	(503.338.982.710)	(380.267.167.403)
JUMLAH ASET LAINNYA		**416.977.065.507**	**376.741.281.894**
JUMLAH ASET		**35.564.364.822.106**	**25.439.868.877.333**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.6**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.1	47.165.904.471	13.776.685.475
Hibah Yang Belum Disahkan	C.6.2	8.620.342.928	0
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.6.3	144.493.282	57.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.4	9.519.360.902	3.403.376.578
Uang Muka dari KPPN	C.6.5	205.000	182.819.395
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.6	34.232.081	5.316.343
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**65.693.529.844**	**18.819.088.791**
JUMLAH KEWAJIBAN		**65.693.529.844**	**18.819.088.791**

Uraian		31 Des 2023	31 Des 2022
EKUITAS			
EKUITAS	C.7		
Ekuitas	C.7.1	25.529.221.392.262	25.420.240.896.441
JUMLAH EKUITAS		**25.529.221.392.262**	**25.420.240.896.441**
JUMLAH EKUITAS		**25.529.221.392.262**	**25.420.240.896.441**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**25.594.994.922.106**	**25.439.890.577.232**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Mei 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Operasional

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023	31 Des 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1.1	637.951.920.307	1.193.172.107.213
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.2	1.243.583.967.110	673.161.229.719
JUMLAH PENDAPATAN		**1.889.725.917.407**	**1.866.333.336.932**
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	1.568.393.474.114	1.644.541.257.158
Beban Persediaan	D.2.2	179.065.299.072	125.425.160.914
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	1.817.232.862.442	1.526.564.153.762
Beban Pemeliharaan	D.2.4	358.522.126.079	262.463.456.351
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	879.408.349.766	527.819.371.696
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	616.756.271.322	120.422.257.342
Beban Pelayanan dan Pemeliharaan	D.2.7	791.671.052.961	810.576.237.332
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	9.796.527.758	8.236.441.867
JUMLAH BEBAN		**6.562.866.765.309**	**5.713.868.474.387**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	**(4.672.140.847.911)**	**(3.847.535.137.455)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.4	**(119.634.738.937)**	**(197.983.215.287)**
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	**112.684.256.529**	**70.915.183.287**
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(6.949.582.669)**	**(127.068.111.929)**
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(4.666.718.745.919)**	**(3.974.603.249.384)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Mei 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

[Dalam Rupiah]

Uraian	CATATAN	31 Des 2023	31 Des 2022
EKUITAS AWAL	E.1	25.430.346.986.441	25.794.812.932.139
SURPLUS/(DEFISIT) LO	E.2	(4.886.114.745.419)	(3.905.563.249.356)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	52.348.387.366	18.239.681.604
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	5.160.560.710	(1.936.907.782)
Koreksi Nilai Revaluasi	E.3.2	11.717.276.630	11.044.904.021
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	36.042.897.569	8.881.518.223
Koreksi Lain-Lain	E.3.4	(572.347.543)	249.167.142
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.842.745.753.874	3.632.894.652.037
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		108.986.395.821	(344.571.920.694)
EKUITAS AKHIR	E.5	25.539.231.382.362	25.430.346.986.441

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Mei 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan

Profil

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berlangsung di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti munculnya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi pembangunan. Pada masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak terurentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Perubahan ini dilanjutkan dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. KKP diharapkan mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang dapat mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya:

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, pembangunan di negara ini lebih berorientasi pada sektor yang ada di darat, mengakibatkan sumber daya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat alamiah seperti industri, pemukiman, konservasi dan sebagainya.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, susunan organisasi KKP sebagaimana diterapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, tanggal 23 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

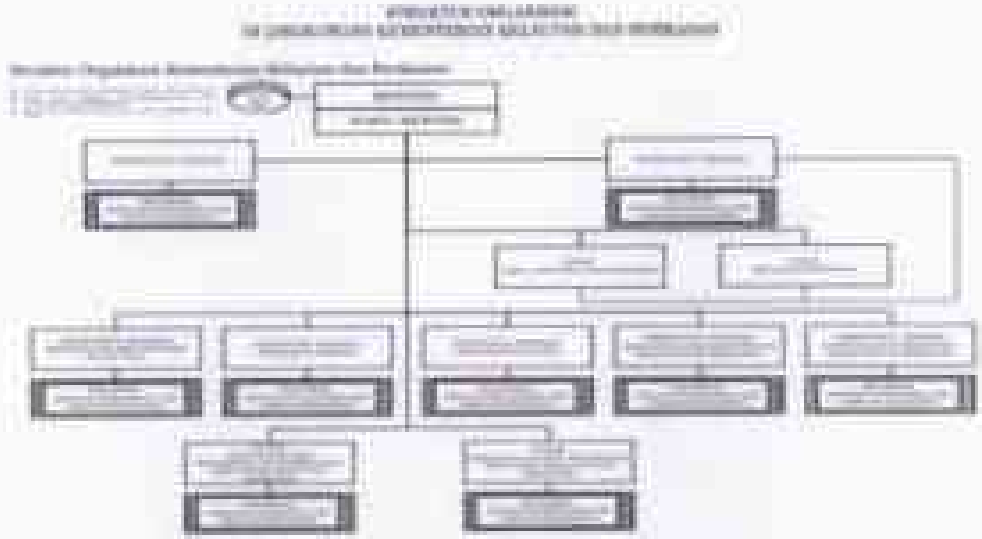
1. Sekretariat Jenderal, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi Setjen terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; Biro Hukum; Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Pusat Data, Statistik dan Informasi; serta kelompok jabatan fungsional.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut. Susunan organisasi Ditjen PKRL terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; Direktorat Penataan Ruang Laut; Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Direktorat Jasa Kelautan; Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan; dan kelompok jabatan fungsional.
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Susunan organisasi DJPT terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat Kepelabuhanan Perikanan; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan kelompok jabatan fungsional.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; Direktorat Ikan Air Tawar; Direktorat Ikan Air Payau; Direktorat Ikan Air Laut; Direktorat Rumput Laut; dan kelompok jabatan fungsional.

5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Direktorat Logistik; Direktorat Pemberdayaan Usaha; Direktorat Pengolahan; Direktorat Pemasaran; dan kelompok jabatan fungsional.
6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Direktorat Pengendalian Operasi Armada; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan; Direktorat Penanganan Pelanggaran; dan kelompok jabatan fungsional.
7. Inspektorat Jenderal, dipimpin oleh Inspektur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Itjen terdiri dari: Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; Inspektorat IV; Inspektorat V; dan kelompok jabatan fungsional.
8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; dan kelompok jabatan fungsional.
9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas:

Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; Pusat Manajemen Mutu; Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer; Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; dan kelompok jabatan fungsional.

10. Staf Ahli, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf Ahli terdiri atas:
    a) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
    b) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
    c) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
11. Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dipimpin oleh Kepala Pusat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
12. Pusat Kebijakan Strategis, dipimpin oleh Kepala Pusat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
13. Kelompok Jabatan Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional, memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
14. Unit Pelaksana Teknis, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar A.1 Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/07/M.KT.01/2017 tanggal 11 Januari 2017, selain struktur organisasi di atas, KKP juga mempunyai satuan kerja (Satker) non struktural yaitu Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Menurut PermenKP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP, pada Pasal 3, disebutkan bahwa lembaga ini di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, Menteri Keuangan menetapkan dua Satker BPPSDMKP, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang Penetapan BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan ditetapkannya satuan kerja pada BRSDMKP menjadi BLU merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mengakselerasi tiga program prioritas KKP, khususnya melalui pengembangan SDM, yaitu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

KKP telah menetapkan tiga program prioritas yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur, pengembangan kampung budidaya berbasis komoditas ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal serta Kampung Nelayan Maju.

Pada Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) Satker di Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yaitu Balai Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang sebagai bagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut, maka Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara diarahkan untuk dapat menjadi salah satu Pusat Pelayanan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel, sedangkan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo diarahkan untuk dapat menjadi salah satu pusat pelayanan produksi perikanan budidaya air payau yang berkelanjutan, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang diarahkan menjadi salah satu pusat pelayanan usaha produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan baik komoditas air tawar, pesisir (payau) maupun laut.

Kebijakan Penetapan Ekonomi

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPN, dimana ditargetkan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Presiden periode 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan dalam sembilan Misi yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat,

penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara. Pada tahun 2023, KKP telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, dimana indikator kinerja utama tersebut terbagi dalam 8 (Delapan) Sasaran Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan.

Untuk itu hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud. Adapun 8 Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Sumber dayu kelautan dan perikanan berkelanjutan;
3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
4. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan meningkat;
5. Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
7. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif;
8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas.

Rencana Strategis KKP 2020-2024

A.2. Rencana Strategis KKP 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi dan Misi KKP Tahun 2020-2024



Gambar A.2 Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
   a. Meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM kelautan dan perikanan
   b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:
   a. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
   b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
   c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
   d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamana hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dan
   e. Optimalnya pengelolaan ruang laut
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) melalui Aplikasi SAKTI.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menggunakan Aplikasi MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11/PB/PB.6/2024 tanggal 3 April 2024 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 *Audited*, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2023 *Audited*, dapat dilakukan koreksi data/transaksi guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKKL Tahun 2023 *Audited*.

b. Pelaksanaan koreksi data/transaksi sebagaimana dimaksud pada poin satu diatur sebagai berikut:
   1. K/L dapat melakukan koreksi data LKKL Tahun 2023 *Audited* baik yang mengakibatkan perubahan data SPAN maupun yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN.
   2. Koreksi data LKKL Tahun 2023 *Audited* dilakukan sampai dengan tanggal 6 Mei 2024.
   3. Seluruh koreksi data LKKL Tahun 2023 harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK pada masing-masing K/L.
   4. Ketentuan umum mengenai koreksi data/transaksi akan dijelaskan lebih lanjut lagi.

c. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2023 serta Pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara, batas waktu penyampaian LKKL tahun 2023 *Audited* diatur sebagai berikut:

No.	Kategori K/L	Batas Waktu
1.	K/L dengan jumlah maksimal 10 satker	6 Mei 2024
2.	K/L dengan jumlah lebih dari 10 satker	13 Mei 2024

Selanjutnya, penyampaian LKKL Tahun 2023 *Audited* agar memedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh satker harus melakukan tutup periode 14 agar LKKL Tahun 2023 Audited yang dihasilkan Aplikasi SAKTI dapat bersifat final.
2. K/L memastikan kesamaan penyajian data antara dokumen *softcopy* LKKL Tahun 2023 Audited dengan data pada Aplikasi SAKTI.
3. LKKL Tahun 2023 Audited disertai dengan lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL serta Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility* (SOR) yang telah ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang bertindak selaku Pengguna Anggaran.
4. K/L mengevaluasi Surat Representasi serta menyampaikannya kepada BPK bersamaan dengan penyampaian aset final.
5. LKKL Tahun 2023 Audited disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui alamat e-mail ketdit.apk.ditpb@kemenkeu.go.id dan ketdit.apk@gmail.com.
6. Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dan UAKPA disampaikan dalam bentuk *softcopy* (format .pdf) melalui alamat e-mail sesuai ketentuan Kantor Wilayah DJPb dan KPPN mitra kerja satker serta melakukan unggah Surat Pengantar pada Aplikasi MonSAKTI.

Ketentuan umum pelaksanaan koreksi data/transaksi dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2023 *Audited* adalah sebagai berikut:

1. K/L dapat melakukan koreksi data LKKL Tahun 2023 *Audited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN yaitu:
    a. Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus, termasuk penutupbukuan POK;
    b. Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data, pengesahan hibah langsung bentuk uang, dan pengesahan pendapatan/belanja BLU, termasuk selisih kurs;
    c. Penyelesaian pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu;
    d. Penyelesaian pengesahan pendapatan/belanja BLU;
    e. Penyelesaian koreksi/void data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara;
    f. Penyelesaian SPI PHLN; dan/atau g. Penyelesaian UP/TUP.

2. Koreksi data/transaksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN diajukan kepada unit kerja Kementerian Keuangan dengan melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK K/L sebagaimana format di bawah ini.
3. Perekaman transaksi koreksi/perubahan data pada Aplikasi SAKTI dilakukan oleh satker pada periode 14.
4. Dalam hal koreksi data/transaksi tidak dapat dilakukan pada Periode 14, maka K/L mengajukan permohonan buka periode pada Aplikasi SAKTI kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
5. Jurnal yang terbentuk dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL 2023 *Audited* dapat dimonitoring pada modul Akuntansi dan Pelaporan menu Monitoring Jurnal dengan terlebih dahulu melakukan filter pada periode jurnal yaitu periode 14
6. Setelah usulan koreksi/perubahan data selesai dilakukan pada Aplikasi SAKTI, satker agar melakukan penutupan periode 14 untuk menjaga konsistensi data yang digunakan dalam penyusunan LKKL Tahun 2023 Audited.
7. K/L agar memantau dan mengawasi seluruh proses perubahan data yang diajukan dalam rangka penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2023 *Audited*.
8. Untuk memastikan keandalan data dalam penyusunan LKKL Tahun 2023 Audited, K/L agar tetap melakukan monitoring dan memastikan kesesuaian data pada menu *To Do List*, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI.
9. K/L agar tetap melakukan monitoring proses rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada aplikasi MonSAKTI serta memastikan tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA.

A.4. Basis Akuntansi

Dalam penyelenggaraan akuntansi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Periode inilah implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan sekambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan SAP maka pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan memberi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

Sejalan dengan berkembangnya kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat Badan Layanan Umum yang merupakan satuan kerja vertikal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan pembukuan, Badan Layanan Umum selaku UAKPA berpedoman pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening

Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan pengurangan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas. Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis kas mengikuti aturan sebagaimana yang tertuang dalam IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (Rekening KUN/D), sedangkan Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang ditertibkan pada Rekening KUN/D dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening KUN/D mengikuti pengaturan sebagaimana IPSAP Nomor 03.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Pendanaan yang berasal bukan dari rupiah murni dan transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan

ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Pendapatan-LRA

A.6.1. Pendapatan-LRA

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi dalam pendapatan-LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan PNBP.

Terkait dengan pengakuan pendapatan BLU diidentifikasi sebagai berikut:

1) Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih

Sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN-DIPA Bagian Murni berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Belanja

A.6.2. Belanja

Merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan dirinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja-LRA mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Belanja-LRA disajikan menurut klasifikasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Aset

A.6.3. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Properti Investasi, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. **Aset Lancar**

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.
2) Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

3) Sedangkan untuk kas dan setara kas yang dikelola BLU diakui sebagai berikut:

a) Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum;

b) Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian;

c) Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

4) Investasi jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Penyajian Investasi BLU, sebagai berikut:

a) Pokok Investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;

b) Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

5) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;

c) Piutang yang timbul dari bukan pajak diakui apabila penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan;

d) Piutang BLU diakui sebagai berikut:

(1) Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan;

(2) Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan;

(3) Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan;

(4) Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel A.1
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan penagihan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

6) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;

7) Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan pengukuran dan penyajian persediaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37/PERMEN-KP/2023 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan KKP, dimana barang yang pertama kali masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama kali keluar *first in first out* (FIFO). Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasar harga perolehan masing-masing. Tujuan penggantian metode penilaian persediaan dari harga pembelian terakhir menjadi FIFO pada tahun 2021 adalah untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar. Khusus untuk persediaan berupa bibit, persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu pencatatan dilakukan setiap terjadi mutasi/transaksi yang mempengaruhi Persediaan. Selanjutnya pencatatan persediaan disesuaikan dengan hasil opname fisik akhir periode.

Aset Tetap

h. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses penyelesaian aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi pembelian BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

(1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk:
   (a). peralatan dan mesin; atau
   (b). aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
(2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
   (a). gedung dan bangunan; atau
   aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan/Depresiasi (carrying amount). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, masa manfaat Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel A.2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 25 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca. Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Properti Investasi

d. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

(a). Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

(b). Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperbolehkan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

(a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

(b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

(c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

(f) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Entitas mengungkapkan:

(a). dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

(b). metode penyusutan yang digunakan;

(c). masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(d). jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

(e). rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelahperolehan yang diakui sebagai aset;

ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

iii. pelepasan;

iv. penyusutan;

v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan

vi. perubahan lain.

(f). apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;

iii. tanggal efektif penilaian kembali;

iv. nilai tercatat sebelum revaluasi;

v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

(g). apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

(h). apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

(i). metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak bertumpu pada faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan ketersediaan data pasar yang dapat dipertimbangkan;

(j). apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

(k). jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

(l). kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan, membangun atau untuk perbaikan.

(m). properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

e. Piutang Jangka Panjang

1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

3) Pengakuran Piutang Jangka Panjang BLU sebagai berikut:

a) Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU

(1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan.

(2) Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b) Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

f. **Aset Lainnya**

1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset lainnya BLU sebagai berikut:

a) Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang

digunakan untuk dimanfaatkan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani.

Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU;

b) Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU;

c) Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang dititipkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atau pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

2) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak katas kekayaan intelektual.

3) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;

5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022.Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3
Pengelompokan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas diusjkan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

A.6.4. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

c. Pengakuan Kewajiban BLU antara lain sebagai berikut:

1) Utang Usaha BLU. Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil rekonsiliasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan;

2) Utang Pihak Ketiga BLU Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/ kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/atau

b) Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti: hemor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari penggoma jasa BLU.

3) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

4) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

5) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

7) Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU, dan/atau pada saat BLU menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Pendapatan-LO

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermindkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atau suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
3) Pendapatan Denda diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO pada BLU disajikan:

1) Nilai pendapatan dari alokasi APBN - DIPA BM sesuai dengan SP2D belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional;
2) Nilai pendapatan umum PNBP sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;
3) Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBP; dan Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBP yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;
4) Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.

5) Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi beharnya dalam pos Beban Operasional;

6) Pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya;

7) Pendapatan BLU secara transaksional non kas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLU non kas LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya;

8) Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non Operasional.

b. Beban LO

Adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi disungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban yang terdapat pada BLU adalah sebagai berikut:

1) Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SPTB/SP2D-BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional dalam pos Beban Operasional;

2) Beban operasional BLU di Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:
   a) Beban pegawai;
   b) Beban barang dan jasa;
   c) Beban persediaan;
   d) Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
   e) Beban pemeliharaan;
   f) Beban perjalanan dinas;
   g) Penyisihan piutang tidak tertagih; dan
   h) Beban penyusutan dan amortisasi.
3) Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNBP untuk kepentingan rekening kas umum negara disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.

Penjelasan Umum Lainnya

A.7. Penjelasan Umum Lainnya

A.7.1 Entitas Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, KKP menggunakan pola pelaporan berjenjang yang dimulai tingkat satker, wilayah, eselon I dan Kementerian. Jumlah satker yang melakukan penyusunan atas Laporan keuangan Lingkup KKP dengan perbandingan antara tahun 2022 dan 2023 dapat digambarkan dalam Rincian jumlah satker aktif pada masing-masing eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel A.4
Perbandingan Jumlah Satker Yang Melakukan
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 dan 2023

Kode Es I	Eselon I	2022					2023					Δ
		KP	KD	DK	TP	Σ	KP	KD	DK	TP	Σ	
01	Setjen	2	-	34	-	36	2	1	34	-	37	+1
02	Itjen	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0
03	DJPT	1	33	34	35	84	1	33	34	35	83	-1

Kode Es I	Eselon I	2022					2023					±
		KP	KD	DK	TP	Σ	KP	KD	DK	TP	Σ	
09	DJPB	1	10	34	-	45	1	15	34	-	50	5
10	Dirjen PSDKP	1	14	34	-	49	1	14	34	-	49	0
30	Dirjen PDSPKP	1	1	34	-	36	1	1	34	-	36	0
37	Dirjen PHRL	1	8	36	8	53	1	8	22	13	54	+2
12	BPPSDMKP	2	41	-	-	43	2	41	-	-	43	0
11	BPPMHKP	1	47	-	-	48	1	47	-	-	48	0
	Kosatker						1				1	+1
Jumlah	Jumlah	11	145	204	36	396	12	152	205	37	402	+6

Pada tahun 2023, KKP memiliki Satker sejumlah 402 yang terbagi ke dalam empat kewenangan yaitu Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP).

Rincian lebih lanjut atas jumlah satker tersebut, dijelaskan pada Sub Laporan Realisasi Anggaran (Catatan atas Laporan Keuangan) laporan keuangan ini.

Rekening pada Bank Pemerintah

A.7.2 Rekening pada Bank Pemerintah

Pada pelaksanaan kegiatan untuk kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menampung penerimaan anggaran dan realisasi baik pendapatan maupun Belanja, menggunakan 571 rekening pada Bank Pemerintah dengan rincian sesuai dengan tahun penerbitan sebagai berikut:

Tabel A.5
Jumlah Rekening Bank

Eselon I	NAMA BANK						Jumlah
	BRI	BNI	MANDIRI	BTN	BSI	BPD	
Setjen	13	27	9	-	1	1	51
Itjen	-	7	-	-	-	-	7
DJPT	31	35	24	1	3	4	97
DJPB	18	18	33	1	2	10	86
Dirjen PSDKP	14	37	41	-	7	3	101
Dirjen PDSPKP	9	25	8	-	2	1	45
Dirjen PHRL	10	31	19	-	4	4	78
BPPSDMKP	10	31	15	11	1	-	77
BPPMHKP	17	19	16	-	1	-	53
Grand Total	127	331	165	13	30	25	571

Sumber Data: Hasil Rekonsiliasi Per tanggal 31 Desember 2023

Adapun Rekapitulasi Data Rekening Bank per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana matriks pada Lampiran I.

Informasi Kepegawaian

A.7.3 Informasi Kepegawaian

Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dibuat berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) pada saat disusunnya laporan ini. Lapiran ini. Adapun jumlah Pegawai KKP dari Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel A.6
Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Unit Pusat I	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Setjen	606	614	560	621	662	687
2	Ditjen PRL	662	671	659	729	773	793
3	Ditjen PT	1.227	1.303	1.284	1.330	1.367	1.041
4	Ditjen PB	1.419	1.424	1.358	1.384	1.205	1.172
5	Ditjen PDSPKP	395	367	367	389	376	408
6	Ditjen PSDKP	1.434	1.195	1.200	1.254	1.326	1.469
7	Itjen	254	223	214	210	206	215
8	BPSDMKP	5.910	5.909	5.245	5.126	5.061	4.888
9	BPPSIGAP	1.708	1.674	1.563	1.666	1.672	1.666
	TOTAL	13.527	13.692	12.965	12.840	12.753	12.552

Sumber data: Biro SDM Aparatur dan Organisasi per tanggal 31 Desember 2023

Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi:

- Kebijakan Jabatan dan Kelas Jabatan ASN

  Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kebijakan Manajemen Talenta ASN

  Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

- Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

  Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang

Pengembangan Komponen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kebijakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional

  Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kebijakan Mekanisme Kerja Penyederhanaan Birokrasi

  Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Informasi yang Digunakan

A.7.4 Sistem Informasi yang Digunakan

Sistem Informasi yang digunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web *(web-based)* yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;

c. Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat

yang melalui proses akuntabel dan transparan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

d. Aplikasi Simponi (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online*), aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

e. Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

f. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi aktor dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan mulai periode penyusunan Laporan Keuangan TA. 2022.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dengan fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

i. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.

ii. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Kuasitunai (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul

Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Perseklusan, dan modul Pembayaran.

iii. Proses pelaporan Modul dalam aplikasi SAKTI

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh KKP

A.7.5 Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh KKP

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel A.7
Aplikasi-Aplikasi yang Digunakan dan Dikembangkan Oleh KKP

Nama Eselon I	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/Manfaat Dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
Setjen			
	WCM KKP	Website Utama KKP	Pusdatin
	Kinerjaku	Aplikasi Untuk Pengelolaan Kinerja	Pusdatin
	Aplikasi E-Pegawai KKP	Menyajikan Database Pegawai pada SIMPEG Pada Masing-Masing Pegawai Kementerian Kelautan Dan Perikanan Secara Online	Pusdatin
	Aplikasi Presensi	Aplikasi Presensi Pegawai KKP	Pusdatin
	Email KKP	Email KKP	Pusdatin
	Pencatatan dan Disposisi	Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar di lingkungan KKP	Pusdatin
	JDIH	JDIH Pusat Hukum KKP	Pusdatin
	Website Setda KKP	Website Setda KKP	Pusdatin
	Aplikasi Integrasi Pensimas	Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Hasil Pemikiran Antara PNP - DKPM Dan Simwastkan PSDKP	Pusdatin
	Aplikasi E- Planning	Aplikasi perencanaan kegiatan di lingkungan KKP	Pusdatin
	Aplikasi Satu Data	Aplikasi yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Modul E-Kuisioner, Modul Pendataan Produksi, Modul E-Pengusul dan Modul Bantuan Pemerintah.	Pusdatin
		a. Modul E-Kuisioner adalah aplikasi untuk input pendataan terkait usaha kelautan dan perikanan (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah, Pemasar, Pelaku Usaha) secara online.	
		b. Modul Pendataan Produksi adalah aplikasi untuk input data produksi kelautan dan perikanan baik harian dan bulanan secara online.	
		c. Modul e-Pengusul adalah aplikasi muatan pelaporan penyaluran perikanan secara online.	
		Modul Bantuan Pemerintah adalah aplikasi untuk pengelolaan dan pendataan bantuan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan khusus para pelaku usaha kelautan dan perikanan secara online.	
	Aplikasi Simpok	Aplikasi pengelolaan dan pendataan anggota kredit lingkungan di lingkungan KKP	Pusdatin
	Si-Pusaka		
	Aplikasi Paspor (PNS)	Aplikasi layanan pengelolaan barang dan jasa di lingkungan KKP	Pusdatin
	Aplikasi PPID	Aplikasi layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KKP	Pusdatin
	Aplikasi PTSP	Aplikasi layanan elektro pelayanan terpadu satu pintu di KKP	Pusdatin

Kantor / Eselon I	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/Manfaat Dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
Itjen			
	Aplikasi e-Pengendalian dan Pengawasan (e-Dalwas)	Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Pusdatin
	Aplikasi Audit Management System	Aplikasi yang berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas pelaksanaan Audit yang berkualitas transparan, sesuai kode etik dan standar Audit	Itjen
	Aplikasi Pengaduan	Manajemen Pengaduan lingkup Itjen KKP, agar lebih cepat sampai dengan pelaporan pengaduan	Itjen
	Unit Pengendalian Gratifikasi	Pusat media sosialisasi dan pelaporan Gratifikasi di lingkungan KKP	Itjen
	Whistle Blowing System	Pusat media sosialisasi dan pelaporan WBS di lingkungan KKP	Itjen
	aplikasi sistem pelaporan pemanfaatan dana	Aplikasi untuk mengharuskan atau Balai dilingkungan kementerian kelautan dan perikanan, terkait dengan tingkat pemanfaatannya	Pusdatin
DJPT			
	SIPAUKA	SIPAUKA (Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan) adalah aplikasi yang digunakan untuk layanan pendaftaran kapal perikanan	Pusdatin
	SIMKADA - Sistem Informasi Kapal Ikan Terintegrasi	SIMKADA / Sistem Informasi Kapal Ikan Daerah	DJPT
	SIPERPI - Sistem Informasi Perizinan Penangkapan Ikan	Sistem Aplikasi Pendataan Kelengkapan Persyaratan SIPERPI Kapal Perikanan Ukuran	Pusdatin
		30 - 60 GT	
	Sistem Informasi Record of Vessels Authorized to Fish for Tuna, Skipjack Tuna and Neritic Tuna Within Indonesia Archipelagic and Territorial Waters and IOTC Waters (RoVIA)	Record of Vessels Authorized to Fish for Tuna, Skipjack Tuna and Neritic Tuna Within Indonesia Archipelagic and Territorial Waters and IOTC Waters (RoVIA) merupakan Sistem informasi daftar kapal ikan Indonesia yang diberikan ijin menangkap tuna, cakalang dan tongkol (TCT) di perairan kepulauan dan Teritorial Indonesia serta IOTC Indonesia, yang tidak tercantum dalam RPMDs dengan tujuan untuk kebutuhan (traceability) guna mendukung peningkatan kinerja negara serta memberikan kepastian hukum (LL) Tertang dan mengembalikan kepastian penangkapan. Selain RoVIA, sudah compatible dengan pendaftaran kapal di International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)	DJPT
	DATA SHARING SYSTEM (DSS)	Sistem integrasi antara sistem DJPT dan	DJPT
		SIMLON I lainnya (PSDKP)	
	Website Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	Media informasi elektro website yang memuat semua informasi terkait validation pemberian (produksi, operasional kapal, profil pelabuhan dll)	DJPT
	Website DJPT	Website resmi DJPT yang menampilkan informasi dan pemberitaan kegiatan DJPT	DJPT
	Website BTC - KTSP	Bali Tuna Conference and International Coastal Tuna Business Forum	DJPT
BPPSI			
	SIMKUR	Penerbitan Polarisir dan Sertifikat/Pascasurvei Realisasi Perikanan	BPPSI

Nama Eselon I	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/Manfaat Dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
		[Penjelasan nama prasarana: sekretariat, saluran tertutup, beberapa lantai, gedung lantai]	
	SIBATIK	Aplikasi berbasis web untuk melayanani pelayanan Ekspor Impor	DJPK
		Dikelola oleh UPT/KSU SIBATIK adalah Sistem Informasi Ekspor Impor, SIBATIK adalah tunning, sifat A (agar pelayanan publik dapat dimaksimalkan, harus sangat kuat-kuat karena bisa sangat mengganggu pelayanan publik)	
	BIKETIKA	Permohonan surat keterangan bebas impor bahan baku pakan ikan	Pusbade
		[Caution Kinch berjalan, sehingga saat akan diperlukan dengan SIKINCH. Termasuk pelayanan publik satu pintu (satu klikat), integrasi harus dilakukan dengan kuat-kuat karena menyangkut pelayanan publik]	
	ARLEDDA	Aplikasi pengajuan surat izin impor ikan hidup, Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penawaran Modal(SPPM) dan SIUP	DJPB
PSDKP			
	Simwasikan	Sistem informasi yang mengelola data yang berkaitan dengan pengawasan perikanan (Perizinanan, Pelaporan, Sertifikasi dan Pembudidayaan)	Pusmas
	Aplikasi Stasiun Bukti Serta Awak Kapal (Simwas)	Aplikasi Stasiun Bukti Serta Awak Kapal (Simwas)	PSDKP
	Sistem UPPN	Sistem UPPN Unit Pengelolaan Hasil Perikanan Non Komersial	PSDKP
DJ PDSPKP			
	Sistem Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan	Sistem Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan adalah sistem untuk pengelolaan permohonan rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan secara elektronik. Perusahaan Anda dapat mengajukan pelayan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai importir di sistem.	Pusmas
	Nusa Pasar Ikan	Logistik ikan, Harga ikan, data PIP, pemantauan dan pengawasan ikan	DJPDS
	DS Pengembangan Investasi	Informasi Peluang Usaha dan Investasi yang Mungkinkan berbasis SIG	
	Aplikasi SKP Online	Aplikasi berfungsi untuk melakukan permohonan penggunaan SKP secara Online	Pusmas
		[Sertifikat kelayakan Pengolahan]	
DJ PRL			
	Sistem Informasi Spasial Tematik Kelautan Terintegrasi - KKP RI	Sistem Informasi Spasial Tematik Kelautan Terintegrasi - KKP RI	DJPRL
	Aplikasi Analisis dampak kegiatan pengelolaan terhadap daya dukung Kawasan	Suara data pengelolaan kawasan untuk melihat kemampuan / daya dukung suatu kawasan terhadap pemanfaatan	DJPRL
BPSDMKP			
	Web Pusat Pendidikan	Website Pusat Pendidikan	BPSDMKP
	Sistem Informasi Spasial	Sistem Informasi Spasial BPSDM	BPSDMKP
	E-Dokumen BPSDM	E-Dokumen BPSDM	BPSDMKP
	Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru	Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru	BPSDMKP
	SIMDIKLATPI	Sistem yang digunakan sebagai bagian dari pelatihan data pendidikan, pelatihan, penyelesaian serta data administrasi	BPSDMKP

Nama Eselon I	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/Manfaat Dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
	Aplikasi jurnal	Aplikasi pengelolaan jurnal secara elektronik.	SEKJEN KP
BKIPM			
	Web BKIPM	Website resmi BKIPM	Pusdatin
	HACCP	Aplikasi Pelayanan Pemeriksaan Sertifikasi HACCP secara online	Pusdatin
	Dumas Kompolnas BKIPM	Aplikasi Pelaporan Pelayanan Dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Dumas Kompolnas	Pusdatin
	JADIS	Aplikasi Jenis Agen Hayati Dilindungi Dilarang dan Invasif	Pusdatin
	GIS KFMKPM	Aplikasi Sistem Informasi Geografis Hama Penyakit Karantinanina	Pusdatin
	SMS Gateway	Aplikasi SMS Gateway untuk notifikasi ke pengguna Jasa KIPM	Pusdatin
	NEW SIGNATIN	Aplikasi Desktop untuk pelayanan sertifikasi karantina ikan dan pengendalian mutu KUPT	Pusdatin
	PPC Online	Aplikasi Pengajuan Pemeriksaan Karantina Ikan Online	Pusdatin

Produk Hukum

A.7.6. Produk Hukum yang telah diterbitkan dan Permasalahan Hukum Periode Tahun 2023

a. Produk hukum berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan di lingkungan KKP selama Tahun 2023, terdiri atas:

1. 48 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP);
2. 210 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN-KP).

(Rekapitulasi Peraturan MKP dan Keputusan MKP sebagaimana matriks terlampir pada Lampiran Nomor II dan Lampiran Nomor III)

b. Gugatan hukum selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terdapat 4 gugatan hukum kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP);
2. Dua gugatan hukum ditayangkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
3. Untuk lingkup Sekretariat Jenderal, ada 3 kasus gugatan hukum yang tercatat;
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mendapat 3 kasus gugatan hukum; dan

5. Masing-masing 1 gugatan hukum dilayangkan untuk Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu/BPPMHKP, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

c. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat selama tahun 2023 terdapat 7 permasalahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
(Rekapitulasi advokasi hukum sebagaimana matrik terlampir pada Lampiran Nomor IV)

Kebijakan Manajemen Bidang Keuangan

A.7.7 Kebijakan Manajemen Bidang Keuangan

Pada Tahun 2023 ini KKP mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, koordinasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pembinaan badan layanan umum, tata laksana dan transformasi keuangan, keputusan pejabat perbendaharaan, penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan keputusan atas laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara dan koordinasi pengelolaan barang milik negara.

Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA)

Pemerintah kembali melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* pada tahun anggaran 2023 dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Sampai dengan Tahunan Audited, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami pembiskiran anggaran dalam rangka *Automatic Adjustment* dan rekompensi blokir *Automatic Adjustment* atas DIPA TA 2023, sebagai berikut:

a) Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/AG/AG3/2022 tanggal 27 Desember 2022 telah disahkan Pembiskiran Anggaran dalam rangka *Automatic Adjustment* DIPA TA 2023 Sekretariat Jenderal sebesar Rp68.582.855.000,00;

b) Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-239/AG/AG.3/2023 tanggal 5 Mei 2023 telah disahkan revisi atas Rekomposisi Blokir *Automatic Adjustment* DIPA TA 2023 Satker;

c) Sesuai surat Direktur Anggaran Nomor S-480/AG/AG.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023 telah disahkan revisi administrasi pengeseran tanda blokir (sebagian) sebesar Rp18.343.094.000,00 dari usulan sebesar Rp18.343.094.000,00 dan revisi administrasi penambahan blokir *Automatic Adjustment* yang dilakukan dalam rangka rekomposisi II blokir *Automatic Adjustment* antar unit eselon I KKP TA 2023 sebesar Rp0.794.000.000,00.

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

A.7.8 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Tahun 2023 telah dilakukan penilaian terhadap penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir.

Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen. Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi.

Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

Prioritas Nasional

A.7.9 Prioritas Nasional

Priorotas Nasional (PN) merupakan penjabaran lanjut daripada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan khusus untuk bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Berdasarkan dokumen RKP tahun 2023, dengan memperhatikan sasaran RPJMN tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, maka RKP 2023 mengusung tema, "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

PN KKP dalam rangka mendukung 5 kebijakan ekonomi biru KKP didukung anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) **PN1: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan** dengan alokasi anggaran sesuai Rp1.292.608.459.000,00, bentuk kegiatannya antara lain:
   - Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional
   - Sarana Data Citra Satelit Radar
   - OM Sarana Data Citra Satelit Radar
   - Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha
   - Awak kapal perikanan yang disertifikasi
   - Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya
   - Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan
   - Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan
   - Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasinya (Kampung nelayan maju/Kalajut)
   - Kapal perikanan bantuan yang tersalurkan
   - Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi
   - Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional

- Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Permits yang ditingkatkan fasilitasnya, termasuk untuk menunjang PNBP perikanan tangkap
- Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan
- Petugas pengolah data dan sertifikator pemungutan PNBP perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya
- Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data *Log Book* Penangkapan Ikan
- Sarana penunjang pemungutan PNBP perikanan tangkap yang disediakan
- Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi
- Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihan dan penetapannya
- Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan
- Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan
- Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya
- Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan
- Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya
- Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya
- Pelabuhan perikanan UPT Daerah yang ditingkatkan fasilitasnya, termasuk untuk menunjang PNBP perikanan tangkap
- Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan
- Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang Dibangun/Ditingkatkan Fasilitasnya
- Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan
- Kajian rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang disusun
- Nelayan penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang diidentifikasi
- Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya
- Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun
- Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan *Observer* diatas kapal perikanan

- Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya
- Kelompok nelayan yang didentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya
- Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya
- Pelabuhan Perikanan terbuat dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan
- Kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan
- Bantuan Premi Asuransi Perikanan Budidaya yang disalurkan
- Calon Induk Unggul yang diproduksi
- Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang dikembangkan sebagai Korporasi Pembudidaya
- Cluster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan
- Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis [UPT]
- Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan
- Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat
- Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan
- Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan diverifikasi
- Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
- Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan
- Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan
- Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha
- Sampel Monitoring Residu yang diuji
- Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat
- Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat
- Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat
- Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif [PITAP]
- Prasarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan
- Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan
- Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji
- Unit Pembenihan Skala Kecil yang dibangun/direhabilitasi
- Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan
- Prasarana Pakan di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan

- Prasarana perbenihan di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan
- Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT
- Prasarana kawasan dan kesehatan ikan di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan
- Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
- Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat
- Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
- Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
- Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat
- Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
- Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat
- Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat
- Kapal perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya
- Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhannya
- Dokumen NSPK Jasa Kelautan
- Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut
- Lahan Garam yang difasilitasi
- Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi
- Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
- Sarana prasarana Wisata Bahari
- Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN
- Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut
- Sarana prasarana BMKT
- Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi
- Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang KSN
- Sarana wisata Garam Rakyat yang dibangun
- Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegatan Pemanfaatan Ruang Laut
- Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun

- Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN
- Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)
- Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan
- Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
- Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih
- Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya
- Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
- Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP
- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan *system traceability*
- Hasil Perizinan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan Ikan yang di selesaikan
- Prasarana pengawasan karantina
- Prasarana Pengujian Mutu
- Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- Sarana pengawasan karantina
- Sarana Pengujian Mutu
- Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
- Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik
- Unit kerja yang menerapkan standar sistem
- Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan *Biosecurity*
- Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan
- Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen

- UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan
- Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina

3) **PN2: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan** dengan alokasi anggaran senilai Rp17.493.270.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:
- Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar
- Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
- Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

3) **PN3: meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing** dengan alokasi anggaran senilai Rp191.875.631.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:
- Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
- Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (Dekonsentrasi)
- Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya
- Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya
- Kajian Pendidikan Tinggi KP
- Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi
- Peralatan dan Mesin Pendidikan KP
- Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten
- Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Kerja Sama Luar Negeri

A.7.10 Kerja Sama Luar Negeri

Pada Tahun 2023, beberapa kegiatan kerja sama luar negeri regional, bilateral, dan multilateral yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian diantaranya adalah:

1) Implementasi 4 Proyek APEC yang berhasil didapatkan oleh Indonesia c.q KKP melalui forum Kerjasama *APEC Ocean and Fisheries Working Group* (OFWG)
2) Penyelesaian dokumen-dokumen *Host Country Agreement*, dan *Regional Plan of Action 2.0 (RPOA 2.0)* pada Kerjasama CTI CFF
3) Finalisasi *Regional Governance Mechanism* (RGM) dan pelaksanaan *Regional Steering Committee Meeting* Proyek ATSEA 2
4) Pelaksanaan pertemuan *Core Group on Fisheries Management* (CGFM) pada forum Kerjasama IORA
5) Pembahasan Tindak Lanjut hasil pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12 dan Persiapan pertemuan KTM WTO ke-13
6) Pelaksanaan pertemuan *Our Ocean Conference (OOC)* ke-7
7) Pelaksanaan Side event Pertemuan G20 sebagai kontribusi KKP pada ketuanrumahan Indonesia tahun 2022
8) Pertemuan *UN Ocean Conference* (UNOC)
9) Pertemuan FAO- COFI - *Committee on Fisheries - 35th Session*
10) Pertemuan *UN Climate Change Conference* 2022 (UNFCCC COP 27
11) Pertemuan ASEAN-ASWGFI
12) Pertemuan SOM AMAF dan AMAF
13) Pembahasan Perpanjangan/Amandemen MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Namibia
14) Pendampingan Kunjungan Utusan Khusus Presiden Republik Seychelles untuk ASEAN ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara
15) Pembahasan draf MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Kenya dan draf PoA Implementasi MoU
16) Penyampaian Draf MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan dan Draf PoA Implementasi MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Mesir
17) Pembahasan Counterdraft MoU Kerja Sama Perikanan RI-Afsel dan Draf PoA Implementasi MoU

18) Penyampaian Draf MoU Kerja Sama Perikanan dan Draf PoA Implementasi MoU Kerja Sama Perikanan RI-Kuwait

19) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Maroko

20) Pembahasan tindak lanjut kerja sama kelautan dan perikanan RI-Mozambik

21) Evaluasi Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Persatuan Emirat Arab.

BLU di Lingkungan KKP

A.7.11. Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan KKP

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat. Badan Layanan Umum (BLU) berqperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau disebut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja Lingkup KKP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai keputusan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel A.8
Satuan Kerja Lingkup KKP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Kode Satker	Nama Satker	Keputusan Menteri Keuangan	Rumpun dari Layanan
660058	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (LPMUKP)	No. Penetapan : 710/KMK.05/2019 Tgl: PMK 193/PMK.05/2019	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Pengelolaan Dana
622039	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN (Politek KP) DEDAHUGI	No. Penetapan : 526/KMK.05/2021 Tgl: PMK 196/PMK.05/2019	Pendidikan
238788	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPI) TEGAL	No. Penetapan : 526/KMK.05/2021	Pendidikan

Kode Satker	Nama Satker	Keputusan Menteri Keuangan	Bungan dan Layanan
		Tarif PMK 168/PMK.05/2022	
239102	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BBPBAP) JEPARA	No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 126 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	No. Penetapan KMK 163 Tahun 2023 Tarif PMK 126 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
367350	BALAI PERikanan BUDIDAYA AIR PAYAU (BPBAP) SITUBONDO	No. Penetapan KMK 163 Tahun 2023 Tarif PMK 126 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

Pada Tahun 2023, Kontrak kinerja antara satker PPK BLU KKP dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dengan rincian sebagai berikut:

a. **LPMUKP**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PRJ-142/PB/2023 antara lain:
   1) Aspek Pembinaan Teknis
      (a). Realisasi PNBP Layanan Utama BLU Rp38 Miliar;
      (b). Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Rp660 Miliar;
      (c). Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Maksimal 3%;
      (d). Indeks Kepuasan Masyarakat 3,4; dan
      (e). Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha 80%.
   2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola
      (a). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 100%;
      (b). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 100%;
      (c). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 100%.

b. **Poltek Sidoarjo**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PRJ-142/PB/2023 antara lain:
   1) Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel:
      (a). Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional 12,88%;
      (b). Realisasi Pendapatan BLU Rp4.340.501.000,00;
      (c). Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset:
         i. Pendapatan BLU dari Aset Lancar Rp4.001.000,00;
         ii. Pendapatan BLU dari Aset Tetap dan Kerjasama Rp942.735.000,00;
      (d). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 100%.

2) Layanan Prima:
   (a). Kuantitas dan Kualitas Dosen 31,35%;
   (b). Serapan Lulusan 100%;
   (c). Keluaran Riset Dosen 17,31%;
   (d). Kepuasan Pengguna Layanan 3,40%;
   (e). Pengabdian Masyarakat 2 Kegiatan;
   (f). Jumlah Mahasiswa yang di sponsori Beasiswa dan Lembaga/Industri 40,65%;
   (g). Kemitraan Kerjasama Baru 4 Kerjasama;
   (h). Jumlah Mata Kuliah Kompetensi yang Diampu oleh Dosen yang Berasal dari Praktisasi / Industri 18,72%.

c. **BP3 Tegal**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PBJ-71/PB/2023 antara lain:
   1) Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel:
      (a). Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional 10,12%;
      (b). Realisasi Pendapatan BLU Rp9.973.709.947,00;
      (c). Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset:
         i. Pendapatan BLU dari Aset Lancar Rp51.737.000,00;
         ii. Pendapatan BLU dari Aset Tetap dan Kerjasama Rp2.335.873.550,00;
      (d). Persentase Penyelesaian Moderninasi Pengelolaan BLU 124%
   2) Layanan Prima:
      (a). Jumlah Peserta Pelatihan Sektor Industri 16,914 Orang;
      (b). Jumlah Peserta yang mengikuti sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sektor KP 1400 Org;
      (c). Kuantitas dan Kualitas Widyaiswara dan Instruktur 28 Orang;
      (d). Jumlah Lulusan Diklat yang terserap di DUDI dan Wirausaha 47%;
      (e). Kepuasan Pengguna Layanan 4%;
      (f). Kuantitas dan Kualitas Kaji Terap:
         i. Jumlah Kaji Terap yang dihasilkan pada Tahun 2023 2 Judul
         ii. Jumlah Kualitas Kaji Terap yang dipublikasikan pada tahun 2023 1 Nilai;
      (g). Jumlah Penerima Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Satker BLU 9.044 Orang;
      (h). Kemitraan Kerjasama 10 Perjanjian.

d. **BSPBAP JEPARA**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PKJ-274.1/PB/2023 antara lain:

1) Aspek Pembinaan Teknis:

(a). Realisasi PNBP Layanan Utama BLU Rp8.160.000.000,00;

(b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%;

(c). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 75%;

(d). Prosentase Bantuan Pada Masyarakat 55%;

(e). Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 Kegiatan; dan

(f). Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks >=3,5.

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola:

(a). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 80%;

(b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85%;

(c). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 80%;

e. **BLUPPB Kerawang**, sesuai Kontrak Kinerja Nomor PKJ-274.3/PB/2023 antara lain:

1) Aspek Pembinaan Teknis:

(a). Realisasi PNBP Layanan Utama BLU Rp67.909.000.000,00;

(b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%;

(c). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 75%;

(d). Persentase Bantuan Pada Masyarakat 55%;

(e). Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 Kegiatan; dan

(f). Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks >=3,5.

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola:

(a). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 80%;

(b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85%;

(c). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 80%;

f. **BPBAP Situbondo**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PKJ-274.2/PB/2023 antara lain:

1) Aspek Pembinaan Teknis:

(a). Realisasi PNBP Layanan Utama BLU Rp6.780.000.000,00;

(b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%;

(c). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 75%;

(d). Prosentase Bantuan Pada Masyarakat 55%;

(e). Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 Kegiatan; dan

(f). Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks >=3,5.

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola:

(a). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 80%;

(b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85%;

(c). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 80%.

Kebijakan KKP terkait dengan Dibentuknya Badan Karantina Indonesia

A.8. Kebijakan KKP terkait dengan dibentuknya Badan Karantina Indonesia

Penyelenggaraan Karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, tetapi undang-undang tersebut tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional, memengaruhi penyelenggaraan Karantina.

Pada tahun 2019, diterbitkan Undang-Undang 21 Tahun 2019tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mencabut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Karantina berdasarkan asas:

(a). Kedaulatan;

(b). Keadilan;

(c). Perlindungan;

(d). Kemanan nasional;

(e). Keilmuan;

(f). Keperluan;

(g). Dampak minimal;

(h). Transparansi;

(i). Keterpaduan;

(j). Pengakuan;

(k). Nondiskriminasi; dan

(l). Kelestarian.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan pengintegrasian dan penghoordinasian Penyelenggaraan Karantina terbentuk menjadi satu badan. Ketentuan mengenai integrasi dan koordinasi dalam bentuk satu badan, termasuk tugas dan fungsinya, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 20 Juli 2023, terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala.

Fungsi dari Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
d. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Februari 2024.

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, salah satu fungsi KKP terkait dengan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan kesmavet ikan telah dicabut. Dengan demikian, unit Eselon I yang menyelenggarakan tugas dari fungsi KKP tersebut sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada saat Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun 2023 KKP menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp6.767.656.875.000 yang terbagi ke dalam sembilan DIPA Induk untuk masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, lima Direktorat Jenderal, dan dua Badan. Berikut postur anggaran awal tahun 2023 menurut Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Tabel II.1
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Unit Eselon I TA 2023

No.	Unit Eselon I	Pagu Anggaran
1.	Setjen	678.157.461.000
2.	Itjen	85.311.317.000
3.	Ditjen PT	955.052.399.000
4.	Ditjen PB	1.181.634.062.000
5.	Ditjen PSDKP	1.151.263.738.000
6.	Ditjen PDSPKP	398.500.003.000
7.	Ditjen PKHL	420.000.000.000
8.	BPPSDMKP	1.003.037.184.000
9.	BPPMHKP	625.500.000.000
TOTAL		**6.767.656.875.000**

Pagu anggaran belanja KKP dibagi ke dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rincian pagu anggaran menurut Unit Eselon I per jenis belanja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2023

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	Setjen	87.356.533.000	462.972.632.000	127.818.230.000	678.157.461.000
2.	Itjen	35.103.672.000	47.040.596.000	3.167.049.000	85.311.317.000
3.	Ditjen PT	145.000.040.000	645.234.062.000	115.418.337.000	955.652.399.000
4.	Ditjen PB	187.000.060.000	816.637.002.000	177.997.760.000	1.181.634.062.000
5.	Ditjen PSDKP	190.344.893.000	688.249.161.000	272.669.676.000	1.151.263.738.000
6.	Ditjen PDSPKP	69.500.000.000	321.338.136.000	6.661.870.000	398.500.003.000

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
I.	Dirjen PKRL	106.000.000.000	305.484.818.000	8.515.182.000	420.000.000.000
II.	BPPSDMKP	770.600.000.000	553.844.975.000	59.192.192.000	1.383.637.166.000
III.	BPPMHKP	272.500.000.000	224.288.080.000	26.900.000.000	523.520.000.000
TOTAL		1.904.616.995.000	4.065.709.467.000	797.330.913.000	6.767.656.875.000

Pada tahun 2023, KKP memiliki 3402 Satker yang terbagi ke dalam empat kewenangan yaitu Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pembagian Satker di lingkungan KKP disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3
Jumlah Satker KKP Per Unit Eselon I per Kewenangan

No.	Unit Eselon I	KP	KD	DK	TP	Total Satker
1.	SETJEN	2	1	34		37
2.	ITJEN	1				1
3.	DJPT	1	23	34	25	83
4.	DJPB	1	15	34		50
5.	DJPSDKP	1	14	34		49
6.	DJPDSPKP	1	1	34		36
7.	DJPKRL	1	0	33	12	54
8.	BPPSDMKP	2	41			43
9.	BPPMHKP	1	47			48
10.	Satker Konsolidasi	1				1
TOTAL		12	150	203	37	402

Pagu anggaran belanja menurut kewenangan Satker per Jenis Belanja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja TA 2023

No.	Kw	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	DK	0	119.367.243.000	0	119.367.243.000
2.	KD	1.433.598.670.000	1.733.951.462.000	309.315.720.000	3.476.466.052.000
3.	KP	473.017.825.000	2.174.964.162.000	485.764.493.000	3.133.966.480.000

No.	Eselon	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
A.	TP	0	36.736.600.000	2.230.780.000	38.957.380.000
TOTAL		1.904.616.495.000	4.063.719.467.000	797.336.913.000	6.767.656.875.000

Selama periode TA 2023, KKP telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebutuhan, situasi, dan kondisi pada saat pelaksanaan anggaran sehingga jumlah pagu anggaran yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 *audited* sebesar Rp6.455.280.145.000,00. Terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* sebelum DIPA Tahun Anggaran 2023 berlaku efektif, Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan terkait *Automatic Adjustment* (AA) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023. Kebijakan ini mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan blokir mandiri sebesar Rp468.167.685.000. KKP menyampaikan usulan AA melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.684/SJ/RC.230/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 hal Usulan *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2023 dengan rincian blokir AA sebagai berikut.

Gambar B.1
***Automatic Adjustment* Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023**



Pada akhir tanggal triwulan I, terdapat kebijakan rekomposisi AA di internal KKP yaitu melakukan realokasi ulang terkait dengan anggaran blokir AA. Rekomposisi AA ini dilakukan untuk menunjang program prioritas pada Unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya. KKP mengusulkan rekomposisi AA melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.162/MEN-SJ/RC.410/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 hal Usulan Rekomposisi *Automatic Adjustment* KKP TA 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Gambar B.2
Rekomposisi *Automatic Adjustment*
Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2023

Lampiran Surat
Nomor : [illegible]
Tanggal : 16 Maret 2023

USULAN REKOMPOSISI AUTOMATIC ADJUSTMENT BELANJA KKP TAHUN 2023
(Dalam Ribu Rupiah)

Unit Kerja Eselon I KKP	Pagu Awal	Usulan Rekomposisi AA	
		Berkurang	Menjadi
Sekretariat Jenderal	675.107.429	68.902.888	71.356.523
Inspektorat Jenderal	88.311.317	9.644.931	9.644.931
Ditjen Perikanan Tangkap	933.933.289	74.901.481	82.532.206
Ditjen Perikanan Budidaya	1.181.814.862	114.754.837	84.764.957
Ditjen Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.101.283.735	98.960.238	98.313.383
Ditjen Pengolahan Dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	886.500.000	59.306.107	90.288.958
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	400.000.000	37.700.001	37.799.951
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.383.837.186	16.150.176	21.991.972
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	523.500.000	17.940.016	21.462.856
TOTAL	**8.427.466.918**	**498.167.680**	**498.167.680**

Pada bulan Juli dilakukan realokasi belanja pegawai yang masih di blokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1946/MEN-KP/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 hal Usulan Revisi Anggaran KKP Tahun 2023 untuk Direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selanjutnya pada bulan Oktober, Kepala Biro Keuangan menyampaikan Nota Dinas Nomor 873/SJ.1/BC.420/X/2023 tanggal 13 Oktober hal Tindak Lanjut Penyelesaian Relokasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2023 untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Unit Eselon I dengan melakukan revisi paling lambat 16 Oktober 2023 dengan berkoordinasi dengan Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai pagu belanja yang direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan pada gambar berikut.

Gambar B.3
Nilai Realokasi Belanja Pegawai KKP ke BA BUN TA 2023

Lampiran
Nomor [illegible]
Tanggal 14 Juli 2023

REALOKASI BELANJA KKP TAHUN 2023

Unit Eselon I	Realokasi Adjustment (Belanja Pegawai)
Sekretariat Jenderal	3.727.968.000
Inspektorat Jenderal	
Ditjen PT	3.330.764.500
Ditjen PB	1.972.185.000
Ditjen PDSPKP	3.300.000.000
Ditjen PSDKP	
Ditjen P2HP	
BRSDM	
BRSDM	3.000.000.000
Jumlah	15.330.917.500

Gambar B.4
Realokasi Belanja Non Pegawai KKP ke BA BUN TA 2023

Eselon I	Pagu Akhir	Automatic Adjustment (AA) KKP Tahun 2023			Pagu Akhir Setelah Realokasi
		Blokir AA	Realisasi AA	Total AA yg Akan Direalisasi	
SETJEN	574.429.516	78.324.438	-	78.324.438	596.109.278
ITJEN	69.311.217	9.644.931	-	9.644.931	78.969.386
DJPT	999.377.200	79.101.448	-	79.101.448	880.215.785
DJPB	1.179.864.673	82.784.662	3.750.000	80.034.662	1.099.830.011
DJPSDKP	1.147.788.730	55.913.531	-	55.913.531	1.092.262.179
DJPDSPKP	384.728.271	51.445.058	-	51.445.058	343.282.812
DJPKHL	473.307.143	57.799.931	-	57.799.931	415.307.212
BPPSDMKP	1.365.279.515	21.331.372	-	21.331.372	1.368.948.143
BPPMHKP	617.498.300	14.582.924	-	14.582.924	502.915.381
JUMLAH	**6.902.357.700**	**448.326.812**	**3.750.000**	**448.776.812**	**6.596.579.199**

Secara umum, perubahan pagu anggaran KKP TA 2023 antara lain disebabkan penambahan pagu pada Satker PNBP, penambahan pagu dari Hibah Langsung Luar Negeri, dan pengurangan pagu anggaran dari realokasi pagu anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran belanja KKP sebesar Rp6.455.280.145.000,00 dengan rincian per Unit Eselon I disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.5
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Unit Eselon I Akhir TA 2023

No.	Unit Eselon I	Pagu Anggaran
1.	Setjen	656.780.605.000
2.	Itjen	75.666.386.000
3.	Ditjen PT	870.815.036.000
4.	Ditjen PB	1.100.237.345.000
5.	Ditjen PSDKP	1.123.693.531.000
6.	Ditjen PDSPKP	343.280.613.000
7.	Ditjen PKHL	413.612.996.000
8.	BPPSDMKP	1.365.279.515.000
9.	BPPMHKP	505.914.168.000
TOTAL		**6.455.280.145.000**

Rincian pagu anggaran menurut Unit Eselon I per jenis belanja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.6
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja Akhir TA 2023

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	Setjen	77.385.945.000	421.390.023.000	137.796.627.000	636.780.603.000
2.	Itjen	33.595.340.000	39.513.389.000	2.157.849.000	75.666.578.000
3.	Ditjen PT	198.383.793.000	618.211.426.000	62.299.199.000	878.815.826.000
4.	Ditjen PB	268.633.170.000	807.237.468.000	124.346.629.000	1.100.237.303.000
5.	Ditjen PSDKP	170.326.626.000	696.770.920.000	256.378.377.000	1.123.693.531.000
6.	Ditjen PDSPKP	56.520.640.000	280.969.412.000	5.811.203.000	343.289.612.000
7.	Ditjen PKRL	103.241.987.000	299.774.570.000	14.596.439.000	417.612.996.000
8.	BPSDMKP	242.913.977.000	583.146.906.000	39.219.372.000	1.365.279.215.000
9.	BPPMHKP	260.471.817.000	224.960.272.000	20.369.078.000	505.914.168.000
TOTAL		**1.801.000.979.000**	**3.970.968.474.000**	**683.318.692.000**	**6.455.288.145.000**

Pagu anggaran belanja menurut kewenangan Satker per Jenis Belanja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.7
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja Akhir TA 2023

No.	Ket	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	DK	0	77.395.535.000	0	77.395.535.000
2.	KD	1.595.808.554.000	1.799.620.671.000	330.113.026.000	3.395.923.266.000
3.	KP	401.972.425.000	2.073.655.218.000	483.195.666.000	2.962.843.294.000
4.	TP	0	19.888.050.000	0	19.888.050.000
TOTAL		**1.801.000.979.000**	**3.970.968.474.000**	**683.318.692.000**	**6.455.288.145.000**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.699.152.504.614,00 dari atau 41,56% dari estimasi PNBP yang ditetapkan sebesar Rp4.088.397.446.000,00 yang secara umum disebabkan antara lain:

1. Tahun 2023 merupakan tahun transisi penerapan penarikan PNBP SDA perikanan praproduksi menjadi penarikan PNBP SDA Perikanan pascaproduksi, dimana kapal yang beroperasi masih menggantongi izin pra produksi tahun 2022. Kapal yang masih memiliki izin (SIPI) PNBP SDA perikanan praproduksi belum dapat ditarik PNBP SDA perikanan pascaproduksi sampai dengan izin PNBP SDA perikanan pascaproduksi terbit.
2. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBPnya).
3. Kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan.
4. Pada saat penyusunan usulan dan penetapan target PNBP SDA perikanan tahun 2023, diasumsikan penerapan PNBP SDA perikanan penarikan dengan sistem kontrak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, namun demikian pada perkembangannya ketentuan sistem kontrak berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan.
5. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi merupakan pelabuhan perikanan UPT daerah yang bukan unit teknis vertikal KKP. Dimana pelabuhan perikanan UPT daerah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga upaya-upaya intensif perlu dilakukan agar mendapat dukungan yang optimal

Rincian realisasi PNBP menurut jenis pendapatan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.8
Rincian Realisasi PNBP Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Nama Akun	Estimasi	Realisasi Netto	%
PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	**3.550.000.000.000**	**636.893.333.269**	**18,20**
Pendapatan Kelautan dan Perikanan	3.550.000.000.000	636.893.333.269	18,20
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	**80.376.933.000**	**88.723.088.530**	**110,82**
Pendapatan Jasa Layanan Umum	57.238.185.000	35.439.613.443	61,90
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	3.313.795.830	100,00
Pendapatan BLU Lainnya	23.092.733.000	50.769.754.661	219,89
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	**508.128.513.000**	**973.536.842.887**	**191,60**
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Ganti Rugi Barang Rusak	46.290.242.000	78.857.609.789	170,31
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	305.227.717.000	752.333.633.350	246,51
Pendapatan Konsultasi, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	1.375.299.000	1.631.476.000	118,61
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.416.833.000	5.206.243.000	117,77
Pendapatan Jasa Lainnya	76.862.123.000	90.668.796.504	117,95
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	299.191.691	100,00
Pendapatan Denda	9.336.299.000	29.846.222.409	319,78
Pendapatan Lain-Lain	0	13.793.926.929	100,00
Total	**4.638.197.446.000**	**1.699.153.264.616**	**41,56**

Sedangkan rincian estimasi dan realisasi PNBP pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.9
Rincian Realisasi PNBP Per Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Estimasi	Realisasi Netto	%
Setjen	61.005.877.000	62.638.742.445	102,68

Unit Eselon I	Estimasi	Realisasi Neto	%
Rpm	0	420.525.887	100,00
Ditjen PT	3.573.008.125.000	736.105.210.282	20,60
Ditjen PB	22.389.806.000	43.255.951.249	193,40
Ditjen PSDKP	9.156.299.000	30.613.322.666	327,90
Ditjen PDSPKP	8.647.596.000	15.236.344.631	176,00
Ditjen PKRL	333.169.648.000	797.036.792.795	312,22
BPPSDMKP	24.731.913.000	32.861.728.502	129,60
BPPMHKP	54.927.999.000	71.880.956.299	130,72
Total	**4.009.397.446.000**	**1.658.122.308.614**	**41,36**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Berjalan terhadap Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Lalu (terhadap Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Lalu (*Year on Year*)

Rincian perbandingan realisasi PNBP per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.10
Rincian Realisasi PNBP Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun	%
PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	**636.095.053.269**	**1.192.945.029.371**	**(556.052.476.102)**	**(46,63)**
Pendapatan Kehutanan dan Perikanan	636.095.053.269	1.192.945.029.371	(556.052.476.102)	(46,63)
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	**68.722.208.530**	**48.994.820.153**	**19.727.488.380**	**40,09**
Pendapatan Jasa Layanan Umum	55.419.613.441	27.170.767.851	8.248.845.590	30,35
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.312.960.634		1.312.960.634	100
Pendapatan BLU Lainnya	11.989.634.455	21.824.052.302	29.813.702.356	137,12
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	**972.536.843.087**	**629.171.294.121**	**344.365.548.886**	**54,73**
Pendapatan Jasa Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Jasa Badan Usaha	78.017.969.709	68.194.664.438	10.773.281.171	15,80
Pendapatan Administrasi dan Pelayanan Hukum	703.318.422.355	454.513.961.928	326.804.461.427	72,83
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	1.632.476.000	1.465.956.449	166.433.600	11,32
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	5.326.243.000	3.758.987.209	1.467.268.530	39,04
Pendapatan Jasa Lainnya	183.668.796.884	79.411.583.330	11.239.282.974	14,15

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	299.193.691	348.882.264	(49.688.427)	(14,24)
Pendapatan Denda	29.868.222.689	37.644.750.288	(7.776.528.279)	(20,75)
Pendapatan Lain-Lain	11.710.112.454	4.031.293.293	7.678.819.161	190,51
Total	1.899.332.504.634	1.871.111.943.445	(171.779.439.811)	(9,19)

B.1.1.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam Kementerian Kelautan dan Perikanan diperoleh dari Pendapatan Kelautan dan Perikanan.

Pendapatan Perikanan

Pendapatan Perikanan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp636.893.353.269,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 atau 18,20%. Realisasi Pendapatan Perikanan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.192.945.829.371,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Perikanan per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.11
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perikanan Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

(dalam satuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	%/Rk (Turun)	%
Pendapatan Pengelolaan Perikanan Perikanan Tangkap	36.837	45.975	82,01	26.367	70.809	260,59	(24.834)	(35,06)
Pendapatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	0	93	100,00	0	102	100,00	(9)	(8,82)

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Kenaikan/ Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Nilai (Turun)	%
Pendapatan Hasi								
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	3.443.971	390.829	17,34	1.601.617	1.222.832	69,98	(832.200)	(97,34)
Total	**3.500.000**	**856.000**	**18,59**	**5.627.904**	**5.193.946**	**73,23**	**(516.853)**	**(96,61)**

Realisasi Pendapatan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp516.052.476.102,00 atau 44,61% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan Perikanan dihasilkan hanya dari Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan pendapatan terkait:

1. Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan atas surat izin usaha perikanan (SIUP) sebesar Rp45.970.982.828,00;
2. Pendapatan pungutan pengusahaan perikanan atas izin pengangkutan ikan sebesar Rp93.225.000,00;
3. Pendapatan pungutan hasil perikanan atas pendaratan ikan di pelabuhan perikanan oleh kapal berizin pascaproduksi sebesar Rp590.829.145.641,00.

B.1.1.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan Pendapatan BLU Lainnya.

Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan jasa layanan umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp35.459.613.443,00 dan sebesar Rp27.170.767.851,00.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa layanan umum pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.12
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	42.595	22.038	51,70	32.476	21.993	67,72	38	0,18
DJPB	4.560	2.249	49,23	0	0	0,00	2.249	100,00
BPPSDMKP	10.052	11.191	111,33	2321	5179	244,38	6.012	116,08
Total	**57.215**	**35.460**	**61,98**	**34.797**	**27.171**	**78,54**	**8.289**	**30,51**

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.459.613.443,00 atau sebesar 61,98% dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp57.214.181.000,00.

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, mengalami kenaikan sebesar Rp8.288.845.592,00 atau 30,51% yang secara umum disebabkan karena terdapat penambahan Satker di DJPB dan BPPSDMKP.

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Layanan Umum pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   a. Pendapatan program dana bergulir sektoral

      Antara lain merupakan pendapatan operasional Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang

diperoleh dari pendapatan dari Jasa Layanan atas penyaluran dana bergulir kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, sesuai dengan tarif layanan berdasarkan PMK Nomor 150 tahun 2017 tentang Tarif Layanan BLU LPMUKP maksimal 4% per tahun dari jumlah pinjaman. Pendapatan program dana bergulir sektoral Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp17.012.415.260,00.

b. Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya

Antara lain merupakan pendapatan dari biaya administrasi dan provisi pinjaman/pembiayaan yang dipungut dari debitur atas penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Tarif biaya administrasi dan provisi tersebut adalah sebesar 1,5% dari jumlah pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Adapaun pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.007.422.226,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan pendapatan dari BLU yang berasal dari pengujian laboratorium. Realisasi per Satker BLU sebagai berikut:

a. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang sebesar Rp23.482.800,00.

b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo sebesar Rp637.645.300,00.

c. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara sebesar Rp1.587.410.100,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari:

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPP) Tegal

Antara lain merupakan pendapatan atas layanan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pendapatan atas layanan non pendidikan sebesar Rp6.659.758.930,00.

b. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politek KP) Sidoarjo
Antara lain merupakan pendapatan atas layanan akademik (diklat) dan pendapatan atas layanan non akademik sebesar Rp4.541.006.150,00.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yaitu kekurangan pembayaran atas Pendapatan jasa Layanan Pendidikan pada BP3 Tegal senilai Rp16.767.000,00. Atas kekurangan tersebut telah disetor ke Rekening Operasional BLU BP3 Tegal pada tanggal tanggal 27 Februari 2024 sebesar Rp4.026.000,00 dan 26 Maret 2024 sebesar Rp12.741.000,00.

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.512.940.434,00 dan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.13
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
DJPB	0	1.513	100,00	0	0	0,00	1.513	100,00
Total	0	1.513	100,00	0	0	0,00	1.513	100,00

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU berasal dari Satker BP3 Tegal. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU merupakan pendapatan atas penyelenggaraan Pelatihan dengan lembaga/badan usaha internal/eksternal KKP.

Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp51.749.754.661,00 dan sebesar Rp21.824.052.302,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.14
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	18.349	39.200	213,60	16.317	21.591	132,32	17.617	81,59
DJPB	3.233	11.381	352,03	0	0	0,00	11.381	100,00
BPPSDMKP	1.480	1.161	78,45	335,56	233	69,44	928	398,28
Total	**23.062**	**51.750**	**224,40**	**16.653**	**21.824**	**131,01**	**29.926**	**137,12**

Realisasi Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.925.702.359,00 atau 137,12% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan adanya penambahan Satker BLU di DJPB dan kenaikan penerimaan dana idle cash BLU LPMUKP.

Penjelasan atas Pendapatan BLU Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Antara lain dari pengelolaan dan penempatan dana LPMUKP di bank sebesar Rp39.208.445.964,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Antara lain merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari:

a. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

Antara lain merupakan penjualan komoditas perikanaman sebesar Rp8.115.664.856,00.

b. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

Antara lain merupakan penjualan komoditas perikanaman sebesar Rp3.212.830.751,00.

c. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

Antara lain pendapatan sewa asrama, jasa magang, dan jasa layanan perbankan sebesar Rp52.045.906,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari:

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal

Antara lan dari sewa gedung/ruangan (asrama, auditorium, gedung workshop) dan sewa *cold storage* sebesar Rp902.835.711,00.

b. Politeknik Kelautan dan Perikanan(Politek KP) Sidoarjo

Antara lain dari sewa asrama, sewa *cold storage*, sewa auditorium sebesar Rp248.405.160,00.

II.1.1.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri atas Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp78.837.869.789,00 dan sebesar Rp68.064.664.618,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BMN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.15
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha Pada Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	62	891	1.437,10	62	2.671	4.288,86	(1.780)	(66,64)
Itjen	0	323	100,00	0	129	100,00	194	150,39
Ditjen PT	12.031	20.665	171,76	8.803	17.313	196,70	3.352	19,36
Ditjen PB	13.179	19.338	146,73	20.488	22.342	109,05	(3.004)	(13,45)
Ditjen PSDKP	0	2.556	100,00	0	435	100,00	2.121	487,59
Ditjen PDPERP	8.407	13.869	165,00	5.114	8.883	173,70	4.986	56,13
Ditjen PRL	2.215	3.599	162,48	2.060	3.859	187,28	(259)	(6,71)
BPPSDMKP	7.955	11.426	143,66	8.922	7.366	82,56	4.060	55,12
BPPMHKP	2.603	6.171	237,06	3.457	5.067	146,57	1.104	21,79
Total	**46.399**	**78.838**	**169,93**	**48.906**	**68.064**	**139,15**	**10.774**	**15,83**

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.773.205.171,00 atau 15,83% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan oleh:

1. Kenaikan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin di Ditjen PSDKP dan Ditjen PDSPKP.
2. Kenaikan pendapatan atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi di Ditjen Perikanan Tangkap antara lain merupakan kontrak sarana dan prasarana berupa tanah selama lima tahun yang dibayar di muka.

Penjelasan atas pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan laran badan usaha pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   Antara lain merupakan penjualan peralatan dan mesin seperti lelang kendaraan dinas roda 4 dan lelang compressor, mebeulair, partisi, cctv, mesin fotocopy, dan sewa gedung/bangunan seperti wisma gracilaria, sewa BTS penguat sinyal dan sewa rumah dinas Satker BPTSDKP sebesar Rp891.256.000,00.
2. Inspektorat Jenderal
   Antara lain merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp322.567.454,00.
3. Ditjen Perikanan Tangkap
   Antara lain merupakan pendapatan penggunaan sarpras sesuai dengan tusi, pemindahtanganan BMN, dan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp20.664.827.245,00.
4. Ditjen Perikanan Budi Daya
   Antara lain merupakan hasil samping kegatan pembudidaya ikan, laboratorium, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi serta penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp19.337.570.583,00.
5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   Antara lain merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin; sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp2.556.393.062,00.

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
   Antara lain merupakan pendapatan atas penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan untuk ruangan kantor, penjualan peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan Pasar Ikan Modern sebesar Rp13.868.874.696,00.
7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
   Antara lain merupakan pendapatan atas KSP BMN di Pulau Nipah dan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp3.599.020.683,00.
8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
   Antara lain merupakan pendapatan atas penjualan hasil sampling TEFA berupa pendidikan kegiatan budidaya perikanan terutama berupa udang vaname, penggunaan saran dan prasarana sesuai tusi, serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp11.426.296.753,00.
9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
   Antara lain merupakan jasa analisa laboratorium dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp6.171.255.293,00.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yaitu kekurangan pembayaran atas sewa BMN pada Setditjen PDSPKP sebesar Rp696.607.825,00 dan denda keterlambatan pembayaran PNBP sebesar Rp44.270.732,00. Atas kekurangan tersebut belum ditindaklanjuti penyetoran ke kas negara dan dalam proses penagihan ke PT Perindo.

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp755.318.422.355,00 dan sebesar Rp434.513.960.928,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Administrasi dan

Penegakan Hukum pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.16
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam ribuan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	9	59	180,00	9	59	180,00	(9)	(13,79)
DJPT	5	9	180,00	9	11	122,22	(3)	(18,18)
Ditjen PB	1.611	4.858	301,55	2.029	5.557	273,89	(699)	(12,58)
Ditjen PDSPKP	247	203	82,19	232	173	74,57	30	17,34
Ditjen PERL	316.957	686.760	217,29	44.861	369.860	824,46	316.900	85,68
BPPSDMKP	721	139	19,28	591	331	56,01	(192)	(58,01)
BPPMHKP	30.688	65.290	114,00	31.528	58.525	113,60	6.765	8,16
Total	**369.329**	**755.320**	**204,51**	**99.342**	**434.515**	**437,89**	**320.805**	**73,83**

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp320.804.461.427,00 atau 73,83% dari realisasi untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan oleh peningkatan signifikan atas pendapatan perizinan lainnya berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang terdapat di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Penjelasan atas Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Antara lain merupakan pendapatan dari laboratorium, sertifikasi, kalibrasi, standardisasi berupa penerimaan dari

pemeriksaan/pengujian laboratorium uji air sebesar Rp50.350.000,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Antara lain merupakan pendapatan atas permohonan sertifikasi alat tangkap sebesar Rp8.540.000,00

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Antara lain merupakan pendapatan atas layanan laboratorium, sertifikasi, kalibrasi, standardisasi berupa penerimaan dari pemeriksaan/pengujian laboratorium sebesar Rp4.857.577.000,00.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

   Antara lain merupakan pendapatan atas pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan, residu antibiotik, bahan kimia sebesar Rp282.570.000,00

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Antara lain merupakan pendapatan atas perizinan lainnya berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebesar Rp686.762.808.355,00.

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Antara lain merupakan pendapatan atas layanan pengujian laboratorium sebesar Rp138.964.000,00.

7. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

   Antara lain merupakan pendapatan atas penerbitan sertifikat dan uji laboratorium sebesar Rp63.297.613.000,00.

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.632.470.000,00 dan sebesar Rp1.575.290.000,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 and 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel B.17
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
BPPMHKP	1.575	1.632	103,62	19.139	1.464	7,65	168	11,48
Total	**1.575**	**1.632**	**103,62**	**19.139**	**1.464**	**7,65**	**168**	**11,48**

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp168.633.600,00 atau 11,52% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan hanya terdapat pada BPPMHKP pada akun Pendapatan Jasa Karantina Perikanan yang antara lain merupakan pendapatan atas uji klinis, pengamatan dan pengawasan, pendapatan pengujian sertifikasi, serta kalibrasi.

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.206.243.030, dan sebesar Rp3.738.982.500,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.18
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Ditjen PT	23	23	100,00	10	0	0,00	23	100,00
Ditjen PB	0	1	100,00	0	5	100,00	(4)	(80,00)
Ditjen PDK	1	3	100,00	0	0	100,00	3	100,00
BPPTDMKP	4.594	5.180	112,76	3.683	3.734	65,70	1.446	38,73
Total	**4.617**	**5.207**	**112,78**	**3.693**	**3.739**	**65,68**	**1.468**	**39,24**

Realisasi Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.467.260.530,00 atau 39,24% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan oleh kenaikan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan di BDA Sukamandi dan BPT Banyuwangi.

Penjelasan atas Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Antara lain merupakan pendapatan atas penjualan atas Vessel Monitoring Aid (VMA) sebesar Rp22.999.130,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Antara lain merupakan pendapatan atas Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp660.000,00.

3. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

   Antara lain merupakan pendapatan atas pelatihan hasil perikanan sebesar Rp2.640.000,00.

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Antara lain merupakan pendapatan atas pendapatan pendidikan kelautan dan perikanan lingkup pendidikan tinggi kelautan dan perikanan program Diploma I, Diploma II, Diploma III, atau Diploma IV, pendapatan atas layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar Rp5.180.843.900,00.

Pendapatan Jasa Lainnya

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp90.660.796.504,00 dan sebesar Rp79.421.503.530,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 and 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.19
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam ribuan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Kenaikan/ Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
Ditjen PT	61.929	75.932	122,64	61.138	66.094	108,08	9.839	13,98
Ditjen PB	0	15	387,20	7	29	414,29	(14)	(48,28)
Ditjen PKSI	14.898	15.814	102,79	2.625	13.296	506,51	2.518	15,18
BPSDMKP	30	0	0,00	85	2	2,35	(2)	(100,00)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Total	76.862	90.645	117,95	43.051	79.421	185,32	11.240	14,15

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.239.292.974,00 atau 14,15% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan pendapatan jasa Pelabuhan karena adanya peningkatan wisata bahari di pelabuhan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
2. Kenaikan pada akun 425629 - Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berupa pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya.

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   Antara lain merupakan pendapatan atas pelatihan pengolahan data kelautan sebesar Rp225.000,00.
2. Ditjen Perikanan Tangkap
   Antara lain merupakan tambat labuh, docking, IPAL, dan wisata bahari sebesar Rp 75.130.614.090,00.
3. Ditjen Perikanan Budi Daya
   Antara lain merupakan pelatihan kelautan dan perikanan berupa konsultasi dan bimbingan teknis, bidang pembudidaya ikan sebesar Rp14.700.000,00.

4. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Antara lain merupakan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya sebesar Rp15.314.132.406,00.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 yaitu kekurangan pembayaran PNBP Jasa Pelabuhan Perikanan pada PPS Bungus sebesar Rp285.227.550,00. Atas kekurangan tersebut telah disetor sebagian ke kas negara pada tanggal 28 Mei 2024 dengan NTPN dan nominal sebagai berikut:

1. Kode NTPN 09C166UBEUHBR412 sebesar Rp18.405.500,00;
2. Kode NTPN B236E0NA04GL06BF sebesar Rp14.911.900,00;
3. Kode NTPN AA5EA48VVEQ6K8TC sebesar Rp25.082.600,00;
4. Kode NTPN E63337QLUP3OBAOO sebesar Rp19.438.000,00;
5. Kode NTPN 3F53A6U0EUHBRDA4 sebesar Rp20.006.300,00.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 299.192.691,00 dan sebesar Rp268.302.264,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.20
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	0	0	0,00	0	57	0,00	(57)	(100,00)
Ditjen PT	0	14	100,00	0	16	100,00	(2)	(12,50)
Ditjen PB	0	0	0,00	0	41	0,00	(41)	(100,00)
Ditjen PDPKP	0	0	0,00	0	1	0,00	(1)	(100,00)
Ditjen PRL	0	5	100,00	0	1	100,00	4	400,00
BPSDMKP	0	57	100,00	0	155	100,00	(98)	(62,75)
BPPMHKP	0	225	100,00	0	0	100,00	225	(100,00)
Total	**0**	**301**	**100,00**	**0**	**269**	**100,00**	**32**	**11,90**

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.090.427,00 atau sebesar 11,51% yang secara umum disebabkan adanya kenaikan seiring penyelesaian ganti kerugian negara pada BPPMHKP.

Penjelasan atas Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap
   Antara lain merupakan Tuntutan Ganti Rugi Bendahara pada Satker PPS Bitung sebesar Rp13.500.000,00.
2. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
   Antara lain merupakan cicilan pengembalian atas kehilangan kendaraan roda 2 pada Satker BPSPL Makassar sebesar Rp4.500.000,00.

3. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp224.692.691,00.

Pendapatan Denda

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp29.848.322.009,00 dan sebesar Rp37.664.750.298,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Denda pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.21
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	0	12	100,00	0	78	100,00	(66)	(84,62)
Ditjen PT	0	227	100,00	0	963	100,00	(736)	(76,43)
Ditjen PB	0	1.138	100,00	0	764	100,00	374	48,95
Ditjen PSDKP	9.336	27.734	297,07	10.200	33.987	333,21	(6.253)	(18,40)
Ditjen PDSPKP	0	350	100,00	0	916	100,00	(566)	(61,79)
Ditjen PRL	0	386	100,00	0	628	100,00	(322)	(51,27)
BPPSDMKP	0	78	100,00	0	252	100,00	(174)	(69,05)
BPPMHKP	0	5	100,00	0	76	100,00	(71)	(93,42)
Total	**9.336**	**29.850**	**319,73**	**10.200**	**37.664**	**369,25**	**(7.814)**	**(20,75)**

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.816.428.279,00 atau 20,75% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan berkurangnya

penerimaan atas denda administratif dan ganti kerugian terkait tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Penjelasan atas Pendapatan Denda sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Antara lain merupakan outsourcing PT Provisi terkait CS atas denda penyelesaian pekerjaan sebesar Rp11.864.650,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Antara lain merupakan denda atas keterlambatan dan/atau kekurangan volume pekerjaan pada 11 Satker sebesar Rp226.951.993,00 dan denda lainnya pada PPN Nizam Zachman sebesar Rp615.145,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Antara lain merupakan denda atas keterlambatan pembangunan. Angsuran denda keterlambatan pekerjaan KJA Offshore sesuai temuan BPK RI TA 2018 (Direktorat Perbenihan) senilai Rp100.000.000,00, denda keterlambatan BUSK Kebumen senilai Rp244.739.869,00.

   Terdapat perbaikan transaksi penerimaan negara yang menjadi tambahan penerimaan di Satker Setditjen Perikanan Budi Daya dari Satker 465054 sebesar Rp861.930 terkait Denda Keterlambatan Pengadaan Pompa.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

   Antara lain merupakan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Sentra Kuliner Kota Ruteau TA 2022 dan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang sebesar Rp349.828.982,00.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Antara lain merupakan denda pada Satker DKP Kabupaten Brebes berupa denda keterlambatan atas pekerjaan integrasi garam di Desa Sawojajar dan pada Direktorat Jasa Kelautan berupa keterlambatan atas pekerjaan atas pengadaan kapal wisata sebesar Rp249.201.342,00 dan denda lainnya yang merupakan tindak Lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI berupa

Pencairan jaminan Pelaksanaan akibat dari Pemutusan Kontrak Pekerjaan Integrasi Lahan Ds. Gersik Putih Tahun 2022 sebesar Rp56.950.000,00.

Pendapatan Lain-Lain

Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp11.728.526.429,00 dan sebesar Rp4.035.293.593,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Lain-Lain pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 and 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.22
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam ratusan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Kenaikan Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	0	457	100,00	0	678	100,00	(221)	(48,39)
Itjen	0	98	100,00	0	10	100,00	88	880,00
Ditjen PT	0	2.947	100,00	0	801	100,00	2.146	267,92
Ditjen PB	0	4.279	100,00	0	574	100,00	3.705	645,47
Ditjen PSDKP	0	323	100,00	0	139	100,00	184	132,38
Ditjen PDSPKP	0	802	100,00	0	82	100,00	720	878,05
Ditjen PKRL	0	1.050	100,00	0	390	100,00	660	169,23
BPPSDMKP	0	1.307	100,00	0	1.134	100,00	173	15,26
BPPMHKP	0	470	100,00	0	409	100,00	61	14,91
Total	**0**	**11.733**	**100,00**	**0**	**4.037**	**100,00**	**7.696**	**190,64**

Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.698.232.836,00 atau sebesar 190,77% dari Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan karena kenaikan penerimaan kembali belanja barang dan belanja modal tahun anggaran yang lalu. Penerimaan kembali belanja barang yang signifikan terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap dan penerimaan

kembali belanja modal yang signifikan terdapat pada Ditjen Perikanan Budi Daya.

Terdapat Penerimaan kembali belanja modal yang berasal dari DKP Kabupaten Pulang Pisau yang pada periode audited dicatat di Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp5.000.000,00.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.335.595.925.317,00 atau 98,15% dari pagu anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp6.455.280.145.000,00. Rincian pagu dan realisasi belanja per jenis belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.23
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Netto	%
Belanja Pegawai	1.801.080.970.000	1.777.377.905.274	98,69
Belanja Barang	3.970.948.474.000	3.878.529.145.356	97,70
Belanja Modal	683.310.692.000	679.688.874.687	99,52
Total	**6.455.280.145.000**	**6.335.595.925.317**	**98,15**

Sedangkan rincian pagu dan realisasi belanja pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.24
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Netto	%
Setjen	684.760.695.000	631.792.931.853	90,26
Itjen	75.644.398.000	75.393.906.501	99,64
Setjen PT	878.815.054.000	862.679.861.843	98,77
Ditjen PB	1.104.217.305.000	1.097.134.906.277	98,81

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
Ditjen PSDKP	1.123.893.531.000	1.119.226.743.478	99,68
Ditjen PTKPKP	343.280.611.000	339.684.037.406	98,95
Ditjen PRL	403.632.996.000	399.297.824.053	98,93
BPPSDMKP	1.365.279.515.000	1.342.845.268.762	98,36
BPPMKIPP	585.914.348.000	497.626.943.867	98,24
Total	**6.825.280.140.000**	**6.335.595.925.317**	**98,18**

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.335.595.925.317,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp937.808.529.261,00 atau sebesar 17,37%. Rincian perbandingan realisasi belanja per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.25
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

Jenis Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)	%
Belanja Pegawai	1.777.377.905.274	1.833.185.613.166	(55.727.707.892)	(3,97)
Belanja Barang	3.879.529.145.356	2.986.571.451.207	892.957.694.149	29,90
Belanja Modal	678.688.874.687	590.990.191.693	87.698.743.044	13,48
Total	**6.335.595.925.317**	**5.397.787.396.056**	**937.808.529.261**	**17,37**

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.777.377.905.274,00 atau 98,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.801.000.979.000,00. Sisa anggaran belanja pegawai di tahun 2023 secara umum disebabkan oleh adanya kebijakan pembayaran tunjangan kinerja atas THR dan Gaji 13 hanya 50%.

Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai menurut akun 3 digit untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.26
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Jenis Akun	Pagu Anggaran	Realisasi Netto	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	918.730.763.000	905.401.010.815	98,54
Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	882.270.214.000	871.896.894.759	98,82
Total	**1.801.000.979.000**	**1.777.297.905.574**	**98,69**

Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai per Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.27
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Netto	%
Setjen	77.320.945.000	75.237.085.406	96,97
Itjen	33.995.148.000	33.738.636.098	99,24
Ditjen PT	190.303.781.000	188.285.717.056	98,94
Ditjen PB	168.651.178.000	165.462.819.682	98,11
Ditjen PSDKP	170.356.626.000	169.518.089.333	99,51
Ditjen PDPPKP	56.500.000.000	54.810.973.275	97,01
Ditjen PKRL	100.241.987.000	98.632.702.337	98,39
BPPSDMKP	742.912.977.000	734.856.926.918	98,91
BPSMKP	260.471.817.000	257.843.221.939	98,91
Total	**1.801.000.979.000**	**1.777.297.905.274**	**98,69**

Pagu anggaran belanja pegawai terbesar berada pada Unit Eselon I BPPSDMKP sehubungan dengan jumlah pegawai terbanyak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.28
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	905.481.010.515	944.299.771.849	(38.818.761.334)	(4,11)
Belanja Honorarium/Lembur/ Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	871.899.894.759	866.835.841.317	5.064.053.442	0,59
Total	**1.777.377.905.274**	**1.811.135.613.166**	**(35.757.707.892)**	**(1,97)**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.757.707.892,00 atau 1,97% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Penurunan beban gaji pokok PNS beserta tunjangan-tunjangan yang melekat, dikarenakan banyaknya pegawai yang mutasi ke Instansi lain terutama pegawai dengan jabatan peneliti, perekayasa, fungsional pada BPPSDMKP yang mutasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu penurunan beban Uang Makan PNS dikarenakan pada tahun 2023 kegiatan di luar kantor sudah berjalan normal yang membuat pegawai setiap hari berada di kantor, sehingga uang makan tidak dibayarkan.

Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp905.481.010.515,00 dan Rp944.299.771.849,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.29
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam ribuan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	33.291	34.592	97,19	33.993	35.706	95,20	(1.114)	(3,12)
Itjen	15.350	15.139	98,63	15.301	15.246	99,64	(107)	(0,70)
Ditjen PT	98.936	97.734	98,79	96.491	95.089	98,55	2.645	2,78
Ditjen PB	86.825	84.978	97,86	93.707	92.881	99,12	(7.903)	(8,51)
Ditjen PSDKP	85.293	83.013	96,67	81.532	81.381	99,81	1.632	4,86
Ditjen PDSPKP	37.238	36.979	97,37	27.078	24.748	98,78	(175)	59,646
Ditjen PKRL	48.943	47.685	97,43	48.106	47.553	98,81	132	0,32
BPPSDMKP	190.892	181.462	98,70	625.323	626.965	98,86	(35.503)	(5,45)
BPPMHKP	130.160	128.070	98,62	129.457	128.726	99,44	(336)	(0,28)
Total	**938.733**	**905.682**	**98,56**	**952.988**	**944.299**	**99,09**	**(38.817)**	**(4,11)**

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.818.761.334 atau 4,11% dari realisasi periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp871.896.894.759,00 dan sebesar Rp868.835.841.317,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito pada menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.30
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	41.998	40.645	96,79	40.711	40.189	99,93	(39)	(0,10)
Itjen	18.645	18.600	99,76	18.712	18.638	99,60	(38)	(0,20)
Ditjen PT	91.360	90.592	99,11	86.977	86.727	99,71	3.865	4,47
Ditjen PK	91.028	86.495	99,37	88.356	87.806	99,38	(7.311)	(8,33)
Ditjen PSDKP	85.043	84.498	99,36	80.020	79.864	99,80	4.634	5,80
Ditjen PDSPKP	29.262	28.234	96,49	27.607	27.597	99,96	637	2,31
Ditjen PKRL	51.399	50.948	99,12	47.966	47.697	99,65	3.251	6,82
BPPSDM KP	352.416	348.634	98,93	350.130	355.977	98,48	(7.343)	(2,06)
BPPMHI KP	130.312	129.295	99,22	124.182	123.848	99,79	5.447	4,40
Total	**883.270**	**873.897**	**98,82**	**872.489**	**868.816**	**99,58**	**5.041**	**0,35**

Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp35.757.707.892,00 atau 0,35% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp5.115.590,00, tunjangan fungsional PNS sebesar Rp540.000,00 dan tunjangan umum PNS sebesar Rp1.255.000,00.

2. Inspektorat Jenderal

   Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp18.593.250,00 dan tunjangan fungsional PNS sebesar Rp5.285.000,00 atas pegawai yang menjalani tugas belajar.

3. Ditjen Perikanan Tangkap

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) sebesar Rp22.703.050,00, tunjangan fungsional PNS sebesar Rp14.700.000,00, dan tunjangan umum PNS sebesar Rp10.175.000,00.

4. Ditjen Perikanan Budi Daya

a. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) sebesar Rp2.716.800,00, tunjangan fungsional PNS sebesar Rp3.090.000,00, dan tunjangan umum PNS sebesar Rp1.800.000,00.

b. Kelebihan pembayaran uang lembur sebesar Rp164.840.750,00.

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) sebesar Rp2.522.200,00, tunjangan fungsional PNS sebesar Rp21.530.000,00, dan tunjangan umum PNS sebesar Rp39.915.000,00.

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp2.775.000,00.

7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp33.158.100,00 dan tunjangan fungsional PNS sebesar Rp14.180.000,00.

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa belanja gaji pokok PNS sebesar Rp54.690.050,00, belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) sebesar Rp445.614.561,00, tunjangan fungsional PNS sebesar Rp106.858.300,00,

tunjangan struktural PNS sebesar Rp6.480.000,00, dan tunjangan umum PNS Rp61.605.000,00.

9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang menjalani tugas belajar berupa tunjangan umum PNS sebesar Rp19.090.800,00.

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.879.529.145.356.

Tabel B.31
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Jenis Akun	Pagu Anggaran	Realisasi Netto	%
Belanja Barang	1.471.004.554.000	1.454.741.505.821	98,89
Belanja Jasa	560.250.461.000	541.485.015.146	96,65
Belanja Pemeliharaan	360.757.649.000	356.827.460.095	98,91
Belanja Perjalanan Dinas	891.173.328.000	866.698.165.853	97,25
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	69.059.555.000	45.545.997.060	65,98
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	638.134.907.000	614.231.898.981	96,37
Total	**3.970.960.474.000**	**3.879.529.145.356**	**97,70**

Rincian realisasi Belanja Barang menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.32
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Netto	%
Setjen	421.396.023.000	399.383.449.590	94,78
Itjen	19.513.109.000	19.098.210.463	97,86
Ditjen PT	618.221.426.000	593.084.980.863	95,94
Ditjen PB	807.237.468.000	797.757.874.989	98,83
Ditjen PSDKP	696.778.938.000	693.643.129.421	99,55

Unit Kuasa I	Pagu Anggaran	Realisasi Neto	%
Ditjen PDSPKP	288.969.413.000	279.088.401.303	96,58
Ditjen PRL	298.774.578.000	286.169.017.700	95,78
SPSDMKP	383.146.966.000	370.983.629.092	97,91
BPPSDMKP	224.938.272.000	219.918.148.247	97,77
Total	**3.970.968.478.000**	**3.879.329.345.336**	**97,70**

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.33
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)	%
Belanja Barang	1.474.781.201.021	1.160.056.476.510	294.735.024.511	25,41
Belanja Jasa	341.485.015.146	409.963.078.478	(31.322.934.668)	32,08
Belanja Pemeliharaan	356.827.460.095	265.458.181.319	91.369.286.776	34,42
Belanja Perjalanan Dinas	866.698.163.053	623.794.740.955	242.903.424.098	38,94
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	45.545.097.000	44.363.589.180	1.181.507.880	2,66
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	614.231.890.981	482.986.584.785	131.245.314.236	27,17
Total	**3.879.329.345.356**	**2.986.571.651.207**	**892.957.694.149**	**29,90**

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp892.957.454.149,00 atau 29,90% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan lebih kondusifnya setelah keadaan covid-19 sehingga aktifitas perkantoran dan kegiatan lapangan, kunjungan, dan mengumpulkan orang kembali berlangsung secara normal.

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.454.741.501.021,00 dan sebesar Rp1.160.006.476.510,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Barang menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.34
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Kenaikan/ Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Nilai (Turun)	%
Setjen	329.603	320.827	99,40	133.726	111.648	98,16	17.107	15,44
Itjen	6.249	6.240	99,94	6.754	6.753	99,96	(503)	(7,48)
Ditjen PT	152.992	148.348	96,93	136.118	135.271	99,38	13.029	9,63
Ditjen PB	333.670	332.120	99,54	128.945	128.807	99,34	75.743	57,47
Ditjen PSDKP	445.812	444.687	99,74	202.433	202.389	99,84	142.498	57,38
Ditjen PDSPKP	63.196	62.693	99,21	53.937	53.525	98,87	9.168	17,57
Ditjen PRL	57.139	55.581	97,17	50.961	49.719	97,56	5.782	11,63
BPSDMKP	314.237	310.102	98,68	310.750	305.244	98,23	4.858	1,59
BPPMHKP	98.189	96.266	98,04	89.852	87.512	98,27	8.754	10,00
Total	**1.471.088**	**1.454.741**	**98,89**	**1.472.886**	**1.160.807**	**98,90**	**294.734**	**25,41**

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.454.741.501.021,00 atau 98,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.471.084.354.000,00. Sisa pagu anggaran Belanja Barang yang signifikan berupa Belanja Bahan sebesar Rp7.378.790.820, belanja keperluan perkantor sebesar Rp2.845.325.608,00, dan belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp1.791.336.522,00.

Sedangkan realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.754.692.581,00 atau 25,41% yang naik sejalan dengan kenaikan pagu anggaran Belanja Barang. Kenaikan ini secara signifikan terdapat pada akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar 88,24%, Belanja Bahan

sebesar 54,96%, dan Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar 54,88%. Ketidak pada beberapa pos Belanja Barang ini diantaranya telah kembali normalnya aktifitas kegiatan perkantoran secara penuh di tahun 2023 setelah penyesuaian pembatasan kegiatan di tahun 2022.

Pengungkapan jurnal koreksi pada periode *audited* Laporan Keuangan KKP TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Budi Daya
   a. Temuan pemeriksaan BPK atas pengadaan HDPE sebesar Rp86.200.200,00. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara pada tanggal 3 Mei 2024 dengan NTPN 1F3705CJTK71DU4M.
   b. Temuan pemeriksaan BPK atas reklasifikasi pencatatan HDPE dari belanja barang menjadi aset peralatan dan mesin sebesar Rp13.474.298.600,00 di BLUPPB Karawang dan Rp567.545.000,00 di Setditjen Perikanan Budi Daya.
2. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
   atas temuan belanja barang sebesar Rp27.615.838,00 di Setditjen PDSPKP. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara dengan NTPN F2F467QL3P0QCFM0.
3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
   Atas temuan belanja barang sebesar Rp30.436.275,00 di Setditjen PKRL dan Rp90.000,00 di DKP Kabupaten Bima.
4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
   Diantaranya atas temuan pemeriksaan pada belanja pengadaan bahan makanan sebesar Rp61.835.300,00, belanja bahan sebesar Rp225.414.129,00, dan belanja barang non operasional sebesar Rp30.741.440,00.

Belanja jasa

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp541.485.015.146,00 dan sebesar Rp409.962.070.478,00. Rincian pagu dan realisasi belanja jasa menurut Unit

Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.33
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	83.614	83.277	99,60	74.211	74.019	99,61	9.258	12,51
Itjen	452	451	99,78	477	470	98,53	(19)	(4,04)
Ditjen PT	187.182	185.771	98,26	71.982	71.238	98,96	34.534	48,48
Ditjen PB	91.336	88.998	97,25	49.247	48.609	98,87	40.306	82,58
Ditjen PSDKP	77.857	77.171	99,37	74.653	74.538	99,85	2.633	3,53
Ditjen PDPKP	35.926	35.628	99,18	30.551	30.344	99,32	5.281	20,79
Ditjen PHKL	39.509	37.549	95,04	27.635	26.553	96,29	10.996	41,41
BPSDMKP	76.864	75.770	98,58	51.725	50.049	96,76	25.721	51,39
BPPMHKP	36.740	35.875	97,65	34.535	34.065	98,64	1.810	5,31
Total	**568.260**	**541.484**	**98,65**	**415.066**	**409.562**	**98,77**	**131.922**	**32,08**

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp541.485.015.146,00 atau 98,65% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp560.258.461.000,00.

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp131.522.936.668,00 atau sebesar 32,08% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Pengungkapan jurnal koreksi pada periode *audited* Laporan Keuangan KKP TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   Atas kelebihan pembayaran jasa profesi sebesar Rp1.800.000,00.
2. Ditjen Perikanan Budi Daya
   a. Atas temuan Inspektorat Jenderal terkait langganan daya dan jasa di BPBL Ambon sebesar Rp72.000,00;
   b. Jurnal koreksi BPBAT Tatelu atas belanja langganan internet bulan Desember sebesar Rp6.300.000,00.

3. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   a. Koreksi pengurangan nilai atas *ground handling* sebesar Rp2.447.600,00.
   b. Koreksi perhitungan sewa rumah dinas sebesar Rp0.333.333,00.
4. Ditjen Pengaturan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
   Diantaranya jurnal balik atas belanja barang atas tagihan listrik CS 1000 Ton Muara Baru sebesar Rp247.209.136,00.
5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
   Jurnal koreksi atas kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp72.155.000,00.
6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
   Atas kelebihan pembayaran penyelenggaraan wisuda dan pelantikan taruna baru sebesar Rp405.964.620,00.

Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp356.827.468.095,00 dan Rp265.454.181.319,00. Rincian pagu dan realisasi belanja pemeliharaan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.36
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	53.722	53.257	99,13	45.770	45.865	99,32	7.392	17,14
Itjen	944	944	100,00	907	907	100,00	37	4,08
Ditjen PT	48.303	47.846	98,68	45.274	42.996	90,36	4.670	10,86
Ditjen PB	34.002	33.763	99,30	16.193	16.132	94,62	(7.631)	109,29
Ditjen PSDKP	75.894	75.624	99,64	72.271	72.139	99,90	3.485	4,74
Ditjen PDSPKP	9.547	9.315	97,76	11.050	10.823	97,95	(1.508)	(13,72)
Ditjen PDKL	10.309	10.130	99,26	6.963	6.825	98,02	3.305	48,42

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
BPPSDM KP	100.229	98.852	98,63	48.721	48.072	98,67	50.780	105,63
BPPMH KP	27.808	27.257	98,02	22.401	22.040	98,39	5.217	23,67
Total	**360.758**	**356.828**	**98,91**	**267.528**	**265.459**	**99,22**	**91.369**	**34,42**

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp356.827.468.095,00 atau 98,91% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp360.757.669.000,00. Sisa anggaran belanja pemeliharaan yang signifikan berada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.380.242.068,00 dan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.254.731.204,00.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi belanja pemeliharaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp91.369.286.776,00 atau 34,42%. Kenaikan ini secara umum disebabkan kenaikan atas:

- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin di Sekretariat Jenderal berupa adanya penambahan Satker BPPSDKP dan adanya pekerjaan Operasional Sistem Pemantauan SDKP di Pusdatin pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp6.706.414.298,00
- belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada Satker di lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya untuk bangunan perkantoran dan prasarana budidaya sebesar Rp7.532.735.743,00
- belanja pemeliharaan gedung dan bangunan BPPSDMKP sebesar Rp38.426.477.697,00

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2023 yaitu:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Atas pekerjaan normalisasi ruang kerja pelayanan terpadu sebesar Rp23.069.912,00. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN BCI4F2G4VPECV2HB.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Atas beban pemeliharaan gedung bangunan yang tidak dilengkapi buktinya sebesar Rp13.976.717,00.

Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp866.698.165.053,00 dan sebesar Rp623.794.740.955,00. Rincian pagu dan realisasi belanja Perjalanan Dinas pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.37
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam ribuan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	84.363	83.470	98,94	73.152	72.243	98,76	11.227	15,54
Itjen	31.868	31.838	99,91	27.759	27.723	99,87	4.115	14,92
Ditjen PT	190.663	183.563	96,28	183.525	142.211	99,88	41.352	29,08
Ditjen PB	134.970	130.693	96,83	87.136	66.047	98,38	64.648	97,88
Ditjen PSDKP	97.196	96.162	98,93	71.899	71.302	99,24	24.860	34,87
Ditjen PDSPKP	72.434	71.863	99,21	70.288	69.590	99,01	2.273	3,27
Ditjen PKRL	136.959	129.300	94,38	97.331	93.813	96,39	35.487	37,83
BPPSDMKP	80.484	79.260	98,48	47.908	46.009	96,04	33.260	72,29
BPPMHKP	62.202	60.320	97,50	35.610	34.850	97,89	25.662	73,62
Total	**891.173**	**866.700**	**97,25**	**634.553**	**623.796**	**98,30**	**242.904**	**38,94**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp866.698.165.053 atau 97,25% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp891.173.520.000. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp242.903.424.098,00 atau 38,94% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp242.903.424.098,00 atau 38,94% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2023 yaitu:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Atas perjalanan dinas pada Satker PPS Bitung menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebesar Rp17.481.000,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Atas perjalanan dinas pada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp254.940.600,00. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara dengan NTPN 955EP61QV3RUH4DP.

3. Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Atas perjalanan dinas pada Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp14.165.095,00 dan DKP Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar Rp2.434.480,00.

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Atas perjalanan dinas pada Politek KP Sorong sebesar Rp40.370.000,00, SUPM Pariaman sebesar Rp60.021.000,00; dan BRPPUPP sebesar Rp14.404.055,00.

Belanja Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp45.545.097.060,00 dan Rp44.363.589.180,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja BLU menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.38
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja BLU Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	56.000	37.438	65,70	40.542	41.276	95,83	(3.858)	(9,35)
Ditjen PB	1.140	1.135	99,87	0	0	0,00	1.135	100,00
BPSDMKP	11.532	6.993	60,64	4.457	3.087	69,26	3.906	126,53
Total	**69.560**	**45.546**	**65,48**	**52.999**	**44.363**	**83,71**	**1.183**	**2,67**

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.545.997.000,00 atau 65,48% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp69.559.555.000,00. Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.181.507.000,00 atau sebesar 2,66% jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp614.231.898.981,00 dan Rp482.986.584.765,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.39
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	13.218	13.135	99,37	623	623	100,00	12.512	2.008,35
Ditjen PT	109.272	187.704	90,64	85.080	82.433	96,11	65.351	154,01

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Ditjen PB	341.932	341.051	99,74	299.258	294.408	98,40	46.643	15,82
Ditjen PDSPKP	98.869	98.572	99,70	98.536	88.821	90,11	9.751	10,98
Ditjen PKRL	54.844	53.689	97,89	57.863	56.632	97,87	(2.943)	(5,20)
Total	**618.135**	**614.231**	**99,37**	**493.368**	**482.087**	**97,98**	**131.244**	**27,23**

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp614.233.898.981,00 atau 99,37% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp618.134.997.000,00. Sisa pagu belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yang signifikan yaitu bantuan mesin dan alat penangkapan ikan di Ditjen Perikanan Tangkap yang menggunakan sumber dana PNBP. Pada tahun 2023, target penerimaan PNBP tidak tercapai sehingga maksimal penggunaan dana PNBP tidak dapat digunakan 100%.

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp131.245.314.216.880,00 atau sebesar 27,17% jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan adanya penambahan bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya di Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Ditjen Perikanan Budi Daya.

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada masing-masing Unit Eselon I kami sajikan di bawah ini:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan belanja barang berupa uang muka pekerjaan konstruksi, pengawasan dan pembayaran termin atas pekerjaan konstruksi terkait proyek *Development of Fisheries Sector in Outer Islands* dari hibah ODA *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Merupakan pengadaan barang berupa alat penangkapan ikan, mesin kapal, kampung nelayan maju/kampung nelayan modern, Bantuan sarpras korporasi nelayan, prasarana TPI perairan darat, dan rumah ikan.

3. Ditjen Perikanan Budidaya

   Merupakan pengadaan barang berupa bantuan benih, bantuan calon induk, bantuan kebun bibit rumput laut kultur jaringan, bantuan excavator, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), kincir, KJA HDPE, mesin pakan dan bahan baku pakan, biofilk, ikan hias, dan pupuk.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

   Merupakan pengadaan barang berupa Gudang beku portable, mobil berefrigerasi, kendaraan berefrigerasi, *chest freezer*, peralatan pengolahan, dan *cool box*.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Merupakan pengadaan barang berupa penanaman vegetasi, bantuan pengembangan pesisir tangguh, pengadaan sarana usaha ekonomi produktif, dermaga apung, sarana TPS, penanaman mangrove, pembangunan gudang garam rakyat, dan mesin pompa air.

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi proteksi tiang pancang dermaga tambahan PPI Pandui Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp133.813.000,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak sesuai kontrak sebesar Rp237.907.627,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak sesuai kontrak sebesar pada Satker Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp427.452.339,00 dan BPBAP Ujung Batee sebesar Rp779.603,00.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

   Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak sesuai kontrak sebesar pada Satker Setditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp227.290.018,00.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak sesuai kontrak sebesar pada Satker Sekretariat Ditjen PKRL sebesar Rp44.255.792,00, DKP Kabupaten Buna sebesar Rp294.000,00, DKP Kabupaten Jeneponto sebesar Rp21.360,00, DKP Kabupaten Cirebon sebesar Rp73.865.806,00, DKP Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar Rp1.306.000,00, DKP Kabupaten Pamekasan sebesar Rp1.617.066,00.

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp678.688.874.687,00 atau 99,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp683.310.692.000,00. Sisa anggaran Belanja Modal TA 2023 secara umum merupakan selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak pengadaan belanja modal.

Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.40
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Jenis Akun	Pagu Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Belanja Modal Tanah	441.934.000	439.146.909	0	439.146.909	99,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.201.373.000	389.632.903.362	(158.777.552)	388.474.205.810	99,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.529.201.000	200.158.823.137	(738.736.798)	199.420.086.339	99,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.066.242.000	15.073.705.258	(64.245.737)	15.009.459.521	99,64
Belanja Modal Lainnya	72.119.311.000	71.919.535.105	0	71.919.535.105	99,72
Belanja Modal BLU	4.954.631.000	3.418.441.333	0	3.418.441.333	68,99
Total	**683.310.692.000**	**679.643.634.774**	**(954.760.087)**	**678.688.874.687**	**99,32**

Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.41
Rincian Realisasi Belanja Modal Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Bruto	%
Setjen	137.796.627.000	137.173.195.957	99,60
Itjen	2.157.689.000	2.157.036.000	99,97
Ditjen PT	62.296.899.000	61.389.363.546	98,45
Ditjen PB	129.346.059.000	125.910.204.636	97,34
Ditjen PSDKP	256.078.577.000	256.063.309.963	99,99
Ditjen PDSPKP	5.811.211.000	5.705.888.120	98,19
Ditjen PKIPM	14.796.499.000	14.696.194.936	99,32
BPPSDMKP	39.219.572.000	37.923.209.252	96,69
BPPMHKP	30.504.079.000	29.040.271.231	97,76
Total	**683.210.642.000**	**670.058.874.687**	**99,32**

Pada tahun 2023 terdapat belanja modal yang signifikan antara lain:

1. Belanja Peralatan dan Mesin

   Berupa pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II senilai Rp200.626.360.161,00 pada Satker Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2. Belanja Gedung dan Bangunan

   Berupa pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan pada Satker Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp67.739.051.563,00.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.42
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)	%
Belanja Modal Tanah	429.146.499	353.920.000	75.226.499	21,25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.474.205.810	293.722.501.876	94.751.703.934	32,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.420.806.359	228.160.662.937	(28.739.856.578)	(12,60)

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.009.659.521	11.316.740.686	3.692.918.835	32,63
Belanja Modal Lainnya	71.919.525.105	63.800.224.864	8.119.311.341	12,73
Belanja Modal BLU	3.418.441.359	896.182.140	2.522.259.219	281,53
Total	**670.608.874.487**	**590.081.151.683**	**80.527.743.804**	**13,65**

Terdapat peningkatan realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar 13,68% yang secara umum berasal dari pengadaan Kapal Pengawas Perikanan kelas II untuk tahun kedua, pada belanja modal lainnya berupa otomatisasi proses bisnis digital KKP, dan pada belanja modal BLU seiring dengan bertambahnya Satker BLU di lingkungan KKP di tahun 2023 menjadi 6 Satker BLU dari semula 3 Satker BLU di tahun 2022.

Penjelasan atas realisasi Belanja Modal menurut jenis akun kami sajikan dibawah ini:

Belanja Modal Tanah

Rincian Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp439.146.499,00 dan Rp363.823.000,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.43
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam ratusan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Ditjen PT	356	353	99,16	340	340	100,00	13	3,82
Ditjen PB	0	0	0,00	24	24	100,00	-24	(100,00)
Ditjen PSDKP	22	22	100,00	0	0	0,00	22	100,00
BPPSDMKP	65	65	100,00	0	0	0,00	65	100,00
Total	**443**	**440**	**99,32**	**364**	**364**	**100,00**	**76**	**20,88**

Peningkatan belanja modal tanah sebesar Rp73.326.499,00 secara umum disebabkan adanya kenaikan pada belanja pengukuran dan pematangan tanah pada Direktorat Perikanan Tangkap yaitu leveling pantai dan BPPMHKP berupa Pengadaan Pengurukan Tanah Balai KIPM Ambon.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp388.474.205.810,00 dan Rp293.723.501.876,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.44
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam ratusan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi (kenaikan)	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	21.843	21.589	98,83	26.131	26.253	99,53	(4.664)	(17,77)
Itjen	2.150	2.137	99,35	5.842	5.891	99,17	(3.754)	(64,26)
Ditjen PT	28.966	28.559	98,60	67.328	66.556	98,85	(37.997)	(57,09)
Ditjen PB	56.074	55.705	99,32	49.449	48.661	98,74	(25.956)	(53,02)
Ditjen PSDKP	248.767	248.715	99,98	108.796	108.788	99,99	139.927	128,62
Ditjen P2HPKP	5.112	5.012	98,04	6.600	6.521	92,67	(1.508)	(18,18)
Ditjen PRL	14.126	14.034	99,35	18.236	17.783	97,52	(3.749)	(21,08)
BPSDMKP	36.111	36.005	99,69	11.986	10.876	91,57	5.129	46,58
BPPMHKP	19.066	18.619	97,65	8.723	8.494	95,15	14.124	216,29
Total	**390.284**	**388.475**	**99,54**	**297.777**	**293.723**	**98,64**	**94.752**	**32,26**

Terdapat peningkatan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari tahun sebelumnya sebesar Rp94.751.703.934,00. Belanja modal peralatan dan mesin yang signifikan diantaranya:

- Pengadaan KP Perikanan Kelas II *(Nusiwe* Tahap II) Termin 1 sebesar Rp37.596.773.224,00
- Termin 2 sebesar 113.013.057.806,00

- Termin 3 sebesar Rp50.016.527.131,00
- *Repowering* Mesin *Speedboat* Pengawas Napoleon 028 Stasiun PSDKP Belawan sebesar Rp2.600.000.000,00.
- Pekerjaan *Repowering Speedboat* Pengawas Napoleon 027 sebesar Rp2.444.442.800,00

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   Atas pengadaan fasilitasi pendukung ruang *mirroring war room* sebesar Rp23.440.000,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 1 April 2024 dengan NTPN 9AA6811NFUT3BBUE.
2. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   Atas pengadaan kapal pengawas sebesar Rp879.438.815,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 30 April 2024 dengan NTPN 3548761QV3511V5G.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp199.428.886.339,00 dan Rp228.180.662.937,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel R.45
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	68.750	68.712	99,95	23.386	23.386	100,00	44.326	189,89
Ditjen PT	18.889	18.413	97,49	22.453	18.742	83,63	(367)	(1,95)
Ditjen PB	86.823	86.778	99,95	159.416	159.326	99,94	(72.548)	(45,53)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Ditjen PSDKP	6.748	6.285	93,14	6.984	6.984	100,00	1.201	26,10
Ditjen PDSPKP	200	198	99,08	603	572	94,86	(374)	(65,38)
Ditjen PRDL	479	462	98,39	3.542	3.430	97,06	(2.970)	(86,56)
BPPSDMKP	16.484	16.419	99,61	10.779	10.649	98,79	5.770	54,18
BPPMHKP	1.164	1.158	99,48	7.686	7.643	99,29	(5.485)	(83,56)
Total	206.528	199.427	96,45	233.249	228.180	98,25	(28.753)	(12,60)

Terdapat penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang selaras dengan penurunan pagu anggaran. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang signifikan diantaranya:

- Konstruksi Budidaya udang berbasis kawasan Tahap II-Paket 1 sebesar Rp 34.995.079.368,00.
- Konstruksi budidaya udang berbasis kawasan Tahap II - Paket 2 sebesar Rp32.743.972.195,00.

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Pengadaan renovasi tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp159.585.835,00. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara dengan NTPN 3AC340NA04DDF0UK, 633E62G4VP946ABJ, AEH756IQV3R8FBED, dan D8B2b2G4VFHM8A3V.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Atas pelaksanaan konstruksi BUBK tidak sesuai kontrak senilai Rp203.549.368,00.

3. Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

   Atas renovasi konstruksi pos pengawasan Pangkalan PSDKP Belawan senilai Rp175.802.712,00. Atas temuan ini telah disetor ke kas negara dengan NTPN D965461QV353M112.

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Atas pekerjaan belanja modal renovasi tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp301.704.676,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.009.459.521,00 dan Rp11.316.740.686,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.46
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam unaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	143	142	99,30	0	0	0,00	142	100,00
Ditjen PT	10.353	10.310	99,58	9.997	9.953	99,56	357	3,59
Ditjen PB	3.320	2.314	69,74	640	645	99,85	1.669	258,76
Ditjen PSDKP	1.042	1.042	100,00	502	502	100,00	540	107,57
Ditjen P2SPKP	0	0	0,00	50	50	100,00	(50)	(100,00)
Ditjen PDPL	0	0	0,00	168	168	100,00	(168)	(100,00)
BPPSDMKP	998	996	99,80	0	0	0,00	996	100,00
BPPMHKP	209	205	98,09	0	0	0,00	205	100,00
Total	**15.065**	**15.009**	**99,63**	**11.363**	**11.318**	**99,60**	**3.691**	**32,61**

Terdapat kenaikan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan yang secara umum disebabkan kenaikan realisasi pada belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal irigasi, dan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Beberapa belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai signifikan diantaranya:

- Rehabilitasi Jalan Produksi di Kawasan Modelling Budi Daya Ikla Salin sebesar Rp 5,900,040,258,00

- Pengadaan Perbaikan Jalan Produksi sebesar Rp 836.468.800,00
- Pengadaan Jalan Keliling sebesar Rp 514.250.600,00
- Perbaikan Saluran Irigasi Dengan Politeknik AUP sebesar Rp191.810.839,00.

Pengungkapan atas temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Atas rehabilitasi jalan produksi sebesar Rp45.170.495,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 2 April 2024 dengan *NTPN 4238189NA04ALPDSSA.*

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Atas pekerjaan belanja modal renovasi tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp26.492.000,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 22 April 2024 dengan NTPN 03AB848VVEMV5UAS.

Belanja Modal Lainnya

Rincian Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp71.919.535.195,00 dan Rp63.808.224.044,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.47
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam ratusan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	68.767	68.698	99,89	53.521	53.368	99,70	14.325	27,89
Ditjen PT	3.757	3.672	97,74	10.842	9.749	97,88	(6.077)	(62,33)
Ditjen PB	239	239	100,00	1.422	1.422	100,00	(1.183)	(83,19)
Ditjen PSDKP	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Ditjen PDSPKP	499	494	98,98	541	534	98,71	(40)	(7,49)
Ditjen PRL	0	0	0,00	800	595	74,38	(595)	(100,00)
BPPSDMKP	1.857	1.825	98,28	135	134	99,26	1.691	1.261,94
Total	**72.119**	**71.920**	**99,72**	**64.441**	**63.799**	**98,97**	**8.121**	**12,73**

Terdapat kenaikan realisasi belanja modal lainnya dibandingkan tahun sebelumnya yang secara umum disebabkan kesalarahan kenaikan pagu anggaran. Beberapa belanja modal lainnya yang signifikan diantaranya:

- Otomatisasi Proses Bisnis Digital KKP sebesar Rp49.900.000,00
- *Interoperability* dan Integrasi *Platform* Komunikasi *War Room* sebesar Rp9.200.000,00
- Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Data Citra Satelit Radar sebesar Rp4.990.222.955,00

Belanja Modal BLU

Rincian Belanja Modal BLU untuk *periode* yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.418.441.333,00 dan Rp696.182.140,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal BLU menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.40
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	396	61	15,40	251	191	76,10	(130)	(78,03)
Ditjen PB	891	880	98,77	0	0	0,00	880	100,00
BPPSDMKP	3.569	2.478	66,28	507	506	99,80	1.972	389,68
Total	**4.955**	**3.419**	**69,00**	**758**	**697**	**91,95**	**2.722**	**390,53**

Penjelasan atas Belanja Modal BLU pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan pengadaan berupa alat penghancur kertas, *air purifier*, dan lain-lain

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Merupakan pengadaan berupa sarana untuk kegiatan pelatihan, peralatan PTSP, pemasangan granit gedung *fishinggear*, rehab bangunan wisma jakadri, dan lain-lain.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

   Merupakan pengadaan berupa AC, pompa air, kursi, mesin proses agung, meubelair, *GPS Receiver*, alat pengolah data, dan lain-lain.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

C. PENJELASAN ATAS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1
Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	206.500	183.089.392	(182.882.892)	(99,89)
Kas di Bendahara Penerimaan	81.395.800	134.133.800	(52.738.000)	(39,32)
Kas Lainnya dan Setara Kas	498.649.923.126	596.623.965.997	(97.974.042.871)	(16,42)
Kas pada Badan Layanan Umum	82.779.623.470	99.618.238.623	(16.838.615.153)	(16,91)
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	132.950.000.000	-	132.950.000.000	100,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	1.956.588.205	35.738.647.201	(33.782.058.996)	(94,53)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	23.180.874.431	19.192.973.810	3.987.900.621	20,78
Piutang Bukan Pajak	67.169.976.498	80.895.833.124	(13.725.856.626)	(16,96)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(38.292.672.004)	(42.292.166.621)	3.999.494.617	(9,46)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	**13.258.441.634**	**38.603.666.503**	**(7.345.225.869)**	**(19,03)**
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	28.741.692.709	0	28.741.692.709	100,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(20.423.296.810)	0	(20.423.296.810)	100,00
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)	**8.322.395.891**	**0**	**8.322.395.891**	**100,00**
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional BLU	35.235.000	5.921.918	29.313.082	495,23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional BLU	(35.235.000)	(29.118)	(35.205.882)	120.940,00
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	**0**	**5.792.800**	**(5.792.800)**	**(100,00)**
Persediaan	91.244.681.819	77.917.222.047	13.327.376.742	17,04
Total	**736.340.960.856**	**841.742.865.432**	**(82.343.982.776)**	**(9,81)**

C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Saldo Kas di

Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp206.500,00 dan Rp182.819.395,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa kas uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) adalah sebagai berikut:

Tabel C.2
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Sisa Kas UP	206.500	6.462.696	(6.256.196)	(96,80)
Sisa Kas TUP	0	176.356.699	(176.356.699)	(100,00)
Total	**206.500**	**182.819.395**	**(182.612.895)**	**(99,89)**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.3
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah	Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah
1	Ditjen PT	206.500	0	206.500	500.000	0	500.000
2	Ditjen PDSKP	0	0	0	1.910.000	0	1.910.000
3	Ditjen PSDI	0	0	0	4.052.696	0	4.052.696
4	SKPD/UPT KP	0	0	0	0	176.356.699	176.356.699
Total		**206.500**	**0**	**206.500**	**6.462.696**	**176.356.699**	**182.819.395**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 hanya terdapat pada Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan sisa UP pada satker Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Sisa kas tersebut telah disetor ke kas negara tanggal 5 Januari 2024 dengan NTPN F197B1GCACGTUTPD.

Terdapat perbedaan saldo rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 antara data pada aplikasi SAKTI / LPJ Bendahara dengan data SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) Kementerian Keuangan sesuai dengan rincian dan penjelasan pada tabel berikut.

Tabel C.4
Rincian Perbedaan Data SPRINT Dengan Rekening Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Eselon I/ Nama Satker	Nomor Rekening	Nama Bank No Rekening	Saldo SPRINT	Saldo (SIAKTI / LPJ Bendahara)	Selisih	Keterangan/penjelasan atas perbedaan
1	BPPSDMKP Politek KP Kupang	8300011420913	Bank Mandiri BPN 889 Politeknis KP Kupang	0,83	0,00	0,83	Disebabkan oleh bunga bank pada tahun 2021 sebesar 1.17 1,83 diserahkan oleh bendahara sesuai 1.171 karena Modul Bendahara pada aplikasi Sakti tidak mengakomodir 2 [dua] angka dibelakang koma. SPJ Bendahara nol

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari sisa uang penerimaan negara bukan pajak yang belum sempat disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp61.395.000,00 dan Rp134.122.000,00.

Kas di Bendahara Penerimaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

Tabel C.5
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Pada Masing-Masing Satker
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Satker	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
PPN Ranoiapiapi	15.324.000	7.984.000	7.340.000	91,93
PPN Sungailiat	-	581.000	(581.000)	(100,00)
PPN Belawan	-	1.395.000	(1.395.000)	(100,00)
PPN Ternate	3.492.000	2.160.000	1.332.000	61,67
PPN Pelni	810.000	686.000	124.000	18,08
PPN Bromborg	7.009.000	1.544.000	5.464.000	353,89

Nama Satker	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
PPS Nizam Zachman	54.204.000	101.677.000	(47.473.000)	(46,67)
PPS Gorontalo	-	8.200.000	(8.200.000)	(100,00)
PPN Sibolga	-	220.000	(220.000)	(100,00)
PPN Ambon	-	210.000	(210.000)	(100,00)
PPN Kejawanan	78.000	9.498.000	(9.420.000)	(99,18)
PPS Bungus	159.000	-	159.000	100,00
PPN Pelabuhan Ratu	320.000	-	320.000	100,00
Total	**81.395.000**	**134.133.000**	**(52.738.000)**	**(39,31)**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan negara bukan pajak berupa jasa pas masuk pelabuhan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dalam bentuk uang tunai setelah jam operasional bank persepsi tutup pada akhir tahun 2023, sehingga uang tunai tersebut tidak dapat disetorkan langsung ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan tersebut baru dapat disetorkan ke kas negara pada tanggal 1 sampai dengan 7 Januari 2023. Pendapatan tersebut telah dibukukan tanggal 31 Desember 2023 dan disimpan dalam brankas Bendahara Penerimaan masing-masing satker.

Daftar rinci penyetoran saldo kas di Bendahara Penerimaan ke kas negara pada bulan Januari tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.6
Rincian Penyetoran Saldo Penerimaan Tahun 2023 Disetor Tahun 2024
Pada Ditjen Perikanan Tangkap

Nama Satker	NTPN	Tanggal Setor	Nilai Setoran	Jumlah
PPS Nizam Zachman	9C833224VPBMHBC0	2 Januari 2024	18.204.000	54.204.000
	72E252G4VPBVHB4	2 Januari 2024	23.015.000	
	D43D6B92E9E3382	2 Januari 2024	11.925.000	
PPN Pelabuhan Ratu	8F1D17QE4ON1D5Bc	2 Januari 2024	320.000	320.000
PPN Kejawanan	4367P91QV31B17A6	1 Januari 2024	78.000	78.000
PPN Prigi	3SDD12G4VPBNC5J6	2 Januari 2024	810.000	810.000
PPN Brondong	6AAF36DBE34J8PAN	2 Januari 2024	78.000	1.088.000
	888911JNPJMB8KAH	2 Januari 2024	90.000	
	2BA6136BE046J9PL1	2 Januari 2024	1.774.000	
	867C13CJFJK27QJV	2 Januari 2024	2.390.000	
	D7DF9Z5AVP8HGR58	2 Januari 2024	2.868.000	
PPS Bungus	5FD5455DP9814AA1	7 Januari 2024	56.000	159.000
	9CC9012NRUMPGA3N	7 Januari 2024	43.000	
	6A1246HHE74PS9CF	7 Januari 2024	60.000	

Nama Setter	NTPN	Tanggal Setor	Nilai Setoran	Jumlah
PPK Ternate	EC3E62G4VP0M2L0V	1 Januari 2024	1.446.000	3.492.000
	SDABBKBEQHLQEQB	2 Januari 2024	1.776.000	
	WE3E0NA0435TM3E0	2 Januari 2024	270.000	
PPK Karangantu	E3D33DMA043DMLDE	2 Januari 2024	6.744.000	15.324.000
	ER22A63QV5P94L6G	2 Januari 2024	8.580.000	
Total			**81.395.000**	**81.395.000**

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp481.649.921.126,00 dan Rp590.433.963.397,00.

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel C.7
Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	21.420.000	1.941.343	19.478.657	1.003,36
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	481.498.774.994	590.370.647.054	(108.871.872.060)	(18,44)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	1.400.000	(1.400.000)	(100,00)
Kas Lainnya di BGN	127.726.132	60.376.000	77.351.132	128,12
Total	**481.649.921.126**	**590.433.963.397**	**(108.784.042.271)**	**(18,42)**

Penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.1.3.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari Uang Persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan atau pajak yang belum disetor. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.420.000,00 dan Rp1.941.343,00.

Rincian saldo Kas di Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.8
Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	21.420.000	1.581.343	19.838.657	1.254,34
BP2SDMKP	0	360.000	(360.000)	(100,00)
Total	**21.420.000**	**1.941.343**	**19.478.657**	**1.003,56**

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan pajak atas honorarium narasumber tahun 2023 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara senilai Rp21.420.000,00. Pajak tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 2 dan 3 Mei 2024.

C.1.3.2 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp481.490.774.994,00 dan Rp590.370.647.054,00.

Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.9
Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	480.157.103.423	587.370.928.060	(107.113.825.637)	(18,24)
Ditjen PT	456.480.375	2.843.673.996	(2.387.193.621)	(77,38)
Ditjen PRL	883.191.199	0	883.191.199	100,00
BP2SDMKP	0	1.054.044.198	(1.054.044.198)	(100,00)
Total	**481.490.774.994**	**590.370.647.054**	**(108.879.872.060)**	**(18,44)**

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan saldo kas terhan proyek *Development of Fisheries Sector in Outer Islands* dari hibah ODA-Japan *International Cooperation Agency* (JICA) yang dicatat pada Biro Umum

dan PB). Hibah langsung Pemerintah Jepang melalui JICA untuk pembangunan 6 (enam) Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Biak dan Mua, yang dimulai dari tahun 2019 dan direncanakan selesai pada tahun 2026. 6 (enam) SKPT tersebut berada di bawah eselon I Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP.

Hibah tersebut diatas diberikan pada 2 (dua) fase yaitu sebagai berikut:

a. Fase I dengan sebesar ¥2.500.000,00 dengan nomor register hibah 2FMFRSSA, sesuai *Grant Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018;
b. Fase II dengan sebesar ¥3.000.000,00 dengan nomor register hibah 2CK4LTSA, sesuai *Grant Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2021.

Dana setiap fase ditempatkan rekening penyalur (dalam mata uang Yen Jepang) dan rekening penampung (dalam mata uang Rupiah Indonesia) yang berbeda. Rekening penampung adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menampung dana hibah dalam mata uang Yen Jepang, sedangkan rekening penyalur adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana Hibah yang berasal dari Rekening penampung.

Pada tanggal neraca 31 Desember 2022, kas dalam mata uang Yen Jepang disajikan dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan dasar kurs tengah 1¥=Rp117,57, dengan rincian saldo kas di K/L dari hibah per rekening adalah sebagai berikut:

Tabel C.10
Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening Pada Sekretariat Jenderal
Per 31 Desember 2022

No.	Jenis Rekening/Mata Uang/Nomor Rekening/Nama Rekening	Saldo Rekening Per 31 Des 2022	Kurs Tengah BI	Saldo Neraca Per 31 Des 2022 (dalam Rp)
FASE I (No. Register 2FMFRSSA)				
1	Rekening penampungan - JPY 1960690224 Sek Ditjen dan Pengelolaan Barang dan Jasa	JPY 1.000.000,000	117,57	117.570.594.501
2	Rekening penyalur - IDR 1960690104 Sek Ditjen dan Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp116.976.333,2 33		116.976.333.283
			Subtotal	**234.284.927.784**
FASE II (No. Register 2CK4LTSA)				
1	Rekening penampungan - JPY 1960690232 Sek Ditjen dan Pengelolaan Barang dan Jasa	3.000.003.043	117,57	352.718.801.126

No.	Jenis Rekening/Mata Uang/Kantor Rekening/Nama Rekening	Saldo Rekening Per 31 Des 2022	Kurs Tengah BI	Saldo Rupiah Per 31 Des 2022 (dalam Rp)
2	Rekening penyalur - IDR 1960019221 Ditjen Bina Marga dan Pengadaan Barang dan Jasa	0		0
			Subtotal	352.716.891.126
			TOTAL	587.270.928.860

Ringkasan mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah selama tahun 2023 dalam mata uang rupiah disajikan sebagai berikut dalam:

Tabel C.11
Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah JICA
Tahun 2023

No	Uraian		Jumlah
I	**Fase I (No. Register 2190035AA)**		
	Saldo Awal per 31 Desember 2022		234.554.927.734
	A Mutasi Tambah		2.007.960.490
	1 Pengesahan Pendapatan Tahun 2023 dari Rekening Rupiah	2.006.243.337	
	2 Pengesahan Pendapatan Tahun 2023 dari Rekening Yen (bunga dikonversi dengan kurs tengah BI 31 Des 2023, 1¥ = Rp110,93)	1.695.281	
	B Mutasi Barang		(62.291.686.363)
	1 Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah	(3.931.219.051)	
	2 Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	a atas saldo rekening Yen (¥3.049.654.969 x (117,57-109,21))	8.360.468.312	
	b atas bunga rekening Yen (¥8958 x (109,55-109,21))	3.344	
	Saldo Akhir per 31 Desember 2023		174.370.682.309
II	**Fase II (No. Register 2CK41T56)**		
	Saldo Awal per 31 Desember 2022		352.716.891.126
	A Mutasi Tambah		1.022.111.726
	1 Pengesahan Pendapatan Tahun 2023 dari Rekening Rupiah	1.019.699.053	
	2 Pengesahan Pendapatan Tahun 2023 dari Rekening Yen (bunga dikonversi dengan kurs tengah BI 31 Des 2023, 1¥ = Rp109,55)	2.412.677	
	B Mutasi Barang		(47.851.051.642)
	1 Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah	(23.673.210.690)	
	2 Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	a atas saldo rekening Yen (¥2.100.851.043 x (117,57 - 109,21))	(17.556.426.719)	
	b atas bunga rekening Yen (¥8958 x (109,55-109,21))	8.230	
	3 Selisih Kurs Terealisasi (¥900.000.000 x (117,57 - 109,1)	7.623.005.000	
	Saldo Akhir per 31 Desember 2023		305.486.581.212
	Total Saldo Rekening Fase I dan Fase II		480.157.163.421

Penjelasan dari mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Itihak adalah sebagai berikut:

a. Pengesahan pendapatan (bunga rekening) dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan Kurs Tengah BI per 31 Desember 2023, yaitu 1¥=Rp109,55, karena pada saat itu Bank Indonesia belum mengeluarkan Kurs Penutup 31 Desember 2023;

b. Pada tanggal 11 Mei 2023 dilakukan perpindahan dana keluar dari rekening Yen fase 2 sejumlah ¥900.000.000 dengan kurs BNI (*buy rate*) 1¥=Rp109,10, masuk ke rekening Rupiah fase 2 sejumlah Rp98.190.000.00,00;

c. Rincian atas Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah Fase I dan Fase II adalah sebagai berikut:

Tabel C.12
Ringkasan Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah Fase I dan II

No.	Uraian Pembayaran	SKPT / PPI	Nilai (Rp)	No. SP2HL
A	**Rekening 1960696241 (IDR) Fase I No Register 2FMFIC16A**		**53.915.214.011**	
1	Pekerjaan (jasa Konsultasi) Perencanaan Pekerjaan Proteksi Tiang Pancang Dermaga Tambahan di Kab. Biak Numfor	PPI Fasdik	96.813.000	09169
2	Pekerjaan Konstruksi Proteksi Tiang Pancang Dermaga Tambahan di Kab. Biak Numfor	PPI Fasdik	829.219.000	09169 & 09947
3	Jasa Konsultansi Uji Lingkungan (Termin 2)	SKPT Meos	205.313.300	09947
4	Pekerjaan Konstruksi Pasar Ikan Tradisi (Ujung Mulut)	SKPT Meos	3.207.186.800	09369
5	Paket Pekerjaan (jasa Konsultansi Perencana Pembangunan (Termin 1))	SKPT Meos	13.800.000	09169
6	Pengadaan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan pada (Ujung Mulut)	SKPT Meos	138.000.000	09369
7	Pekerjaan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan (Termin 1)	SKPT Meos	2.565.749.440	09947
8	Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Prasarana dan Sarana di Luar Kawasan Pelabuhan (Termin I)	SKPT Meos	110.400.000	09947
9	TC Perencanaan - pembangunan breker (Termin ii)	SKPT Saumlaki	75.227.800	09169
10	Pekerjaan Konstruksi FP (Darlaran (Termin 1)	SKPT Saumlaki	18.999.576.207	09019
11	Paket Jasa Konsultasi Konstruksi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Prasarana dan Sarana FP (Darlaran (Termin 1)	SKPT Saumlaki	457.700.000	09019
12	Jasa Konsultasi Konstruksi Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelabuhan Perikanan (Darlaran (Termin II)	SKPT Saumlaki	572.125.000	09947
13	Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Darlaran (Termin II)	SKPT Saumlaki	15.589.960.704	09019
14	TC Perencanaan DMEE (Termin I)	SKPT Saumlaki	13.800.000	09169
15	Pekerjaan Manajemen Konstruksi PT. Arsetek Arkindo (Termin 4,5,6)		1.851.535.000	09947
16	Pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan (Termin 4)	SKPT Wonreli	13.800.000	09169

No.	Uraian Pembayaran	SKPT / PPI	Nilai (Rp)	No. SP2HL
B	Rekening 1960690221 (IDR) Fase 2 No. Register 2C0142T5A		22.672.216.692	
1	Pekerjaan Konstruksi PP Tukar (Tiang Mulai)	SKPT Moa	5.999.327.900	09941
2	Pekerjaan Konstruksi PP Dasi Majbo (Tiang Mulai)	SKPT Morotai	16.672.888.792	08562
Total			74.681.433.743	

Beberapa progress pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dan ketentuan disbursement fase 1 dan 2 (*Policy Matrix and Disbursement Linked Indicators Phase 1 and 2*), yang seharusnya sudah selesai pada 31 Desember 2023, namun mengalami keterlambatan sehingga dilakukan *adendum*, yaitu pekerjaan pada:

- SKPT Moa
  i. Atas keterlambatan pekerjaan telah dilaksanakan Rapat Pembuktian / SCM 1 dengan memberikan masa uji coba tahap 1 s.d. 4 Februari 2024;
  ii. Berdasarkan rapat pemantauan tanggal 5 Februari 2024, uji Coba Tahap 1 dinyatakan GAGAL, penyedia hanya dapat mencapai progress 4,218% dari bobot realisasi yang diharapkan 38,159% (keterlambatan pekerjaan - 44,162%). Pengawas akan menerbitkan surat pernyataan bahwa uji coba pertama gagal dan PPK akan menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 1 dan selanjutnya diselenggarakankan SCM 2.
- *SKPT Morotai*
  i. Atas keterlambatan pekerjaan telah dilaksanakan Rapat Pembuktian / SCM 1 dengan memberikan masa uji coba tahap 1, s.d. Akhir Minggu ke 55 (26 Januari s.d. 23 Februari 2024);
  ii. Bobot realisasi yang diharapkan 48,159% dari rencana Progress 57,002% pada akhir masa uji coba tahap 1;
  iii. Pada tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan rapat pemantauan Uji Coba Tahap 1 dengan hasil s.d. M52 progress yang telah dicapai adalah 32,99% dari rencana 33,31% (keterlambatan pekerjaan -13,99%).

Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023, terdapat temuan pemeriksaan yaitu kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Konstruksi Proteksi Tiang Pancang Dermaga Tambahan PPI Fandoi di Kabupaten Biak Numfor senilai Rp133.813.000,00 yang sudah dikembalikan oleh pihak penyedia jasa ke Rekening RPL 140 Biro Umum dan PBJ Nomor 1960690243 (IDR) pada tanggal 23 April 2024.

d. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2022 tentang Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing, yaitu perhitungan konversi saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah berdasarkan saldo rekening per 31 Desember 2023 menggunakan kurs penutup 31 Desember 2023 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 1¥=Rp109,21 dan terhadap selisih kurs antara pencatatan per 31 Desember 2022 dengan per 31 Desember 2023, dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi dan beban selisih kurs terealisasi.

Saldo akhir Kas Hibah JICA dapat dirinci per rekening dalam mata uang Rupiah dan Yen Jepang yang dikonversi menjadi Rupiah Indonesia sebagai berikut:

Tabel C.13
Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening Pada Sekretariat Jenderal
Per 31 Desember 2023

No.	Jenis Rekening/Mata Uang/Nomor Rekening/Nama Rekening	Saldo Rekening Per 31 Des 2023	Kurs Penutup	Saldo Neraca Per 31 Des 2023 (dalam Rp)
PAGU I				
1	Rekening penampungan - JPY 1960098254 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.066.000	109,21	174.770.602.389
2	Rekening penyalur - IDR 1960098243 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	45.053.306.739		45.053.306.739
			Subtotal	174.770.602.389
PAGU II				
1	Rekening penampungan - JPY 1960098232 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.075.250	109,21	229.340.218.853
2	Rekening penyalur - IDR 1960098223 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	76.537.283.159		76.537.283.159
			Subtotal	305.886.501.312
			TOTAL	480.657.103.701

Terdapat perbedaan saldo Kas Lainnya di kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2023 antara Neraca dengan LPJ Bendahara yang merupakan akumulasi dari tahun 2022, disebabkan jurnal pengakuan atas beban selisih kurs belum terkoneksi dengan modul Bendahara pada aplikasi SAKTI. Terkait hal tersebut Kepala Biro Umum dan PBJ sudah bersurat kepada Direktur SITP Kementerian Keuangan dan belum mendapat penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Saldo Kas Hibah JICA per 31 Desember 2023 sebesar Rp480.157.103.421,00 akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan-pekerjaan konstruksi tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan *Grant Agreement*. Rencana dan progres fisik dari proyek *Development of Fisheries Sector in Outer Islands* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar C.1
Rencana Progress Fisik Pembangunan Proyek Hibah JICA
Sampai dengan Tahun 2024



2. Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan saldo kas terkait proyek *The Eco-System Approach to Fisheries Management* (EAFM) *in Eastern Indonesia dari hibah Global Environmental Facility* (GEF-6) pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Project GEF merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF-US GEF Agency. Program ini merupakan bagian dari program perikanan global yang disebut CFI (Coastal Fisheries Initiative) yang mencakup 3 wilayah geografi, yaitu Amerika Latin, Afrika Barat dan Indonesia. Dengan demikian, program ini memberi kesempatan kepada setiap negara di wilayah ini untuk saling berbagi pengetahuan, inovasi, pengalaman, dan pembelajaran dalam pengelolaan perikanan pantai. Hibah GEF-6 CFI untuk Indonesia ini diawali dengan penandatanganan *grant agreement* antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF-US GEF Agency pada tanggal 23 Desember 2019 serta telah didaftarkan sebagai hibah langsung barang dan jasa ke Kementerian Keuangan, dengan register No. 2QTS8A9A per tanggal 10 Februari 2020.

Dalam struktur pelaksanaan hibah, Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap bertindak sebagai *Executing Agency*, sedangkan WWF GEF *Agency* merupakan *Implementing Agency*. Dalam dokumen *grant agreement* kegiatan GEF ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025. Fuyuk Hibah ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Implementasi EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) di Indonesia Timur (*Area Manajemen Perikanan* (FMA) 715, 717 & 718), dimana dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi atas 3 komponen, yaitu :

a. Komponen A : Penerapan EAFM pada FMA 715,717 & 718, 04;
b. Komponen B : Penerapan Proyek Perbaikan Perikanan pada FMA 715,717,718; dan
c. Komponen D : Penerapan pengelolaan pengetahuan, Pengawasan dan Evaluasi perikanan pesisir yang berkelanjutan pada FMA 715, 717, 718.

Total Hibah yang Diterima (dalam bentuk uang) sebesar $7.375.690 atau Rp103.093.706.975,00 (Kurs 1 US$ = Rp13.977,50 tanggal 23 Desember 2019).

Jumlah hibah yang telah digunakan s.d tahun lalu (2022) adalah sebesar Rp20.711.124.000,00, sedangkan jumlah yang telah digunakan pada tahun ini (2023) adalah sebesar Rp22.752.719.712,00 yang terdiri dari saldo awal tahun 2023 sebesar Rp2.845.671.996,00 dan pendapatan hibah tahun berjalan sebesar Rp20.707.045.716,00, dari jumlah pagu hibah sebesar Rp22.752.719.712,00, telah disahkan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp22.302.239.337,00 secara bertahapan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.14
Rincian Mutasi Kas Hibah pada DJPT Tahun Anggaran 2023

Uraian			Nilai
Saldo Awal TA 2023			**2.845.671.996**
Mutasi Tambah:			**20.707.045.716**
-	Pendapatan Hibah Tahun 2023	20.707.045.716	
Dana Hibah TA 2023			**22.752.719.712**
Mutasi Kurang:			**(22.302.239.337)**
-	Pengesahan belanja No.SPBL 011597/238720/2023	2.045.273.000	
-	Pengesahan belanja No.SPBL 014977/238720/2023	7.326.969.470	
-	Pengesahan belanja No.SPBL 016697/238720/2023	5.648.765.867	
-	Pengesahan belanja No.SPBL 020837/238720/2023	6.723.206.962	
-	Pengesahan belanja No.SPBL 020867/238720/2023	338.761.000	
-	Pengesahan belanja No.SPBL 021097/238720/2023	219.462.038	
Saldo Akhir TA 2023			**450.480.371**

Sisa saldo sebesar Rp450.480.375,00 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

a. *Project Steering Comitee* GEF-6 dengan rencana anggaran biaya sebesar Rp150.00.000,00;
b. Monitoring pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP NRI) nomor 715, 717 dan 718 sebesar Rp300.480.375,00.

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan hibah luar negeri berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Consortium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari Unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP pada satker Pusat Riset Perikanan dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00.

Pemindahan pengelolaan kerja sama dikarenakan secara strategis projek kerja sama ini sangat relevan dengan tugas dan fungsi pada satker Direktorat Jasa Kelautan yang ada pada Unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan bangunan dan instalasi laut dan wisata bahari. Selain itu kegiatan ini mendukung kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi kawasan KZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca produksi sebagaimana tugas fungsi Ditjen PKRL.

Pada tahun 2023 terdapat pengesahan hibah langsung luar negeri untuk kegiatan pengembangan kebijakan *Rigs to Reefs* pada Direktorat Jasa Kelautan sebesar Rp179.853.000,00 sehingga sisa Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp883.191.198,00. Sisa Kas tersebut akan digunakan untuk kajian *Rigs to Reefs* dan monitoring dan evaluasi kajian yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

C.1.3.3 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.00 dan Rp1.000.000,00.

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dengan rincian pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.15
Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
BPSDM KP	0	1.000.000	(1.000.000)	(100,00)
Total	**0**	**1.000.000**	**(1.000.000)**	**(100,00)**

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP per 31 Desember 2022 merupakan pendapatan atas penjualan barang hasil kegiatan penyuluhan dan setoran biaya pendidikan.

C.1.3.4 Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU)

Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp137.726.132,00 dan Rp60.375.000,00.

Rincian saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.16
Rincian Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	77.340.831	60.375.000	17.165.831	28,43
Ditjen PB	30.000.001	0	30.000.001	100,00
BSDM KP	30.385.300	0	30.385.300	100,00
Total	**137.726.132**	**60.375.000**	**77.351.132**	**128,12**

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada Sekretariat Jenderal terdapat pada Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan setoran masuk pada rekening penerimaan untuk LPMUKP yang masih dalam proses

identifikasi debitur sejumlah dan kelebihan pembayaran proses oleh debitur yang pencairan dana bergulir dilakukan secara bertahap.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada satker BLUPPB Karawang yang merupakan pembayaran piutang PT Perindo (Persero) pada rekening dana kelolaan namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp30.000.000. Kas tersebut sudah disetor tanggal 2 Januari 2024 dengan NTPN 112325SDF8VSN0HD. Selain itu. Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) juga merupakan selisih Rp1.00 yang disebabkan kekurangan pembayaran belanja dan sudah disetorkan ke pihak ketiga tersebut pada tanggal 2 Januari 2024.

3. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP

   Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP terdapat pada satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal yang merupakan uang muka pelatihan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp24.399.000,00 dan terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP tahun 2023 terdapat temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yaitu kelebihan belanja pegawai tahun 2021 dan 2022 senilai Rp5.786.300,00 yang masih ada di brankas bendahara pengeluaran dan belum dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2023. Atas temuan pemeriksaan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 20 Februari 2024 dengan NTPN 0EA184HVVEH15CSM dan D70C648VVEH1SEBJ.

C.1.4 Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi bersih pengesahan pendapatan PNBP BLU dan belanja BLU yang bersumber dari PNBP. Saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.779.421.970,00 dan Rp99.618.258.421,00.

Rincian saldo Kas Lainnya Pada Layanan Umum pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.17
Rincian Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	14.569.316.359	97.799.281.648	(83.229.965.289)	(85,10)

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
DJPB	13.966.932.770	0	13.966.932.770	100,00
BRSDM KP	2.245.172.855	1.818.976.775	424.196.080	23,32
Total	**38.779.421.970**	**99.618.258.421**	**(60.838.836.451)**	**(69,10)**

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum mayoritas tersimpan dalam beberapa rekening yang secara umum fungsinya sebagai penampung penerimaan dan pengeluaran. Saldo Kas dan Bank BLU pada masing-masing unit Eselon I per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Terdapat pada BLU LPMUKP sebesar Rp14.569.316.359,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Terdapat pada BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara sebesar Rp1.839.456.096,00; BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang sebesar Rp9.620.209.550,00; dan BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo sebesar Rp2.707.107.172,00.

3. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP

   Terdapat pada BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPP) Tegal sebesar Rp963.979.677,00 dan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politek KP) Sidoarjo sebesar Rp1.279.193.156,00.

Rincian Saldo Kas pada BLU per rekening bank per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah berikut ini:

Tabel C.10
Rincian Saldo Rekening Operasional BLU
Per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Nama Bank	Peruntukan	Saldo	
			31 Des 2023	31 Des 2022
Sekretariat Jenderal			**14.714.971.855**	**97.845.231.645**
Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP			**14.714.971.855**	**97.845.231.645**
1	Bank Negara Indonesia	Rekening Operasional Penerimaan	13.537.659.317	14.362.788.243
2	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Penerimaan	1.177.312.538	8.483.043.302
3	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Pengeluaran	0	0
4	Deposito		0	75.000.000.000
Ditjen Perikanan Budi Daya			**13.996.932.782**	**0**
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang			**9.650.209.551**	**0**
1	Bank Jawa Barat	Rekening Operasional Penerimaan 1	9.620.209.551	0

No.	Nama Bank	Peruntukan	Saldo	
			31 Des 2023	31 Des 2022
	E HP HE	b HW HY B		
	E HP HE	b HYRK		
	E HP HE	b HJ HR		
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara			**1.639.456.098**	**0**
	E Hl HJ	b HW B		
	E Hl HJ	b HW B		B
	E Hl HJ	b HYRK		
	E Hl HJ	b HJ HR		
Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo			**2.707.187.133**	**0**
	E HT	b HW HY		
	E HT	b HW HY		
	E HT	b HJ HR	B	
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP			**2.267.571.834**	**3.399.152.929**
Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal			**988.378.677**	**2.002.987.939**
	E Hl HJ	b HJ HR		
	E Hl HJ	b HY HR HESe		
	E Hl HJ	b HW HY		
	E Hl HJ	b HW HY B E Hb		
	E Hl HJ	b HW HY		
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo			**1.279.193.157**	**1.396.164.990**
	E HT	b HW HJ HR		
	E HT	b HY HR HESe		
	E HT	b HW HY		
	E HT	b HY		
Total			**30.979.476.471**	**101.244.384.574**

Pada periode Triwulan III tahun 2023, pencatatan terhadap penempatan deposito dana *idle* yang bersumber dari Kas pada BLU dan jangka waktu minimal 3 bulan, dipindahbuku ke akun Invetasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum. Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo rekening operasional per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel C.19
Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca dengan Saldo Rekening BLU per 31 Desember 2023

No	Badan Layanan Umum	Neraca 31 Des 2023			Saldo Rekening Bank Per 31 Des 2023	Selisih
		Kas Pada BLU	Kas Lainnya	Total		
	SYT e RY					B
	EY B					
	Y BRY					
	ESe YYE B		B			
	EEYEDYB					B
	EYEDY					B
Total		**30.779.421.970**	**137.726.132**	**30.917.148.102**	**30.979.476.471**	**62.328.369**

Y B B B B B B B Se B

B B

1. Pada BLU LPMUKP, saldo rekening operasional lebih besar Rp68.114.665 dibandingkan saldo Kas dan Bank BLU dan Kas Lainnya di BLU, merupakan Angsuran pokok yang ada di rekening operasional disebabkan kesalahan transfer oleh Debitur sejumlah Rp68.114.665,00 dan sampai 31 Desember 2023 belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening dana kelolaan. Sudah dipindah ke rekening dana kelolaan pada tanggal 22 Januari 2024.
2. Pada BLU Poltek KP Sidoarjo, BLU BBPBAP Jepara DAN BLU BPBAP Situbondo terdapat selisih masing-masing Rp1, Rp2 dan Rp1 disebabkan pembulatan perhitungan pada rekening operasional.
3. Pada BLU BP3 Tegal, saldo rekening lebih kecil Rp5.786.300,00 dibandingkan saldo Kas dan Bank BLU dan Kas Lainnya di BLU pada Neraca, disebabkan terdapat Kas Lainnya di BLU dalam bentuk uang tunai yang disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran.

b B Se B B B B B B B B

B B B B B

B B B B B B B B B B B B

Tabel C.20
Rincian Perbedaan Data SPRINT Dengan Rekening Pada Setiap Satker BLU Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Eselon I/ Nama Satker	Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening	Saldo SPRINT	Saldo (SAKTI / LPJ Bendahara)	Selisih	Keterangan/ Penjelasan atas perbedaan
I	**Sekretariat Jenderal**					
	ESe SYT e RY	E B EUO				b B B Y E Se B

No	Eselon I/ Nama Satker	Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening	Saldo SPRINT	Saldo (SAKTI / LPJ Bendahara)	Selisih	Keterangan/ Penjelasan atas perbedaan
		bYS W ESe SYT e RY				SYT e RY B B cYbOJdB B B B B B J B
	ESe SYT e RY	E B EbO bYS B W B ES SYT e RY				
	ESe SYT e RY	E B EbO bYSB ESe B SYT e RY e Ude RB WYcBY			B E	b BW B Y ESe B SYT e RY B B B cYbOJdB B B B B B J B
II	**Ditjen Perikanan Budi Daya**					
	ESe ESe YYEB R	EYJ BP E bYSB ESe B ESe YYEBRbg B edRBWYcB				b BW B ESe ESe YYE B B BcYbOJdB B B B B B J B
	ESe ESe YYEB R	EYJ BP E bYSB ESe B ESe YYEBRbg B edRBWYcB				b BW B ESe YYE B B B B B B ESe BB B B BJ B B B B B B B B
	ESe ESe YYEB R	EYJ BP E bYSB ESe B ESe YYRBRbg B edRBJ R				b ESe YYEB BJ BR B B BcYbOJdB B B B B B J B
III	**Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP**					
	ESe BY B RYBc	E ET bYSB ESe B YWSdKRBRYBcJ DB edRBWYcB YKUKbOT DDU				b BW B Y BY BRYB c B B B cYbOJdB B B B B B J B

No	Eselon I/ Nama Satker	Nama Bank Nomor Rekening Nama Rekening	Saldo SPRINT	Saldo (SAKTI / LPJ Bendahara)	Selisih	Keterangan/ Penjelasan atas perbedaan
	ESeBY B RYEc	E EF bYSB EESeB YWSdKREYEcJ DB edRBJ R				b BJ B R EESe B B B B B B B B B B B B B B B BJ B B B B B B B

C.1.5 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum

O BP BY B BEB BB BB B B B

B BB B B B B BB B BESe B c B

O BP BY B BB BBBB BJ Be B BBBJ

B Bb B Bb

b B B O BP BY B Be BE BB B B

Tabel C.21
Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
c	B	B	B	B
EbcJ T BRY	B	B	B	B
Total	**110.950.000.000**	**0**	**110.950.000.000**	**100,00**

J B B B B B B B B

Tabel C.22
Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Nama Bank	Jangka Waktu	Nominal	Bunga
Sekretariat Jenderal			**107.000.000.000**	
Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP			**107.000.000.000**	
	EbO	BE		
	EDURBJ RO	BE		
	EDUREBEBEc	BE		
	EDUREBEBEc	BE		
	EDUREBEBEc	BE		

No.	Nama Bank	Jangka Waktu	Nominal	Bunga
	EDURHEHEHc	HE		
	EDURHEHEHc	HE		
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP			**3.950.000.000**	
Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal			**3.350.000.000**	
	E Hd HU	B		
	E Hd HU	B		
	E Hd HU	B		
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo			**600.000.000**	
	E HT	B	H	
Total			**110.950.000.000**	

C.1.6 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

E HJ HJ B B B B B B B B B B

BB HB BB B HB HB B B

B Hc HE HJ HJ BY B B HJ B B B B

J B B B B b B Hb

b B HE HJ HJ B *Prepaid* B B B B B

Tabel C.23
Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
E HE B HJ B J B *Prepaid*	B	B	B	B
E HT B HJ B J B *Prepaid*	B	B		
Total	**1.856.560.265**	**35.738.647.201**	**(33.882.086.936)**	**(94,81)**

Y HE HJ HJ B *Prepaid* B B B B B B

C.1.6.1 Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

c B E HE HB HJ HJ *Prepaid* B HJ HB B B HJ B

B B B b B Hb

b B HE HE HJ HJ B *Prepaid* B B B HK HCB

B B

Tabel C.24
Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PB	332.816.000	0	332.816.000	100,00
Ditjen PSDKP	224.264.382	218.197.915	10.066.467	4,70
Ditjen PNBL	548.385.702	346.435.000	201.950.702	122,53
BP2SDM KP	616.441.447	401.037.500	215.403.167	53,71
BPSMI KP	134.652.234	471.260.166	(336.607.932)	(71,55)
Total	**1.856.560.265**	**1.334.930.581**	**521.629.684**	**39,08**

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Belanja Barang Dibayar dimuka pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp332.816.000,00 merupakan temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP tahun 2023 berupa belanja bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada program PITAP melalui mekanisme swakelola yang belum lengkap dokumen pertanggungjawabannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Tim Itjen telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian bukti dukung pertanggungjawaban sehingga terkoreksi nilai temuan menjadi Rp332.816.000,00.

2. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

   Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 5 (lima) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Pangkalan PSDKP Lampulo

      Merupakan sewa gedung satuan pengawas Aceh Barat sebesar Rp1.2500.000,00 dan satuan pengawas Aceh Selatan sebesar Rp1.237.500,00.

   b. Stasiun PSDKP Belawan

      Merupakan sewa gedung di Batuhora sebesar Rp4.810.750,00; sewa kantor Panjahan sebesar Rp1.583.333,00; dan sewa gudang sebesar Rp4.125.000,00.

c. Stasiun PSDKP Ambon

Merupakan sewa gedung arsip sebesar Rp7.333.333,00; sewa gudang barang bukti sebesar Rp12.500.000,00; dan sewa kantor wilayah kerja Maoshi sebesar Rp9.333.333,00.

d. Pangkalan PSDKP Benoa

Merupakan sewa kantor pelayanan pimpinan sebesar Rp49.416.666,00; sewa gudang sebesar Rp30.000.000,00; sewa kantor pelayanan operasional sebesar Rp29.166.667,00; sewa kantor pelayanan umum sebesar Rp29.166.667,00; dan sewa kantor pelayanan operasional sarana dan prasarana sebesar Rp30.000.000,00.

e. Pangkalan PSDKP Batam

Merupakan sewa pos bangunan untuk pos pelayanan sebesar Rp4.818.750,00.

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut:

a. Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan sewa ruang arsip sebesar Rp182.641.250,00 dan temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP tahun 2023 berupa belanja bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda melalui mekanisme reakehila yang belum lengkap dokumen pertanggungjawabannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada kegiatan penanaman vegetasi pantai di Aceh Besar sebesar Rp7.830.000,00 dan bantuan pengembangan pesisir tanggoh di Lampung Selatan sebesar Rp18.535.232,00. Angka koreksi final merupakan hasil verifikasi oleh Itjen terhadap kelengkapan dan kesesuaian bukti dukung pertanggungjawaban.

b. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak

Merupakan biaya sewa kendaraan operasional sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp117.540.000,00 dan sewa kantor di 5 (lima) wilayah kerja sebesar Rp47.214.167,00.

c. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang

Merupakan sewa kendaraan operasional sebesar Rp61.139.300,00 dan sewa kantor wilayah kerja di Semarang, Yogyakarta, Lampung dan Bangka Belitung sebesar Rp113.483.333,00.

4. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP

Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP hanya terdapat pada satker Sekretariat Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP yang

merupakan biaya pendidikan peserta tugas belajar periode Januari dan Februari 2024 yang dibayarkan oleh peserta didik tahun 2023.

5. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada 10 (sepuluh) satker yaitu sebagai berikut:

a. Balai KIPM Surabaya I

Merupakan sewa rumah untuk kantor wilayah kerja Banyuwangi sebesar Rp18.750.000,00 dan sewa rumah untuk kantor wilayah kerja Malang sebesar Rp4.125.000,00.

b. Balkin KIPM Medan I

Merupakan sewa rumah untuk wilayah kerja Sibolga sebesar Rp10.416.665,00 dan sewa rumah dinas sebesar Rp7.500.000,00.

c. Stasiun KIPM Medan II

Merupakan biaya sewa wilayah kerja Nias sebesar Rp2.500.000,00.

d. Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan

Merupakan biaya sewa wilayah kerja Kuala Tanjung sebesar Rp2.916.000,00.

e. Balai KIPM Lampung

Merupakan sewa gudang arsip sebesar Rp7.500.000,00.

f. Stasiun KIPM Pontianak

Merupakan sewa kantor wilayah kerja pelabuhan Dwikora sebesar Rp20.750.000,00.

g. Balai KIPM Balikpapan

Merupakan sewa kantor wilayah kerja Berau sebesar Rp22.916.667,00.

h. Balai Besar KIPM Makassar

Merupakan biaya sewa wilayah kerja pelabuhan penyeberangan Bungsala'e Siwa sebesar Rp7.500.000,00.

i. Balai KIPM Denpasar

Merupakan sewa biaya sewa wilayah kerja Padang Bai dan sewa tempat pemeriksaan ikan sebesar Rp19.661.235,00.

j. Balai KIPM Tarakan

Merupakan sewa kendaraan dinas sebesar Rp.6.079.167,00 dan sewa kantor wilayah kerja Tanjung Selor sebesar Rp3.237.300,00.

C.1.6.2 Belanja Modal Yang Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Modal Yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp34.403.716.620,00. Saldo Belanja Modal Yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya yang merupakan pembayaran pelunasan pekerjaan pembangunan Budidaya Ulang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih dalam proses penyelesaian.

C.1.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Berdasarkan perhitungan secara akuntansi, yang sudah menjadi hak pemerintah tersebut dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima dan diakui sebagai pendapatan di periode berjalan. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.106.014.631,00 dan Rp19.118.371.810,00.

Rincian saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.25
Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	1.275.611.868	1.292.201.118	(16.589.250)	(1,28)
Ditjen PT	19.813.818.883	15.929.781.799	3.884.037.084	24,38
BPSDM KP	2.016.583.960	1.896.388.893	120.195.067	6,34
Total	**23.106.014.631**	**19.118.371.810**	**3.987.642.821**	**20,86**

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker BLU LPMUKP yang merupakan:

   a. Bunga penempatan deposito pada BLU LPMUKP yang sudah menjadi hak BLU LPMUKP sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo sebesar

Rp764.520.541,00. Penempatan deposito tersebut berasal dari dana menganggur (*idle cash*) dari Kas BLU (Investasi Jangka Pendek - BLU) dan Dana Kelolaan BLU;

b. Pendapatan jasa layanan yang sudah menjadi hak BLU LPMUKP sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo. Pendapatan tersebut dihitung secara proporsional selama 6 (enam) hari dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp511.091.327,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 21 (dua puluh satu) satker yaitu sebagai berikut:

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan nilai PNBP Pasca Produksi yang dihitung dari pendaratan ikan yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan sebelum 31 desember 2023, sementara itu kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan yang telah didaratkan tersebut belum kembali ke pelabuhan pangkalan pada tanggal 31 desember 2023, sehingga nilai PNBP Pasca Produksinya 92 belum dapat ditagihkan kepada pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan dengan total nilai Rp745.429.469.

b. Pelabuhan Perikanan Samudar Nizam Zachman

Merupakan pendapatan jasa tambat dan labuh serta kebersihan kolam kapal-kapal perikanan yang masih berada di kolam pelabuhan hingga 31 tahun 2023 sebesar Rp17.564.148.385,00. Terdapat kenaikan yang sangat signifikan yang disebabkan oleh pengakuan atas temuan BPK menjadi PYMHD sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LK tahun 2023. PPS Nizam Zachman Jakarta melakukan rekonsiliasi PYMHD senilai Rp3.606.961.957,00 kepada pemilik/pengurus/nakhoda kapal, namun demikian hasil rekon tersebut belum tercatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan 31 Desember 2022. Selanjutnya pada penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2023 yang sedang berjalan PPS Nizam Zachman mengajukan nilai PYMHD tersebut menjadi semula Rp3.606.961.957,00 menjadi Rp3.792.200.607,00.

Perubahan semula menjadi tersebut disebabkan oleh:

- Berdasarkan data aktivitas kapal per 31 Desember 2023, masih terdapat 9 unit kapal yang tercatat sebagai PYMHD 2021 masih 8 unit masih berada dikolam dalam kondisi rusak berat dan tidak operasional dan 1 unit telah beraktifitas yaitu Kapal Hasil Laut 8;
- Terdapat selisih perhitungan penetapan PYMHD dari Rp371.481.810,00 menjadi Rp21.464.217,00. Selisih perhitungan tersebut terjadi karena adanya klarifikasi

dari pemilik kapal yang didukung dengan dokumen aktifitas kapal yang menyatakan ke lima kapal sudah tidak berada dalam kolam per 31 Desember 2021. Terhadap setiap perhitungan senilai Rp21.464.217,00 telah dilakukan pembayaran atas nama kapal Samudera Deli dengan NTPN 805A540IVVS1G0HRM.

- Berdasarkan dokumen aktifitas kapal hasil klarifikasi dengan pemilik kapal diketahui dari data awal 16 kapal yang berada di kolam pelabuhan per 31 desember 2021, dinyatakan hanya 3 kapal yang berada di kolam pelabuhan, dan telah ada pembayaran atas nama Kapal Tri Wijaya Makmur senilai Rp23.342.250, sehingga PYMHD terhitung menjadi Rp64.493.743.

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Merupakan jasa tambat labuh dan biaya kebersihan kolam hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp698.728.790,00.

d. PPN Brondong

Merupakan jasa tambat labuh hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp20.064.296,00. Dari saldo PYMHD per 31 Desember 2022 sebesar Rp325.600,00 telah direklasifikasi menjadi piutang atas tagihan sewa kapal keruk yang belum dibayarkan dan telah diserahkan ke PUPN.

e. Satker Lainnya

Merupakan jasa tambat labuh, biaya kebersihan kolam, penggunaan sarana dan prasarana sesuai fusi (listrik, air dan lain-lain) yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar pada 16 satuan kerja sebesar Rp809.512.428,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 5 (lima) satker yaitu sebagai berikut:

a. Pusat Riset Perikanan

Merupakan temuan pemeriksaan atas LK KKP Tahun 2019 yaitu kelebihan pembayaran rancang dan bangun (*design and build*) pekerjaan pembangunan *Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute* (PIAMARI) yang dilaksanakan oleh KSO PT Pangkhi Megah – PT Daya Cipta Dianrancana sebesar Rp1.896.308.893,00. Kelebihan pembayaran tersebut dicatat sebagai PYMHD karena tidak terdapat dokumen pengakuan piutang (antara lain berupa namun tidak terbatas pada kesepakatan jumlah kelebihan pembayaran, surat keterangan tanggung jawab mutlak dan lain-lain) yang disertai jaminan pembayaran. Atas kelebihan pembayaran tersebut KKP telah menerbitkan 4 (empat) kali surat teguran kepada KSO PT Pangkho

Megah - PT Daya Cipta Dianrancana. Karena tidak ada itikad baik dari KSO PT Pangkho Megah – PT Daya Cipta Dianrancana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada negara, melalui surat nomor B.4567/BRSDM.1/KU.420/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 penagihan kelebihan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN). Pada tahun 2023 dilakukan mediasi antara PUPN dengan KSO PT Pangkho Megah – PT Daya Cipta dan tidak membuahkan hasil. PUPN akan melakukan proses penagihan lebih lanjut terhadap PT Pangkho Megah - PT Daya Cipta.

b. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal (BP3 Tegal)
Merupakan perhitungan terhadap bunga penempatan Deposito yang sudah menjadi hak BLU BP3 Tegal sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo sebesar Rp10.021.917,00; dan pengakuan pendapatan kompensasi tetap KSO pemanfaatan aquarium Indonesia periode 1 November sampai dengan 31 Desember 2023 belum jatuh tempo sebesar Rp64.153.537,00.

c. Politeknik KP Sidoarjo
Merupakan pendapatan sewa gudang beku (*cold storage*) sebesar Rp16.587.187,00; perhitungan terhadap bunga penempatan Deposito yang sudah menjadi hak BLU Politeknik KP Sidoarjo sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo sebesar Rp1.146.575,00; dan pendapatan sewa dapur tahun 2023 sebesar Rp5.705.950,00.

d. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan (BP3 Medan)
Merupakan pendapatan pelatihan *basic safety training* (beserta sewa asrama, ruang kelas dan sewa aula) periode November 2023 sebesar Rp20.950.000,00 namun sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dibayarkan.

e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Lampung
Merupakan kesalahan catat atas pengakuan kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2023 sebesar Rp1.630.401,00.

C.1.8 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.
Piutang diakui apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai ketetapan hukum tetap.
2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah sebagai berikut:

Tabel C.26
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada pantia urusan piutang negara (PUPN) Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.500.916.430,00 dan Rp60.895.032.124,00.

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.27
Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kuasa Akun / Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	**32.227.960.374**	**51.489.971.861**	**(19.262.071.487)**	**(37,41)**
Setjen	0	17.261.074.458	(17.261.074.458)	(100,00)
Ditjen PT	28.968.451.855	30.629.267.829	(2.229.916.826)	(7,28)
Ditjen PB	230.440.000	350.080.000	(119.640.000)	(34,16)
Ditjen PSDKP	194.392.000	288.982.997	(94.680.997)	(32,98)
Ditjen PDSPKP	892.346.519	740.248.678	152.097.841	20,54
Ditjen PKRL	2.098.703.328	2.214.487.796	(44.095.582)	7,28
BP2SDM KP	176.427.000	36.390.203	144.067.247	418,81
Piutang Lainnya	**13.271.016.064**	**9.403.860.263**	**3.867.155.801**	**41,28**
Setjen	376.746.636	273.471.981	103.274.655	38,86
Kkp	23.879.250	97.003.383	(73.503.133)	(75,79)
Ditjen PT	6.824.705.512	3.922.099.118	4.202.606.394	234,26
Ditjen PB	1.433.793.809	4.173.134.858	(2.739.342.049)	(65,64)
Ditjen PSDKP	1.357.116.095	275.986.579	1.081.129.516	391,73
Ditjen PDSPKP	424.636.873	713.864.821	(289.228.748)	(40,52)
Ditjen PKRL	451.695.122	776.285.246	(324.590.124)	(41,81)
BP2SDM KP	4.887.286.195	945.913.821	3.941.434.360	374,60
BP3MKP	89.805.772	26.346.438	63.461.334	240,94
Total	**47.500.976.438**	**60.893.832.124**	**(13.394.955.686)**	**(22,00)**

Penjelasan Piutang Bukan Pajak per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.1.8.1 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penjelasan rinci atas saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan piutang dari operasional BLU yang merupakan akumulasi tunggakan jasa layanan debitur yang telah jatuh tempo namun hingga akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan. Pada periode pelaporan tahun 2023 pencatatan Piutang PNBP satker BLU LPMUKP dipindah ke akun Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 8 (delapan) satker yaitu sebagai berikut:

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

- Piutang atas tunggakan pungutan hasil perikanan (PHP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai LHP Nomor 39/LHP/XVII/11/2013 tanggal 19 November 2013 yang disebabkan penyesuaian harga patokan ikan pada peraturan Menteri Perdagangan nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 sebesar Rp28.876.531.364,00 yang berasal dari 1.070 (seribu tujuh puluh delapan) kapal di atas 30 GT milik 590 (lima ratus sembilan puluh delapan) perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2023 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp12.568.380.255,90, sehingga saldo piutang PHP per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.308.151.108,10. Piutang ini diklasifikasikan sebagai piutang macet karena setelah dilakukan penagihan lebih dari 3 (tiga) kali terhadap 1.051 (seribu lima puluh satu) kapal milik 292 (dua ratus sembilan puluh dua) perusahaan penunggak pungutan hasil perikanan sampai 31 Desember 2023 belum melunasi kewajibannya dan sudah disisihkan 100% sebagai piutang tidak tertagih;
- Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI eks satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambraw sebesar Rp3.015.000,00.

b. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman

Merupakan piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam, serta piutang atas tagihan jasa listrik, jasa gedung bangunan dan jasa kebersihan yang berasal dari LHA Itjen, LHP BPK dan Piutang PNBP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.28
Rincian saldo Piutang PNBP pada PPS Nizam Zachman
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
LHA Itjen 2022 (Periode Aktivitas 2019-2020)	503.077.626	1.197.947.636
Piutang sen tambat 2021	45.720.000	86.175.600
LHP BPK RI 2021 (22M) (Periode Aktivitas 2019-2020)	62.073.990	549.679.755
LHP BPK RI 2021 (18T3) (Periode Aktivitas 2021)	-	36.282.750
Rekomendasi BPK RI Periode 2022	-	212.574.664
Piutang Inerk 2022	-	2.513.793
Piutang tambat atas kapal yang dibayar dengan [illegible]	79.739.000	-

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Jumlah	691.210.816	2.885.074.088

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu

Merupakan piutang atas penggunaan listrik dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.050.278,00.

d. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam PT Harenda Ocean Industries sebesar Rp14.070.311.650,00. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada PUPN. Adapun penyerahannya melalui 2 (dua) tahap. Penyerahan pertama sebesar Rp11.914.580.846,00 pada tanggal 18 Februari 2018 dan penyerahan kedua sebesar Rp2.155.730.804,00 pada tanggal 4 Februari 2019. Sampai dengan 31 Desember 2023 piutang yang disetor ke kas negara merupai Rp3.199.999.994,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.870.311.656,00.

e. Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus

Merupakan piutang atas jasa tambat labuh Puskopal II sebesar Rp205.227.550,00. Atas piutang tersebut Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus telah melakukan penagihan lebih dari 3 (tiga) kali namun sampai dengan per 31 Desember 2023 belum ada pembayaran dari Puskopal II.

f. Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari

Merupakan piutang atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi di PP Untia sebesar Rp41.781.934,00 dan piutang atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah dilimpahkan ke PUPN dan baru dicatatat sebagai piutang pada tahun 2023 sebesar Rp11.509.294,00.

g. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan piutang atas jasa kebersihan Kawasan yang sudah jatuh tempo sebesar Rp440.000,00.

h. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Merupakan piutang atas jasa pelabuhan perikanan berupa tambat labuh, kebersihan kolam dan lain-lain sebesar Rp198.227.437,00.

i. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Merupakan piutang atas penggunaan sarana dan prasarana yang sudah jatuh tempo sebesar Rp15.800.709,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut:

a. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

Merupakan piutang atas penggunaan lahan tambak intensif oleh Perum Perindo pada satker BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang sebesar Rp350.000.000,00. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada PUPN. Adapun penyerahannya melalui 2 (dua) tahap, penyerahan pertama pada tanggal 31 Mei 2023 dan penyerahan kedua pada tanggal 6 Juli 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023 piutang yang disetor ke kas negara sebesar Rp120.000.000,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp230.000.000,00.

b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

Merupakan piutang kekurangan pembayaran penggunaan wisma sebesar Rp440.000,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

a. Merupakan tunggakan denda administratif pelanggaran tidak menyampaikan data pemantauan secara terus menerus kepada Pusat Pengendali Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atas nama PT Sisfo Indonesia sebesar Rp258.000.000,00 berdasarkan Surat Penetapan Ditjen PSDKP Nomor B.723/DJPSDKP/IX/2022 tanggal 23 September 2022. Ditjen PSDKP telah mengirimkan 2 surat penagihan, yang terakhir Surat Ditjen PSDKP nomor 129/IDPA.1-PSDKP/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal penagihan denda pokok ditambah dengan dwangsom 4% dengan total estimasi piutang PNBP PT Sisfo Indonesia sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp268.320.000,00.

Mutasi Piutang dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.29
Mutasi Piutang PT Sisfo Indonesia
Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2023

Keterangan		Nilai Piutang
Saldo piutang per 31 Desember 2022		268.320.000
Ditambah: Denda Keterlambatan awal tahun 2023	5.160.000	273.480.000
Dikurang : Pembayaran Februari s.d Juni 2023	(78.480.000)	195.000.000

Kemudian atas saldo piutang Rp195.000.000,00 diberikan keringanan berupa skema pembayaran atas pokok piutang beserta denda (dieongsom) per bulan sebagai berikut:

Tabel C.30
Skema Pelunasan Piutang PT Sisfo Indonesia
Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2023

Bulan	Angsuran Pokok Piutang	Denda (Dwangsom)	Total
Juli	30.000.000	7.800.000	37.800.000
Juli	30.000.000	7.800.000	37.800.000
Agustus	32.000.000	8.320.000	40.320.000
September	33.000.000	3.300.000	36.300.000
Oktober	35.000.000	9.100.000	44.100.000
November	35.000.000	-	35.000.000
Total	**195.000.000**	**36.400.000**	**231.400.000**

Selanjutnya mutasi Piutang dari bulan Juli sampai dengan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.31
Mutasi Piutang PT Sisfo Indonesia
Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2023

Keterangan		Sisa Piutang
Saldo piutang per 30 Juni 2023		195.000.000
Ditambah: Skema	36.400.000	231.400.000
Dikurang: Pembayaran Juli sd Desember 2023	(70.000.000)	161.400.000
Saldo piutang per 31 Desember 2023		**161.400.000**

b. Merupakan denda administratif yang dikenakan kepada PT. Masyarakat Usaha Kami sesuai dengan Surat Penetapan Denda Administratif pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp22.902.000,00. Atas denda tersebut telah dilakukan pembayaran oleh wajib bayar pada tanggal 4 Januari 2024.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan piutang atas kontribusi tetap (tahun 2024) dari perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Surya Mina Asimasa dengan jangka waktu 30 tahun, dan dicatat pada satuan kerja Sekretariat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.380.703.328,00.

h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Merupakan merupakan piutang atas pemanfaatan lahan dengan cara sewa selama 2 (dua) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan sebesar Rp179.457.500,00 yang belum diterima per 31 Desember 2023.

C.1.8.2 Piutang Lainnya

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
   a. Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan PNS bulan Desember 2023 sebesar Rp29.395.400,00;
   b. Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS bulan Desember 2023 sebesar Rp2.959.748,00;
   c. Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan PPPK bulan Desember 2023 sebesar Rp2.142.050,00;
   d. Piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PPPK bulan Desember 2023 sebesar Rp226.373,00;
   e. Piutang atas koreksi pembayaran belanja barang yang dibayar dengan pertanggungjawaban TUP sebesar Rp12.997.000,00;
   f. Piutang atas kelebihan pembayaran pompa sebesar Rp2.057.000,00;
   g. Piutang atas koreksi pembayaran honorarium dan perjalanan dinas sebesar Rp5.666.980,00;
   h. Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2023, terdapat temuan berupa:
      - kelebihan pembayaran 4 (empat) Paket Pekerjaan Belanja Modal Renovasi dengan nilai total Rp159.585.835,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 5 April 2024 dengan NTPN AE87561QV3R8FBED dan D8G202G4VPHM8A2V, tanggal 18 April 2024 dengan NTPN 633E62G4VP946AIB, dan tanggal 19 April 2024 dengan NTPN 3AC340NAD4DOFOUK, dengan nilai total Rp159.585.835,00;
      - kelebihan pembayaran Pengadaan Infrastruktur Pendukung Mirroring War Room/Command Centre sebesar Rp23.440.000,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 1 April 2024 dengan NTPN 9AA601JNFUT388U;

- kelebihan pembayaran tunjangan kepada 5 orang pegawai yang sedang tugas belajar dengan nilai total Rp8.543.250,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 13 dan 28 Maret 2024 dengan NTPN 7D67C55DP966KRM2 sebesar Rp1.163.250,00 dan 2A4D51JNFUT38TL8 sebesar Rp2.220.000,00. Sisanya akan dilunasi dengan cara angsuran di tahun 2024;
- kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Proteksi Tiang Pancang Dermaga Tambahan PPI Fandoi di Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp133.813.000,00. Sudah dilakukan penyetoran oleh pihak penyedia jasa ke Rekening RPL 140 Biro Umum dan PBJ Nomor 1960690243 (IDR) pada tanggal 23 April 2024.

2. Inspektorat Jenderal

Saldo Piutang Lainnya pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp23.878.250,00 merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang Tugas Belajar karena tidak sesuai ketentuan. Sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 20, 21 dan 22 Maret 2024 dengan NTPN D1FCE397A3LPDJH sebesar Rp2.325.000,00; NTPN 6669845KPUB5QJ5B sebesar Rp635.000,00; dan NTPN 68AF16Q79BV83WJ sebesar Rp18.593.250,00.

3. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 18 (dua belas) satker antara lain:

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Lainnya pada satker Setditjen Perikanan Tangkap merupakan:

- Piutang atas kelebihan belanja barang perjalanan dinas sebesar Rp30.266.001,00;
- Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2023, terdapat temuan berupa:
  i. Pengembalian belanja modal atas pekerjaan rehabilitasi jalan produksi di kawasan modeling budidaya nila salin sebesar Rp45.170.195,00 yang sudah disetor pada tanggal 02 April 2024 dengan NTPN 42B1I0NA04ALPDBA;
  ii. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Swakelola Tipe IV Penataan Kampung Nelayan Maju Desa Mola Utara sebesar Rp19.253.808,00;
  iii. Pengembalian belanja atas belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Biak sebesar Rp133.101.971,00 yang sudah disetor pada tanggal 24 April 2024 dengan NTPN 363042G4VPI595J9;
  iv. Kelebihan pembayaran belanja pegawai dan tunjangan kepada pegawai yang sedang Tugas Belajar sebesar Rp65.416.250,00;

- Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2011, terdapat keterlambangan Penyelesaian Pekerjaan belum dikenakan denda pada PT. CBI sebesar Rp828.450.545,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
- Terkait pemeriksaan atas Laporan Keungan KKP TA 2017, terdapat temuan berupa:
  i. Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan kapal perikanan pada Direktorat KAPI yang belum dikenakan sebesar Rp114.789.720,00. Terhadap Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
  ii. PDTT Kapal dan Pelabuhan TA. 2015-2016 atas temuan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan atas 45 Unit Kapal Perikanan Belum Dikenakan Denda a.n. PT. RM sebesar Rp597.936.000,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
  iii. PDTT Kapal dan Pelabuhan TA.2015-2016 Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan atas 45 Unit Kapal Perikanan Belum Dikenakan Denda a.n. CV. SP sebesar Rp1.450.826.753,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
  iv. Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 Tidak Diyakini Kewajarannya a.n. PT. IFT sebesar Rp435.420.000,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
  v. Pembayaran Pembangunan Kapal Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 Tidak Diyakini Kewajarannya a.n PT. AC sebesar Rp508.574.400,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet.

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu

Merupakan pengembalian belanja pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp1.880.750,00.

c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Saldo Piutang Lainnya pada PPN Brondong sebesar Rp343.583.409,00 merupakan

- Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja pegawai dan PPPK di bulan Desember 2023 sebesar Rp651.250,00;
- Piutang atas jasa kapal keruk sebesar Rp325.600.000,00;
- Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2023, terdapat temuan berupa:
  i. Kelebihan pembayaran belanja atas rehabilitasi Gedung masjid kantor sebesar Rp14.615.359,00;
  ii. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp2.716.800,00.

d. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Merupakan pengembalian uang makan dan tunjangan bulan Desember 2023 sebesar Rp1.648.000,00, dan pengembalian belanja pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp1.504.600,00.

e. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Merupakan pengembalian belanja pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp1.504.600,00.

f. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Merupakan Piutang Lainnya terkait hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Periode Tahunan terdapat temuan kelebihan pembayaran atas pengadaan kapal sebesar Rp280.964.200,00.

g. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp17.103.000,00.

h. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara

Merupakan pengembalian belanja barang pembangunan TPI perairan darat sebesar Rp16.053.834,00.

i. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Merupakan pengembalian atas pekerjaan normalisasi ruang kerja pelayanan terpadu sebesar Rp23.069.912,00 dan kelebihan uang makan dan tunjangan kinerja pegawai dan PPPK bulan Desember 2023 sebesar Rp2.557.668,00.

j. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara

Merupakan pengembalian belanja barang pembangunan TPI perairan darat sebesar Rp14.749.011,00.

k. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Merupakan piutang atas pencairan jaminan asuransi atas pekerjaan kapal yang tidak selesai. Saat ini sedang proses pengalihan penagihan piutang ke PUPN sebesar Rp537.727.000,00.

l. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat

Merupakan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tahun anggaran 2012 antara lain:

- Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal ikan yang oleh PT Carita Boat sebesar Rp852.096.000,00;
- Denda pengadaan PC, *printer* dan *scanner* oleh CV. Arya Mulia sebesar Rp1.465.200,00; dan
- Denda pengadaan *Notebook* dan *printer* oleh PT Putri Ramdani sebesar Rp375.000,00.

Sampai dengan per 31 Desember 2023 piutang yang disetor ke kas negara mencapai Rp21.640.200,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp832.996.000,00.

m. Satker Lainnya

Merupakan piutang kelebihan pembayaran belanja pegawai pada satker Balai Besar Penangkapan Ikan, PPN Pekalongan, PPN Tanjung Pandan, PPN Ternate, PPN Ambon, dan PPN Pengambengan dengan total Rp11.859.591,00.

4. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 8 (delapan) satker antara lain:

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

- Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan antara lain kelebihan pembayaran pengadaan sarana budidaya rumput laut tahun 2019 sebesar Rp315.923.040,00, kurang volume pengadaan paket bantuan sarana budidaya ikan lele sistem biofluk sebesar Rp125.018.014,00 dan sebesar Rp49.525.025,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp78.077.330,00, sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp412.208.749,00;
- Piutang atas temuan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah atas bantuan kekurangan tahun 2017 sebesar Rp197.690.000,00. Sampai dengan tahun 2017 yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp60.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp137.690.000,00. Piutang ini

diklasifikasikan sebagai piutang macet karena setelah tahun 2017 belum ada pembayaran angsuran atas piutang ini;

- Piutang atas kelebihan pembayaran atas nama PT. Titian sebesar Rp250.735.763.000 yang sudah dikategorikan macet dan sudah dilimpahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan piutang;
- Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP tahun 2023, terdapat temuan berupa:
  i. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang Tugas Belajar sebesar Rp2.760.250,00;
  ii. Tiga paket pekerjaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda berupa Rumpiat Laut tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp94.636.339,00;
  iii. Pekerjaan Konstruksi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Tahap II tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp203.549.368,00;
  iv. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp254.940.600,00.

b. Balai Layanan Usaha produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang
Terkait pemeriksaan LK Tahun 2023 terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran belanja plastic HDPE kluster Nila sebesar Rp86.200.200,00.

c. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
Merupakan pengembalian gaji dan tunjangan atas pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp3.080.000,00

d. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
Merupakan piutang atas kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Tambak yang dilaksanakan oleh *CV Azhu Don* berdasarkan temuan pemeriksaan kinerja TA 2022-2023 oleh aparat pengawas intern pemerintah Nomor T.383/ITJ/HP.110/XI/2023 tanggal 13 November 2023 sebesar Rp6623497dan pengembalian gaji dan tunjangan atas pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp810.000,00.

e. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Ujung Batee
Merupakan piutang kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Desember 2023 sebesar Rp218.110,00 dan pengembalian atas kekurangan volume pembangunan ruang genset kegiatan kluster dan gudang pakan kluster sebesar Rp779.603,00.

f. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam

Merupakan pengembalian gaji dan tunjangan atas pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp1.000.000,00.

g. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai tugas belajar sebesar Rp2.716.800,00, terkait temuan Itjen atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pembayaran paket pemeliharaan hatchery Gedung, kelebihan pembayaran jasa konsultan pengawas sebesar Rp8.118.600,00.

h. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp720.000,00, kelebihan pembayaran uang lembur sebesar Rp164.840.750,00, dan kelebihan pembayaran rehab Gedung dan bangunan sebesar Rp1.263.186,00.

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada satker berikut:

a. Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Merupakan kelebihan pembayaran uang makan ASN bulan Desember 2023 sebesar Rp17.834.650,00, kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka Diklat Dasar JF Pengawas Perikanan Keahlian di Ambon dan Medan sebesar Rp149.954.064,00, kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp60.645.600,00 dan terkait pemeriksaan atas LK Tahun 2023 terdapat temuan kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) senilai Rp879.458.815,80.

b. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Terkait pemeriksaan atas LK Tahun 2023 terdapat temuan kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp270.000,00 dan kekurangan volume atas Pekerjaan Renovasi Konstruksi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan sebesar Rp175.862.712,00.

c. 12 (dua belas) satker lainnya, terkait pemeriksaan atas LK Tahun 2023 terdapat temuan kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai tugas belajar pada satker Stasiun PSDKP Cilacap, Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Biak,

Stasion PSDKP Tarakan, Pangkalan Pengawasan PSDKP Jakarta, Bitung, Tual, dan Pontianak sebesar Rp73.150.054,00.

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Terdapat pada DKP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 32.623.000,00 merupakan piutang atas temuan aparat pengawas intern pemerintah atas program strategis pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp37.623.000,00 dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 dan terkait pengembalian belanja gaji dan tunjangan atas pegawai tugas belajar pada satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) sebesar Rp6.660.000,00.

7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat pada 10 (sepuluh) satker yaitu:

a. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan piutang atas:

- Temuan pemeriksaan oleh BPKP pada proyek Coremap-CTI pada tahun anggaran 2014 atas satjar maked Dinas KP Kabupaten Buton sebesar Rp33.746.000,00;
- Kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja serta uang makan PNS dan PPPK bulan Desember 2023 sebesar Rp42.751.776,00;
- Terkait pemeriksaan atas LK Tahun 2023 terdapat temuan kelebihan pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Gaji dan Tunjangan kepada pegawai tugas belajar tahun 2023 sebesar Rp32.276.600,00, temuan atas Penatausahaan Belanja Barang Dengan Mekanisme UP/TUP sebesar Rp103.875.030,00, Temuan DKP Kab Buton yang sudah ditimpahkan ke PUPN sebesa Rp147.950.250,00;
- Denda Keterlambatan CV Three Putra Abadi sesuai dengan LHA Nomor T.501/IT1/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp6.393.528,00;
- Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kota Ambon sesuai dengan LHA Nomor T.501/IT1/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp1.918.400,00;
- Kekurangan Pekerjaan Persiapan SMKK pada Kab. Banyuwangi sesuai dengan LHA Nomor T.501/IT1/HP.110/XI/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp1.025.000,00;
- Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Rumah Produksi Produk Jadi Fikotianin sesuai dengan LHE Nomor T.41/IT1/KP.730/XII/2024 Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp4.230.627,00;

- Kesalahan perhitungan volume pekerjaan lantai pembangunan GOR oleh PT. Alfa Mahkota Abadi sesuai LHP Nomor T.608/IT3/HP.550/XII/2023 Tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp4.151.386,00;
- Temuan pada Dit. Inshel an CV Gibran Raka Pratama senilai Rp76.511,17 dan CV. Bangun senilai Rp85.447,83.

b. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar

Merupakan kelebihan pembayaran belanja tunjangan kinerja PNS dan PPPK dan kelebihan belanja uang makan PNS bulan Desember 2023 sebesar Rp955.243,00.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Piutang atas pengembalian belanja Belon Penyediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan pada Masyarakat atas pembayaran pembangunan jembatan dan pekerjaan bozem, evaporator dan waduk air tua yang belum dicatat pada period 13 Hasil Reviu itjen sebesar Rp25.395.000,00.

d. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Piutang terkait temuan atas pemeriksaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan Gedung bangunan dan honorarium narasumber sebesar Rp24.706.717,00.

e. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang

Piutang terkait temuan atas pemeriksaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegwai yang sedang tugas belajar sebesar Rp8.581.500,00.

f. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar

Piutang terkait temuan atas pemeriksaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegwai yang sedang tugas belajar sebesar Rp7.159.200,00.

g. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima

Piutang atas pengembalian belanja bahan dan honor narasumber yang disetahkan dokumen pertanggungjawaban kurang lengkap dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp954.000,00.

h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan

Piutang atas kelebihan pembayaran belanja barang modal untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.617.066,00.

i. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Piutang atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan penyediaan jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3.734.480,00.

j. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

Piutang atas kelebihan pembayaran perencanaan pembangunan saluran/jalan produksi sebesar Rp31.1360,00.

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 39 (tigapuluh) satker sebagai berikut:

a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Pencatatan Piutang atas pengalihan KM Bawal Putih III yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN atas nama PT. Carita Boat Indonesia; namun belum tercatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp1.428.485.977,00;

b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

- Merupakan temuan pemeriksaan BPK-RI pada LK KKP TA 2019 yaitu kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan kelembagaan *Marotai Integrated Aquarium dan Marine Research Institute* (MIAMARI) Pengandaran pada Pusat Riset Kelautan yang dilaksanakan oleh KSO PT Pangkho Megah – PT Daya Cipta Dharmonana sebesar Rp800.000.000,00;
- Temuan pemeriksaan LK Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp97.471.450,00.

c. Poltek AUP Jakarta

Piutang sebesar Rp857.133.051,00 merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas:

- Paket Pekerjaan Belanja Modal Renovasi pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp328.196.676,00 dengan rincian:
  - Renovasi Asrama Aster Baru dan Aster Lama oleh PT. Marvic Rp116.634.150,00;
  - Renovasi Gedung Direktorat, Auditorium Madidihang dan Ruang VIP oleh PT. Nara Rp151.592.970,00;
  - Renovasi Asrama Octopus, Thunus dan Ruang Makan Loligo oleh CV. Andi Rp33.477.656,00;
  - Pengadaan Jalan Keliling oleh PT. Naga Toba Rp26.492.000,00.
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan senilai Rp8.447.475,00;
- Kelebihan pembayaran pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp52.157.070,00;
- Kelebihan Pembayaran Belanja Barang atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Barang Penyelenggaraan Wisuda dan Pelantikan Taruna Baru Nasional Pendidikan Tinggi

Vokasi pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp405.964.620,00;

- Kelebihan Pembayaran Tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp62.367.200,00;

d. Politk KP Sorong

Piutang sebesar Rp420.040.989,00 merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas:

- Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp64.813.034,00;
- Biaya perjalanan dinas dalam negeri berupa biaya hotel/penginapan, biaya pendaftaran pelatihan, dan biaya transportasi taksi dipertanggungjawabkan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) senilai Rp37.370.000,00;
- Proses perencanaan penganggaran dan realisasi belanja bantuan uang makan dan bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama pada satker Politeknik KP Sorong tidak sesuai ketentuan dan terdapat penggunaan bantuan uang makan yang tidak sesuai kondisi riil senilai Rp91.675.000,00;
- Realisasi Belanja Barang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp147.957.955,00;
- Pertanggungjawaban belanja honorarium jasa profesi tidak sesuai ketentuan/Kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp66.075.000,00.

e. SUPM Sorong

Piutang sebesar Rp303.791.827,00 merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas:

- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada SUPM Sorong dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi riil;
- Belanja pemeliharaan Peralatan Mesin pada SUPM Sorong dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi riil;
- Sewa Rumah negara yang dikuasai oleh mantan pegawai pada SUPM Sorong Belum dicatat pada LK dan akan dicatat jurnal penyesuian pada LK audited Tahun 2023, sesuai dengan Putusan MA.

f. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Merupakan piutang yang disebabkan oleh temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas:

- Belanja Barang dan Jasa dengan mekanisme UP/ TUP yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban senilai Rp24.123.855,00;
- Belanja Barang kepada Koperasi Penelitian Penyuluh Perikanan (KPP) tidak sesuai kondisi riil senilai Rp165.158.129,00.

g. Politek KP Bitung

Piutang atas pengembalian belanja perjalanan dan kelebihan pembayaran tunjangan atas pegawai Rp16.492.810,00.

h. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Piutang atas pengembalian tunjangan kinerja pegawai bulan Desember tahun 2023 dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pegawai sebesar Rp7.339.676,00.

i. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Piutang sebesar Rp16.892.810,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas bulan Desember 2023 yang dibayarkan Januari tahun 2024 dan kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar atas hasil pemeriksaan LK tahun 2023.

j. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

Piutang sebesar Rp10.965.416,00 merupakan pengembalian uang makan dan tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2023.

k. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Piutang sebesar Rp6.043.400,00 merupakan pengembalian uang makan bulan Desember tahun 2023 dan temuan pemeriksaan atas LK tahun 2023 atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja atas pegawai yang sedang tugas belajar.

l. SUPM Pariaman

Piutang sebesar Rp60.287.859,00 merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas penatausahaan Belanja Barang dengan mekanisme UP/TUP tidak tertib dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

m. Politek KP Sidoarjo

Piutang sebesar Rp60.642.126 merupakan pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2023 dan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 atas kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar.

n. 19 satuan kerja yaitu Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, SUPM Kota Agung Lampung, SUPM Pontianak, Politek KP Bitung, Politek KP Pangandaran, Politek KP Bone, Balai Riset

Budidaya Ikan Hias, Loka Pengkajian Teknologi Kelautan, Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Poltek KP Karawang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, Poltek KP Jembrana, SUPM Waeheru, Poltek KP Kupang, Poltek KP Dumai, dan SUPM Ladong.

Piutang terkait temuan atas pemeriksaan LK tahun 2023 yaitu kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp289.652.056,00.

9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada 20 (dua puluh) satker sebagai berikut:

a. Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Piutang atas pengembalian uang muhan bulan Desember 2023 pada Sekretariat BKIPM, Pusat Karantina Ikan, Pusat Pengendalian Mutu, dan Pusat SSK.

b. 13 (tiga belas) satker yaitu BKIPMKHP Surabaya I, BKIPMKHP Medan I, SKIPMKHP Padang, SKIPMKH Pontianak, SKIPMKHP Kendari, SKIPMKHP Mamuju, SKIPMKHP Palu, BKIPMKHP Tarakan, SKIPMKHP Gorontalo, SKIPMKHP Medan II, SKIPMKHP Meruk, SKIPMKHP Surabaya II, dan BBKIPMKHP Jakarta I
Piutang atas pengembalian belanja pegawai berupa tunjangan kinerja, uang makan, dan uang lembur bulan Desember 2023 dengan total Rp10.506.022,00.

c. 6 (enam) satker yaitu BKIPMKHP Makassar, BKIPMKHP Manado, BKIPMKHP Lampung, BKIPMKHP Jakarta II, SKIPMKHP Cirebon, dan SKIPMKHP Tahuna
Piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar yang merupakan temuan pemeriksaan LK tahun 2023 sebesar Rp47.974.750,00.

C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.242.472.804,00 dan Rp42.292.166.621,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.32
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun / Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang - Piutang PNBP	**(27.677.805.543)**	**(40.479.290.625)**	**12.702.285.082**	**(31,38)**
Setjen	0	(12.973.345.241)	12.973.345.241	(100,00)
Ditjen PT	(17.613.685.296)	(17.619.580.919)	595.895.623	(0,73)
Ditjen PB	(250.000.000)	(350.000.000)	119.997.800	(34,29)
Ditjen PSDKP	(16.254.520)	(1.948.915)	(14.305.605)	1.208,59
Ditjen PDSPKP	(4.461.732)	(6.701.747)	(741.985)	38,56
Ditjen PKRL	(13.993.517)	(11.344.805)	(538.642)	6,93
BPSDM KP	(897.208)	(172.953)	(724.237)	418,81
Penyisihan Piutang - Piutang Lainnya	**(8.565.867.261)**	**(1.832.875.996)**	**(6.733.591.265)**	**367,33**
Setjen	(1.800.448)	(1.367.500)	(323.000)	88,11
Itjen	(119.393)	(489.037)	369.644	(75,59)
Ditjen PT	(5.995.442.067)	(1.277.479.981)	(4.621.962.136)	336,31
Ditjen PB	(934.879.098)	(392.667.051)	(542.212.247)	138,08
Ditjen PSDKP	(6.785.584)	(1.379.933)	(5.405.651)	391,73
Ditjen PDSPKP	(129.311.281)	(2.564.325)	(126.746.956)	4.227,93
Ditjen PKRL	(188.827.769)	(52.366.406)	(127.761.300)	232,81
BPSDM KP	(1.443.763.873)	(4.715.600)	(1.439.048.225)	30.499,68
BPSMKP KP	(449.038)	(141.723)	(307.305)	216,84
Total	**(36.243.672.804)**	**(42.292.166.621)**	**6.049.493.817**	**(14,30)**

C.1.10 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang merupakan kegiatan utama dari BLU dan belum diselesaikan pembayarannya. Piutang ini terdapat pada eselon I Sekretariat Jenderal pada satker BLU LPMUKP yang merupakan akumulasi tunggakan jasa layanan debitur yang telah jatuh tempo namun hingga akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.728.925.709,00 dan Rp0,00.

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut:

Tabel C.33
Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	16.767.000	0	16.767.000	100,00
Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	28.726.675.709	0	28.726.675.709	100,00
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	3.250.000	0	3.250.000	100,00
Total	**28.745.692.709**	**0**	**28.745.692.709**	**100,00**

Penjelasan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.1.10.1 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Saldo Piutang BLU Pelayanan Pendidikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.767.000,00 hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Piutang tersebut merupakan jasa pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2023 dan sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat kekurangan pembayaran oleh pengguna jasa. Atas kekurangan telah dilunasi pada bulan Februari dan Maret 2024.

C.1.10.2 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir

Saldo Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.726.675.709,00 hanya terdapat pada Sekretariat Jenderal di satker BLU LPMUKP yang merupakan akumulasi tunggakan jasa layanan debitur yang telah jatuh tempo namun hingga akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan. Saldo piutang ini per 31 Desember 2022 dicatat pada akun Piutang Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp17.534.546.443 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP sebesar Rp12.474.712.602. Pada bulan September 2023 dipindah ke akun Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum yang lebih sesuai dengan proses bisnis BLU LPMUKP. Rincian kualitas Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.34
Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU - Pengelolaan Dana Bergulir Berdasarkan Kualitas Piutang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	31 Des 2023 (akun Piutang dari Keg Operasional BLU)	31 Des 2022 (akun Piutang PNBP)	Kenaikan (Penurunan)	%
Lancar	135.416.880	406.682.897	(271.266.897)	(66,70)
Kurang Lancar	498.123.600	979.084.623	(480.961.023)	(49,04)
Diragukan	145.244.821	140.613.843	4.630.978	3,29
Macet	27.955.891.288	15.734.693.895	12.221.198.393	77,67
Total	**28.726.675.709**	**17.261.075.458**	**11.465.601.251**	**66,43**

C.1.10.3 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

Saldo Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.250.000,00 hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker BLU Politeknik KP Sidoarjo, merupakan biaya makan tarunа dan sewa asrama bulan November - Desember 2023 yang telah jatuh tempo namun sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran.

C.1.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari kegiatan Operasional BLU merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.418.025.253,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut:

Tabel C.35
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(83.835)	0	(83.835)	100,00

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola	(20.423.201.733)	0	(20.423.201.733)	100,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan	(11.250)	0	(11.250)	100,00
Total	**(20.423.296.810)**	**0**	**(20.423.296.810)**	**100,00**

Penjelasan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.1.11.1 Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU Pelayanan Pendidikan. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.835,00 merupakan penyisihan atas Piutang BLU Pelayanan Pendidikan yang hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal yang disisihkan sebesar 0,5% karena kualitas piutangnya lancar

C.1.11.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU Pengelola Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Dalam menghitung pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, LPMUKP memperhitungkan jumlah Tunggakan atau Piutang, kualitas piutang dan nilai barang agunan atau jaminan. Nilai agunan atau barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai komponen pengurang terhadap piutang, lalu dikalikan dengan persentase sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Direktur LPMUKP Nomor 6/PDR-LPMUKP/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang. Rincian saldo penyisihan piutang tidak tertagih – piutang dari kegiatan operasional BLU berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.36
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan kualitas
Per 31 Desember 2023

Kualitas Piutang PMBP	Nilai Piutang	Nilai Piutang - jaminan (LPMUKP)	%	Penyisihan Piutang
Lancar	135.416.600	59.267.000	0,50%	296.335
Kurang Lancar	490.123.600	321.984.722	10%	32.198.972
Diragukan	145.244.821	24.232.500	50%	12.116.250

Kualitas Piutang PNBP	Nilai Piutang	Nilai Piutang - Jaminan (LPMUKP)	%	Penyisihan Piutang
Macet	27.955.891.288	28.378.688.176	100%	28.378.688.176
Jumlah	28.726.678.709			30.423.201.733

C.1.11.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.250,00 merupakan penyisihan atas piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional pada terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker BLU Poltek KP Sidoarjo, yang disisihkan sebesar 0,5% karena kualitas piutangnya lancar.

C.1.12 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang bukan merupakan kegiatan utama dari BLU dan belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.235.000,00 dan Rp5.821.918,00.

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU adalah sebagai berikut:

Tabel C.37
Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	35.235.000	5.821.918	29.413.082	505,21
Total	35.235.000	5.821.918	29.413.082	505,21

Piutang ini hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker BLU LPMUKP yang merupakan piutang atas temuan pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah berupa kelebihan kelebihan belanja apiikasi sebesar Rp170.855.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 piutang yang telah disetor ke kas negara mencapai Rp135.620.000,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.235.000,00. Pada pelaporan 31 Desember 2022

piutang ini dicatat pada akun Piutang Lainnya. Pada Triwulan III TA 2023 piutang ini dipindahbukan dari akun Piutang Lainnya.

C.1.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.235.000,00 dan Rp29.110,00.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU adalah sebagai berikut:

Tabel C.38
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Opr BLU Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Lainnya	(35.235.000)	(29.110)	(35.205.890)	0,00
Total	**(35.235.000)**	**(29.110)**	**(35.205.890)**	**0,00**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU hanya terdapat unit Eselon I Sekretariat Jenderal pada satker UPMOEP, yang merupakan penyisihan atas Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp35.235.000,00 yang masuk dalam kualitas macet.

C.1.14 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.39
Rincian Saldo Persediaan Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya	**59.988.393.339**	**56.344.312.334**	**3.636.780.005**	**6,45**
Barang Konsumsi	18.253.020.896	16.930.060.659	1.322.960.237	8,01
Amunisi	1.722.772.288	724.555.532	998.216.866	137,91
Bibit untuk Penelitian dan	702.922.359	736.902.467	(33.980.208)	(4,87)
Suku Cadang	22.630.026.225	21.547.969.957	1.082.056.268	5,02
Bahan Baku	10.122.630.959	11.377.048.614	(1.254.439.655)	(10,24)
Persediaan Lainnya	6.247.933.742	3.176.975.155	1.292.958.587	27,92
Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	**31.264.309.519**	**21.613.799.779**	**9.650.509.737**	**44,65**
Tanah Bangunan untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	299.395.880	0	299.395.880	100,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	15.514.870.890	10.196.187.810	5.318.683.079	52,20
Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	0	5.820.877.210	(5.820.877.210)	(100,00)
Aset Lain-Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat	140.202.000	140.202.000	0	0,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	825.418.249	1.442.534.899	(617.116.650)	(42,79)
Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam Proses	14.485.322.499	4.013.998.862	10.471.323.637	260,86
Total	**91.244.681.859**	**77.957.112.113**	**13.287.570.742**	**17,04**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.287.379.742,00 atau 17,04% dari saldo per 31 Desember 2022 yang secara umum disebabkan oleh pengadaan pekerjaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di SKPT Mna Prov. Maluku dan SKPT Biak Prov. Papua.

Selain saldo Persediaan pada tabel diatas terdapat Persediaan dalam kondisi rusak atau usang yang masih dalam proses penghapusan. Rincian saldo Persediaan dalam kondisi rusak atau usang masing-masing unit Eselon I per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.40
Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi Usang dan Rusak
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Usang	Rusak	Total
Ditjen PT	25.100.100	0	25.100.100
Ditjen PB	21.671.690	375.682.400	397.354.090
BPSDM KP	78.013.835	31.740.600	109.754.435
Total	**124.785.625**	**407.423.000**	**532.208.625**

Penjelasan Persediaan per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.1.14.1 Persediaan Untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya

Saldo Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.980.292.329,00 dan Rp56.343.512.324,00.

Rincian saldo Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.41
Rincian Saldo Persediaan Untuk Operasional, Proses Produksi
dan Persediaan Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	1.654.405.541	1.736.983.346	(82.577.805)	(4,75)
Itjen	383.441.528	69.923.148	53.517.980	107,20
Ditjen PT	1.245.729.542	3.358.973.671	(2.113.253.129)	(62,91)
Ditjen PB	18.450.744.138	13.818.073.480	4.632.670.658	33,53
Ditjen PDSKP	25.729.839.276	21.388.169.020	4.304.078.256	20,12
Ditjen PSDPKP	263.455.020	329.548.782	(66.093.762)	(20,06)
Ditjen PRL	17.291.935	15.799.800	1.492.135	9,44
BPSDM KP	4.268.215.370	5.149.202.432	(880.987.062)	(16,38)
BPPMH KP	8.223.879.379	10.505.838.437	(2.281.959.058)	(21,72)
Total	**59.980.292.329**	**56.343.512.324**	**3.636.780.005**	**6,45**

Penjelasan ringkas atas saldo Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Sekretariat Jenderal antara lain berupa Tinta/Toner *Printer* sebesar Rp168.999.150,00; Kunci, Kran Dan Semprotan sebesar Rp329.348.126,00; dan Lampu Listrik sebesar Rp131.246.717,00.

2. Inspektorat Jenderal

   Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Inspektorat Jenderal antara lain berupa Ordner dan Map sebesar Rp20.332.567,00; Amplop sebesar Rp5.524.380,00; dan Tinta/Toner *Printer* sebesar Rp41.973.691,00.

3. Ditjen Perikanan Tangkap

   Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa Bahan Lainnya sebesar Rp485.600.000,00; Barang Cetakan sebesar Rp123.528.032,00; danTinta/Toner *Printer* sebesar Rp115.750.000,00.

4. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa Bahan Kimia Padat sebesar Rp1.871.047.792,00; Pakan Ikan sebesar Rp4.940.811.675,00; dan Biota Laut/Ikan sebesar Rp3.342.298.105,00.

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

   Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP antara lain berupa Amunisi sebesar Rp1.723.772.388,00; Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp21.180.504.434,00; dan Tinta/Toner *Printer* sebesar Rp487.974.869,00.

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

   Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen Penguatan Saing Produk KP antara lain berupa Bahan Kimia Lainnya sebesar Rp240.639.749,00; Alat-Alat Pel dan Lap sebesar Rp1.272.000,00; dan Biota Laut/Ikan sebesar Rp9.305.500,00.

7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Ordner Dan Map sebesar Rp3.077.800,00; Kertas HVS sebesar Rp5.745.500,00; dan Tinta/Toner Printer sebesar Rp3.707.175,00.

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP antara lain berupa Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp462.177.702,00; Biota Laut/Ikan sebesar Rp1.412.529.005,00; dan Perikanan sebesar Rp562.189.405,00.

9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP antara lain berupa Bahan Kimia Padat sebesar Rp1.881.349.955,00; Bahan Kimia Cair sebesar Rp1.369.419.220,00; dan Barang Cetakan sebesar Rp1.258.969.354,00.

Ringkasan mutasi akun Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.42
Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Operasional, Proses Produksi dan Persediaan Lainnya Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**36.343.512.334**
Mutasi Tambah:		**325.404.670.283**
M01	Penambahan Saldo Awal	137.377.500
M02	Pembelian	295.026.056.543
M03	Transfer Masuk	1.031.235.550
M06	Perolehan Lainnya	8.720.973.991
M10	Reklasifikasi Masuk	10.125.476.175
M11	Reklasifikasi Dari Aset	3.241.425.900
M15	Persediaan Dalam Proses Masuk	1.887.998.493
M95	Koreksi Transfer Keluar Online	1.626.800
M98	Koreksi Nilai Tambah	72.975.801.870
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	22.957.038.979
P01	Hasil Operasi Pihak	1.478.793.036
Mutasi Barang:		**(321.967.890.278)**
K01	Habis Pakai	(197.969.913.770)
K02	Transfer Keluar	(1.832.865.316)
K04	Hilang	(192.586.365)
K05	Rusak	(144.409.187)
K06	Keluar Lainnya	(10.230.321.560)
K10	Reklasifikasi Keluar	(9.525.590.327)

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
611	Reklasifikasi ke Aset	(2.136.385.295)
950	Koreksi Nilai Barang	(22.777.607.125)
999	Koreksi Kuantitas Barang	(73.289.852.668)
P01	Hasil Opname Fisik	(4.260.663.360)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**39.500.297.329**

C.1.14.2 Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.264.309.510,00 dan Rp21.613.709.773,00.

Rincian saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.43
Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual Atau Diserahkan kepada Masyarakat Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	13.001.105.440	0	13.001.105.440	100,00
Ditjen PT	439.597.000	6.042.725.190	(5.603.128.190)	(92,73)
Ditjen PB	16.118.301.420	11.704.069.420	4.414.232.000	39,42
Ditjen PDSPKP	472.054.000	3.253.612.213	(2.781.558.213)	(85,49)
Ditjen PRL	1.018.900.850	590.554.950	411.425.900	68,62
BPSDM KP	21.188.000	13.758.000	7.430.000	54,09
Total	**31.264.309.510**	**21.613.709.773**	**9.650.599.737**	**44,65**

Penjelasan ringkas atas saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Jenderal antara lain berupa pekerjaan pembangunan fisik di SKPT Moa Prov. Maluku dan SKPT Biak Prov. Papua.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa rehabilitasi tempat pemasaran ikan PP Kaldemak Kota Sorong dan dokumen perencanaan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa excavator, plastik HDPE untuk keramba jaring apung, bioflok, pupuk, kincir air, bibit rumput laut, benih ikan, calon indukan dan lain-lain.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa pabrik es di Kabupaten Mimika, unit pengolah ikan di Kabupaten Pati, pasar ikan bersih, sentra kuliner di Kabupaten Sumbawa.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Aru, Pembangunan Gudang Garam Nasional di Kabupaten Kupang, dan Izin Lingkungan pembangunan SKPT Moa.

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP antara lain berupa bahan jadi yang diklasifikasi dari praktek siswa.

Ringkasan mutasi akun Persediaan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.44
Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**21.613.709.773**
Mutasi Tambah:		**1.003.222.318.117**
M02	Pembelian	325.510.423.792
M03	Transfer Masuk	893.899.778
M04	Hibah (Masuk)	888.925.000
M06	Perolehan Lainnya	99.798.721.539
M10	Reklasifikasi Masuk	207.997.358.574
M11	Reklasifikasi Bari Aset	217.744.500
M15	Persediaan Dalam Proses Masuk	181.292.804.686
M95	Koreksi Transfer Keluar (Mutasi)	363.893.090
M98	Koreksi Nilai Tambah	4.581.595.946
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	63.472.750
P01	Hasil Opname Fisik	1.618.602.279

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Mutasi Barang:		**(1.028.571.718.280)**
KD1	Hasil Pakai	(587.516.476.490)
KD2	Transfer Keluar	(1.357.202.864)
KD3	Hibah Keluar	(1.771.802.879)
KD5	Rusak	(378.137.600)
KD6	Keluar Lainnya	(55.032.674.756)
KD9	Reklasifikasi Keluar	(181.325.180.847)
KD11	Reklasifikasi ke Aset	(2.768.900.000)
KD12	Perseditan Dalam Proses Keluar	(191.118.386.734)
KD98	Koreksi Nilai Barang	(224.115.950)
KD99	Koreksi Kuantitas Barang	(1.348.913.800)
PD1	Hasil Optimasi Pilah	(237.698.700)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**31.266.309.210**

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 adalah sebagai berikut:

2. Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi proteksi tiang pancang dermaga tambahan pada dan SKPT Biak Prov. Papua sebesar Rp133.813.000. Atas temuan tersebut telah disetor ke rekening hibah BCA pada tanggal 19 April 2024.
3. Pencatatan persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Budi Daya yang tidak sesuai kebijakan akuntansi KKP sebesar Rp239.982.550,00.

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.902.907.207.513,00 dan Rp24.115.941.352.182,00.

Rincian saldo Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut:

Tabel C.45
Rincian Saldo Aset Tetap Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Tanah	16.211.395.715.663	16.096.132.571.193	[94.826.855.920]	(0,53)
Peralatan dan Mesin	6.522.516.896.685	6.969.014.708.854	462.498.135.551	7,63
Gedung dan Bangunan	5.302.975.449.379	5.373.798.721.033	[70.819.272.654]	(1,32)

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.924.815.114.324	3.883.995.205.091	40.819.909.233	1,05
Aset Tetap Lainnya	226.804.902.066	239.115.333.474	(12.660.451.408)	(5,29)
Konstruksi Dalam pengerjaan	95.118.357.353	204.562.374.909	(109.444.017.556)	(53,49)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.376.776.149.908)	(7.742.077.498.332)	(634.697.651.623)	5,61
Total	**23.903.807.287.213**	**24.115.941.553.183**	**(211.134.146.669)**	**(0,88)**

Penjelasan Aset Tetap per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.2.1 Tanah

Aset tetap berupa Tanah ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.011.305.715.663,00 dan Rp16.096.132.571.583,00.

Rincian saldo Tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.46
Rincian Saldo Tanah Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	1.048.754.118.000	1.048.754.118.000	0	0,00
Itjen PT	3.678.000.652.312	3.685.648.989.620	(67.648.337.308)	(1,88)
Itjen PB	3.756.345.384.141	3.774.993.853.141	(18.587.569.000)	(0,49)
Itjen PSDKP	306.806.578.843	307.084.766.115	(248.187.272)	(0,12)
Itjen PDSPKP	616.358.044.791	616.358.044.791	0	0,00
Itjen PKRL	368.345.890.034	367.927.067.148	418.822.886	0,29
BPSDM KP	4.128.303.191.900	4.128.367.466.100	(85.791.800)	0,00
BPSMI KP	333.821.964.654	333.357.264.654	564.700.000	0,28
Total	**16.011.305.715.663**	**16.096.132.571.583**	**(84.826.855.920)**	**(0,53)**

Rincian nilai tercatat (carrying ammount) Aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tanah Persil sebesar Rp 12.565.213.378.416,00;
2. Tanah Non Persil sebesar Rp 3.223.092.309.912,00;
3. Lapangan sebesar Rp 132.010.027.333,00.

Ringkasan mutasi akun Tanah per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.47
Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**10.096.133.571.503**
Mutasi Tambah		**331.930.796.816**
100	Penambahan Saldo Awal	8.006.627.000
101	Pembelian	2.450.854.719
102	Transfer Masuk	54.816.312.000
103	Hibah Masuk	2.726.240.000
107	Reklasifikasi Masuk	159.402.035.628
112	Pembelian Lainnya	36.645.343.134
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	706.181.524
131	Likuidasi Masuk	79.318.318.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Tanggung)	101.446.899
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	4.484.701.332
209	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	246.718.000
298	Pengembangan Melalui BDP	1.167.630.000
482	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.779.588.000
Mutasi Kurang		**(436.757.652.736)**
254	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(35.302.375.133)
302	Transfer Keluar	(54.816.312.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(159.449.984.612)
305	Koreksi Pencatatan	(4.892.747.991)
311	Likuidasi Keluar	(79.318.318.000)
451	Penyataan BMN ke PI	(103.077.913.000)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**10.011.305.715.583**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Tanah adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp8.006.627.000,00.
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp235.081.440,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp2.215.773.279,00.
3. Transaksi Transfer Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp54.816.312.000,00.

4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.128.240.000,00 dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp600.000.000,00.
5. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.092.349.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp99.763.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp158.209.923.628,00.
6. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp11.241.074.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp618.822.881,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp22.785.296.233,00.
7. Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp786.181.524,00.
8. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp79.318.318.000,00.
9. Transaksi Pengembangan Nilai Langsung terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp15.157.074,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp21.588.625,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp64.700.000,00.
10. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp244.027.332,00 dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.240.674.000,00.
11. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp345.710.000,00.
12. Transaksi Pengembangan Melalui KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.167.629.000,00.
13. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dibentikan Penggunaan Aktif hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.779.580.000,00.
14. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp269.777.900,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp35.032.597.233,00.
15. Transaksi Transfer Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp54.816.312.000,00.

16. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp885.944.524,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp158.564.040.000,00.
17. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.616.007.972,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.775.940.019,00.
18. Likuidasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp79.318.318.000,00.
19. Transaksi Perubahan BMN ke PI terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp85.090.346.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp18.387.569.000,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah yang memenuhi kriteria aset Properti Investasi namun belum direklasifikasi ke akun Properti Investasi

   Terdapat tanah pada satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal berupa Pulau Cemara yang memenuhi kriteria sebagai aset Properti Investasi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan asesi manajemen sebagai dasar penetapan menjadi aset properti investasi. Pelaksanaan asesi manajemen tersebut direncanakan pada semester I tahun 2024.
2. Tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain

   Terdapat tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.48
Rincian Tanah Dikuasai dan/atau Bersengketa dengan Pihak Lain
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Nama Satker	Luas (m2)	Nilai (Rp)
Ditjen Perikanan Tangkap		**1.103**	**5.965.775.000**
	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1.103	5.965.775.000
Ditjen Perikanan Budi Daya		**3.259.647**	**398.701.213.000**
	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	473.440	580.403.744.000

Unit Eselon I	Nama Satker	Luas (m2)	Nilai (Rp)
	BLI/ Produksi Perikanan Budi Daya Karawang	2.736.535	153.249.760.000
	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	50.622	84.968.709.000
Jumlah		**3.266.750**	**402.666.908.000**

Penjelasan ringkas atas permasalahan tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

a. Ditjen Perikanan Tangkap - Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Berupa tanah seluas 1.400 m2 di Lamongan, Jawa Timur pada satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang dikuasai oleh PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero). Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 September 2022 untuk menempuh penyelesaian sengketa tanah hasil reklamasi oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada tahun 2004 dengan mengambil alih Tanah yang dipersengketan untuk dapat dipergunakan sebagai fasilitas umum sarana perhubungan berupa jalan dan kawasan energi di lingkungan Pelabuhan Perikanan sesuai dengan Perda Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2021.

b. Ditjen Perikanan Budi Daya - Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya
Berupa sebidang tanah seluas 472.440 m2 sebagai obyek perjanjian tukar menukar (*ruilslag*) di Sidoarjo, Jawa Timur pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya yang dikuasai oleh PT Semeru Cemerlang. Atas permasalahan tersebut pada tahun 2023 BKP melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Mengirimkan surat permohonan penilaian BMN berupa Tanah dalam rangka tindak lanjut penyelesaian perjanjian *ruilslag* kepada Kementerian Keuangan. Surat tersebut dikembalikan dengan alasan obyek penilaian beserta permasalahan hukum tidak jelas.
   - Melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dengan kesepakatan sebagai berikut:
     i. Kementerian Keuangan belum dapat melakukan penilaian ulang atas aset dimaksud dan diarahkan untuk sementara menggunakan hasil revaluasi pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp180.246.056.750,00;

ii. Penilaian aset pengganti yang telah diberikan oleh PT. Semeru Cemerlang dapat dilakukan oleh Tim Penilai/Akuntan Publik;

iii. KKP dapat melakukan negosiasi ulang dengan PT. Semeru Cemerlang dan diharapkan mendapatkan alternatif solusi terbaik bagi para pihak.

c. Ditjen Perikanan Budi Daya - BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Berupa tanah seluas 273,66 Ha eks proyek Tambak Inti Rakyat pada sektor Badan Layanan Umum Produksi Perikanan Budidaya Karawang yang dikuasai oleh masyarakat. Atas masalah ini KKP masih mengkaji kewajiban yang mungkin timbul berkenaan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat berserta peraturan turunannya termasuk tapi tidak terbatas pada konversi lahan kepada masyarakat.

d. Ditjen Perikanan Budi Daya - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

- Tanah di Maros dengan luas tanah 16.228 m2 senilai Rp4.800.729.000,00 dengan status bersertifikat Hak Pakai (terbit tahun 1992) atas nama pemerintah RI c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan namun sampai saat ini masih dikuasai masyarakat,dan menjadi tanah sengketa sejak tahun 2012, atas permasalahan ini KKP telah melakukan upaya menguasai kembali tanah tersebut melalui surat Kepala BPSAP kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros pada tanggal 3 Desember 2020 untuk menindaklanjuti putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang membatalkan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02876/Maccini Baji a.n Murtiara tanggal 13 November 2009, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros sehingga tanah tersebut masih dikuasai oleh masyarakat;
- Terdapat 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi sebagai berikut:
  i. Tanah di Desa Bira, Kota Makassar dengan luas tanah 15.000 m2 dengan nilai Rp55.020.000.000,00 bersertifikat Hak Pakai Nomor 20004/Parang Loe atas nama Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan terbit tahun 2019 dan telah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanah ini terdapat bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
  ii. Tanah di Desa Mandalle, Kab. Pangkep dengan luas tanah 19.394 m2 dengan nilai Rp5.147.990.000,00 bersertifikat Hak Pakai a.n. Departemen Pertanian RI Jakarta Kantor dan Unit *Hatchery* Ditjen Perikanan dan Kepulauan, dengan

sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Mandelle tanggal 2 Februari 1989. Pada tanah ini terdapat bangunan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sertifikat tanah tersebut berupa salinan dan dipegang oleh satker BBPBAP Takalar.

Berdasarkan hasil pemantauan pengamanan Aset Tetap berupa Tanah pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 03 sampai dengan 07 April 2023, ketiga permasalahan tanah tersebut belum selesai sehingga tanah tersebut masih dikuasai oleh masyarakat/Pihak Lain.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.522.510.838.685,00 dan Rp6.060.014.703.454,00.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.49
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	358.277.567.174	349.992.465.982	8.285.061.192	2,48
Itjen	21.881.109.926	20.173.275.188	1.618.834.738	8,07
Ditjen PT	797.854.429.257	831.843.865.778	(34.189.445.521)	(4,11)
Ditjen PB	925.923.688.626	911.992.212.943	13.931.475.683	1,53
Ditjen PSDKP	2.211.226.266.042	1.840.708.960.404	470.517.217.638	25,56
Ditjen PDSPKP	193.874.663.787	194.415.180.878	(540.117.091)	(0,28)
Ditjen PHRL	122.993.161.716	134.656.940.576	(11.663.778.860)	(8,66)
BP2SDM KP	1.455.058.615.217	1.440.895.303.784	14.163.312.433	1,04
BP3MI KP	334.782.904.940	336.137.329.921	(1.354.424.991)	(0,27)
Total	**6.522.510.838.685**	**6.060.014.703.454**	**462.496.135.231**	**7,63**

Nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.064.405.837.265,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.50
Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2023

Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Tercatat/Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
302-Alat Besar	543.216.282.609	983.058.267.974	461.295.810.284	81.822.472.488
303-Alat Angkutan	2.721.015.108.289	1.735.111.989.876	1.871.872.987.192	676.143.993.047
304-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	75.210.313.303	44.363.922.096	64.341.125.760	10.869.187.593
305-Alat Pertanian	193.879.129.793	176.883.555.793	179.083.298.829	14.795.830.964
306-Alat Kantor & Rumah Tangga	726.281.062.896	629.199.348.876	627.664.222.592	98.616.840.304
307-Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	308.496.858.740	256.816.104.359	259.561.212.852	72.935.525.891
308-Alat Kedokteran Dan Kesehatan	52.434.487.852	33.176.039.150	32.208.961.388	5.225.344.524
309-Alat Laboratorium	1.138.962.271.134	962.968.089.116	979.615.142.253	160.347.128.881
310-Alat Persenjataan	53.448.463.098	42.211.206.130	43.289.366.276	10.158.830.922
311-Komputer	431.629.568.968	388.871.333.039	376.353.369.233	55.276.199.831
312-Alat Rumah Tangga	7.564.376.096	7.226.192.696	7.463.896.256	679.482.162
313-Alat Pengeboran	4.228.405.000	4.053.269.375	4.150.426.972	77.978.328
314-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	40.190.488.216	37.271.600.218	39.888.346.911	301.941.305
315-Alat Bantu Eksplorasi	15.663.440.861	14.758.443.761	14.444.155.467	899.565.395
316-Alat Keselamatan Kerja	49.861.362.238	41.491.234.268	41.491.279.093	8.369.787.133
317-Alat Perang	12.924.177.962	7.283.555.230	7.867.422.628	5.056.755.939
318-Peralatan Proses/Produksi	86.179.098.445	60.726.976.449	62.729.242.029	23.449.856.416
319-Rambu - Rambu	9.102.822.796	6.168.835.803	7.209.917.867	1.892.904.929
329-Peralatan Olah Raga	7.121.073.698	7.051.078.318	6.753.899.186	275.254.512
Total	**6.325.510.858.885**	**4.949.676.617.954**	**5.064.405.817.265**	**1.458.185.691.620**

Ringkasan mutasi akun Peralatan dan Mesin per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.51
Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**6.060.014.793.454**
Mutasi Tambah		**1.505.579.825.988**

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
100	Penambahan Saldo Awal	137.404.052.100
101	Pembelian	161.858.692.523
102	Transfer Masuk	233.098.443.030
103	Hibah Masuk	243.863.346.866
105	Penyelesaian Pembangunan/Hilangan KDP	259.076.913.861
106	Pembatalan Penghapusan	276.358.942
107	Reklasifikasi Masuk	28.244.916.132
172	Penilaian Lainnya	176.585.505.578
173	Penyelesaian Pembangunan/Langsung	184.011.960
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	2.943.406.507
131	Mutasi Masuk	29.101.408.784
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	5.108.034.247
206	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	99.579.976.032
208	Pengembangan Melalui KDP	16.536.245.651
214	Koreksi Susutan	601.249.601
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan awal	133.344.392.194
Mutasi Barang		**(1.043.083.690.757)**
204	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(130.658.126.317)
301	Penghapusan	(66.950.000)
302	Transfer Keluar	(253.048.443.030)
303	Hibah Keluar	(15.043.403.892)
304	Reklasifikasi Keluar	(37.072.784.214)
305	Koreksi Pencatatan	(191.516.043.299)
311	Likuidasi Keluar	(29.101.408.784)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(983.695.040)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(386.791.845.241)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**6.522.518.838.405**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp13.783.140.145,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp114.071.468.301,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.599.594.290,00; unit Eselon I Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk KP sebesar Rp311.616.069,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar

Rp5.700.975.375,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp57.460.000,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp20.716.340.935,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.157.030.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp28.655.659.953,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp26.336.620.985,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp32.553.967.626,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp5.013.334.578,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp14.005.931.846,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp16.024.345.533,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp16.395.255.067,00.
3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp89.306.329.349,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.122.097.325,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp30.618.352.924,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp7.405.542.504,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp10.796.689.386,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.591.440.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp110.820.100.642,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.387.890.820,00.
4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.868.617.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.684.241.481,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp226.169.695.902,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp52.081.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp12.098.711.483,00.
5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp916.355.900,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp99.590.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp34.352.200,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp257.420.614.661,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp606.000.000,00.

6. Transaksi Pemutatalan Penghapusan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp276.158.942,00.
7. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.791.016.057,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp296.568.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.212.944.032,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp12.826.322.889,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp46.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp224.379.380,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp2.265.999.718,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.580.485.256,00.
8. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp20.953.508.938,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.339.087.262,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp18.982.488.030,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp126.848.467.338,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp5.750.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.354.994.018,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp101.290.000,00.
9. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp104.011.960,00.
10. Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan pada pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.923.009.600,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp17.449.200,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp2.148.627,00.
11. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp29.101.400.704,00.
12. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp131.980.590,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp120.107.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp4.353.656.857,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp300.000.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp202.290.000,00.

13. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp158.875.688,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp849.039.693,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp51.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp68.009.134.736,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp253.359.900,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp216.246.915,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp39.320.000,00.
14. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 3 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.039.500.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp5.082.745.651,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.414.000.000,00.
15. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp405.294.877,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp199.964.724,00.
16. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.859.937.375,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp886.240.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp117.863.222.914,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.704.101.105,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp805.556.458,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.113.032.350,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp31.502.000,00.
17. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.146.154.210,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp939.996.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp95.135.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp128.343.201.307,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp16.201.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp6.798.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp111.640.000,00.
18. Transaksi Penghapusan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp66.958.000,00.

19. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp89.320.283.849,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.079.622.325,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp31.353.352.924,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp6.403.472.504,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp18.738.295.886,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.591.440.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp109.434.998.342,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.826.977.120,00.
20. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp7.260.707.394,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp245.993.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp3.614.466.478,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp2.410.221.319,00; dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp312.125.701,00.
21. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.700.172.957,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp70.523.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.580.522.232,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp21.559.877.809,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp46.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp290.779.300,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp2.236.422.700,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.500.485.256,00.
22. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp121.728.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.509.482.977,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp115.336.790.053,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp68.371.464.736,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.369.826.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp3.777.780.033,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp28.970.000,00.
23. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp29.101.400.704,00.

24. Tranzaksi Reklasifikasi Keluar Persediaan terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp37.493.580,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp876.268.460,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp60.000.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.935.000,00.

25. Transaksi Penghentian dari Penggunaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp32.053.745.624,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp528.201.262,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp73.183.667.623,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp161.604.244.572,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp52.504.980.263,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.566.320.909,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp23.903.272.955,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp19.746.401.295,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp19.701.010.758,00.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan Pembayaran Pengadaan Infrastruktur Pendukung Mirroring War Room/Command Center pada satker Biro Umum dan PHJ sebesar Rp23.640.000,00. Atas temuan tersebut telah disetorkan ke kas negara tanggal 1 April 2024 dengan NTPN 9AAA001JNPUT30001.

2. Kelebihan pembayaran pengadaan kapal pengawas perikanan kelas II (MYC) pada satker Sekretariat Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP senilai Rp879.458.815,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara tanggal 30 April 2024 dengan NTPN 3548761QV351IV9G.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.032.979.449.379,00 dan Rp5.373.798.722.003,00.

Rincian saldo Gedung dan Bangunan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.52
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	757.132.444.069	745.663.759.099	11.468.684.970	1,54
Ditjen PT	749.082.488.416	797.714.874.768	(47.812.386.352)	(6,02)
Ditjen PB	1.347.325.198.984	1.277.648.380.091	70.276.817.973	5,50
Ditjen PSDKP	209.352.304.836	209.045.674.154	1.164.028.685	0,53
Ditjen PDSPKP	104.297.330.029	192.414.591.555	(88.117.261.526)	(45,80)
Ditjen PKRL	86.958.981.479	82.182.105.179	4.776.883.589	5,81
BPSDM KP	1.686.327.201.859	1.708.328.631.133	(24.021.429.074)	(1,41)
BPSMB KP	978.478.307.227	972.878.797.827	1.102.498.288	0,80
Total	**5.302.979.449.379**	**5.373.798.722.803**	**(70.819.272.424)**	**(1,32)**

Nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp891.484.476.795,00. Rincian nilai tercatat (carrying amount) aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.53
Daftar Rinci Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2023

Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Tercatat/Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
403-Bangunan Gedung	5.093.907.244.224	783.373.222.152	864.869.221.791	4.229.038.040.883
403-Monumen	1.315.383.249	148.347.971	165.410.871	1.067.872.897
403-Bangunan Menara	17.999.902.800	3.666.912.341	3.961.941.178	14.037.960.422
404-Tugu Titik Kontrol/Pasti	192.753.019.540	22.122.179.964	24.487.921.344	166.271.098.469
Total	**5.302.979.449.379**	**809.310.662.428**	**891.484.476.795**	**4.411.494.972.584**

Ringkasan mutasi akun Gedung dan Bangunan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.54
Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**5.373.798.722.803**
Mutasi Tambah		**889.108.065.738**
189	Penambahan Saldo Awal	15.199.501.307

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
101	Pembelian	3.886.925.787
102	Transfer Masuk	193.695.707.953
103	Hibah Masuk	23.695.792.196
105	Penyelesaian PembangunanDengan KDP	92.228.564.091
107	Reklasifikasi Masuk	93.322.364.298
112	Perolehan Lainnya	131.869.477.240
113	Penyelesaian PembangunanLangsung	2.867.514.007
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	696.437.226
131	Likuidasi Masuk	52.328.521.201
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	5.133.501.099
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	31.371.135.918
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	3.691.777.210
209	Pengembangan Melalui KDP	29.702.434.776
214	Koreksi Surplus	5.581.456.085
402	Penggunaan Sementara BMN yang sudah dikembalikan penggunaan aktif	8.434.946.582
432	Perubahan PI ke BMN	26.568.480.825
Mutasi Kurang		**(909.927.338.362)**
209	Koreksi Rusak	(131.368.000)
214	Koreksi Susutan	(916.980.126)
264	Koreksi Pencatatan Nilai berkurang	(8.827.914.222)
302	Transfer Keluar	(194.661.073.620)
303	Hibah Keluar	(15.083.074.327)
304	Reklasifikasi Keluar	(93.429.445.826)
305	Koreksi Pencatatan	(16.087.443.353)
313	Likuidasi Keluar	(52.328.521.201)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(18.097.346.630)
431	Perolehan BMN Ke PI	(378.371.226.045)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**5.302.079.449.379**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp14.212.644.258,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.354.655.799,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp86.906.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan

Ruang Laut sebesar Rp422.492.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.163.203.250,00.

2. Transaksi Pembelian terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp40.825.245,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.547.450.629,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp417.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp129.642.205,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp69.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp58.021.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp522.385.728,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp382.080.900,00.
3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp26.115.543.855,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.437.720.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp119.272.344.213,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp44.392.928.884,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp277.171.000,00.
4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp17.204.168.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.491.624.106,00.
5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp9.222.232.481,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp75.033.448.801,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.897.408.555,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp169.800.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.897.334.254,00.
6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp12.590.583.140,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5.534.364.128,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp977.193.542,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp845.304.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp73.374.919.480,00.
7. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp11.955.310.223,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan

Budi Daya sebesar Rp113.906.080.091,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.766.210.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.041.870.926,00.

8. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp500.920.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.074.046.458,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp325.773.549,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp166.774.000,00.
9. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dari Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp696.437.226,00.
10. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp52.320.521.201,00.
11. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp351.921.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.317.654.412,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp199.300.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.718.524.683,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp544.101.000,00.
12. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp5.504.083.998,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp8.848.677.475,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5.062.521.626,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp277.346.201,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp275.235.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp10.224.530.418,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp578.821.200,00.
13. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp1.524.180.310,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.167.597.000,00.
14. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp24.530.78.750,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp7.569.013.394,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp10.537.523.178,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp9.222.819.454,00.

15. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp2.106.182.502,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.332.186.500,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.153.087.983,00.
16. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.926.365.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.263.331.941,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp519.524.561,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.745,725,000,00.
17. Transaksi Perubahan PI ke MB hanya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp26.568.488.025,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp169.502.300.000,00.
18. Transaksi Koreksi Manual hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp131.300.908,00.
19. Transaksi Koreksi Susutan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp920.908.128,00.
20. Transaksi Koreksi Nilai Berkurang terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp159.585.835,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.233.764.406,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp404.163.045,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp49.963.100,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp422.692.800,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.757.750.836,00.
21. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Setjen sebesar Rp26.115.543.855,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.437.720.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp119.272.344.213,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.165.365.676,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp44.392.920.084,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp277.171.000,00.
22. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp7.954.296.097,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5,928,778.230,00.

23. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.130.1018.400,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp7.295.604.484,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp977.193.542,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp845.304.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp73.001.245.480,00.
24. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.250.664.583,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp4.636.331.716,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp219.245.701,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.547.346.455,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp433.854.900,00.
25. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp52.329.521.201,00.
26. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.927.297.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.161.649.270,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp13.68.904.360,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp23.869.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.560.105.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp55.522.000,00.
27. Transaksi Perubahan BMN ke Properti Investasi terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp128.279.146.491,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp302.360.661.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp88.186.261.526,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp51.545.157.028,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Gedung dan Bangunan yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Rumah negara sebanyak 2 (dua) unit pada satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong yang dikuasai pensiunan ASN dan ahli waris ASN.
2. Rumah negara sebanyak 10 (sepuluh) unit pada satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan dan Perikatan Bogor yang dikuasai pensiunan ASN dan ahli waris ASN.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran 4 (empat) paket pekerjaan belanja modal renovasi pada satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp154.585.835,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 5 April 2024 sebesar Rp9.520.000,00 dengan NTPN AE875610V3R8FBED dan sebesar Rp8.385.013,00 dengan NTPN 080202G4VPHMRAJV; tanggal 18 April 2024 sebesar Rp26.655.822,00 dengan NTPN sebesar 080202G4VPHMRAJV; dan tanggal 19 April 2024 sebesar Rp8.385.013,00 dengan NTPN 3AC340NA04DDF0UK.
2. Kelebihan pembayaran belanja modal pada satker PPN Brondong senilai Rp14.615.359,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 26 Maret 2024 dengan NTPN 669AE7QL0DTHPOMJL.
3. Pekerjaan konstruksi Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Tahap II pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya tidak sesuai kontrak sebesar Rp203.549.368,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara 4 April 2024 dengan NTPN EBBC648VVEMDGJVL.
4. Pekerjaan belanja modal renovasi pada satker Politek AUP Jakarta tidak sesuai kontrak sebesar Rp301.704.671i,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 1 April 2024 sebesar Rp116.634.150,00 dengan NTPN 599F73CIFK1PQFJD dan sebesar Rp13.477.656,00 dengan NTPN 27BAB3CIFK1PQGF5.
5. Pencatatan saldo aset atas pekerjaan BUBK Kebumen yang masih dicatat secara gabungan sebagai Gedung dan Bangunan senilai Rp69.204.059.345,00 dan belum dirinci per jenis Aset.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.924.815.114.324,00 dan Rp3.903.995.205.091,00.

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.55
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	78.998.688.111	77.959.821.211	1.038.866.900	1,36
Ditjen PT	2.819.587.801.389	2.807.097.091.872	12.490.709.431	0,44
Ditjen PB	471.185.825.468	446.848.806.905	24.257.018.485	5,43
Ditjen PSDKP	140.206.467.387	139.251.833.164	954.634.423	0,69
Ditjen PDSPKP	30.161.373.276	30.161.373.276	0	0,00
Ditjen PKRL	13.492.829.862	13.492.829.862	0	0,00
BPSDM KP	349.380.879.750	347.452.105.770	1.935.973.980	0,56
BPSMS KP	21.954.749.768	21.754.845.754	282.906.014	0,93
Total	**3.924.815.114.336**	**3.883.995.205.091**	**40.819.909.231**	**1,00**

Nilai akumulasi penyusutan jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.212.977.554.092,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.56
Daftar Rinci Nilai Tercatat jalan, Irigasi dan Jaringan Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2023

Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Tercatat/Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
103-Jalan Dan Jembatan	1.877.592.100.170	906.023.023.431	943.464.028.945	934.127.941.795
105-Bangunan Air	1.830.336.030.179	1.013.118.608.658	1.192.123.002.848	138.005.838.171
106-Instalasi	385.691.629.952	425.555.796.846	493.039.990.178	138.351.636.774
504-Jaringan	320.482.554.021	90.181.372.266	24.849.894.442	89.332.659.026
Total	**3.924.815.114.320**	**1.975.191.295.201**	**2.212.977.554.093**	**1.711.837.268.232**

Ringkasan mutasi akun jalan, Irigasi dan jaringan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.57
Ringkasan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**3.883.995.205.091**
Mutasi Tambah		**124.965.154.286**
180	Penambahan Saldo Awal	[illegible]
101	Pembelian	9.095.214.891

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
102	Transfer Masuk	32.608.259.951
103	Hibah Masuk	83.503.000
105	Penyelesaian PembangunanDengan RDP	2.186.791.905
107	Reklasifikasi Masuk	3.411.717.900
112	Perolehan Lainnya	40.186.765.290
113	Penyelesaian PembangunanLangsung	179.031.716
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	324.432.363
131	Likuidasi Masuk	5.498.362.735
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.303.878.424
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.662.669.330
205	Penemuan Aset Tetap Renovasi	894.403.606
209	Pengembangan Melalui RDP	4.259.868.625
214	Koreksi Susutan	204.948.434
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan akhir	1.869.757.625
Mutasi Barang		**(84.145.245.053)**
244	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(319.345.811)
302	Transfer Keluar	(32.608.259.951)
303	Hibah Keluar	(24.621.769.778)
304	Reklasifikasi Keluar	(46.283.500)
305	Koreksi Pencatatan	(2.896.508.928)
313	Likuidasi Keluar	(3.498.362.735)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(872.714.350)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**3.924.015.114.334**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp905.658.497,00.
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.097.790.571,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp328.441.250,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.014.900.332,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp749.033.138,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp202.049.600,00.
3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.737.249.987,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi

Daya sebesar Rp36.907.592.157,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp4.006.966.807,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp28.451.000,00.

4. Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp83.583.000,00.
5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.441.512.976,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp745.278.929,00.
6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp916.356.900,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.495.361.000,00.
7. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.405.745.803,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp36.601.407.407,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp179.512.000,00.
8. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp179.031.716,00.
9. Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp324.432.363,00.
10. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp3.498.362.735,00.
11. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp386.260.977,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp413.909.706,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp41.417.741,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp457.180.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp5.170.000,00.
12. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.924.490.334,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp220.843.875,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp83.545.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp453.790.121,00.
13. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi hanya terdapat unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp894.401.600,00.

14. Transaksi Pengembangan Metalsi KDP terdapat Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp142.310.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.518.891.770,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.520.386.055,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp78.300.800,00.
15. Transksani Koreksi Susutan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp204.940.434,00.
16. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat Bertambah terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.950.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.064.807.625,00.
17. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp287.320.495,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.911.730,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp26.492.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp2.613.580,00.
18. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp11.737.249.987,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp30.907.592.157,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp4.006.966.007,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp28.451.000,00.
19. Transaksi Hibah Keluar yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat Bertambah terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp8.949.787.400,00; pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp15.671.982.370,00.
20. Transaksi Reklasifikasi Keluar yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat Bertambah terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.950.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp61.333.500,00.
21. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp12.83.840.540,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp98.113.750,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp705.354.638,00.

22. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp34.98.362.735,00.
23. Transaksi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp201.822.458,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp122.867.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp87.114.900,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp458.410.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp2.500.000,00.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap senilai Rp45.170.495,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 2 April 2024 dengan NTPN 42B1I0NA04ALPOQA.
2. Pekerjaan belanja modal renovasi pada Politek AUP Jakarta tidak sesuai kontrak sebesar Rp26.492.000,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara tanggal 22 April 2024 dengan NTPN 03ABB40VVEMV5UAS.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp226.854.882.066,00 dan Rp239.515.333.474,00.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.58
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	15.341.953.105	15.908.345.647	(567.392.482)	(3,57)
Ditjen PT	27.817.048.970	38.791.723.452	(10.974.674.482)	(28,81)
Ditjen PB	4.677.754.349	4.558.802.994	118.951.355	2,61
Ditjen PSDKP	18.976.611.320	8.137.927.320	10.838.684.000	127,59
Ditjen P2HPKP	276.585.270	276.585.270	0	0,00
Ditjen PDSI,	126.592.041.571	136.489.040.419	(9.897.618.848)	(6,42)

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
BP2SDM KP	28.434.938.079	30.936.404.731	(2.501.466.653)	(8,09)
BPSMH KP	1.916.879.361	2.213.923.261	(297.043.900)	(13,51)
Total	**226.854.802.066**	**239.515.333.474**	**(12.660.531.408)**	**(5,29)**

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.907.281.803,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya per bidang barang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.59
Daftar Rinci Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Per Akun Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2023

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Aset Tetap Renovasi	24.099.707.899	1.771.981.786	1.777.267.310	22.322.440.589
607 Aset Tetap Dalam Renovasi	24.099.707.899	1.771.981.786	1.777.267.310	22.322.440.589
Aset Tetap Lainnya	**282.755.094.167**	**6.301.000.633**	**6.238.814.293**	**199.423.879.874**
621 Buku Perpustakaan	52.936.254.679	0	0	52.936.254.679
632 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Hiburan	138.809.784.488	6.301.000.633	6.238.814.293	132.570.770.195
634 Ikan	0	0	0	0
636 Barang Bahan Non Medan	10.765.055.000	0	0	10.765.055.000
Total	**336.854.802.066**	**8.072.982.419**	**7.907.281.803**	**318.947.606.263**

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.967.267.171,00
   Merupakan pekerjaan renovasi gedung Mina Bahari II yang dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 yang akan diserahkan pada Kementerian Keuangan selaku pemilik gedung.
2. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp13.911.605.560,00
   Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada satker sebagai berikut:
   a. Sekretariat Ditjen Perikanan sebesar Rp7.529.297.386,00;
   b. Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan sebesar Rp737.483.500,00;

c. DKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.415.973.000,00;

d. DKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp208.851.674,00

Terhadap Aset Tetap Renovasi pada satker Setditjen Perikanan Tangkap dan PPS Belawan akan dilakukan transfer/serah terima/penghapusan. Sedangkan Aset Tetap Renovasi pada satker DKP Provinsi Kalimantan Timur dan DKP Provinsi Sulawesi Utara akan dilaksanakan identifikasi ulang dalam rangka proses serah terima ke pemilik aset.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.736.065.064,00

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada satker sebagai berikut:

a. Setditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan pekerjaan pembuatan partisi dan tata ruang di lantai 7 dan 8 gedung Mina Bahari IV yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar Rp1.837.601.966,00 dan pekerjaan penataan ruang podcast lantai 7 gedung Mina Bahari IV yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar Rp63.310.000,00.

b. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Merupakan pekerjaan rehabilitasi gedung kantor sebesar Rp758.946.118,00.

c. DKP Sulawesi Utara

Merupakan pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi sebesar Rp77.000.000,00 yang saat ini dalam proses penyelesaian melalui proses penghitahan atau penghapusan.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp142.600.000,00

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada satker Pangkalan SDKP Tual sebesar Rp142.600.000,00 yang merupakan biaya pengurukan tanah milik Pemkab. Raja Ampat. Diatas lahan tersebut akan dibangun kantor wilayah kerja (wilayah kerja) Raja Ampat.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp232.856.000,00

Merupakan renovasi ruang kerja Direktorat Jasa Kelautan di lantai 2 gedung Mina Bahari III yang belum diserahkan kepada Biro Umum dan PBJ selaku pemilik gedung.

6. Badan Riset dan Sumber Daya KP sebesar Rp3.100.830.600,00

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Badan Riset dan Sumber Daya KP terdapat pada satker sebagai berikut:

a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Merupakan pekerjaan renovasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar Rp379.176.300,00.

b. Pusat Riset Perikanan

Merupakan pengurugan tanah milik Pemkab. Kepulauan Tanimbar yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebesar Rp2.537.843.450,00.

c. Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebesar Rp191.010.859,00

Ringkasan mutasi akun Aset Tetap Lainnya per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.60
Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**239.515.333.474**
Mutasi Tambah		**34.128.217.309**
101	Pembelian	7.868.593.001
102	Transfer Masuk	14.063.661.818
103	Hibah Masuk	5.709.670
107	Reklasifikasi Masuk	10.793.120.000
112	Penilaian Lainnya	28.695.000
113	Penyelesaian PembangunanLangsung	385.572.859
131	Likuidasi Masuk	888.191.847
234	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	469.012
955	Pemulihan Lainnya Aset Tetap Renovasi	94.145.310
Mutasi Kurang		**(46.788.668.917)**
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(316.525)
302	Transfer Keluar	(18.895.337.920)
304	Reklasifikasi Keluar	(4.413.219.740)
305	Koreksi Pencatatan	(12.227.474.725)
311	Likuidasi Keluar	(888.191.847)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(10.363.908.160)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**226.854.882.866**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Pembelian terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.589.388.820,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.966.346.135,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp148.310.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp99.812.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.065.536.046,00.

2. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp154.299.610,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.092.316.400,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.733.555.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp83.490.000,00.
3. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5.769.670,00.
4. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp59.565.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.733.555.000,00.
5. Transaksi Perolehan Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp28.695.800,00.
6. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp193.762.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp191.810.859,00.
7. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp868.191.647,00.
8. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp469.012,00.
9. Transaksi Perolehan Lainnya Aset Tetap Renovasi terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp94.145.310,00.
10. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp316.525,00.
11. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp154.299.610,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.400.033.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.733.555.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.524.188.310,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp83.490.000,00.
12. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.328.219.740,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp85.000.000,00.
13. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.106.182.502,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan

Tangkap sebesar Rp5.522.116.977,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp99.012.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.568.163.246,00.

14. Transaksi Likuidasi Keluar terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp888.191.647,00.
15. Transaksi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp50.498.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp264.979.300,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp43.957.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp94.071.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8.898.087.860,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp734.470.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp277.043.900,00.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp91.116.357.351,00 dan Rp204.562.314.909,00.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.61
Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	62.433.001.849	665.179.599	61.768.823.050	9.286,81
Ditjen PT	20.324.415.388	22.117.905.988	(1.793.570.600)	(8,11)
Ditjen PB	1.553.206.900	124.451.543.225	(122.898.336.325)	(98,75)
Ditjen PSDKP	4.886.295.603	53.560.261.536	(48.673.866.133)	(90,88)
Ditjen PDSPKP	178.862.288	234.494.688	(55.632.400)	(23,72)
Ditjen PEBL	492.349.864	1.235.171.864	(742.822.000)	(60,14)
BP2SDM KP	1.268.525.149	1.857.242.754	(588.717.605)	(31,86)
BP3MI KP	0	840.435.345	(840.435.345)	(100,00)
Total	**91.116.357.351**	**204.562.314.909**	**(113.446.957.558)**	**(55,46)**

Penjelasan ringkas atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal antara lain berupa pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pelabuhan perikanan Dano Majiko Prov. Maluku Utara dan Ukurlaran Prov. Maluku.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa pembangunan Sentru Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan pembangunan kawasan Pelabuhan.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan budi Daya antara lain berupa jasa analisa dan penyusunan dokumen lingkungan instalasi budidaya ikan lepas pantai serta biaya-biaya pendukung pembangunan keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (*offshore*).

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP antara lain berupa pembangunan pos pengawasan, pembuatan desain *watercanon* kapal pengawas dan pengadaan kapal pengawas.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing KP

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa penyusunan site plan, perencanaan pagar dan IPAL gedung beku (*cold storage*) 1.000 ton di Muara Baru.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa renovasi gedung kantor Pemkab. Balikpapan, *masterplan* dan DED pembangunan kantor Taman Wisata Perairan Pulau Pieh serta Taman Wisata Kep. Anambas.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP antara lain berupa Perencanaan GOR mini kampus Serang, Lapangan parkir GOR mini kampus Pasar Minggu dan Perencanaan *interior* gedung Rektorat di kampus Pasar Minggu.

Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.62
Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**284.562.214.909**
Mutasi Tambah		**458.029.590.021**
302	Perolehan/Penambahan KDP	88.038.876.378
303	Pengembangan KDP	323.010.718.290
304	Koreksi Nilai KDP Bertambah	39.684.465.650
306	Transfer Masuk KDP	2.226.509.826
318	Perolehan Lainnya KDP	2.127.156.824
324	Reklasifikasi Masuk KDP	2.434.283.033
Mutasi Kurang		**(371.475.347.379)**
305	Penyelesaian Pembangunan/Pengembangan KDP	(358.548.387.337)
308	Pengembangan Melalui KDP	(45.748.708.850)
309	Penghapusan/Pengalihan KDP	(3.803.446.463)
307	Transfer Keluar KDP	(2.226.509.826)
318	Reklasifikasi Keluar KDP	(2.434.283.033)
317	Koreksi Pencatatan KDP	(160.915.349.278)
344	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(1.866.703.591)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**91.116.327.351**

Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Perolehan/Penambahan KDP terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp64.175.481.415,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.040.977.001,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp12.924.295.400,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.877.879.450,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp30.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp170.835.200,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.799.407.904,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp2.020.000.000,00.

2. Transaksi Pengembangan KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.778.687.696,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp14.987.221.608,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp76.784.029.920,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp215.626.343.990,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp165.300.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp9.476.715.092,00.
3. Transaksi Koreksi Nilai KDP Bertambah terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp74.976.060,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp941.366.490,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp35.779.888.670,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp28.830.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp2.859.404.430,00.
4. Transaksi Transfer Masuk KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.226.589.836,00.
5. Transaksi Perolehan Lainnya KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.401.075.617,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp105.206.100,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp99.012.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp521.863.107,00.
6. Transaksi Reklasifikasi Masuk KDP hanya terdapat unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.134.283.035,00.
7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp916.356.900,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp10.822.712.957,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp75.813.000.010,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp266.318.103.216,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp169.800.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.097.334.254,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp606.000.000,00.
8. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.595.388.250,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp11.253.044.164,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp16.097.409.233,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

sebesar Rp5.082.743.651,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp9.301.120.254,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.414.000.000,00.

9. Transaksi Penghapusan/Pemberhentian KDP terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp44.815.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp270.055.370,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp134.776.400,00; unit Eselon I Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk KP sebesar Rp184.644.600,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp743.022.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp807.697.250,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp640.435.345,00.
10. Transaksi Transfer Keluar KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.226.589.836,00.
11. Transaksi Reklasifikasi Keluar KDP terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.134.283.035,00.
12. Transaksi Koreksi Pencatatan KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.504.003.998,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.983.837.887,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp156.164.248.408,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp36.967.400,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp166.335.200,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp59.956.380,00.
13. Transaksi Koreksi Nilai KDP Berkurang terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp244.692.473,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp59.800.800,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp147.963.402,00; dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp634.326.906,00.

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 adalah berupa kurang volume pekerjaan renovasi konstruksi pos pengawasan pada satker Stasiun Pengawasan Sumber Daya KP Belawan senilai Rp175.802.712,00. Atas temuan tersebut telah disetor ke kas negara pada tanggal 29 April 2024 dengan NTPN D965461QV351M112.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.176.775.149.955,00 dan Rp7.762.077.498.332,00.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut:

Tabel C.63
Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	(Penurunan) Penyusutan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.864.405.827.265	5.745.678.617.959	118.727.209.306	2,32
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	891.484.474.795	809.132.422.833	82.351.052.962	10,18
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	943.464.658.441	806.033.023.421	137.431.635.019	17,05
Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.102.525.002.000	1.013.210.009.650	89.314.992.350	8,76
Akumulasi Penyusutan Jaringan	167.289.091.443	155.039.963.112	12.249.128.331	7,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.907.201.003	8.073.068.339	(166.200.336)	(2,06)
Total	**8.176.775.149.955**	**7.762.077.498.332**	**434.697.651.633**	**5,61**

Ringkasan nilai penyusutan Aset Tetap per akun per bidang barang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.64
Ringkasan Nilai Penyusutan Aset Tetap Per Akun Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2023

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Peralatan dan Mesin	6.322.310.830.665	4.945.678.617.959	5.864.405.827.265	1.458.185.003.629
301-Alat Besar	565.216.293.684	481.814.267.874	661.293.815.294	83.822.472.980
302-Alat Angkutan	2.751.015.180.099	1.735.111.089.076	1.871.812.067.192	878.343.893.067
303-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	76.230.313.305	64.761.912.936	65.241.125.768	10.989.187.295
304-Alat Pertanian	195.879.129.703	176.483.935.703	179.083.190.829	14.795.938.874
305-Alat Kantor & Rumah Tangga	729.281.043.886	635.195.166.076	637.464.232.192	86.326.899.414

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
306-Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
307-Alat Kedokteran Dan Kesehatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
308-Alat Laboratorium	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
309-Alat Persenjataan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
310-Komputer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
311-Alat Eksplorasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
312-Alat Pengeboran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
313-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
314-Alat Bantu Eksplorasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
315-Alat Keselamatan Kerja	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
316-Alat Peraga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
317-Peralatan Proses/Produksi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
318-Rambu - Rambu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
319-Peralatan Olah Raga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gedung dan Bangunan	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
401-Bangunan Gedung	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
402-Monumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
403-Bangunan Menara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
404-Tugu Titik Kontrol/Pasti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jalan dan Jembatan	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
501-Jalan Dan Jembatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Irigasi	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
502-Bangunan Air	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jaringan	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
503-Instalasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
504-Jaringan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Tetap Renovasi	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
607-Aset Tetap Dalam Renovasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Tetap Lainnya	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
601-Buku Perpustakaan	[illegible]	0	0	[illegible]
602-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
604-Ikan	0	0	0	0

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
606-Barang Bekstal Non Budaya	10.965.015.000	0	0	10.965.015.000
Total	11.908.966.000.157	7.742.877.496.032	8.176.775.369.955	13.631.190.626.202

C.3 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.3.1 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp477.778.353.020,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.65
Rincian Saldo Properti Investasi Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	186.891.004.466	0	186.891.004.466	100,00
Ditjen PB	151.245.930.000	0	151.245.930.000	100,00
Ditjen PDSPKP	88.186.261.526	0	88.186.261.526	100,00
Sekjen KP	51.545.157.028	0	51.545.157.028	100,00
Total	477.778.353.020	0	477.778.353.020	100,00

Penjelasan ringkas atas saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

3. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 22 (dua puluh dua) satker antara lain berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp11.753.410.000,00; Tanah Hasil Reklamasi sebesar Rp70.364.000.000,00; Bangunan Gudang Tertutup Permanen sebesar Rp6.219.621.960,00; Bangunan Gudang Lainnya sebesar Rp14.926.133.150,00; Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar Rp43.696.889.858,00; dan Flat/Rumah Susun Permanen sebesar Rp20.880.235.223,00.

Terdapat Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap yang belum mendapatkan asersi manajemen pada satker sebagai berikut:

1. Setditjen Perikanan Tangkap

   Berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen pada Pelabuhan Perikanan Untia sebesar Rp470.911.634,00; Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik sebesar Rp517.795.390,00; dan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai sebesar Rp1.324.957.321,00.

2. DKP Provinsi Lampung

   Berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar Rp1.112.940.000,00.

3. DKP Provinsi Kalimantan Tengah

   berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sebesar Rp44.548.900,00.

Selain itu terdapat aset ekstrakomptabel yang diklasifikasikan sebagai properti investasi pada satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen sejumlah 4 unit sebesar Rp78.312.900,00.

4. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 3 (tiga) satker antara lain berupa Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium sebesar Rp18.387.569.000,00; Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp2.187.651.000,00; Bangunan Kolam/Bak Ikan sebesar Rp124.850.119.000,00; dan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen sebesar Rp4.411.034.000,00. Selain itu terdapat aset ekstrakomptabel yang diklasifikasikan sebagai properti investasi pada satker Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang berupa Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen sejumlah 1 unit sebesar Rp13.936.000,00 dan Gedung Pos Jaga Permanen sejumlah 2 unit sebesar Rp10.461.000,00.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

   Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa Pasar Ikan Modern (Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen) sebesar Rp80.596.694.208,00; Gudang Beku/Cold Storage 2.000 ton (Bangunan Gudang Lainnya) sebesar Rp7.502.886.000,00; dan tempat pengolaan styrofoam di Muara Baru (Bangunan Gudang Tertutup Permanen) sebesar Rp86.681.318,00.

6. Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP

   Properti Investasi pada Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP berupa akuarium PAMARI (Bangunan Gedung Pendidikan Permanen) sebesar Rp51.545.157.028,00.

Rincian aset tetap berupa Properti Investasi per bidang barang per satker per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.66
Daftar Rinci Properti Investasi Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2023

Kode dan Nama Bidang/Nama Eselon I/Nama Satker	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
301 Tanah	**103.477.915.000**	**0**	**0**	**103.477.915.000**
Ditjen Perikanan Tangkap	**85.098.346.000**	**0**	**0**	**85.098.346.000**
PPN Pemangkat	2.972.930.000	0	0	2.972.930.000
PPN Pelabuhan Ratu	11.753.418.000	0	0	11.753.418.000
PPN Rajawarun	70.364.998.000	0	0	70.364.998.000
Ditjen Perikanan Budi Daya	**18.287.569.000**	**0**	**0**	**18.287.569.000**
KPSDL Serang	18.287.569.000	0	0	18.287.569.000
401 Bangunan Gedung	**274.327.436.818**	**0**	**67.017.041.329**	**207.340.394.491**
Ditjen Perikanan Tangkap	**191.767.446.666**	**0**	**14.744.681.084**	**67.001.245.382**
SKP Provinsi Lampung	1.112.940.000	0	185.490.003	927.449.997
SKP Provinsi Kalimantan Tengah	44.546.908	0	18.236.729	26.310.182
Subdijen Perikanan Tangkap	2.313.664.385	0	353.883.441	2.960.780.944
PPN Karangantu	1.083.189.124	0	185.362.711	901.826.413
PPN Sungailiat	5.891.423.200	0	896.431.857	4.995.991.343
PPN Tanjung Pandan	468.873.000	0	73.226.064	396.646.936
PPP Teluk Batang	1.882.188.763	0	259.258.053	1.622.930.629
PPN Pemangkat	1.339.162.000	0	458.955.750	1.085.106.250
PPN Kendawangan	478.746.000	0	86.722.898	386.923.192
PPN Belawan	1.074.453.000	0	165.425.328	908.927.672
PPN Ternate	193.073.000	0	29.496.827	163.448.173
PPN Prigi	3.924.323.000	0	534.828.632	3.389.494.468
PPN Brondong	4.808.126.000	0	685.436.662	4.122.689.338
PPN Ujung	2.828.873.000	0	579.196.090	2.249.877.010
PPN Bungus	728.290.000	0	128.645.219	603.644.781
PPN Nizam Zachman	14.888.113.793	0	3.516.666.340	11.371.447.253
PPN Bendahi	31.279.851.427	0	4.473.166.926	26.806.684.501
PPN Pelabuhan Ratu	10.712.908.000	0	1.564.298.251	9.148.601.749
PPN Ujung	968.037.000	0	163.262.077	804.774.923
PPN Rajawarun	10.088.546.920	0	953.237.285	9.069.323.797
PPN Pengambengan	2.697.963.413	0	135.244.980	2.562.657.433

Kode dan Nama Bidang/Nama Eselon I/Nama Satker	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
PPS Bitung	3.694.434.000	0	475.586.978	3.218.847.022
Ditjen Perikanan Budi Daya	132.858.361.000	0	38.632.207.644	94.226.153.356
BBPBAP Sukabumi	3.911.318.000	0	1.874.446.369	2.036.871.631
BLUPPB Karawang	114.874.867.000	0	33.480.337.593	81.394.829.407
BPBIL Ujung	14.047.976.000	0	4.077.713.932	9.970.262.068
Ditjen PDSPKP	88.196.361.326	0	8.981.368.671	79.214.992.655
Satuan Pengawas Fungsional Pusat Data Statistik KP	88.196.291.326	0	8.981.368.671	79.214.892.655
BPSDMKP	53.545.157.010	0	6.639.064.330	46.906.092.680
BPI Tegal	53.545.157.010	0	6.639.064.330	46.906.092.680
Total	477.855.341.010	0	67.017.041.329	410.838.299.491

Pengungkapan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yaitu terdapat Aset Tetap yang belum diidentifikasi dan diinventarisasi sebagai Properti Investasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanah dan fasilitas pendukung berupa tanggul, lahan reklamasi, jalan penghubung, dan bangunan prasasti di Pulau Nipa tercatat pada Sekretariat Ditjen PKRL yang dimanfaatkan oleh pihak lain melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan;
2. Tanah di Pulau Cemara Besar yang direncanakan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tercatat pada BPI Tegal.

C.3.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp67.013.812.119,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi ada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.67
Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	19.781.171.674	0	19.781.171.674	100,00
Ditjen PB	38.632.207.644	0	38.632.207.644	100,00
Ditjen PDSPKP	8.981.368.671	0	8.981.368.671	100,00

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
BP2SDM KP	4.629.864.130	0	4.629.864.130	100,00
Total	**67.013.811.119**	**0**	**67.013.811.119**	**100,00**

Ringkasan nilai penyusutan Properti Investasi per akun per bidang barang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel C.67 diatas.

C.6 Piutang Jangka Panjang

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.68
Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	281.814.549	162.324.544	39.690.209	24,68
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(157.851.750)	(156.845.750)	(205.959)	0,13
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	**43.962.799**	**4.478.749**	**39.484.050**	**881,59**
Piutang Jangka Panjang Lainnya	103.580.242.333	103.095.598.961	484.643.372	0,47
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya	(517.803.203)	(515.477.986)	(2.325.217)	0,45
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	**103.062.341.130**	**102.580.120.975**	**482.220.155**	**0,47**
Total	**103.106.303.929**	**102.584.599.724**	**521.704.205**	**0,51**

Penjelasan Piutang Jangka Panjang per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.6.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp201.014.544,00 dan Rp161.324.544,00.

Rincian saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.69
Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PSDKP	0	4.500.000	(4.500.000)	(100,00)
BPSDM KP	201.014.544	156.824.544	44.190.000	28,18
Total	**201.014.544**	**161.324.544**	**39.690.000**	**24,60**

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 2 (dua) pada Unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi ditetapkan adanya unsur kelalaian atas nama Sdr. AJ dengan nilai penetapan Rp5.000.806,00 dan diangsur selama 10 bulan dan telah lunas.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada satker sebagai berikut:

   a. Pusat Pendidikan

      Merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi biaya atas pelanggaran dalam pelaksanaan tugas belajar atas nama Sdr. HH Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.117/MEN/KU.440/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada tanggal 16 Juli 2019. Saldo Piutang TP/TGR per 31 Desember 2023 sebesar Rp156.824.545,00.

b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak

Berdasarkan laporan hasil audit investigasi (LHAI) nomor R.112/ITL3/NP.230/10/2023 terdapat Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. FF terkait kegiatan Pelatihan Satpam yang dilaksanakan di SUPM senilai Rp66.240.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah dilakukan setoran ke kas negara sebesar Rp56.500.000,00, namun terdapat beberapa setoran yang menggunakan akun tidak sesuai, yaitu akun penerimaan atas pemanfaatan BMN dan penerimaan kembali belanja lain-lain, sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.190.000,00.

Adapun kualitas dari saldo piutang TP/TGR pada masing-masing unit eselon I per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.70
Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2022

Unit Eselon I	Saldo	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
BPSDM KP	201.014.544	44.190.000	0	0	156.824.544
Total	**201.014.544**	**44.190.000**	**0**	**0**	**156.824.544**

C.4.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.051.745,00 dan Rp156.845.795,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.71
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PDKL	6.250	21.250	(15.000)	(70,59)
BPSDM KP	157.045.495	156.824.545	220.950	0,14
Total	**157.051.745**	**156.845.795**	**205.950**	**0,13**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Ditjen PDKL merupakan kesalahan jurnal pada akun tersebut, yang akan dikoreksi pada semester I tahun 2024.

C.4.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp103.580.242.333,00 dan Rp103.095.598.961,00.

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.72
Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	9.370.590	0	9.370.590	100,00
Ditjen PT	2.855.976.110	0	2.855.976.110	100,00
Ditjen PRL	100.714.895.633	103.095.598.961	(2.380.703.328)	(2,31)
Total	**103.580.242.333**	**103.095.598.961**	**484.643.372**	**0,47**

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.370.590,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar yang harus dikembalikan ke kas Negara di satker Biro Umum dan PBJ. Pelunasan piutang ini dilakukan dengan cara angsuran selama lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pelaporan.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.855.976.110,00 merupakan pembebanan ganti kerugian negara atas pelanggaran kewajiban pegawai tugas belajar atas nama Sdr. GP di satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan piutang perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di

Pulau Nipa kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Surya Mina Asmuva. Adapun jangka waktu KSP adalah 30 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan perikatan KSP telah ditetapkan bahwa selama kurun waktu 30 tahun KKP akan memperoleh kontribusi tetap sebesar 0,50% dari nilai investasi sedangkan nilai investasinya sendiri mengalami kenaikan 7,50% setiap tahun. Perhitungan kontribusi yang akan diterima per tahun terhitung sejak ditetapkannya KSP sampai dengan berakhirnya KSP adalah sebagai berikut:

Tabel C.73

Perhitungan Kontribusi Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa

No.	Tahun	Nilai Investasi	Kenaikan Investasi per tahun	Nilai Investasi Tahun Berjalan	Kontribusi Tetap per tahun	Piutang Jangka Panjang Lainnya
		(Hijrah KSP)	7,50%		0,50%	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2024	235.000.000.000	-	235.000.000.000	1.175.000.000	118.381.806.000
2	2025	252.625.000.000	17.625.000.000	252.625.000.000	1.263.125.000	117.040.101.000
3	2026	271.571.875.000	18.946.875.000	271.571.875.000	1.357.859.375	115.795.235.750
4	2027	291.965.765.625	20.363.890.625	291.965.765.625	1.459.828.828	114.638.294.782
5	2028	313.863.948.047	21.898.182.422	313.863.948.047	1.569.319.740	113.561.671.834
6	2029	337.329.144.150	23.535.196.103	337.329.144.150	1.686.645.721	112.558.055.115
7	2030	362.428.229.961	25.279.085.811	362.428.229.961	1.812.141.150	111.621.353.135
8	2031	389.258.847.208	27.159.617.247	389.258.847.208	1.946.294.236	110.745.648.986
9	2032	417.927.408.099	29.168.560.891	417.927.408.099	2.089.637.040	109.925.224.786
10	2033	448.547.188.706	31.309.780.607	448.547.188.706	2.242.735.944	109.154.510.329
11	2034	481.236.827.658	33.589.638.952	481.236.827.658	2.406.184.138	108.428.108.960
12	2035	516.121.687.082	36.020.859.424	516.121.687.082	2.580.608.435	107.741.794.695
13	2036	553.329.839.864	38.611.152.782	553.329.839.864	2.766.649.199	107.091.406.555
14	2037	593.000.328.855	41.373.488.991	593.000.328.855	2.965.001.644	106.473.917.360
15	2038	635.285.351.876	44.317.022.021	635.285.351.876	3.176.426.759	105.886.384.140
16	2039	680.355.751.258	47.451.399.382	680.355.751.258	3.401.778.756	105.325.945.000
17	2040	728.380.929.095	50.787.577.837	728.380.929.095	3.641.904.645	104.790.824.000
18	2041	779.546.594.231	54.336.665.136	779.546.594.231	3.897.732.971	104.279.324.000
19	2042	834.049.855.827	58.113.261.596	834.049.855.827	4.170.249.279	103.789.824.000
20	2043	892.093.346.735	62.133.990.908	892.093.346.735	4.460.466.734	103.321.824.000
21	2044	954.939.881.207	66.414.470.472	954.939.881.207	4.774.699.406	102.873.824.000
22	2045	1.021.835.672.892	70.973.791.685	1.021.835.672.892	5.109.178.364	102.444.324.000
23	2046	1.093.045.169.995	75.829.496.803	1.093.045.169.995	5.465.225.850	102.032.324.000
24	2047	1.168.838.331.895	81.003.161.900	1.168.838.331.895	5.844.191.659	101.637.324.000
25	2048	1.249.496.015.128	86.517.683.233	1.249.496.015.128	6.247.480.076	101.258.824.000
26	2049	1.335.310.736.187	92.396.721.059	1.335.310.736.187	6.676.553.681	100.895.324.000
27	2050	1.426.589.536.920	98.664.800.733	1.426.589.536.920	7.132.947.685	100.546.324.000
28	2051	1.523.663.124.125	105.347.587.205	1.523.663.124.125	7.618.315.621	100.211.324.000

No.	Tahun	Nilai Investasi	Kenaikan Investasi per tahun	Nilai Investasi Tahun Berjalan	Kontribusi Tetap per tahun	Piutang Jangka Panjang Lainnya
		(Hitung KSP)	9,58%		6,58%	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
29	2042	1.628.092.862.372	155.186.963.136	1.783.279.805.229	8.758.999.326	9.407.323.933
30	2043	1.756.199.806.229	131.264.985.192	1.887.464.790.421	9.407.323.933	-

Piutang terkait (KSP) BMN di Pulau Nipa dicatat pada 2 (dua) akun yaitu kontribusi tetap tahun 2024 sebesar Rp2.388.703.328,00 yang dicatat pada akun Piutang Lainnya dan sisa kontribusi tetap sampai dengan tahun 2043 sebesar Rp Rp100.714.895.633,00.

Pada periode Triwulan III TA 2023, Piutang Jangka Panjang KSP Pulau Nipa berpindah akun dari akun Piutang Jangka Panjang Lainnya (155111) ke akun Piutang PNBP (115211) sebesar Rp103.095.598.961,00. Perpindahan ini merupakan hasil dari proses penginputan Piutang KSP P. Nipa pada aplikasi SAKTI modul Piutang sebagai tindak lanjut atas selisih rekonsiliasi internal pada periode sebelumnya dan dikarenakan pada tahun 2023 sudah wajib mencatat piutang pada aplikasi SAKTI Modul Piutang. Pencatatan pada modul piutang mengakibatkan perubahan piutang jangka panjang menjadi piutang jangka pendek. Dari hasil pertemuan 3 pihak (tripartied) disepakati akan dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang dengan menghapus pencatatan piutang pada modul piutang.

Adapun kualitas dari saldo piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit eselon I per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.74
Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Saldo	Lancar	Kurang Lancar	Ditagihkan
Setjen	9.378.590	9.378.590	-	-
Ditjen PT	2.855.976.110	2.855.976.110	-	-
Ditjen PRL	100.714.895.633	100.714.895.633	-	-
Total	**103.580.382.333**	**103.580.382.333**	**-**	**-**

C.4.8 Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp517.901.203,00 dan Rp515.477.986,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.75
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	46.853	0	46.853	100.00
Ditjen PT	14.279.881	0	14.279.881	100.00
Ditjen PRL	103.574.869	115.477.386	(11.902.517)	(2.31)
Total	**117.901.203**	**115.477.386**	**2.423.217**	**0.47**

C.5 Aset Lainnya

Rincian saldo Aset Lainnya per akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.76
Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	214.231.398.172	214.231.398.172	0	0.00
Aset Tak Berwujud	234.923.989.781	105.977.861.286	28.944.519.495	14.05
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	2.745.000	0	2.745.000	100.00
Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga	32.493.421.582	0	32.493.421.582	100.00
Aset Lainnya	443.267.396.082	543.799.589.641	(100.532.193.559)	(10.49)
Akm Peny dan Amortisasi Aset Lainnya	(585.938.982.710)	(585.267.107.493)	79.329.284.695	(13.55)
Total	**418.977.508.907**	**378.741.361.694**	**40.236.647.213**	**10.62**

Penjelasan Aset Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sama yaitu sebesar Rp214.231.398.172,00.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan pemanfataan aset melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) antara KKP dengan PT.Surya Mina Adimusa atas aset yang terdapat di Pulau Nipa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau.

Kerja sama pemanfaatan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-502/MK.6/2013 dengan jangka waktu pemanfataan selama 30 tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali.

Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 234/MEN-KP/III/2014 dan nomor B.285/MEN-KP/V/2014 aset yang dikerjasamakan terdiri dari:

1. Tanah sebesar Rp110.346.287.172,00;
2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp0.197.000,00;
3. Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp13.121.507.000,00;
4. Tanggul Keliling senilai Rp90.754.497.000,00

Aset yang telah dikerja sama pemanfaatan tersebut diatas memenuhi kriteria sebagai aset Properti Investasi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan asesi manajemen sebagai dasar penetapan menjadi aset Properti Investasi. Pelaksanaan asesi manajemen tersebut direncanakan pada Semester I tahun 2024.

Penjelasan lebih rinci terhadap kerjasama pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dapat dilihat pada pos pengungkapan lainnya.

C.5.2 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp234.921.980.781,00 dan Rp205.977.461.286,00. Rincian saldo Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel C.77
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Hak Cipta	25.800.800	25.800.800	0	0,00
Paten	12.549.291.776	12.540.841.776	8.450.000	0,07
Software	128.704.862.528	102.303.339.592	26.400.923.328	25,81
Lisensi	1.988.544.457	4.705.407.193	(2.716.862.536)	(57,74)
Hasil Kajian/Penelitian	789.767.000	789.767.000	0	0,00

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Aset Tak Berwujud Lainnya	90.865.314.828	85.613.226.143	5.252.088.785	6,13
Total	234.921.980.781	205.977.441.286	28.944.539.495	14,05

Rincian aset tetap berupa Aset Tak Berwujud per akun per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.78
Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Akun
Per 31 Desember 2023

Nama Akun	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Hak Cipta	25.000.000	3.928.585	4.285.707	20.714.293
Paten	12.949.291.776	6.882.904.204	7.604.241.754	4.945.050.022
Software	138.784.843.529	89.296.119.585	89.441.642.733	49.343.419.796
Lisensi	1.908.544.657	1.691.034.591	1.308.987.661	408.456.996
Hasil Kajian/Penelitian	789.767.000	0	0	789.767.000
Aset Tak Berwujud Lainnya	90.865.314.828	935.531.701	1.810.330.815	89.054.984.013
Total	234.921.980.781	80.813.418.796	80.668.288.160	154.461.992.613

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap Tak Berwujud pada masing-masing akun adalah sebagai berikut:

1. Hak Cipta

   Aset Tak Berwujud berupa Hak Cipta antara lain berupa *software* pembelajaran *E-Job*.

2. Paten

   Aset Tak Berwujud berupa Paten antara lain berupa paten rumpon elektronik dengan pengamatan langsung, paten proses pemurnian garam dan paten berupa buoy untuk pemantauan kualitas air.

3. *Software*

   Aset Tak Berwujud berupa *Software* antara lain berupa software pengawasan armada/kapal kehutan dan perikanan; *software coolfa ultimate digital touch point*; dan *software ultimate* monasional proses bisnis.

4. Lisensi

   Aset Tak Berwujud berupa lisensi antara lain berupa Sistem *Backup Data Virtualisasi, Themis Server License Standby* dan *Radar Module License*.

5. Hasil Kajian/Penelitian

   Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian antara lain berupa rancang bangun rinci (*Detail Engineering Design*).

6. Aset Tak Berwujud Lainnya

   Aset Tak Berwujud berupa Aset Tak Berwujud Lainnya antara lain berupa Radar Data 1800 unit *Scenes*, Ocerangrupity Data dan Data Citra COSMO-SkyMED 150 *Scenes*.

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.79
Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**205.977.461.286**
Mutasi Tambah		**156.322.949.083**
100	Penambahan Saldo Awal	1.211.388.758
101	Pembelian	98.676.020.400
102	Transfer Masuk	80.436.669.629
103	Hibah Masuk	18.093.399
105	Penyelesaian Pembangunan/Jenga KDP	4.998.233.955
107	Reklasifikasi Masuk	6.269.337.955
113	Perubahan Lainnya	3.309.422.055
181	Lisensi Masuk	45.000.000
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	248.157.150
402	Penggunaan lembah BMN yang telah dihentikan penggunaan aktif	110.020.000
Mutasi Kurang		**(127.378.429.588)**
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(21.525.134.993)
302	Transfer Keluar	(80.446.669.429)
304	Reklasifikasi Keluar	(8.092.835.213)
305	Koreksi Pencatatan	(35.679.000)
311	Likuidasi Keluar	(45.000.000)
401	Penghentikan Aset Dari Penggunaan	(18.233.119.953)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**234.921.980.781**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp858.980.750,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp49.950.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp302.450.000,00.
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp59.110.125.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp83.362.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp189.810.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp294.638.400,00.
3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp80.115.541.429,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp133.770.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp197.358.000,00.
4. Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp16.003.389,00.
5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan XDP terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.990.222.955,00.
6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.990.222.955,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp170.365.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp66.000.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.042.750.000,00.
7. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.108.422.055,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp192.000.000,00.
8. Transaksi Likuidasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp45.000.000,00.
9. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp89.062.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp199.095.150,00.
10. Transaksi Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp118.820.000,00.

11. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp21.523.384.993,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.750.000,00.
12. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp80.115.561.429,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp133.770.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp197.358.000,00.
13. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.990.222.555,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.102.612.258,00.
14. Transaksi Koreksi Pencatatan hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp35.670.000,00.
15. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp45.000.000,00.
16. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.369.861.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp156.684.935,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp12.045.778.238,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.790.868.705,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp1.501.835.000,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp358.091.575,00.

C.5.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah aset tak berwujud yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.745.000,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.80
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
BPSDM KP	2.745.000	0	2.745.000	100,00

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Total	2.745.000	0	2.745.000	100,00

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan salah pencatatan atas biaya-biaya terkait renovasi kawasan kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Atas kesalahan tersebut akan dikoreksi pada Semester I tahun 2024.

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.83
Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		-
Mutasi Tambah		**8.892.036.482**
582	Perolehan/Penambahan KDP	1.469.529.525
583	Pengembangan KDP	3.562.496.957
Mutasi Kurang		**(6.629.281.482)**
585	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	(4.990.222.955)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(39.058.527)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**2.745.000**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Perolehan/Penambahan KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.427.725.998,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp41.803.527,00.
2. Transaksi Pengembangan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.562.496.957,00.
3. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.990.222.955,00.
4. Transaksi Koreksi Pencatatan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp39.058.527,00.

C.5.4 Dana di Rekening Penampungan – Kementerian/Lembaga

Pemerintah menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dengan tujuan untuk:

1. Menjaga prinsip "pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN baru dapat dilaksanakan setelah barang/jasa diterima;
2. Mendukung optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Sedangkan ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan yang:

- Pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran;
- Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya; dan
- Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan KPA.

Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.493.421.582,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.82
Rincian Saldo Dana Rekening Penampungan- K/L
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	17.644.494.012	0	17.644.494.012	100,00
Ditjen PT	2.760.603.390	0	2.760.603.390	100,00
Ditjen PB	2.822.305.928	0	2.822.305.928	100,00
Ditjen PDPKP	2.043.577.398	0	2.043.577.398	100,00
Ditjen PDSPKP	5.677.273.150	0	5.677.273.150	100,00
Ditjen PKRL	411.012.379	0	411.012.379	100,00
BPSDM KP	1.138.076.326	0	1.138.076.326	100,00

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Total	32.493.421.382	0	32.493.421.382	100,00

Penjelasan ringkas atas saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp17.044.494.012,00 antara lain berupa pengadaan jasa *main bandwith*; jasa colocation service; dan jasa satuan pengaman.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.760.682.390,00 antara lain berupa Pembangunan mess pegawai dan tempat parkir inap, rehabilitasi jembatan tempat pemasaran ikan (TPI) pelabuhan perikanan Klademak Kota Sorong.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.820.385.920,00 antara lain berupa Pengadaan dan biaya pengiriman alat berat (excavator); dan jasa konsultasi penyusunan dokumen analisis AMDAL kawasan budidaya udang terintegrasi.

4. Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP

   Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.041.577.398,00 antara lain berupa pemeliharaan sarana dan prasarana stasiun PSDKP Pontianak; renovasi pos pengawasan stasiun PSDKP Belawan; dan pembelian bahan bakar minyak kapal pengawas.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

   Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp5.677.273.150,00 antara lain berupa penataan dan perlengkapan pendukung gerai pemasaran ikan di Jakarta Timur; dan pembangunan gudang beku (cold storage) portabel.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp411.012.370,00 antara lain berupa pekerjaan integrasi lahan penggaraman.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Dana Rekening Penampungan – K/L pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp1.130.076.326,00 antara lain berupa pengadaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan dan kebersihan.

Rincian dan mutasi Dana Rekening Penampungan – K/L per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.83
Rincian dan Mutasi Dana di Rekening Penampungan – K/L
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023

Unit Eselon I	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Per 31 Des 2023
Setjen	16.846.329.433	1.891.635.821	17.644.494.612
Ditjen PT	6.782.557.390	2.841.955.000	3.760.602.390
Ditjen PB	6.085.537.742	3.265.151.814	2.820.385.928
Ditjen PSDKP	5.692.667.390	3.651.890.000	2.040.777.390
Ditjen PDSPKP	12.285.443.400	6.608.268.450	5.677.278.150
Ditjen PRL	411.012.370		411.012.370
BPSDM KP	1.214.213.226	76.136.900	1.138.076.326
Total	**47.927.329.167**	**15.434.137.385**	**32.493.421.282**

Berdasarkan monitoring OMSPAN tanggal 13 Februari 2024 dan wawancara dengan petugas SAKTI masing-masing Unit Eselon I diketahui bahwa seluruh pekerjaan yang masuk dalam RPATA sudah dilakukan jurnal untuk menghilangkan akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya dan memunculkan Utang pada Pihak Ketiga, karena per 31 Desember 2023 pembayaran kepada pihak ketiga (penyedia barang/jasa) belum dilakukan. Kemudian atas pekerjaan yang masuk dalam RPATA tersebut juga sudah diterbitkan SP2D pembayaran kepada penyedia barang/jasa pada tanggal 4 Januari sampai dengan 1 Februari 2024.

C.5.5 Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan yang dapat disebabkan karena usu, ketinggalan jaman, tidak sesuai kebutuhan organisasi, rusak berat atau masa kegunaannya telah berakhir. Aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktif harus dieliminasi dari neraca. Jenis eliminasi yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara menghapus bukukan aset tersebut, tetapi apabila aset tersebut masih bernilai ekonomis dapat memilih jenis eliminasi lain yang dapat berupa namun tidak terbatas pada transfer keluar atau hibah keluar kepada entitas lain yang membutuhkan. Saldo per 31

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp443.267.346.082,00 dan Rp543.799.589.641,00.

Rincian saldo aset lain-lain per akun adalah sebagai berikut:

Tabel C.84
Rincian Saldo Aset Lain-Lain Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	7.298.038.835	42.298.922.910	(35.000.884.075)	(82,75)
Ditjen PT	188.426.295.119	156.235.306.109	34.191.089.010	15,48
Ditjen PB	173.958.588.898	204.485.062.309	(31.194.473.665)	(15,25)
Ditjen PDRP	11.857.378.009	66.406.073.097	(54.548.695.088)	(82,14)
Ditjen PDSPKP	2.486.445.676	14.772.693.676	(12.286.228.000)	(83,17)
Ditjen PKRL	21.218.162.880	16.902.462.124	4.307.700.756	25,49
BPSDM KP	96.646.116.160	42.229.917.102	6.006.198.983	16,38
BPSMKP	0	467.151.240	(467.151.240)	(100,00)
Total	**443.267.346.082**	**543.799.589.641**	**(100.532.243.559)**	**(18,49)**

Aset Lain-Lain pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa pencatatan aset eks dana bergulir program pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil (PUPTSK) tahun 2003 s.d. 2005 berdasarkan BAST nomor KPB.1794/DJPT.1/PL.450/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 antara Ditjen Perikanan Tangkap dan Perikanan dengan Ditjen Kekayaaan Negara. Karena jumlah aset eks dana bergulir tersebut sangat banyak maka pada tahun 2023 aset eks dana bergulir tersebut dicatat dalam 1 (satu) barang. Selanjutnya akan dilaksanakan inventarisasi atas aset eks dana bergulir sebagai dasar pencatatan riil per barang. Sedangkan Aset Lain-Lain pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa pembangunan Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA *Offshore*) sebesar Rp114.871.468.303,00. Pembangunan KJA *Offshore* tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lain-Lain karena sebagian besar komponen dari 3 (tiga) unit KJA *Offshore* yang berlokasi di Sabang, Karimun Jawa dan Pangandaran mengalami kerusakan sehingga secara fungsional tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan semula tetapi masih mungkin dimanfaatkan untuk tujuan yang lain dengan pengadaan sarana dan prasarana lain.

Penjelasan terkait aset eks dana bergulir dan KJA Offshore kami jelaskan lebih lanjut pada pos pengungkapan lainnya.

Rincian Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan per golongan barang per per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.85
Rincian Aset Tetap Lain-Lain Per Golongan Barang
Per 31 Desember 2023

No.	Golongan Barang	Nilai
1	Tanah	12.321.000
2	Peralatan dan Mesin	339.619.603.323
3	Gedung dan Bangunan	41.948.891.751
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.077.404.000
5	Aset Tetap Lainnya	2.303.593.153
6	Aset Tak Berwujud	24.005.533.047
Total		**443.367.346.082**

Ringkasan mutasi akun Aset Lain-Lain per jenis transaksi per per 31 Desember 2023 kami sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel C.86
Ringkasan Mutasi Aset Lain-Lain Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2023

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		**343.799.389.641**
Mutasi Tambah		**442.667.941.473**
192	Transfer Masuk (Hasil Guna)	7.824.994.473
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	427.958.954.562
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	8.384.012.438
Mutasi Barang		**(343.299.385.832)**
301	Penghapusan	(6.106.414.204)
312	Likuidasi Keluar (hasil Guna	(677.371.948)
392	Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(6.307.623.413)
393	Rilisb Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(5.853.194.674)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(144.767.496.321)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(375.654.945.298)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		**443.367.346.082**

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Transfer Masuk (BMN Yang dihentikan) terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.298.273.413,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp89.350.000,00; dan unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp637.371.060,00.
2. Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp34.474.105.924,0h; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp528.201.262,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp79.744.451.316,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp162.932.718.382,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp66.101.648.761,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.506.320.909,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp35.615.298.520,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp24.001.221.295,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp20.394.960.233,00.
3. Transaksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.468.903.788,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.455.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp76.375.800,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp382.653.400,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp334.994.250,00; dan unit Eseloo I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp16.631.000,00.
4. Transaksi Penghapusan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp404.944.717,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.366.055.529,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp450.726.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp286.796.453,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.197.574.025,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp67.877.560,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp347.240.000,00.
5. Transaksi Likuidasi Kelur Henti Guna hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp637.371.060,00.

6. Transaksi Transfer Keluar (BMN Yang dihentikan) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.296.273.413,00; dan unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp89.350.000,00.
7. Transaksi Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.742.035.075,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp530.452.000,00; dan unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp379.847.599,00.
8. Transaksi Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.859.937.375,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp7.597.135.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp11.912.6554.055,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp11.303.625.666,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp805.556.450,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp4.043.184.975,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp31.502.000,00.
9. Transaksi Pencatatn Barang Yang Mau Dihapuskan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp74.679.011.995,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp528.201.262,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp39.852.591.702,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp74.035.834.092,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp109.079.721.730,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp13.832.548.909,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp29.307.273.090,00; unit Eselon I Badan Penyuluh dan SDM KP sebesar Rp15.839.754.027,00; dan unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp20.500.000.477,00.

C.5.6 Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain per akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.87

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	(Kenaikan) Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Konstruksi dengan Pihak Ketiga	40.296.983.371	34.023.143.579	6.267.839.791	18,42
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	367.251.664.821	443.149.798.030	(75.898.133.209)	(17,13)
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	4.285.707	3.928.565	357.142	9,09
Akumulasi Amortisasi Paten	7.604.241.754	6.882.804.264	721.437.490	10,48
Akumulasi Amortisasi Software	69.661.642.731	69.296.129.580	165.513.148	0,24
Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.508.087.661	3.691.016.591	(2.182.928.930)	(57,19)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	1.016.330.315	909.531.792	876.798.523	91,59
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17.933.746.350	27.280.827.502	(9.345.080.452)	(34,26)
Total	**505.938.982.710**	**585.267.187.405**	**(79.328.204.695)**	**(13,55)**

Ringkasan nilai penyusutan dan amortisasi Aset Lainnya per akun per bidang barang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.88

Ringkasan Nilai Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per Bidang Barang

Per 31 Desember 2023

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Konstruksi Dengan Pihak Ketiga	**214.231.390.172**	**34.023.143.579**	**40.290.983.371**	**173.940.414.801**
201-Tanah	110.346.207.172	0	0	110.346.207.172
401-Bangunan Gedung	9.107.800	1.034.890	1.241.868	7.865.132
501-Jalan Dan Jembatan	13.121.507.000	10.120.346.310	11.620.426.659	1.501.080.341
502-Bangunan Air	90.756.497.000	23.901.762.379	28.429.314.844	62.327.182.156
Hak Cipta	**25.000.000**	**3.928.565**	**4.285.707**	**20.714.293**
601-Aset Tak Berwujud	25.000.000	3.928.565	4.285.707	20.714.293
Paten	**12.349.291.754**	**6.882.804.264**	**7.604.241.754**	**4.745.050.000**

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
801-Aset Tak Berwujud	13.549.391.774	6.882.809.268	7.604.241.734	6.945.050.022
Software	**138.704.863.520**	**69.296.119.583**	**69.461.642.731**	**59.242.419.789**
801-Aset Tak Berwujud	138.704.863.520	69.296.119.583	69.461.642.731	59.242.419.789
Lisensi	**1.988.544.657**	**1.691.034.591**	**1.580.087.661**	**408.456.996**
801-Aset Tak Berwujud	1.988.544.657	1.691.034.591	1.580.087.661	408.456.996
Hasil Kajian/Penelitian	**789.767.000**	**0**	**0**	**789.767.000**
801-Aset Tak Berwujud	789.767.000	0	0	789.767.000
Aset Tak Berwujud Lainnya	**90.865.314.020**	**919.531.792**	**1.816.330.315**	**89.054.984.513**
801-Aset Tak Berwujud	90.865.314.020	919.531.792	1.816.330.315	89.054.984.513
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	**418.761.018.035**	**443.149.798.030**	**367.251.664.021**	**51.510.148.214**
203-Tanah	12.321.000	0	0	12.321.000
301-Alat Besar	99.060.837.214	65.505.732.797	94.675.905.600	4.385.906.414
302-Alat Angkutan	62.258.274.804	60.888.335.434	62.038.842.585	219.408.473
303-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.340.252.900	3.093.013.839	3.299.014.740	47.238.160
304-Alat Pertanian	64.128.781.646	131.314.916.186	64.085.040.043	43.715.603
305-Alat Kantor & Rumah Tangga	22.408.705.940	47.845.919.771	22.386.863.170	71.842.770
306-Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	24.273.221.475	52.175.317.641	22.870.484.091	1.885.037.384
307-Alat Kedokteran Dan Kesehatan	974.198.776	753.852.529	974.198.776	0
308-Alat Laboratorium	21.085.454.995	46.182.915.099	20.981.880.587	103.574.408
309-Alat Persenjataan	1.807.806.606	553.174.330	1.807.806.606	0
310-Komputer	19.911.211.358	51.044.479.776	19.881.855.233	29.356.125
311-Alat Elektronik	206.561.800	199.413.201	202.447.302	4.062.498
312-Alat Pengeboran	4.295.629.075	168.741.988	2.789.028.671	1.415.660.406
313-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	78.060.200	866.727.522	78.060.200	0
314-Alat Rumi Hegelevasi	13.970.040.145	99.239.232	13.967.939.545	2.101.200
315-Alat Keselamatan Kerja	1.838.607.337	1.462.096.242	1.806.482.487	14.224.750
316-Alat Peraga	0	37.125.000	0	0
317-Perabotan Rumah/Perlengkapan	1.209.719.650	9.669.327.215	1.208.113.276	1.706.374
318-Buku - Buku	0	11.800.000	0	0
319-Peralatan Olah Raga	561.745.912	106.989.284	561.745.912	0

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
403-Bangunan Gedung	38.542.197.277	8.263.936.243	8.725.264.661	29.817.932.916
404-Bangunan Menara	37.153.000	465.237.284	13.420.216	23.732.700
404-Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.268.342.174	370.747.468	968.514.878	1.727.629.296
503-Jalan Non Inteluan	9.912.371.429	9.712.949.564	8.718.850.177	1.193.521.252
502-Bangunan Air	21.234.641.131	15.879.804.779	15.787.318.778	5.447.322.353
503-Instalasi	3.302.017.355	1.374.736.992	1.568.966.968	1.733.050.355
504-Jaringan	668.172.233	390.963.783	418.664.856	237.508.077
601-Aset Perpustakaan	2.044.426.623	0	0	2.044.426.623
602-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	53.999.000	19.125.000	19.000.000	34.999.000
604-Buku	4.987.200	0	0	4.987.200
605-Satwaman	100.000	0	0	100.000
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	**24.505.333.047**	**27.208.027.092**	**17.915.746.358**	**6.589.586.689**
601-Aset Tak Berwujud	24.505.333.047	27.208.027.092	17.915.746.358	6.589.586.689
Total	**892.426.715.035**	**505.207.187.495**	**505.938.962.710**	**386.488.752.325**

C.8 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.603.529.844,00 dan Rp18.019.000.791,00.

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per akun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.89
Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	47.165.909.471	12.770.565.475	34.395.338.996	269,33
Hibah Langsung Belum Disalurkan	8.828.342.608	0	8.828.342.608	100,00
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan	144.463.282	57.000.000	87.463.282	153,44
Pendapatan Diterima Dimuka	9.510.300.902	5.863.376.570	3.715.081.224	64,01

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Uang Muka Dari KPPN	204.569	182.819.395	(182.612.895)	(99,89)
Utang Jangka Pendek Lainnya	34.232.081	5.316.343	28.915.738	543,90
Total	**63.683.529.844**	**18.819.080.791**	**44.864.449.053**	**249,53**

Penjelasan Kewajiban Jangka Pendek per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.6.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.165.904.471,00 dan Rp12.770.565.475,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per akun adalah sebagai berikut:

Tabel C.90
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.164.548.490	1.118.340.175	46.208.315	4,13
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.821.731.442	10.163.577.904	658.153.538	6,48
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	1	0	1	100,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	33.655.789.842	0	33.655.789.842	100,00
Dana Pihak Ketiga	1.518.047.296	1.488.647.396	29.400.000	1,97
Dana Pihak Ketiga BLU	5.786.300	0	5.786.300	100,00
Total	**47.165.904.471**	**12.770.565.475**	**34.395.338.996**	**269,33**

Penjelasan Utang Kepada Pihak Ketiga per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.6.1.1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.164.548.490,00 dan Rp1.118.340.175,00.

Rincian saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.91
Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	141.008.650	42.795.144	98.205.506	229,56
Ditjen PB	149.634.254	59.646.980	89.987.274	335,78
Ditjen PSDKP	32.746.550	63.280.998	(30.534.448)	(48,25)
Ditjen PKHL	0	23.311.627	(23.311.627)	(100,00)
BP2SDM KP	204.518.284	651.652.215	(447.133.931)	(68,62)
BP2MI KP	645.649.752	277.713.311	367.936.541	132,49
Total	**1.164.549.490**	**1.118.348.275**	**46.209.215**	**4,13**

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

      Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp69.424.750,00 dan Uang Makan PPPK sebesar Rp10.643.250,00.

   b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

      Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp6.597.000,00.

   c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

      Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp16.804.000,00; Uang Makan PPPK sebesar Rp7.122.000,00; dan Uang Lembur PPPK sebesar Rp8.491.000,00.

   d. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

      Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp14.063.950,00 dan Uang Makan PPPK sebesar Rp7.854.700,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 5 (lima) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Setditjen Perikanan Budi Daya

      Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp83.020.850,00; Uang Makan PPPK sebesar Rp3.233.800,00 dan Uang Lembur sebesar Rp14.090.850,00.

h. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

Merupakan Uang Makan PPPK sebesar Rp648.000,00.

c. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

Merupakan Gaji Pokok PPPK sebesar Rp5.164.048,00; Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp12,00; Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp720.000,00; Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp144.840,00; Uang Makan PPPK sebesar Rp1.435.000,00; dan Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK sebesar Rp7.020.000,00.

d. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

Merupakan biaya Gaji Pokok PNS sebesar Rp791.200,00; Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp308,00; Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp79.120,00; dan Tunj. Anak PNS sebesar Rp27.008,00.

e. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp19.824.000,00.

f. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu

Merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp3.634.418,00.

3. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

a. Sekditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Merupakan Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp9.443.550,00.

b. Stasiun PSDKP Ambon

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp296.000,00.

c. Pangkalan PSDKP Tual

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp14.512.000,00 dan Uang Makan PPPK sebesar Rp888.000,00.

d. Stasiun PSDKP Biak

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp5.658.000,00 dan Uang Makan PPPK sebesar Rp1.929.000,00.

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp13.391.150,00 dan Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp49.766.932,00.

b. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan

Merupakan Gaji Pokok PNS sebesar Rp198.700,00; Tunj. Anak PNS sebesar Rp7.628,00; dan Tunj. PPh PNS sebesar Rp9.406,00.

c. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo:

Merupakan Belanja Tunj. PNS sebesar Rp28.346.464,00.

d. Politeknik KP Sorong

Merupakan Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp112.806.304,00.

5. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut:

a. Balai KIPM Surabaya I

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp1.330.000,00.

b. Balai Besar KIPM Makassar

Merupakan Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegatan) sebesar Rp540.010.866,00.

c. Stasion KIPM Pekanbaru

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp21.826.000,00.

d. Balai KIPM Lampung

Merupakan Uang Makan PNS sebesar Rp11.692.000,00 dan Uang Lembur sebesar Rp6.464.000,00.

e. Balai KIPM Surabaya II

Merupakan Gaji Pokok PNS sebesar Rp2.116.100,00; Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp710,00; Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp197.910,00; Tunj. Anak PNS sebesar Rp48.714,00; Tunj. PPh PNS sebesar Rp21.756,00; Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegatan) sebesar Rp62.001.696,00.

C.6.1.2 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.821.731.442,00 dan Rp18.163.577.904,68.

Rincian saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.92
Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	2.144.498.511	1.926.281.229	218.217.282	11,33
Ditjen PT	2.094.936.245	1.740.942.848	353.993.397	20,33
Ditjen PE	2.409.785.165	1.928.573.763	481.211.402	25,07
Ditjen PSDKP	732.368.279	1.304.066.024	(571.696.745)	(43,78)
Ditjen PDSPKP	272.648.734	365.757.301	(93.116.567)	(25,46)
Ditjen PKRL	111.589.096	109.702.563	1.886.533	1,72
BP2SDM KP	1.910.583.356	1.628.542.806	282.039.544	17,32
BP2MI KP	1.144.120.062	1.166.911.370	(22.781.308)	(1,95)
Total	**10.821.731.442**	**10.103.377.904**	**658.353.538**	**6,48**

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal merupakan Langganan Listrik sebesar Rp1.693.277.203,00; Langganan Telepon sebesar Rp110.649.617,00; Jasa Lainnya sebesar Rp5.080.400,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp335.571.291,00 yang terdapat pada satker Biro Umum dan PBJ.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

   a. Merupakan kekurangan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp56.900.000,00 pada satker Setditjen Perikanan Tangkap;

   b. Merupakan biaya Keperluan kantor, pengiriman surat dinas, langganan listrik, air, dan jasa lainnya pada 23 (dua puuh tiga) satker sebesar Rp2.037.951.425,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan biaya langganan listrik, air, dan jasa lainnya pada 15 (lima belas) satker sebesar Rp 2.409.785.165,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP adalah sebagai berikut:

a. Merupakan sewa pesawat operasi pengawasan sebesar Rp208.809.720,00 pada satker Setditjen Pengawasan Sumber Daya KP;
b. Merupakan kekurangan pembayaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp90.935.497,00 pada satker Setditjen Pengawasan Sumber Daya KP;
c. Merupakan biaya kegiatan penyidikan sebesar Rp37.090.853,00 pada satker Stasiun PSDKP Tarakan;
d. Merupakan biaya Sewa sebesar Rp228.579.640,00 pada satker Setditjen Pengawasan Sumber Daya KP;
e. Merupakan biaya langganan listrik, telepon, dan air pada 15 (lima belas) satker sebesar Rp379.410.889,00.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP adalah sebagai berikut:

a. Merupakan biaya listrik, telepon, internet dan zoom sebesar Rp212.454.449,00 pada satker Setditjen Penguatan Daya Saing Produk KP;
b. Merupakan biaya langganan listrik dan telepon pada satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk KP sebesar Rp60.186.285,00.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan biaya langganan listrik, telepon, air, jasa lainnya pada 9 (sembilan) satker sebesar Rp111.589.096,00.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM merupakan biaya langganan listrik, telepon, air, jasa lainnya pada 32 (tiga puluh dua) satker sebesar Rp1.910.582.350,00.

8. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP merupakan biaya keperluan kantor, langganan listrik, telepon, air, jasa lainnya pada 47 (empat puluh tujuh) satker sebesar Rp1.144.130.052,00.

C.6.1.3 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.93
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PB	1	0	1	100,00
Total	**1**	**0**	**1**	**100,00**

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya pada satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang yang merupakan kekurangan pembayaran atas belanja barang kepada penyedia. Atas kekurangan tersebut telah dilunasi pada bulan Januari 2024.

C.6.1.4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.655.789.842,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.94
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	17.623.304.508	0	17.623.304.508	100,00
Ditjen PT	2.760.602.390	0	2.760.602.390	100,00
Ditjen PB	4.858.254.254	0	4.858.254.254	100,00
Ditjen PSDKP	1.187.266.836	0	1.187.266.836	100,00
Ditjen PDSPKP	5.677.273.150	0	5.677.273.150	100,00
Ditjen PKRL	411.012.379	0	411.012.379	100,00
BPSDM KP	1.138.076.326	0	1.138.076.326	100,00
Total	**33.655.789.842**	**0**	**33.655.789.842**	**100,00**

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dan utang lainnya.

Penjelasan ringkas atas saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp17.623.304.508,00 antara lain berupa pengadaan jasa *main bandwith*; jasa *colocation service*; dan jasa satuan pengaman.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

   Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp2.760.602.390,00 antara lain berupa Pembangunan mess pegawai dan tempat parkir inap, rehabilitasi jembatan tempat pemasaran ikan (TPI) pelabuhan perikanan Klademak Kota Sorong.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari 2 (dua) jenis utang yaitu sebagi berikut:

   a. Utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp2.743.385.928,00 antara lain berupa Pengadaan dan biaya pengiriman alat berat (excavator); dan jasa konsultasi penyusunan dokumen analisis AMDAL kawasan budidaya udang terintegrasi;

   b. Biaya konsultan proyek *Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project* (IISAP) Rp1.131.044.934,00;

   c. Kekurangan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp983.823.392,00.

4. Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP

   Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melaui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp1.107.266.836,00 antara lain berupa pemeliharaan sarana dan prasarana stasiun PSDKP Pontianak; renovasi pos pengawasan stasiun PSDKP Belawan; dan pembelian bahan bakar minyak kapal pengawas.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

   Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melalui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp5.677.273.150,00 antara lain berupa penataan dan perlengkapan pemblokiran gerai pemasaran ikan di Jakarta Timur; dan pembangunan gudang beku (*cold storage*) portabel.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

   Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melalui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp411.012.378,00 antara lain berupa pekerjaan integrasi lahan penggaraman.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan utang yang terkait dengan pembayaran melalui rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sebesar Rp1.138.976.326,00 antara lain berupa pengadaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan dan kebersihan.

C.6.1.3 Dana Pihak Ketiga

Saldo Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.518.047.296,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Dana Pihak Ketiga pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.95
Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PB	30.000.000	0	30.000.000	100,00
BP2SDM KP	1.488.047.296	1.488.647.296	(600.000)	(0,04)
Total	**1.518.047.296**	**1.488.647.296**	**29.400.000**	**1,97**

Penjelasan ringkas atas saldo Dana Pihak Ketiga pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Budi Daya

   Saldo Dana Pihak Ketiga pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan pembayaran piutang PT Perindo (Persero) pada rekening dana kelolaan namun belum

disetor ke kas negara sebesar Rp30.000.000,00. Kas tersebut sudah disetor tanggal 2 Januari 2024 dengan NTPN 1123255329BVSN0JH0.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Dana Pihak Ketiga pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan sisa kas program hibah dari *Australian Center for International Agricultural Research* (ACIAR) sebesar Rp949.918.483,00 dan *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO) yang pelaksanaannya telah berakhir senilai Rp538.128.913,00 pada satker Pusat Riset Perikanan.

C.6.1.6 Dana Pihak Ketiga BLU

Saldo Dana Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.706.300,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Dana Pihak Ketiga BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.96
Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
BP2SDM KP	5.706.300	0	5.706.300	100,00
Total	**5.706.300**	**0**	**5.706.300**	**100,00**

Saldo Dana Pihak Ketiga BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan kelebihan belanja pegawai tahun 2021 dan 2022 senilai Rp5.706.300,00 yang masih ada di brankas bendahara pengeluaran dan belum dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2023. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 20 Februari 2024 dengan NTPN 0EA1040FVVEH15C5M dan D70C640FVVEH15ERJ.

C.6.2 Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.920.324.600,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Hibah Yang Belum Disahkan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.97
Rincian Saldo Hibah Yang Belum Disahkan Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
BPSDM KP	8.810.342.608	0	8.810.342.608	100,00
Total	**8.810.342.608**	**0**	**8.810.342.608**	**100,00**

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan hibah langsung berupa barang terkait proyek *The Project for Comprehensive Assessment and Conservation of Blue Carbon Ecosystems and Their Services in The Coral Triangle (Blue CARES)* dari hibah *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pada tanggal 24 Maret 2023 hibah tersebut telah diserahterimakan dengan berita acara serah terima (BAST) nomor B.327/BRASM.3/RS.120/III/2023. Hibah tersebut akan disahkan pada Semester I tahun 2024.

C.6.3 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp144.463.282,00 dan Rp57.000.000,00.

Rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.98
Rincian Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	144.463.282	57.000.000	87.463.282	153,44
Total	**144.463.282**	**57.000.000**	**87.463.282**	**153,44**

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal yang merupakan biaya provisi yang dibayar dimuka oleh debitur lebih besar dari perhitungan biaya provisi dari dana kelolaan yang disetujui atau yang sudah ditransfer ke debitur terkait (pencairan bertahap) pada satker BUI LPMUKP.

C.6.4 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.518.380.902,00 dan Rp5.803.379.578,00.

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per akun adalah sebagai berikut:

Tabel C.99
Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1.959.765.624	2.445.247.031	(485.481.407)	(19,85)
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	7.339.847.778	3.214.972.639	4.124.875.139	128,30
Pendapatan Diterima Dimuka BLU	218.767.500	143.159.908	75.607.592	52,81
Total	**9.518.380.902**	**5.803.379.578**	**3.715.001.324**	**64,01**

Penjelasan Pendapatan Diterima Dimuka per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.6.4.1 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.959.765.624,00 dan Rp2.445.247.031,00.

Rincian saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.100
Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	979.441.292	474.043.108	505.398.184	106,61
Ditjen PT	30.904.417	60.168.417	(29.264.000)	(48,64)
Ditjen PB	703.790.304	1.179.796.886	(476.006.582)	(40,32)
Ditjen PDSPKP	0	516.859.416	(516.859.416)	(100,00)
Ditjen PRBL	42.291.808	98.914.208	(56.622.400)	(57,14)
BP2SDM KP	205.237.611	121.465.004	83.772.605	68,97
Total	**1.959.765.624**	**2.445.247.031**	**(485.481.407)**	**(19,85)**

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan di tahun 2023 disebabkan ada 2 perjanjian sewa yang baru di tahun 2023. Pendapatan Sewa

Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal merupakan sewa tanah dan/atau bangunan di area gedung Mina Bahari I, III, dan IV pada satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa antara Lain:

a. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 dan rooftop gedung dan bangunan pada gedung Mina Bahari I oleh PT. Telekomunikasi Seluler sebesar Rp49.081.200,00;
b. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B3 gedung Mina Bahari I oleh PT. Mac Sarana Daya sebesar Rp220.370.833,00;
c. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 gedung Mina Bahari III oleh PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp16.225.000,00;
d. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B1 gedung Mina Bahari III oleh Koperasi Mina Utama sebesar Rp6.476.450,00;
e. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B2 gedung Mina Bahari III oleh Koperasi Mina Samudra sebesar Rp595.569,00;
f. Pendapatan atas sewa lantai B3 pada gedung Mina Bahari III oleh PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera sebesar Rp63.644.233,00;
g. Pendapatan atas sewa lahan parkir pada gedung Mina Bahari III oleh Perkumpulan Wredatama IKKP sebesar Rp70.950.000,00;
h. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 gedung Mina Bahari IV oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp3.765.472,00;
i. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B3 Gedung Mina Bahari IV oleh PT dHost Telekomunikasi Nusantara sebesar Rp540.333.333,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Ditjen Perikanan budidaya mengalami peningkatan di tahun 2023 disebabkan tidak ada perjanjian sewa yang baru di tahun 2023. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Ditjen Perikanan budidaya merupakan pendapatan atas sewa lahan kebersihan kawasan dan pemeliharaan pada satker PPN Kejawanan sebesar Rp30.904.417,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut:

a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

Merupakan sewa Barang Milik Negara sebesar Rp11.873.517,00.

b. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

Merupakan sewa sebagian tanah oleh KPRI Graha Mina dan PT. Adib sebesar Rp69.265.487,00.

c. Balai Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT. Tri Karta Pratama dan PT. Sari Tani sebesar Rp620.651.500,00.

4. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah di Kawasan SKPT Morotai, Desa Daeo Majiko, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara seluas 523,84 m2 selama 5 tahun (2019-2024) oleh CV. Putra Karya Jaya untuk SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) sebesar Rp98.914.200,00.

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 6 (enam) satker yaitu sebagai berikut:

a. Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT BNI Tbk dan PT Mandiri Tbk untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp70.619.218,00.

b. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp55.947.500,00.

c. Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT Bank Negara Indonesia untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp17.933.332,00.

d. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia untuk anjungan tunai mandiri sebesar Rp2.928.000,00.

e. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Koperasi Penelitian dan Penyuluhan Perikanan dan anjungan tunai mandiri sebesar Rp19.209.967,00.

f. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak

Merupakan pendapatan sewa ruangan kelas oleh lembaga pendidikan swasta sebesar Rp38.599.594,00.

C.6.4.2 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.339.847.778,00 dan Rp3.214.972.639,00.

Rincian saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.101
Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	7.269.385.557	3.050.771.751	4.218.613.806	137,66
BP2SDM KP	70.462.221	164.200.888	(85.738.667)	(54,89)
Total	**7.339.847.778**	**3.214.972.639**	**4.124.875.139**	**128,30**

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi berupa pembayaran biaya sewa lahan, biaya pengembangan, biaya pemeliharaan, dan biaya kebersihan lahan yang terdapat pada satker antara lain Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut:

   a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

      Merupakan sewa sebagian tanah oleh PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Tabungan Negara untuk anjungan tunai mandiri.

   b. Politeknik KP Dumai

      Merupakan biaya pendidikan diterima dimuka.

   c. Politeknik ATIP Jakarta

      Merupakan biaya Pendidikan Semester Ganjil tahun 2024.

d. Politeknik KP Jembrana

Merupakan biaya Pendidikan Semester Ganjil tahun 2024.

C.6.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka BLU

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp218.767.500,00 dan Rp143.159.908,00.

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.182
Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	89.368.500	143.159.908	(53.791.408)	(37,57)
BPSDM KP	129.399.000	0	129.399.000	100,00
Total	**218.767.500**	**143.159.908**	**75.607.592**	**52,81**

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

   Merupakan kelebihan pembayaran pendapatan jasa layanan (bunga) oleh debitur pada satker BLU LPMUKP sebesar Rp89.368.500,00.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

   Merupakan pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa aset sebesar Rp105.000.000,00 dan uang muka pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebesar Rp24.399.000,00 pada satker BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.

C.6.5 Uang Muka KPPN

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian saldo Uang Muka KPPN pada masing-masing unit eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel C.103
Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah	Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah
3	Ditjen PT	206.500	0	206.500	500.000	0	500.000
5	Ditjen PSDKP	0	0	0	1.938.000	0	1.938.000
7	Ditjen PDSI	0	0	0	4.832.696	0	4.832.696
8	BPSDM KP	0	0	0	0	176.356.699	176.356.699
Jumlah		**206.500**	**0**	**206.500**	**6.832.696**	**176.356.699**	**183.813.395**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 hanya terdapat pada Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan sisa uang persediaan (UP) pada satker Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta. Sisa kas tersebut telah disetor ke kas negara tanggal 5 Januari 2024 dengan NTPN F197B1GCACGTUTPD.

C.6.6 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.232.081,00 dan Rp5.316.343,00.

Rincian saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per akun adalah sebagai berikut:

Tabel C.104
Rincian Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Per Akun
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan rekening	12.812.081	3.375.000	9.437.081	279,62
Utang Pajak Rekalihara Pengeluaran yang Belum Disetor	21.420.000	1.941.343	19.478.657	1.003,36
Total	**34.232.081**	**5.316.343**	**28.915.738**	**543,90**

Penjelasan Utang Jangka Panjang Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.6.6.1 Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.812.081,00 dan Rp3.375.000,00.

Rincian saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.105
Rincian Saldo
Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	12.812.081	3.375.080	9.437.001	279,62
Total	**12.812.081**	**3.375.080**	**9.437.001**	**279,62**

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal yang merupakan setoran masuk pada rekening penerimaan saldo Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP yang masih dalam proses identifikasi debitur dan kelebihan pelunasan pinjaman oleh debitur.

C.6.6.2 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor

Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.420.000,00 dan Rp1.941.343,00.

Rincian saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel C.106
Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	21.420.000	1.581.343	19.838.657	1.254,54
BPSDM KP	0	360.000	(360.000)	(100,00)
Total	**21.420.000**	**1.941.343**	**19.478.657**	**1.003,36**

Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan pajak atas honorarium narasumber pada kegiatan proyek hibah GEF tahun 2023 yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara senilai Rp21.420.000,00. Kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas Negara pada tanggal 2 dan 3 Mei 2024.

C.7 Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

C.7.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp25.520.221.292.262,00 dan Rp25.420.240.996.441,00.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LO

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

D.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang bukan berasal dari setoran pajak negara. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 1 UU 9/2018).

Peningkatan PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan ini berasal dari PNBP Sumber Daya Alam berupa pendapatan pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budi Daya, serta PNBP Non Sumber Daya Alam berupa pendapatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Eselon I penghasil PNBP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PSDKP, Ditjen PDSPKP, Ditjen PKRL, BPPSDMKP, BPPMHKP dan BLU yakni LPMUKP, BPPP Tegal, dan Politeknik KP Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saldo akun Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Berikut ini rincian saldo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel D.1
Rincian Pendapatan – LO
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Sumber Daya Alam	637.161.520.387	1.193.172.107.213	(556.010.586.826)	(46,60)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.043.563.987.110	673.161.229.719	370.402.757.391	55,02
TOTAL	1.680.725.517.497	1.866.333.336.932	(185.607.819.435)	(9,95)

D.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam
Rp637.161.520.387,00

Pendapatan Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp637.161.520.387,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp556.010.586.826 atau 46,60% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.193.172.107.213,00.

Pendapatan Sumber Daya Alam terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap dengan rincian berdasarkan akun disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.2
Rincian Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	81.781.958.647	81.813.295.996	(31.337.349)	(0,04)
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	93.225.000	102.045.000	(8.820.000)	(8,64)
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	555.287.336.740	1.111.257.856.217	(555.970.519.477)	(49,94)
TOTAL	637.161.520.387	1.193.172.107.213	(556.010.586.826)	(46,60)

Penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap disebabkan oleh:

1. Tahun 2023 merupakan tahun transisi yaitu tahun pertama pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi. Pada tahun transisi, kapal yang beroperasi di tahun 2023 masih mengantongi izin praproduksi dan sudah membayar PNBP praproduksi di tahun 2022. Kapal yang masih memiliki izin

(SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pascaproduksi sampai dengan izin pascaproduksinya terbit;

2. Penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi menggunakan metode self-assessment (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP-nya). Pada tahun transisi 2023, kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan;
3. Pada saat penyusunan target 2023, penetapan target diasumsikan dapat dilaksanakannya penarikan PNBP SDA dengan sistem kontrak sebagaimana telah diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021. Namun demikian, pada perkembangannya ketentuan sistem kontrak dimaksud berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan;
4. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah. Terkait dengan hal tersebut, terus dilakukan upaya-upaya intensif agar dukungan pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah ini menjadi optimal baik dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kelengkapan sumber daya manusia, pendataan, dll.

Terdapat perbedaan Pendapatan Sumber Daya Alam pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.3
Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2023 pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Sumber Daya Alam (LRA)	636.893.353.269
Pendapatan Sumber Daya Alam (LO)	637.161.520.387
Selisih	**(267.167.118)**

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Sumber Daya Alam berasal dari jurnal balik piutang Sumber Daya Alam pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atas temuan BPK yang sudah disetor ke kas negara sebesar Rp267.167.118,00.

D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.043.563.977.110,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp370.402.767.391,00 atau 55,02% dibandingkan periode yang

berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp671.161.229.719,00. Rincian saldo dari akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel D.4
Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.696.524.197	4.425.803.239	2.270.720.868	51,31
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi	142.074.007	0	142.074.007	100,00
Pendapatan Penyediaan Barang	3.774.135.400	0	3.774.135.400	100,00
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.859.053.296	717.644.900	2.141.408.396	298,39
Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	38.318.000	0	38.318.000	100,00
Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	28.597.814.517	27.966.102.192	631.713.325	2,26
Pendapatan Pengelolaan Dana Lainnya	4.927.687.694	1.970.771.250	2.956.916.444	150,04
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.472.093.971	0	1.472.093.971	100,00
Pendapatan Jasa Layanan Pertunikan BLU	39.179.688.749	22.352.559.739	16.827.121.010	75,28
Pendapatan Lain-lain BLU	11.286.949.970	6.745.165	11.280.204.805	237.762,12
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	17.053.814	4.545.778	12.508.036	275,16
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	68.265.000	66.577.988	1.687.012	2,53
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	772.676.771	9.082.600	763.594.171	8.407,22
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	182.892.554	310.800	182.582.554	33.091,15
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	39.948.400	56.379.851	(16.430.451)	(29,14)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	98.220.240	39.615.000	58.605.240	147,94

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin	33.000.000	0	33.000.000	100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan	21.768.008.114	22.307.798.967	(539.790.853)	(2,42)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	629.181.210	1.011.308.750	(382.127.540)	(37,79)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.935.976.579	6.743.102.093	192.874.486	2,86
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	501.608.724	2.141.545.211	(1.639.936.487)	(76,58)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	27.833.638.198	25.338.576.004	2.495.062.194	9,85
Pendapatan Perizinan Lainnya	686.762.008.355	369.859.610.123	316.903.198.232	85,68
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi	68.555.614.000	64.600.665.650	3.954.948.350	6,12
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	1.632.470.000	1.463.836.400	168.633.600	11,52
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	323.873.000	426.102.500	(102.229.500)	(23,99)
Pendapatan Biaya Pendidikan	1.461.669.167	2.019.881.966	(558.212.799)	(27,64)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.407.915.000	1.444.230.000	1.963.685.000	135,97
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	275.625	0	275.625	100,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan	30.544.905	7.350.000	23.194.905	321,31
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	77.046.101.149	66.621.667.371	10.424.433.778	15,65
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	15.444.632.406	13.390.559.291	2.054.073.115	15,34
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	23.300.000	45.225.000	(21.925.000)	(48,48)
Pendapatan Jasa Lainnya	62.250.000	103.270.400	(41.020.480)	(39,72)

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	11.079	(11.079)	(100,00)
Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	954.000	(954.000)	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Peberjaan Pemerintah	2.301.329.036	3.620.902.951	(1.319.573.875)	(36,44)
Pendapatan Denda Lainnya	27.272.249.411	34.280.968.128	(6.908.718.717)	(20,15)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Lsp	359.202	3.276.366	(2.917.164)	(89,04)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.371.021.479	116.349.767	1.255.471.712	1.079,05
Total	**1.843.503.997.110**	**673.161.229.719**	**370.402.767.391**	**55,02**

Rincian atau saldo akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.5
Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
SETJEN	72.546.469.086	53.533.748.873	19.012.720.213	35,45
DJPT	93.930.330.528	82.932.278.194	10.998.052.334	13,26
DJPB	37.019.551.179	27.062.538.522	9.957.012.657	36,74
DJPSDKP	27.672.568.338	34.412.652.591	(6.740.244.253)	(19,59)
DJPDSPKP	8.789.441.871	9.428.872.033	(639.430.162)	(6,78)
DJPERL	702.424.483.944	383.937.412.327	318.487.071.617	82,95
BPPSDMKP	29.923.299.103	16.316.568.834	13.606.730.269	83,39
BPPMHKP	70.458.053.041	64.737.208.347	5.720.849.714	8,84
TOTAL	**1.843.503.997.110**	**673.161.229.718**	**370.402.767.391**	**55,02**

Kenaikan signifikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada tahun 2023 terdapat pada beberapa Unit Eselon I dengan pengungkapan sebagai berikut.

1. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Pendapatan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp318.487.071.617,00 atau 82,95% dibandingkan tahun 2022. Hal ini dijabarkan sebagai berikut:

a. PNBP lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp707.036.792.765,00 dimana Ditjen PRL telah melebihi target PNBP-nya sebesar 212,22% atas target PNBP sebesar Rp333.169.648.000,00. Realisasi PNBP lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas PNBP pelayanan sebesar Rp702.133.090.761,00, PNBP pengelolaan BMN sebesar Rp3.599.020.663,00 dan penerimaan non anggaran sebesar Rp1.303.881.261,00;

b. Capaian PNBP DJPKRL sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 82,21% atau sebesar Rp319.004.850.423,00 dibanding realisasi tahun 2022 pada periode yang sama sebesar Rp388.031.942.282,00. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan signifikan atas pendapatan perizinan lainnya berupa persetujuan perizinan atas pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dan perizinan berusaha atas pemanfaatan jenis ikan dimana realisasinya sebesar Rp686.762.808.355,00 atau telah dicapai 217,29% dari target sebesar Rp316.056.728.000,00 yang peningkatannya mencapai 85,68% atau Rp316.903.198.232,00 dibandingkan tahun 2022 untuk pendapatan yang sama yang realisasinya mencapai Rp369.859.610.123,00;

c. PNBP pengelolaan BMN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.599.020.663,00 atau sebesar 162,51% atas target PNBP sebesar Rp2.214.608.000,00 terdiri dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan penjualan peralatan dan mesin, pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya, dan pendapatan KSP tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi pengelolaan BMN signifikan berupa pendapatan KSP tanah, gedung, dan bangunan berasal dari kerja sama pemanfaatan BMN di Pulau Nipah Batam dengan mitra KSP yaitu PT SMA KSO atas tanah seluas 24 ha dimana berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No S-502/MK.06/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN berupa tanah pada KKP di Pulau Nipah Kota Batam dan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 9 tanggal 16 April 2014 antara KKP dan Surya Mina Arimusa KSO dan pada 16 April 2018 telah dilakukan addendum perjanjian KSP antara KKP dengan PT SMA KSO dengan nilai PNBP tahun 2023 sebesar Rp2.214.607.747,00;

d. Penerimaan non anggaran (lain-lain) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.303.881.261,00 berupa temuan BPK RI, penerimaan kembali belanja TAYL, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, pendapatan denda lainnya, pendapatan penyelesaian tuntutan ganti rugi non

bendahara, serta terdapat pendapatan setoran dari sisa utang non TP/TGR Pensiunan PNS dimana akun ini hanya dimiliki oleh Satuan Kerja Biro Umum dan PBJ Setjen KKP sehingga harus dilakukan koordinasi dengan PT Taspen (Persero) untuk dipastikan transaksi merupakan TAYL dan untuk selanjutnya dilakukan koreksi kode satuan kerja.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:

Pendapatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.923.299.103,00 atau 83,39% dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan:

a. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan senilai Rp6.664.884.330,00 merupakan Pendapatan dari Diklat BST, BST KLM, BSTF, Rating, peningkatan ke AT/ANKAPTN I, *upgrading* SKK ke AN/ATKAPTN III, ujian *upgrading* SKK AN/ATKAPTN III, revalidasi BST, revalidasi BST KLM, uji kompetensi, pelatihan las listrik, pelatihan teknis Kelautan dan Perikanan. Terjadi peningkatan karena adanya pembukaan kelas pelatihan baru seperti Rating dan peningkatan AN/ATKAPTN I pada BPPP Tegal senilai Rp5.561.786.589,00 dan Politeknik KP Sidoarjo merupakan pendapatan pendaftaran taruna baru, seleksi penerimaan taruna baru (seleksi kesehatan, psikotes, dan wawancara) senilai Rp1.103.097.741,00. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan PMK 198/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Estimasi pendapatan senilai Rp6.696.524.107,00;

b. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan senilai Rp142.074.007,00 merupakan pendapatan jasa pelatih di luar unit penyelenggara pada BPPP Tegal senilai dan Politeknik KP Sidoarjo yang merupakan pendapatan imbal jasa atas jasa SDM Politeknik KP Sidoarjo, seperti jasa narasumber. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 113/KEP-PKP5/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Pendanjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo dari estimasi pendapatan senilai Rp12.000.000,00;

c. Pendapatan Penyediaan Barang senilai Rp3.774.135.400,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp2.835.688.000,00, berasal dari:

- Politeknik KP Sidoarjo merupakan pendapatan makanan yang dibayar oleh taruna jalur umum dan pendapatan dari penjualan hasil produk TEFA

pengolahan (Bakari, otak-otak, siomay, nugget, dll), TEFA budidaya air payau (udang vannamei, bandeng), TEFA budidaya air tawar (ikan nila), TEFA budidaya air laut (udang vannamei), TEFA wirausaha (ikan gurame, patin, bawal). Dasar pemungutan pendapatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Laporan Operasional Catatan Atas Laporan Keuangan Bppsdm Tahunan T.A 2023 Audited - 173 - Permakanan taruna berdasarkan PMK 196/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Sedangkan dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik KP Sidoarjo Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo. Pendapatan akun ini pada TA 2023 meningkat karena pada TA 2023 terdapat peningkatan jumlah taruna jalur mandiri, pada TA 2022 hanya 12 taruna sedangkan pada TA 2023 sebanyak 144 taruna; dan

- BPPP Tegal merupakan pendapatan jasa catering dan penjualan produk pengolahan dan budidaya.

d. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya senilai Rp610.516.196,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp512.400.000,00, yang berasal dari:

- Politeknik KP Sidoarjo senilai Rp607.416.916,00 merupakan Pendapatan BLU yang berasal dari TEFA mekanikasi (perbengkelan mobil, sepeda motor, cuci ac dan *digital printing*) dan TEFA wirausaha berasal dari kunjungan edukatif. Dasar pemungutan pendapatan tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik KP Sidoarjo Nomor 113/KEP-PKPS/2023 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Layanan Penunjang Akademik BLU Politeknik KP Sidoarjo; dan
- BPPP Tegal senilai Rp3.100.000,00 merupakan pendapatan dari perbaikan dan cetak ulang sertifikat pelatihan.

e. Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah senilai Rp38.310.000,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan pendapatan yang berasala dari karcis masuk pulau cemara pada Satker BLU BPPP Tegal;

f. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha senilai Rp1.472.093.971,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00 merupakan kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan DJPT dan PSDKP, IFISH,

kompensasi tetap aquarium indonesia pangandaran pada Satker BLU BPPP Tegal;

g. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU senilai Rp108.210.360,00 dari estimasi pendapatan senilai Rp28.541.000,00; dst.

Terdapat perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.6
Perbedaan Saldo Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
Nama Akun (LRA)	973.506.842.807
Nama Akun (LO)	1.043.563.997.110
Selisih	**(70.027.154.303)**

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan/berasal dari:

Tabel D.7
Rincian Perbedaan Saldo Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
1. Pencatatan Pendapatan pada Satker BLU	(100.098.381.530)
2. Pencatatan Pendapatan Non Operasional Lainnya	27.851.113.978
3. Settlement Piutang	133.639.524
4. Pencatatan Akrual Pada Neraca	
Kas di Bendahara Penerimaan	17.228.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	400.000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9.545.317.484
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.836.522.503
Piutang Lainnya	48.502.525
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(554.746.804)
Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	4.124.036.419
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.017.550
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	(2.017.550)
5. Koreksi Lain - Lain	
Koreksi Lain-Lain atas Beban Barang dan Jasa	(13.077.295.728)
Lain-lain	38.509.306
Jumlah	**(70.027.154.303)**

D.2 Beban

Beban

Beban Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Rincian saldo per akun Beban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebagai berikut.

Tabel D.8
Rincian Beban
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.800.393.474.514	1.844.541.257.158	(44.147.782.644)	(2,39)
Beban Persediaan	179.045.299.672	125.425.180.014	53.620.119.658	42,75
Beban Barang dan Jasa	1.931.232.862.440	1.528.584.193.162	402.648.669.278	26,34
Beban Pemeliharaan	359.522.125.975	262.483.456.857	97.038.669.618	36,97
Beban Perjalanan Dinas	875.495.745.7nn	627.419.371.099	248.076.374.671	39,54
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	615.716.271.822	526.602.257.382	89.114.014.440	16,92
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	791.677.852.361	810.576.317.532	(18.899.264.971)	(2,33)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	9.786.927.758	8.236.441.867	1.550.485.891	18,82
Total	**6.562.869.760.308**	**5.733.868.474.367**	**829.001.285.941**	**14,46**

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.800.393.474.514,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp44.147.782.644 atau 2,39% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.844.541.257.158,00. Rincian saldo dari akun Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel D.9
Rincian Saldo Beban
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	585.742.614.959	609.760.727.377	(24.018.112.627)	(3,94)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.093.259	9.149.088	(456.610)	(4,99)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	44.189.261.959	45.767.026.705	(1.577.764.746)	(3,45)
Beban Tunj. Anak PNS	13.681.478.389	14.055.865.552	(374.387.243)	(2,66)

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Tunj. Struktural PNS	7.396.824.646	8.487.324.586	(1.090.499.956)	(12,85)
Beban Tunj. Fungsional PNS	69.708.796.386	78.849.415.390	(9.140.619.004)	(11,59)
Beban Tunj. PPh PNS	2.281.034.615	2.973.573.864	(692.539.249)	(23,29)
Beban Tunj. Beras PNS	35.248.932.668	36.809.340.040	(1.560.407.372)	(4,24)
Beban Uang Makan PNS	81.516.562.972	93.129.304.834	(11.612.741.962)	(12,48)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	96.025.000	98.775.000	(2.750.000)	(2,78)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2.151.218.000	2.205.100.000	(53.882.000)	(2,44)
Beban Tunjangan Umum PNS	10.000.833.717	10.801.249.100	(792.415.383)	(7,34)
Beban Tunjangan Profesi Guru	3.185.821.700	5.940.099.095	(2.754.277.395)	(46,37)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	9.996.067.450	10.004.142.610	(10.075.160)	(0,10)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	245.083.109	268.376.550	(23.293.450)	(8,71)
Beban Gaji Pokok PPPK	26.086.545.952	16.164.104.926	9.922.441.026	61,39
Beban Pembulatan Gaji PPPK	430.060	308.172	121.896	75,93
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.701.097.341	1.043.550.350	657.546.991	63,72
Beban Tunjangan Anak PPPK	468.098.960	290.034.870	178.064.120	61,39
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.246.630.000	2.044.080.000	2.202.550.000	89,31
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.692.020.080	1.208.448.500	483.572.580	67,70
Beban Tunjangan Lauk Pauk PPPK	3.182.000	0	3.182.000	100,00
Beban Uang Makan PPPK	5.311.364.300	3.400.817.200	1.910.546.600	56,19
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	48.937.306	0	48.937.306	100,00
BebanTunjanganDaerah Terpencil/SangatTerpencil PPPK	2.250.000	1.375.000	875.000	63,64
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	32.325.000	4.675.000	27.650.000	591,64
Beban Tunjangan Umum PPPK	1.620.000	0	1.620.000	100,00
Beban Uang Lembur	17.938.535.250	14.509.309.000	3.429.196.250	23,63
Beban Uang Lembur PPPK	644.214.300	48.009.000	596.205.300	1.219,66
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Reguler)	815.976.345.269	831.845.676.641	(15.871.331.372)	(1,91)
Beban Pegawai/Tunjangan/Khusus/Reguler/Kinerja PPPK	37.105.044.630	22.780.823.935	14.324.220.695	62,88
Beban Gaji dan Tunjangan	23.703.518.896	31.445.653.075	(7.742.162.179)	(24,62)
Belanja Tenj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	0	0	0,00
Total	**1.800.393.476.514**	**1.844.641.237.150**	**(44.147.702.644)**	**(2,39)**

Berikut ini rincian saldo akun Beban Pegawai untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023.

Tabel D.10
Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	98.897.052.221	107.795.688.525	(8.898.636.304)	(8,26)

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Itjen	33.714.777.780	33.873.373.622	(158.595.834)	(0,47)
Ditjen PT	188.334.306.934	181.795.647.515	6.538.659.419	3,60
Ditjen PB	165.366.756.996	180.473.711.555	(15.106.954.559)	(8,37)
Ditjen PSDKP	169.397.972.015	161.184.872.045	8.213.100.770	5,10
Ditjen PDSPKP	54.834.675.243	54.338.555.295	476.119.948	0,88
Ditjen PRL	98.524.358.181	95.248.030.467	3.276.327.714	3,44
BPPSDMKP	733.365.596.070	777.263.529.211	(43.897.932.333)	(5,65)
BPPMHKP	257.977.977.458	252.567.048.923	5.410.128.535	2,14
Total	**1.800.395.474.514**	**1.844.541.257.150**	**(44.167.782.644)**	**(2,39)**

Adapun penurunan dan peningkatan Beban Pegawai per akun yang cukup signifikan disebabkan hal-hal berikut ini.

1. Penurunan beban gaji pokok PNS beserta tunjangan-tunjangan yang melekat, dikarenakan banyaknya pegawai yang mutasi ke Instansi lain terutama pegawai dengan jabatan peneliti, perekaya, fungsional pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mutasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Penurunan beban uang makan PNS dikarenakan pada tahun 2023 kegiatan di luar kantor sudah berjalan normal yang membuat pegawai setiap hari berada di kantor sehingga uang makan tidak dibayarkan.
3. Adanya kenaikan realisasi beban pegawai untuk pegawai PPPK dikarenakan terdapat pembayaran gaji, tunjangan, dan uang lembur untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terdapat 655 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja formasi Tahun 2023 berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 678/XI/KP.320/XII/2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan formasi tahun 2023.
4. Penurunan belanja pegawai dari periode *unaudited* adalah karena koreksi tunjangan kepada pegawai yang melaksakan tugas belajar yang perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp977.683.469,00 pada semua Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terdapat perbedaan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.11
Perbedaan Saldo Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO)
pada 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
Nama Akun (LRA)	1.777.277.905.274
Nama Akun(LO)	1.800.293.474.514
Selisih	**(23.015.569.240)**

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual tersebut merupakan/berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp23.015.569.240,00.

Tabel D.12
Rincian Perbedaan Saldo Belanja Pegawai (LRA) dengan Beban Pegawai (LO)
pada 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
1. Pencatatan Belanja Pegawai pada Sistem BLU	(23.788.510.808)
2. Pencatatan Akrual Pada Neraca	
uang muka belanja pegawai (prepayment)	3.618.000
Piutang Lainnya	723.382.381
Piutang Jangka Panjang lainnya	7.150.590
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(45.313.679)
Belanja barang yang masih harus dibayar	(897.636)
Jumlah	**(23.015.569.240)**

D.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp179.645.299.672,00

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179.645.299.672,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.620.119.658,00 atau 42,75% dibandingkan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp125.425.180.014,00.

Rincian saldo akun Beban Persediaan disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.13
Rincian Saldo Beban Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Persediaan konsumsi	100.464.809.019	84.677.384.839	23.787.419.200	28,09
Beban Persediaan amunisi	55.283.134	53.167.830	2.115.304	3,98
Beban Persediaan bahan baku	61.909.679.960	33.052.192.414	28.057.487.546	84,88

Nama Akun	31 Des 2022	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Bahan Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	359.900	1.247.000	(887.100)	(71,14)
Bahan Persediaan Lainnya	8.615.172.659	6.841.187.951	1.773.984.708	25,93
Total	**179.045.299.672**	**125.425.180.014**	**53.620.119.658**	**42,75**

Berikut ini rincian saldo akun Bahan Persediaan untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2022.

Tabel B.14
Rincian Saldo Bahan Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
SETJEN	6.572.627.332	7.686.513.184	(1.113.885.852)	(14,49)
ITJEN	188.867.667	164.016.857	24.850.810	15,15
DJPT	41.703.076.247	11.039.034.724	30.664.041.523	277,76
DJPB	82.586.518.180	64.359.637.997	18.227.482.183	28,32
DJPSDKP	7.605.458.811	5.472.820.291	1.632.638.520	27,33
DJPDPIP	692.062.841	981.722.006	(290.659.165)	(30,12)
DJPKRL	1.049.871.000	1.202.340.525	(152.968.639)	(12,72)
BPPSDMKP	18.638.491.150	16.862.932.687	1.775.558.463	10,53
BPPMHKP	20.007.033.558	17.145.971.743	2.861.061.815	16,69
TOTAL	**179.045.299.672**	**125.425.180.014**	**53.620.119.658**	**42,75**

Terdapat kenaikan saldo yang cukup signifikan pada Ditjen Perikanan Tangkap yaitu sebesar 277,76% atau sebesar Rp30.664.041.523,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pembelian Mesin Kapal Penangkap Ikan Yamaha Daya 15 PK PT KBA.

Kenaikan pendapatan yang cukup signifikan juga terdapat pada Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 28,32% atau sebesar Rp18.227.482.183,00 yang disebabkan oleh telah ditetapkannya 3 Satuan kerja pada DJPB menjadi Satuan Kerja BLU, melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai

instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 10 Mei 2023.

Perbedaan antara Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Barang Persediaan (LRA) ditambah Persediaan awal tahun dikurangi Persediaan akhir tahun, disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.15
Perbedaan Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Persediaan (LRA)
Per 31 Desember 2023

Uraian		Nilai (Rp)
Beban Persediaan (LO)		179.045.299.672
Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)		151.734.016.360
Saldo Persediaan awal tahun	+	34.059.639.900
Saldo Persediaan akhir tahun	-	36.647.343.305
koreksi penyesuaian	+	0
Jumlah		149.146.312.955
Selisih		**29.901.987.817**

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya jurnal balik atas belanja barang yang dibayar dimuka tahun 2022, kelebihan pembayaran atas belanja persediaan yang pengembaliannya dilakukan pada tahun 2023, adanya reklasifikasi beban yang disebabkan oleh kesalahan pemilihan kode barang pada saat input transaksi pada modul komitmen ketika implementasi awal aplikasi SAKTI, persediaan yang masih harus dibayar pada TA 2023 (utang kepada pihak ketiga) dan reklasifikasi antar beban LO, dengan rincian disajikan pada:

Tabel D.16
Rincian Perbedaan Beban Persediaan (LO) dengan Belanja Persediaan (LRA)
Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
1. Transaksi Persediaan Non Anggaran	(3.009.143.634)
2. Transaksi Menggunakan Akun 5212	117.288.350
3. Transaksi Menggunakan Akun 523	1.088.572.703
4. Transaksi Menggunakan Akun 525	888.814.269
5. Transaksi Menggunakan Akun 526	34.377.536.151
6. Transaksi Menggunakan Akun 55	3.663.000
7. Transaksi yang dibukukan sbg Beban Pemeliharaan	(3.469.214.552)
8. Transaksi yang dibukukan sbg Beban 526	(3.712.031.093)
9. Lain-lain	(283.507.877)
Jumlah	**29.901.987.917**

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.931.232.062.440,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp402.648.669.278 atau 26,34% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.528.584.193.162,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.17
Rincian Saldo Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Kegiatan Perkantoran	352.810.246.493	325.270.602.833	27.539.643.660	8,47
Beban Pengolahan Bahan Makanan	30.594.864.259	42.455.208.316	(11.860.344.057)	(27,94)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10.396.124.821	9.926.827.176	369.297.645	3,72
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.331.987.914	1.338.105.703	(6.117.789)	(0,46)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.073.983.394	41.227.683.550	(1.153.700.156)	(2,80)
Beban Barang Operasional Lainnya	50.311.274.252	32.479.025.466	17.832.248.786	54,90
Beban Barang Operasional lepada BLUdalam Satu	12.763.196	0	12.763.196	100,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	752.743.861	9.785.373.583	(9.032.629.672)	(92,31)
Beban Bahan	575.427.429.520	375.888.339.854	199.547.089.666	53,09
Beban Honor Output Kegiatan	88.558.519.620	92.825.969.565	(4.267.449.945)	(4,60)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	127.570.338.368	106.332.313.073	21.248.025.295	19,98
Beban Barang Pencherian Penghargaan dalam bentuk uang	18.750.000	0	18.750.000	100,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	293.857.022	4.411.227.355	(4.117.369.333)	(93,34)
Beban Perjalan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.328.660.869	188.142.313	3.140.517.756	1.743,33
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	1.575.250.170	0	1.575.250.170	100,00
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	196.414.000	0	196.414.000	100,00
Beban Langganan Listrik	111.355.385.481	97.810.637.919	14.544.747.562	14,87
Beban Langganan Telepon	6.089.014.364	6.926.495.832	(837.481.468)	(12,09)
Beban Langganan Air	6.425.855.294	5.715.288.507	710.566.777	12,43
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37.854.215.531	33.768.024.645	4.086.189.486	12,10
Beban Jasa Pos dan Giro	3.103.300	9.296.600	(6.193.600)	(66,62)

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Jasa Konsultan	37.299.143.975	23.258.604.926	14.040.539.049	60,37
Beban Sewa	115.869.399.727	99.745.430.359	16.123.969.368	16,17
Beban Jasa Profesi	34.249.395.601	29.521.192.130	4.728.203.471	16,02
Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	0	1.022.182.000	(1.022.182.000)	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	284.225.714.239	170.060.794.415	114.164.919.824	67,13
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	451.816.013	5.200.899.516	(4.749.083.503)	(91,31)
Beban Barang	6.226.952.650	2.749.119.488	3.477.833.162	126,51
Beban Jasa	4.182.652.529	3.622.278.083	560.375.446	15,47
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.084.768.646	1.815.669.349	269.100.297	14,82
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2.088.800	278.406.459	(276.717.659)	(99,04)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	525.440.760	4.702.057.806	(4.176.617.046)	(88,83)
Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	28.297.000	(28.297.000)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	36.108.173	32.850.000	3.258.173	9,92
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	0	2.850.000	(2.850.000)	(100,00)
Total	**1.931.232.862.440**	**1.528.584.193.162**	**402.648.669.278**	**26,34**

Rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.18
Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	203.240.622.245	181.219.862.974	22.020.759.321	12,15
Itjen	6.454.106.790	6.952.600.282	(498.493.492)	(7,17)
Ditjen PT	274.356.687.758	217.384.961.933	56.971.645.825	26,21
Ditjen PB	210.379.309.089	122.184.587.899	88.194.721.179	72,15
Ditjen PSDKP	515.048.577.913	343.131.294.205	172.717.283.708	50,34
Ditjen PDSPKP	110.428.249.056	87.774.133.167	22.654.115.889	25,81
Ditjen PKRL	92.151.728.840	74.879.222.975	17.272.505.865	23,07
BPPSDMKP	406.347.291.214	392.494.323.480	13.852.967.734	3,53
BPPMHKP	112.866.869.585	102.563.206.247	9.503.163.338	9,27
Total	**1.931.232.862.440**	**1.528.584.193.162**	**402.648.669.278**	**26,34**

Berikut ini penanggapan terkait kenaikan saldo yang terdapat pada Beban Beban Barang dan Jasa paling signifikan.

1. DJPB

Kenaikan signifikan pada Beban Barang dan Jasa pada DJPB terdapat pada akun-akun berikut:

a. Beban keperluan kantor senilai Rp5.403.246.474,00 yang meningkat karena BLUPPB Karawang belanja keperluan kantor ada bertambah ada BUBK Kebumen dan pada Setditjen Perikanan Budi Daya dikarenakan sudah dicabutnya status pandemi menjadi endemi sehingga kegiatan di kantor meningkat.

b. Beban Langganan Listrik meningkat senilai Rp5.968.205.350,00 karena pada Satker BLUPPB Karawang belanja listrik ada pada 2 lokasi: Karawang dan BUBK Kebumen yang sebelumnya hanya Karawang.

2. DJPSDKP

Kenaikan signifikan terdapat pada beban bahan yang termasuk di dalamnya adalah pembelian bahan bakar karena adanya penambahan kapal pengawas yakni ORCA 5 dan ORCA 6 yang merupakan hibah dari Pemerintah Jepang.

Terdapat penambahan dan pengurangan nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp8.579.067,00 yang berasal dari hasil pengamatan cek fisik BPK menjadi koreksi interval KKP dan temuan BPK RI dengan rincian sebagai berikut:

a. Pangkalan PSDKP Benoa melakukan koreksi kurang atas belanja sewa sebesar Rp8.333.333,00 merupakan koreksi pencatatan kesalahan Laporan Keuangan Ditjen PSDKP Tahun 2023 *Audited* Catatan atas Laporan Keuangan 343 perhitungan sewa rumah dinas kepala sub bagian umum kontrak terhitung mulai tanggal 21 September 2022 s.d. 21 September 2023.

b. Stasiun PSDKP Tarakan melakukan koreksi belanja bahan sebesar Rp19.360.000,00 merupakan biaya kegiatan penyidikan tahun 2023 Belanja Bahan (konsumsi rapat) hasil reviu Itjen Nomor R-43/ITJ.2/HP.380/11/2024.

c. Sekretariat Ditjen PSDKP melakukan koreksi kurang atas belanja sewa sebesar Rp2.447.680,00 merupakan koreksi pengurangan nilai dikarenakan bukti dukung kwitansi *ground handling* tidak disertakan.

Perbedaan antara Beban Barang dan Jasa (LO) dengan Belanja Barang Jasa (LRA) disajikan pada tabel berikut:

Tabel B.19
Perbedaan Beban Barang dan Jasa (LO) dengan Belanja Barang Jasa (LRA)

Uraian	Nilai (Rp)
A. Beban Barang dan Jasa (LO)	1.931.232.862.440
B. Belanja Barang Jasa (LRA)	1.840.366.564.432
Reklasi Belanja Barang Operasional (521xx)	498.299.038.491
Reklasi Belanja Barang Non Operasional (522xx)	808.585.446.170
Reklasi Belanja modal (532xx)	941.469.013.140
Reklasi Belanja Barang pnbp-BLU (525xx)	12.497.064.625
A - B	**90.866.298.008**

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin, Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya, Pencatatan Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas dan lain-lain, Pencatatan Akrual Pada Neraca, Reklasifikasi Beban menambah nilai Aset, Pencatatan Belanja yang bersumber pada Hibah (LPE), dan Reklasifikasi Beban Operasional dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel B.20
Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa (LO) dengan Belanja Barang Jasa (LRA)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Sebab
117111	Barang Konsumsi	1.350.298.097
117112	Amunisi	999.214.864
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	(35.980.268)
117114	Suku Cadang	1.082.056.268
117131	Bahan Baku	(1.154.439.085)
117199	Persediaan Lainnya	1.521.797.697
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	(28.729.851)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.430.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(347.370)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8.232.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.386.909
521121	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	54.257.286
521211	Belanja Bahan	12.392.203.424
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	14.100.000

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Selisih
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(80.475.270)
521341	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7.332.000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	(139.667.051)
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	(1.574.304.950)
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	(196.414.000)
521262	Belanja Selisih Kurs Terealisasi	(7.623.000.000)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	(123.342.115.782)
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	(1.054.500.000)
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Legra	(16.714.000)
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	(13.741.101.678)
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	(7.002.008.513)
521823	Belanja Barang Persediaan Lainnya	(6.573.701.437)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	(5.875.000)
522111	Belanja Langganan Listrik	389.527.920
522112	Belanja Langganan Telepon	77.091.445
522113	Belanja Langganan Air	293.644.731
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(26.490.087)
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.177.665.184
522141	Belanja Sewa	(580.911.159)
522151	Belanja Jasa Profesi	56.112.500
522191	Belanja Jasa Lainnya	92.667.883.137
525114	Belanja Pemeliharaan	(164.464.800)
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	(749.586.918)
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	(641.087.508)
595112	Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	525.440.760
595115	Belanja Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	36.108.173
		(52.034.223.323)
Transaksi BMN		
M01	Penambahan Saldo Awal	157.377.500
M02	Pembelian	201.679.602.752
M03	Transfer Masuk	1.031.235.550
M06	Perolehan Lainnya	8.729.877.941
M10	Reklasifikasi Masuk	10.124.858.247
M11	Reklasifikasi Dari Aset	1.233.182.100
M15	Penambahan Dalam Proses Masuk	1.987.998.493
M95	Koreksi Transfer Keluar Online	3.420.000
M98	Koreksi Nilai Tambah	72.875.801.070
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	22.957.008.075
Jumlah Penambahan		320.778.561.728

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Selisih
KD1	Habis Pakai	(194.538.017.438)
KD2	Transfer Keluar	(1.032.855.550)
KD4	Usang	(192.586.565)
KD5	Rusak	(144.485.301)
KD6	Keluar Lainnya	(10.238.443.885)
KD8	Reklasifikasi Keluar	(9.524.959.327)
KD11	Reklasifikasi ke Aset	(2.130.805.295)
KD8	Koreksi Nilai Kurang	(22.777.607.125)
KD9	Koreksi Kuantitas Kurang	(73.386.433.660)
Jumlah Pengurangan		(314.021.177.946)
999	Saldo Awal	55.604.609.857
Mutasi	Penambahan dan Pengurangan	6.757.383.782
Saldo Awal dikurangi Mutasi Tambah dan Kurang		62.361.993.639
Selisih pada LO & LRA dikurangi dengan Mutasi BMN		**10.327.870.316**
PDT	Hasil Opname Fisik	(3.084.623.509)
Selisih Stus		**7.243.246.807**

II.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp359.522.125.975,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp97.659.541.392,00 atau 36,97% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp262.483.456.357,00.

Adanya kenaikan beban pemeliharaan merupakan salah satu dampak dari telah dicabutnya status dari pandemi Covid-19 serta adanya penambahan saldo asuransi gedung dan bangunan milik Sekretariat Jenderal. Rincian saldo akun Beban Pemeliharaan disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.21
Rincian Saldo Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.943.593.850	82.556.443.284	65.387.150.574	79,20
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	1.609.395.295	964.987.219	728.208.076	76,08
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Lainnya	4.196.164.916	3.852.816.634	343.348.282	8,06
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168.569.987.955	129.078.310.940	39.491.577.087	24,40
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.954.617.698	3.314.352.723	640.304.975	19,32
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.781.363.932	1.906.967.365	2.874.396.567	150,73
Beban Pemeliharaan Irigasi	2.040.196.462	1.772.181.101	268.015.361	15,12
Beban Pemeliharaan Jaringan	9.655.977.523	9.724.452.921	(68.475.398)	(0,70)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.496.243.350	2.673.768.837	(1.177.525.487)	(44,04)
Beban Pemeliharaan	164.464.800	88.339.400	76.125.400	86,17
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	3.375.925.817	2.032.466.562	1.343.459.255	66,10
Beban Persediaan Suku Cadang	19.330.338.915	23.810.605.923	(4.480.267.008)	(18,82)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	316.115.454	707.763.440	(391.647.986)	(55,34)
Total	**359.522.125.975**	**262.483.456.357**	**97.038.669.618**	**36,97**

Rincian saldo akun Beban Pemeliharaan untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.22
Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	52.799.019.232	44.781.638.529	8.017.380.703	17,90
Itjen	944.169.988	906.627.280	37.542.709	4,14
Ditjen PT	48.201.920.544	43.655.036.055	4.546.884.489	10,42
Ditjen PB	35.743.047.066	18.035.758.369	17.707.288.697	98,18
Ditjen PSDKP	73.418.304.947	66.403.244.828	7.015.060.119	10,56
Ditjen PDSPKP	9.419.365.666	8.574.034.452	845.331.214	9,86
Ditjen PKRL	10.317.997.525	6.812.145.995	3.505.851.530	48,53
BPPSDMKP	88.972.343.624	40.040.544.584	48.931.799.040	101,82
BPPMHKP	29.985.957.380	24.274.426.265	5.631.531.123	23,20
Total	**359.522.125.975**	**262.483.456.357**	**97.038.669.618**	**36,97**

Belum Pemeliharaan pada Unit Eselon I mengalami kenaikan secara umum dikarenakan sudah normalnya kegiatan *work from office* setelah status pandemi di Indonesia telah dicabut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Kenaikan signifikan ada pada Eselon I BPPSDMKP dengan mutasi seperti berikut:

Penambahan Saldo Awal

1. Pada satuan kerja SUPM Bone senilai Rp11.198.300,00 bahan pakan lainnya (*Shrimp feed*) sebanyak 31 unit merupakan temuan BPK tahun 2020 atas produk TEFA yang belum ditopot kedalam aplikasi persediaan.
2. Politek KP Dumai sebesar Rp61.066.500,00 merupakan input saldo awal hasil hibah dari Pemda Riau pada tahun sebelumnya dicatat dalam transaksi Saldo Awal.

Transfer Masuk

1. Satker Politek KP Jakarta transfer masuk senilai Rp73.809.360,00 barang persediaan karena proses likuidasi Satker BAPPL Serang dan STP Jurnihkan.
2. Satker Sekretariat BPPSDM KP transfer masuk senilai Rp23.479.540,00 dari Pusdik KP karena kebijakan 1 DIPA.
3. Satker Pusriskan transfer masuk dari Pusrisfel senilai Rp129.673.400,00 karena adanya kebijakan 1 DIPA.

Hibah Masuk

Satker BRPPPU Palembang terdapat hibah Masuk senilai Rp172.450.000,00 merupakan hibah dari CSR Pertamina sesuai perjanjiah Hibah antara PT. Pertamina dengan Balai Riset Perikanan Perairan Umum Nomor:114/PKS/N00000/2020-S0 dan Nomor:13364/BPPSDM.KP-BRPPUPP/ KS.300/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020.

Perolehan Lainnya

1. BRPPUPP Palembang terdapat perolehan lainnya senilai Rp341.000,00 merupakan benih ikan hasil penelitian bukti ikannya dari CSR Pertamina.
2. Politek KP Dumai terdapat perolehan lainnya senilai Rp74.807.700,00 merupakan hasil reklasifikasi aset tetap dengan nilai perolehan dibawah 1 juta.
3. Politek KP Sidoarjo terdapat perolehan lainnya senilai Rp83.064.900,00 merupakan barang konsumsi hasil olahan produk TEFA.

4. BRPPBAP Maros perolehan lainnya senilai Rp31.700.000,00 input atas hasil penelitian benih ikan harosang sebanyak 1.500 ekor senilai Rp3.000.000,00; udang windu sebanyak 800.000 ekor senilai Rp18.400.000,00.
5. Poltek KP Bone perolehan lainnya senilai Rp128.352.000,00 dari hasil pembesaran ikan produk TEFA yang diinput untuk dilakukan penjualan menjadi PNBP.
6. Poltek KP Jembrana perolehan lainnya senilai Rp16.776.000,00.
7. Pusat Riset Perikanan perolehan lainnya senilai Rp24.220.900,00.
8. STP Jakarta perolehan lainnya senilai Rp594.087.200,00 input hasil produk TEFA.
9. SUPM Bone perolehan lainnya senilai Rp5.271.000,00 input hasil berupa produk olahan dari bahan baku persediaan yang menhasilkan PNBP seperti Bandeng Tanpa Duri (BATARI) dan Bakso Ikan.

Koreksi Tambah

Satker BBRSEKP terdapat koreksi tambah senilai Rp66.000,00 untuk koreksi harga satuan barang semula Rp6.600,00 menjadi Rp66.000,00.

Hasil Opname Fisik Lebih

1. BPPP Banyuwangi terdapat opname fisik lebih senilai Rp50.102.500,00 barang konsumsi, persediaan lainnya, dan barang persediaan strategis untuk berjaga-jaga.
2. UPSDKP terdapat opname fisik lebih senilai Rp960.000,00 berupa barang konsumsi.
3. BRBIH Depok terdapat opname fisik lebih senilai Rp118.503.900,00 bahan baku, barang konsumsi, persediaan lainnya dan bahan untuk pemeliharaan.
4. BRPI terdapat opname fisik lebih senilai Rp150.237.316,00 berupa bahan baku dan persediaan lainnya (ikan, udang, plasma nutfah, laboratorium, dan pakan);
5. Poltek KP Sorong terdapat opname fisik lebih senilai Rp330.000,00 berupa bahan baku.

Terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan (LO) dengan Belanja Pemeliharaan (LRA) yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.23
Perbedaan Beban Pemeliharaan (LO) dengan Belanja Pemeliharaan (LRA)

Uraian	Nilai (Rp)
A. Beban Pemeliharaan (LO)	359.522.115.975
B. Belanja Pemeliharaan (LRA)	356.827.468.085
A - B	**2.694.657.888**

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya Piutang atas belanja pemeliharaan, reklasifikasi beban ke aset, dan realisasi anggaran pemeliharaan yang masuk kategori persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.24
Rincian Perbedaan Beban Pemeliharaan (LO) dengan Belanja Pemeliharaan (LRA)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Selisih
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	(316.115.454)
591114	Beban Persediaan suku cadang	(19.330.358.915)
591113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	(3.375.925.817)
525114	Belanja Pemeliharaan	(164.464.800)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	(212.454.449)
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	(19.941.000)
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	(193.403.000)
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	(3.960.000)
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	(24.935.245)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.031.820.072
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.677.793.150
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213.568.364
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(23.859.560)
117199	Persediaan Lainnya	1.382.958.587
117131	Bahan Baku	(1.154.439.685)
117114	Suku Cadang	1.082.056.268
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	(35.980.268)
117112	Amunisi	999.316.866
117111	Barang Konsumsi	1.352.968.237
117131	Bahan Baku	128.809.110
117112	Amunisi	(2.680.140)
K01	Hutbis Pakai	(3.376.896.332)
K06	Keluar Lainnya	(77.700)
K10	Reklasifikasi Keluar	(657.000)
K11	Reklasifikasi ke Aset	(5.500.000)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Setelah
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	(2.939.000)
M02	Pembelian	3.346.453.791
M10	Reklasifikasi Masuk	617.928
M11	Reklasifikasi Dari Aset	8.243.800
Selisih Ska		**(10.042.188)**

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp875.495.745.766,00

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp875.495.745.766,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp248.076.374.671,00 atau 39,54% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp627.419.371.095,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.25
Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Biasa	550.241.065.529	417.824.363.962	132.417.501.567	31,69
Beban Perjalanan Tetap	189.404.334	0	189.404.334	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.883.436.093	19.929.734.430	7.953.692.463	39,91
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.321.706.582	34.086.943.044	32.234.763.538	94,57
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3.477.000	(3.477.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	176.477.357.721	130.620.627.265	45.856.730.456	35,11
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	41.928.543.355	15.180.516.616	26.748.026.739	176,20
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.664.061.032	5.834.043.343	(1.170.782.311)	(20,07)
Beban Perjalanan	7.789.380.328	3.940.065.435	3.849.314.885	97,66
Total	**875.495.745.766**	**627.419.371.095**	**248.076.374.671**	**39,54**

Berikut ini Rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023.

Tabel D.26
Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	91.040.893.847	75.890.733.837	15.150.160.010	19,96
Itjen	31.857.554.043	27.722.561.245	4.134.992.798	14,92
Ditjen PT	183.635.515.571	142.140.358.075	41.495.157.496	29,19
Ditjen PB	131.421.395.071	66.046.848.549	65.374.544.522	98,98
Ditjen PSDKP	96.123.450.167	71.251.905.395	24.871.544.772	34,91
Ditjen PDSPKP	71.875.056.880	69.578.843.243	2.296.213.637	3,30
Ditjen PKRL	129.331.972.654	93.763.812.212	35.568.160.442	37,93
BPPSDMKP	79.685.500.339	46.160.762.851	33.524.737.488	72,63
BPPMHKP	60.524.409.194	34.858.545.688	25.665.863.506	73,63
Total	**875.495.745.766**	**627.419.371.095**	**248.076.374.671**	**39,54**

Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan pada seluruh Unit Eselon I seiring dengan keadaan pandemi yang sudah semakin membaik. Tetapi kenaikan paling signifikan terjadi pada DJPB yang disebabkan oleh meningkatnya perjalan dinas luar negeri dan di BPPMHKP yang disebabkan oleh meningkatnya perjalanan dinas paket *meeting* luar kota atau menghadiri undangan dan perjalanan dinas luar negeri.

Pada Ditjen PSDKP terdapat penambahan nilai Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp17.730.853,00 yang berasal dari Hasil Reviu Itjen Nomor R-43/IT1.2/HP380/II/2024 menjadi koreksi Internal KKP di Satker Stasiun PSDKP Tarakan biaya kegiatan penyidikan tahun 2023 yang belum dibayarkan.

Pada Ditjen PKRL realisasi belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp9.226.929.767,09 dengan pengembalian belanja Rp1.301.805,00 sehingga realisasi sebesar Rp9.225.627.962,00 atau 83,83% dari total pagu sebesar Rp11.007.235.000,00. Belanja perjalanan luar negeri terdiri dari perjalanan biasa luar negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, dan perjalanan lainnya luar negeri yaitu pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi perhutanan besar atau atase di luar negeri.

Terdapat perbedaan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.27
Perbedaan Saldo Belanja Perjalanan Dinas (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas (LO)

Uraian	Nilai
Nama Akun (LRA)	860.698.365.053
Nama Akun(LO)	875.495.745.766
Selisih	**(8.797.580.713)**

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual tersebut merupakan/berasal dari:

Tabel D.28
Rincian Perbedaan Saldo Belanja Perjalanan Dinas (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas (LO)

Uraian	Nilai (Rp)
1. Pencatatan Belanja Pegawai pada Satker BLU	(7.788.340.320)
2. Pencatatan Akrual Pada Neraca	
Piutang Lainnya	478.476.648
Belanja barang yang masih harus dibayar	(321.217.641)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(983.828.392)
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	4.592.800
3. Lain-lain	(6.328.000)
Jumlah	**(8.797.580.713)**

D.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp615.716.271.822,00

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp615.716.271.822,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp89.114.014.440 atau 16,92% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar dan Rp526.602.257.382,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.29
Rincian Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	0	40.000.000	(40.000.000)	(100,00)

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	9.567.184.000	18.297.500.000	(8.730.316.000)	(47,71)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	0	609.144.546	(609.144.546)	(100,00)
Beban Persediaan tanah lungonan untuk dijual atau	100.314.580.664	87.688.362.606	12.626.218.058	14,40
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	56.171.259.682	56.938.947.034	(767.687.351)	(1,35)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	270.946.742.124	231.637.486.303	39.309.255.821	16,97
Beban persediaan jalan, Irigasi dan Jaringan untuk	15.146.806.260	5.826.823.442	9.319.982.818	159,95
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	49.950.000	0	49.950.000	100,00
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	6.347.621.607	6.077.384.714	270.236.893	4,45
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	157.172.127.481	119.426.608.734	37.745.518.747	31,61
Total	**615.716.271.822**	**526.602.257.382**	**89.114.014.440**	**16,92**

Rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.30
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	0	25.000.000	(25.000.000)	(100,00)
Itjen	0	0	0	0,00
Ditjen PT	80.643.296.112	32.161.321.016	48.481.975.096	150,75
Ditjen PB	379.368.872.466	334.667.125.511	44.701.746.955	13,36
Ditjen PSDKP	0	0	0	0,00
Ditjen PDSPKP	101.149.240.059	97.354.900.112	3.794.285.947	3,90
Ditjen PRL	53.308.973.230	61.598.234.173	(8.289.260.943)	(13,46)
BPSDMKP	1.253.889.955	863.596.570	450.287.385	36,03
BPPMHP	0	0	0	0,00
Total	**615.716.271.822**	**526.602.257.382**	**89.114.014.440**	**16,92**

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat mengalami kenaikan paling signifikan pada DJPT dikarenakan adanya pekerjaan penataan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) sesuai dengan Keputusan KP Nomor 147 Tahun 2023 tentang

Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju tanggal 31 Agustus 2023. Selain hal itu juga terdapat pekerjaan di Riau meliputi pembangunan tambatan perahu, pembangunan turap beton dan pedestrian pembangunan pagar dan gapura, *levelling* lahan kawasan, pembangunan jalan kawasan, pembangunan *landscaping*, pekerjaan bangunan IPAL dan MCK sesuai dengan SK 10375/DJPT.4/KU.220/PPK/IX/2023 tanggal 2023.

Perbedaan antara Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (LO) dengan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LRA) ditambah dengan Saldo Awal Persediaan dan dikurang dengan Saldo Akhir Persediaan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.31
Perbedaan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LO) dan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LRA)

Uraian		Nilai (Rp)
BEBAN BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (LO)		615.716.271.822
BELANJA BARANG/JASA yang akan diserahkan kepada masyarakat (LRA)		614.231.898.981
PERSEDIAAN barang/jasa untuk diserahkan kepada masyarakat 2022	+	23.613.709.773
Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat 2023	+	-
PERSEDIAAN barang/jasa untuk diserahkan kepada masyarakat 2023	-	31.264.309.510
Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat 2022	-	-
Jumlah		604.581.299.244
koreksi penyesuaian	+	-
Selisih		**11.134.972.578**

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya Piutang atas belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, pelunasan utang TA 2022 di TA 2023, koreksi nilai, reklasifikasi, dan koreksi lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.32
Rincian Perbedaan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LO) dan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (LRA)

Uraian	Nilai (Rp)
1. Transaksi Persediaan Non Anggaran	146.695.241.400
2. Biaya dibayar dimuka	26.368.222

Uraian	Nilai (Rp)
3. Piutang Lainnya	400.740.853
4. Beklas antar beban	38.786.712
5. Bahan Baku	32.411.058.151
6. Persediaan	1.985.018.000
7. Persediaan Lainnya	511.800.000
8. Lain-lain (On Process)	250.282.034
Jumlah	**(11.134.972.578)**

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp791.677.052.361,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp791.677.052.361,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.899.264.971 atau 2,33% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp810.576.317.332,00.

Adanya penurunan pada beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2023 dari 31 Desember 2022 adalah karena adanya penambahan jumlah aset yang dihapuskan karena kondisinya sudah mengalami rusak berat. Penghapusan paling besar ada pada Ditjen Perikanan Tangkap senilai Rp3.366.312.049,00, Ditjen Perikanan Budi Daya senilai Rp455.526.000,00 dan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp1.267.993.909,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.33
Rincian Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	371.864.224.705	381.725.854.549	(9.861.629.844)	(2,58)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.364.435.164	144.444.269.752	(8.079.834.588)	(5,59)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	138.148.061.310	141.883.220.785	(3.734.359.475)	(2,63)
Beban Penyusutan Irigasi	91.325.288.245	105.831.741.789	(14.506.453.544)	(13,71)
Beban Penyusutan Jaringan	11.273.563.712	10.822.749.520	550.814.192	5,09
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	494.414.843	759.766.565	(265.351.722)	(34,93)
Beban Penyusutan Properti Investasi	9.900.448.526	0	9.900.448.526	100,00
Beban Amortisasi Hak Cipta	357.142	357.142	0	0,00
Beban Amortisasi Paten	720.776.240	758.533.444	(29.757.204)	(3,96)

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Amortisasi Software	15.912.443.783	7.541.444.855	8.370.998.928	111,00
Beban Amortisasi Lisensi	334.301.355	470.548.720	(136.247.365)	(28,95)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	870.798.523	621.287.376	249.511.147	40,16
Beban Pengwatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	6.267.839.793	6.267.839.793	0	0,00
Beban Penyusutan Penyesuaian Aset Tetap yang Tidak	8.099.307.049	9.456.703.042	(1.357.395.002)	(14,35)
Total	**791.677.052.361**	**810.576.317.332**	**(18.099.264.971)**	**(2,33)**

Rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.24
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	65.603.304.126	55.726.217.609	9.877.086.517	17,72
Itjen	2.067.982.812	1.927.032.528	140.950.284	7,31
Ditjen PT	263.434.360.579	286.721.646.339	(23.287.285.760)	(8,12)
Ditjen PB	110.688.485.039	110.464.442.382	224.042.657	0,20
Ditjen PSDKP	158.527.770.268	141.069.301.468	17.458.468.780	12,38
Ditjen PDSPKP	13.165.476.302	17.925.385.467	(2.759.909.165)	(15,40)
Ditjen PRL	19.577.237.886	19.248.294.325	328.943.561	1,71
BPPSDMKP	114.555.144.174	128.819.214.762	(13.764.070.588)	(10,73)
BPPMHKP	42.057.291.125	49.174.782.432	(7.117.491.257)	(14,47)
Total	**791.677.052.361**	**810.576.317.332**	**(18.099.264.971)**	**(2,33)**

Dari tabel di atas, berikut ini penjelasan kenaikan/penurunan dari saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk masing-masing Unit Eselon I paling signifikan.

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan senilai Rp23.287.285.760,00 dibandingkan saldo TA 2022 tetapi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya mengalami kenaikan pada saldo neraca. Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan sebab terdapat beberapa Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memiliki masa manfaat habis sehingga tidak lagi mengalami penyusutan tetapi saldo aset-aset tersebut belum keluar dari neraca. Barang

Milik Negara lingkup DJPT dengan transaksi paling signifikan yakni penghentian aset dari penggunaan senilai Rp34.485.312.424,00, pencatatan barang yang mau dihapuskan senilai Rp74.689.928.495,00 dan transfer keluar senilai Rp262.493.775.276,00.

2. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan senilai Rp17,458.468.780,00 yang disebabkan adanya pengadaan Peralatan dan Mesin yang mengakibatkan nilai beban penyusutan/depresiasi untuk tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pengadaan TA 2023 paling signifikan pada hibah kapal ORCA 5 dan ORCA 6.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP)

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2023 sebagian Barang Milik Negara lingkup BPPSDMKP dengan transaksi paling signifikan yakni transfer keluar senilai Rp111.324.665.747,00, penghentian aset dari penggunaan senilai Rp25.616.859.968,00, likuidasi keluar senilai Rp165.852.956.037,00 dan reklasifikasi keluar senilai Rp235.004.677.296,00.

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp9.786.927.758,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah nilai setelah perhitungan tarif penyisihan dari piutang yang diprediksikan tidak akan tertagih pada periode pelaporan. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.786.927.758,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.550.485.891,00 atau 18,82% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp8.236.441.867,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.35
Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	(26.508.583)	7.171.117.846	(7.197.626.429)	(100,37)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.840.619.964	1.862.277.944	778.342.020	73,27

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	83.835	0	83.835	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU	7.949.858.491	0	7.949.858.491	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan	11.250	0	11.250	100,00
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional	34.526.615	29.110	34.497.505	118.507,40
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	205.950	14.098.005	(13.884.055)	(98,54)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	(11.867.764)	(11.073.038)	(794.726)	7,18
Total	**9.786.927.758**	**8.236.441.867**	**1.550.485.891**	**18,82**

Rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.36
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	7.986.288.676	6.809.407.093	1.176.881.583	17,28
Itjen	119.391	489.017	(369.626)	(75,59)
Ditjen PT	(41.769.613)	865.641.291	(907.410.904)	(105,18)
Ditjen PB	396.461.185	599.576.598	(203.115.413)	(33,88)
Ditjen PSDKP	21.368.124	2.724.848	18.643.276	684,28
Ditjen PDSPKP	(1.351.817)	7.141.891	(8.493.708)	(118,93)
Ditjen PKRL	(13.548.802)	(7.416.185)	(6.132.617)	82,69
BPPSDMKP	1.439.114.710	18.735.591	1.420.379.119	7.581,18
BPSDMKP	268.906	141.723	124.183	87,62
Total	**9.786.927.758**	**8.236.441.867**	**1.550.485.891**	**18,82**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami kenaikan signifikan pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.176.881.583,00 karena adanya kenaikan pada beban penyisihan piutang tidak tertagih piutang PNBP sebesar Rp1.141.445.594,00 pada BLU LPMUKP karena adanya kenaikan realisasi pencairan pada tahun 2023. Kenaikan juga terdapat pada BPPSDMKP sebesar Rp1.420.379.119,00, hal ini terjadi karena adanya Pencatatan piutang yang telah

diserahkan pengurusannya ke PUPN namun belum tercatat pada Laporan Keuangan atas PT. Carita Boat Indonesia sebesar Rp1.428.485.977,00.

D.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari saldo pos akun Pendapatan dikurangi Beban yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebagai berikut.

SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Akun Pendapatan/Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah akun yang temasuk ke dalam pos Laporan Operasional untuk pos Surplus/Defisit Non Operasional. Defisit dari saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp116.634.758.937,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp81.348.456.270,00 atau 41,09% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp197.983.215.207,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Pelepasan Aset Non Lancar disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.37
Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	(Kenaikan) Penurunan	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	15.014.865.792	10.418.247.697	4.596.618.095	44,12
Dikurangi:				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	131.649.624.729	208.401.462.904	(76.751.838.175)	(36,83)
Total	**(116.634.758.937)**	**(197.983.215.207)**	**81.348.456.270**	**(41,09)**

D.3.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.014.865.792,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.596.618.095 atau 44,12% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp10.418.247.697,00.

Kemudian, rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.38
Rincian Saldo Beban Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	48.641.800	52.727.767	(4.085.967)	(7,75)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	14.358.096.555	9.340.175.224	5.017.861.331	53,72
Pendapatan dari Pemindahtangangan BMN Lainnya	608.187.417	1.025.344.706	(417.157.289)	(40,68)
TOTAL	**15.014.865.792**	**10.418.247.697**	**4.596.618.095**	**44,12**

Pengungkapan atas rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari transaksi-transaksi berikut ini.

1. Terdapat saldo transaksi dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan pada Unit Eselon I BPPMHKP senilai Rp855.000,00; DJPB senilai Rp41.986.800,00; dan DJPT senilai Rp5.800.000,00.
2. Terdapat saldo transaksi dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Unit Eselon I BPPMHKP senilai Rp647.060.313,00; BPPSDMKP senilai Rp859.534.706,00; DJPB senilai Rp1.512.026.922,00; DJPDSPKP senilai Rp6.146.030.765,00; DJPKRL senilai Rp1.337.461.995,00; DJPSDKP senilai Rp2.469.099.821,00; DJPT senilai Rp717.515.792,00; ITJEN senilai Rp322.567.454,00; dan SETJEN senilai Rp346.720.787,00.
3. Terdapat saldo transaksi dari Pendapatan dari Pemindahtangangan BMN Lainnya pada Unit Eselon I BPPSDMKP senilai Rp255.017.654,00; DJPB senilai Rp40.756.178,00; DJPDSPKP senilai Rp151.498.323,00; DJPKRL senilai Rp5.138.000,00; DJPSDKP senilai Rp22.660.373,00; dan DJPT senilai Rp133.116.909,00.

Rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.39
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
SETJEN	346.758.787	1.831.844.804	(1.485.086.017)	(80,86)
ITJEN	322.567.454	128.846.000	193.721.454	150,35
DJPT	856.432.701	1.721.372.525	(864.939.824)	(50,25)
DJPB	1.586.769.900	1.377.780.526	216.989.374	15,75
DJPSDKP	2.481.708.194	326.266.307	2.155.403.887	641,01
DJPDSPKP	6.297.529.068	2.114.542.914	4.182.986.174	197,82
DJPKRL	1.342.089.895	1.757.037.217	(414.437.222)	(23,59)
BPPSDMKP	1.114.552.560	808.760.800	215.792.560	26,01
BPPMHKP	647.915.313	271.787.704	376.127.609	138,38
TOTAL	**15.914.865.792**	**10.418.247.697**	**4.596.618.095**	**44,12**

Kenaikan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan terdapat pada DJPDSPKP berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp8.170.880.101,00 dan Pendapatan dari Penjualan Permukaan BMN Lainnya Rp241.991.901,00.

D.3.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.845.662.814,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp76.751.838.175 atau 36,83% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp203.401.462.904,00.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan transaksi-transaksi Kerugian Pelepasan Aset yang disajikan lebih detail ke dalam Unit Eselon I lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.40
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	424.297.216	6.731.362.148	(6.307.064.932)	(93,70)
Ditjen PT	16.856.993.498	81.003.977.216	(64.146.983.718)	(79,19)
Ditjen PB	87.931.385.339	100.445.440.075	(12.514.054.736)	(12,46)

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PSDKP	8.146.350.015	375.667.217	7.770.682.798	2.068,58
Ditjen PDSPKP	7.264.095.600	4.600.482.118	2.663.613.482	57,90
Ditjen PKNL	8.091.215.444	11.381.485.242	(3.290.269.818)	(28,91)
BPPSDMKP	1.696.370.095	1.916.344.883	(219.974.788)	(11,48)
BPPMHKP	1.238.917.522	1.946.703.985	(707.786.463)	(36,36)
Total	**131.649.624.729**	**208.401.462.904**	**(76.751.838.175)**	**(36,83)**

Kenaikan Beban Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan terjadi pada:

1. Ditjen Perikanan Tangkap

   Penurunan signifikan pada DJPT disebabkan karena pada tahun 2022 ada bibah dalam bentuk alat-alat pendukung penangkapan ikan tersebar ke pelabuhan-pelabuhan perikanan milik pemerintah daerah yang tidak didapatkan lagi pada tahun 2023.

2. Ditjen PSDKP

   Beban pelepasan aset non lancar senilai Rp8.146.350.015,00 merupakan aset yang dihentikan penggunaannya atau dalam proses penghapusan terdiri dari Satker:

Tabel D.41
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada PSDKP
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Satker	Jumlah
Stasiun PSDKP Cilacap	637.654.321
Pangkalan PSDKP Lampulo	17.728.792
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	1.334.668
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi	7.350.377
Stasiun PSDKP Ambon	1.675.000
Pangkalan PSDKP Benoa	49.489.800
Stasiun PSDKP Kupang	125.361.684
Pangkalan PSDKP Batam	133.534.200
Pangkalan PSDKP Jakarta	180.476.982
Stasiun PSDKP Belawan	631.978.930
Stasiun PSDKP Pontianak	29.067.133
Sekretariat Ditjen PSDKP	6.378.820.858
Grand Total	**8.146.350.015**

D.4 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Surplus/Defisit dari saldo akun Pendapatan Non Operasional Lainnya dikurangi Beban Non Operasional Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebagai berikut.

Tabel D.42
Rincian Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	(Kenaikan) Penurunan	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	184.484.309.793	142.759.532.001	41.724.777.792	29,23
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71.820.953.464	72.744.428.714	(924.375.250)	(1,27)
Total	**112.664.356.329**	**70.015.103.287**	**42.649.153.042**	**60,91**

D.4.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp184.484.309.793,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.724.777.792 atau 29,23% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp142.759.532.001,00.

Kemudian, rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.43
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang RKL Tahun Anggaran	0	26.808.167	(26.808.167)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	325.362.691	165.683.409	159.679.282	96,39
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	13.500.000	3.800.000	10.700.000	350,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	862.584.291	1.813.091.597	(950.507.306)	(52,42)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	3.680.582.534	1.104.093.216	2.576.489.318	233,36
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	192.386.340	54.363.452	138.022.896	253,89

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Setoran dari Sisa Uang Non TP/TGR Pemanfaatan	114.963.183	172.576.814	(57.613.631)	(33,38)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	68.213.048	19.402.669	48.811.379	251,58
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	143.546.649.927	132.896.125.345	10.650.524.582	8,01
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	35.600.047.171	6.504.387.932	29.175.659.239	448,55
Total	**186.484.309.793**	**142.759.532.001**	**43.724.777.792**	**29,23**

Rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.44
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	319.346.360	495.269.056	(175.922.696)	(35,52)
Itjen	185.000	10.009.533	(9.824.533)	(98,15)
Ditjen PT	27.354.504.382	3.463.694.458	23.890.809.924	689,75
Ditjen PB	111.600.555.696	123.024.598.108	(11.424.042.412)	(9,29)
Ditjen PSDKP	46.966.556	54.881.578	(7.915.022)	(14,42)
Ditjen PDSPKP	324.455.479	3.089.724.208	(2.765.268.729)	(89,34)
Ditjen PRL	3.581.928.048	6.325.107.394	(2.723.179.346)	(43,75)
BPPSDMKP	48.661.644.785	6.028.132.074	34.633.492.711	574,53
BPPMHKP	669.643.487	368.095.592	301.547.895	81,92
Total	**186.484.309.793**	**142.759.532.001**	**43.724.777.792**	**29,23**

Kenaikan paling signifikan terjadi pada BPPSDMKP karena adanya koreksi nilai persediaan yang naik cukup signifikan. Hal ini terjadi karena adanya proses likuidasi BMN dari STIPM Kupang ke Politek Kupang sesuai dengan BAST Nomor B.154/BPPSDM-POLTEKKPG/PL.740/II/2023 tanggal 3 Februari senilai Rp32.589.626.718,00, namun terdapat kesalahan penulisan nilai pada BAST dan CaLBMN yang tidak sesuai dengan Neraca pada aplikasi SAKTI.

Kenaikan pada Ditjen Perikanan Tangkap dikarenakan adanya koreksi pendapatan perolehan lainnya pada PPS Kendari sebesar Rp15.163.045.000,00.

D.4.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp71.820.053.464,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp924.375.250,00 atau 1,27% dibandingkan periode yang berakhir sebesar Rp72.744.428.714,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.45
Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Selisih Kurs Terealisasi	7.623.000.000	0	7.623.000.000	100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	37.424.550.631	9.429.201.444	27.995.349.187	296,90
Beban Penyelesaian Rusak/Usang	708.344.566	977.486.043	(269.141.477)	(27,53)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	26.064.158.267	62.337.741.227	(36.273.582.960)	(58,19)
Total	**71.820.053.464**	**72.744.428.714**	**(924.375.250)**	**(1,27)**

Rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel D.46
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	33.673.720.262	62.318.183.854	(28.644.463.592)	(45,96)
Itjen	0	281.075	(281.075)	(100,00)
Ditjen PT	10.385.600	2.786.260.770	(2.775.914.170)	(99,63)
Ditjen PB	2.354.538.149	1.910.342.728	444.195.421	23,25
Ditjen PSDKP	0	64.500	(64.500)	(100,00)
Ditjen PDSPKP	41.474.504	4.457.464.006	(4.413.989.422)	(99,02)
Ditjen PKRL	0	173.835.896	(173.835.896)	(100,00)
BPPSDMKP	35.661.155.585	796.926.867	34.864.228.718	4.374,03
BPPMHKP	76.818.264	301.069.010	(224.250.726)	(74,48)
Total	**71.820.053.464**	**72.744.428.714**	**(924.375.250)**	**(1,27)**

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami penurunan paling signifikan ada pada Biro Umum dan PBJ senilai Rp28.644.463.592

dikarenakan adanya pengeluaran belanja atas hibah yang menyebabkan pengurangan nominal pada rekening hibah. Perhitungan selisih kurs dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar D.1
Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs Belum Terealisasi
Phase 1



Gambar D.2
Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs Belum Terealisasi
Phase 2



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LPE

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp25.420.240.996.441,00 dan Rp25.764.812.932.135,00.

Rincian nilai ekuitas awal pada masing-masing eselon I per 1 Januari 2023 dan per 1 Januari 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel E.1
Rincian Saldo Awal Ekuitas pada Masing-Masing Eselon I
per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022

Eselon I	01 Januari 2023	01 Januari 2022
Setjen	2.565.045.114.335	2.835.235.831.901
Itjen	3.693.248.390	3.624.417.343
Ditjen PT	5.986.784.264.050	6.167.765.641.870
Ditjen PB	5.256.986.203.499	5.413.217.690.920
Ditjen PSDKP	1.029.548.972.042	1.048.547.689.110
Ditjen PDSPKP	842.508.749.740	872.063.318.984
Ditjen PKRL	647.116.229.123	725.604.297.867
BPPSDMKP	7.904.170.647.372	8.063.512.831.205
BPPAKHP	779.753.091.452	985.789.780.605
Sarker Konsolidasi	31.622.093.842	27.411.752.130
TOTAL	**25.420.240.996.441**	**25.764.812.932.135**

Penurunan Ekuitas Awal disebabkan antar yang mengurangi nilai ekuitas yaitu Defisit LO yang mengalami kenaikan, sedangkan koreksi yang menambah nilai ekuitas dan transaksi antar entitas mengalami penurunan.

Perbandingan nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.2
Perbandingan Nilai Ekuitas Awal
per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022

Uraian	01 Januari 2023	01 Januari 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas Awal	25.764.812.932.135	26.290.136.988.231	(525.324.056.096)	(2,00)
Surplus/ Defisit LO	(3.995.103.249.353)	(4.384.423.024.749)	389.319.775.396	(2,66)
Koreksi yang menambah Ekuitas	(18.330.683.694)	(52.900.116.642)	34.569.432.948	65,35

Uraian	01 Januari 2023	01 Januari 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Transaksi Antar Entitas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

E.2 Surplus Defisit LO

Surplus Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit Rp4.886.114.745.439,00 dan Rp3.995.503.249.355,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Perbandingan Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.2
Perbandingan Surplus/Defisit LO
Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Operasional	[illegible]	[illegible]
Beban Operasional	[illegible]	[illegible]
Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional (A)	**[illegible]**	**[illegible]**
Kegiatan Non Operasional		
Surplus Defisit Penjualan Aset Non Lancar	[illegible]	[illegible]
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	[illegible]	[illegible]
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional (B)	[illegible]	[illegible]
Surplus/Defisit LO (A+B)	**[illegible]**	**[illegible]**

Peningkatan Surplus Defisit LO per 31 Desember 2023 disebabkan karena meningkatnya beban operasional, sementara pendapatan operasional mengalami penurunan karena tidak tercapainya target PNBP.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Surplus Rp52.349.387.566,00 dan Rp18.238.661.604,00.

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.160.560.702,00 dan sebesar minus Rp1.938.907.762,00.

Rincian dan perbandingan saldo koreksi nilai persediaan pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.4
Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan / Penurunan	%
Setjen	139.760.000	0	139.760.000	100,00
BPT	(186.117.800)	68.708.595	(244.825.695)	(406,58)
Ditjen PB	5.071.386.177	3.149.045.379	1.922.334.798	61,05
Ditjen PSDKP	(426.175)	158.483.489	(158.882.864)	(100,31)
Ditjen PDSPKP	0	5.247.117.299	(5.247.117.299)	(100,00)
Ditjen PKRL	0	(10.589.472.000)	10.589.472.000	100,00
BPPSDMKP	133.514.700	(75.376.722)	208.891.422	(277,68)
BPPMHKP	2.842.500	138.086.487	(135.243.987)	(97,94)
TOTAL	**5.160.560.702**	**(1.938.907.762)**	**7.099.468.464**	**(366,26)**

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan senilai Rp7.099.468.464,00. Kenaikan Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 disebabkan koreksi yang signifikan pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disebabkan pada tahun sebelumnya terdapat kesalahan penginputan jumlah dan harga satuan saat reklasifikasi dari aset ke - 126 - persediaan pada satker DKP Kabupaten Lombok Timur.

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi nilai persediaan adalah koreksi yang diakibatkan perubahan jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain.

Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp11.717.276.630,00 dan Rp11.044.904.021,00.

Rincian saldo koreksi atas reklasifikasi pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.5
Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan / Penurunan	%
Setjen	0	23.268.690	(23.268.690)	(100,00)
Itjen	1.743.600	(68.588.589)	70.332.189	(102,54)
Ditjen PT	177.286.850	0	177.286.850	100,00
Ditjen PB	11.608.789.682	0	11.608.789.682	100,00
Ditjen PSDKP	0	11.143.777.716	(11.143.777.716)	(100,00)
BPPSDMKP	(86.398.430)	(43.045.796)	(41.352.634)	96,07
BPPMHKP	13.855.000	(8.500.000)	22.355.000	(263,00)
TOTAL	**11.717.276.630**	**11.044.904.021**	**672.372.609**	**6,09**

Koreksi atas Reklasifikasi yang signifikan terdapat pada Ditjen PSDKP senilai Rp11.608.789.682,00.00 yang berasal dari transaksi Reklasifikasi Masuk, Reklasifikasi Keluar, Reklasifikasi dari Aset ke Persediaan, dan Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset. Salah satunya Koreksi yang berasal dari reklasifikasi ini adalah reklasifikasi 1 unit Kapal Patroli Pantai MUF 23 ke Barang Koleksi Non Budaya Lainnya (Monumen) senilai Rp10.733.555.000 pada Sekretariat Ditjen PSDKP. Aset tersebut memiliki saldo nilai buku nol, namun direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya yang tidak memiliki penyusutan. Koreksi tersebut terdapat pada Dit. Pemantauan dan Operasi Armada, Dit. Penanganan Pelanggaran, Dir. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Ambon, Stasiun PSDKP Biak, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Tarakan, DKP Prov. Kep. Bangka Belitung, DKP Prov. Lampung.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena penilaian kembali yang dapat berupa pembukuan persediaan yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan, pembukuan transaksi dengan dokumen sumber sebelum tahun berjalan, koreksi nilai/kuantitas, koreksi pencatatan dan lain-lain.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp28.047.097.088,00 dan Rp8.041.518.223,00.

Rincian saldo koreksi aset non revaluasi pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel E.6
Rincian Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi pada Masing-Masing Unit Eselon I per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	Koreksi Aset Tetap Non Reval	Koreksi Aset Lainnya Non Reval	Jumlah	Koreksi Aset Tetap Non Reval	Koreksi Aset Lainnya Non Reval	Jumlah
Sekjen	17.800.881.400	(12.170.983.152)	5.719.898.248	36.438.111.288	(36.035.953.639)	808.557.649
Itjen	0	0	0	0	0	0
Ditjen PT	277.868.329	837.665.155	1.056.971.854	6.344.913.022	5.784.408.326	12.669.321.348
Ditjen PB	10.342.765.380	(1.408.534)	10.341.336.481	(127.136.194.366)	(3.261.764)	(127.739.882.145)
Ditjen PSDKP	(9.089.936)	0	(55.089.189)	(18.329.467.344)	0	(18.329.467.344)
Ditjen PDSPKP	(5.808.185)	0	(5.808.185)	381.719.833	(31.212.000)	350.496.833
Ditjen PKRL	2.363.467.838	43.736.295	2.487.214.189	108.127.313.919	(971.978.481)	127.231.334.539
BPPSDMKP	3.227.852.267	914.037.133	3.661.733.782	6.167.939.254	0	6.167.939.254
BPPMHKP	1.752.367	0	1.752.367	(719.894.749)	0	(719.894.749)
Total	30.199.815.440	(11.141.520.302)	28.047.097.088	30.363.161.768	(36.881.842.345)	8.041.518.223

Koreksi Aset Non Revaluasi yang signifikan terdapat pada Ditjen Perikanan Budi Daya senilai Rp15.241.336.951,00 yang berasal dari temuan Inspektorat Jenderal.

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi Lain-Lain yang bersaldo negatif menunjukan bahwa saldo Koreksi Lain-Lain akan mengurangi

Ekuitas Akhir. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp7.424.453.146,00 dan Rp289.147.122,00.

Rincian saldo koreksi lain-lain pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.7
Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan / Penurunan	%
Setjen	7.635.469	(44.982.781)	52.618.370	(116,97)
Itjen	489.017	0	489.017	100,00
Ditjen PT	2.956.763.539	469.465.625	2.487.297.914	529,81
Ditjen PB	2.640.850.668	1.659.536	2.639.191.132	159.031,07
Ditjen PSDKP	(71.564.172)	138.788	(71.702.960)	(80.349,39)
Ditjen PDSPKP	6.472.475	510.048	5.962.427	1.168,99
Ditjen PKRL	16.679.201	3.000.000	13.679.201	455,97
BPSDMKP	1.030.143.000	(128.985.890)	1.959.128.890	(1.520,06)
BPSDMKP	46.569.349	(11.718.284)	48.301.633	(412,19)
TOTAL	**7.424.453.146**	**289.147.122**	**7.135.306.024**	**2.467,71**

Atas Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp7.424.453.146,00 sebagaimana tersaji pada tabel di atas, yang mana koreksi ini akan menambah saldo Ekuitas.

Koreksi Lain-Lain yang signifikan terdapat pada:

- Ditjen Perikanan Tangkap senilai Rp2.956.763.539,00; merupakan koreksi atas lain koreksi atas jurnal balik penyelesaian piutang dan belanja yang masih harus dibayar pada tahun anggaran yang lalu;
- Ditjen Perikanan Budi Daya senilai Rp2.640.850.668,00 merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini berupa koreksi beban penyelesaian piutang jurnal awal tahun.

E.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain Akun 113111
2. Diterima dari Entitas Lain Akun 113121
3. Transfer Keluar Akun 213211
4. Transfer Masuk Akun 213221
5. Pengesahan Hibah Langsung Akun 391131
6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Akun 391132
7. Pengesahan Hibah Langsung TA YL Akun 391133

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp4.942.745.753.674,00 dan Rp3.632.694.652.017,00.

Rincian saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel E.8
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.173.032.863.544	5.313.287.537.203	859.745.326.563	16,17
Diterima dari Entitas Lain	(1.010.436.196.070)	(1.822.117.123.493)	211.680.927.423	(11,62)
Transfer Keluar	(509.670.934.794)	(910.851.455.429)	(302.317.648.794)	167,48
Transfer Masuk	507.829.909.194	236.536.836.240	331.293.072.954	140,08
Pengesahan Hibah Langsung	855.946.181.332	113.619.440.951	242.326.701.381	213,19
Pengesahan Hibah Langsung TA YL	0	(1.969.709.119)	1.969.709.119	(100,00)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	16.225.914.794	9.002.126.874	8.237.787.920	82,44
TOTAL	**4.942.745.753.674**	**3.632.694.652.057**	**1.310.051.101.617**	**36,06**

Perbandingan Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.9
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	515.128.099.590	446.282.335.320	68.845.764.270	15,56
Itjen	74.975.252.660	73.446.877.430	1.528.375.230	2,08
Ditjen PT	538.307.982.725	(496.141.052.153)	425.329.044.878	(133,84)
Ditjen PR	1.881.522.394.857	916.270.114.278	165.252.480.579	18,04
Ditjen PSDKP	1.317.096.814.434	744.985.463.223	572.111.350.962	76,78

Eselon I	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PDSPKP	336.386.334.444	295.068.947.245	41.317.387.199	13,69
Ditjen PRL	(306.805.774.334)	(33.984.170.193)	(272.871.504.141)	802,98
BPPSDMKP	1.344.979.953.139	1.281.559.648.899	67.420.313.931	5,26
BPPMHKP	426.423.907.168	382.496.196.761	43.927.790.407	11,48
TOTAL	4.942.745.753.674	3.632.694.652.057	1.310.051.101.617	36,06

Saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.942.745.753.674,00 mengalami penurunan sebesar 36,06% dibanding dengan saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 senilai Rp3.632.694.652.057,00. Rincian dari Saldo Transaksi Antar Entitas dijelaskan sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain(DOEL)

Merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2023, DOEL yang secara keseluruhan merupakan realisasi belanja sebesar Rp1.610.430.196.076,00.

Tabel E.10
Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain
Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Eselon I	DOEL	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Setjen	1.410.650.995	3.342.607.707
Itjen	420.533.837	138.586.374
Ditjen PT	794.108.210.202	1.278.144.263.360
Ditjen PB	29.626.772.546	29.312.701.870
Ditjen PSDKP	38.613.322.664	44.586.921.685
Ditjen PDSPKP	15.224.344.421	10.054.878.759
Ditjen PRL	707.036.792.705	380.033.942.271
BPPSDMKP	18.186.782.117	12.970.724.957
BPPMHKP	71.200.956.299	65.340.709.309
TOTAL	1.610.430.196.076	1.822.117.125.692

Ditjen Perikanan Tangkap merupakan Eselon I yang memiliki nilai paling signifikan sebesar Rp736.108.210.282,00 karena perolehan PNBP yang tinggi.

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp6.179.932.863.044,00. Pada umumnya DKEL diperoleh dari pendapatan pengembalian belanja, denda penyelesaian pekerjaan, perizinan, dan lelang aset yang menggunakan dana APBN (Rupiah Murni).

Nilai bersih dari kedua akun tersebut adalah sebesar Rp4.569.502.667.768,00. Rincian DDEL dan DKEL yang bersaldo negatif akan menambah saldo Ekuitas Akhir dan sebaliknya akan mengurangi Ekuitas Akhir jika bersaldo positif.

Tabel E.11
Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Eselon I	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Setjen	510.109.251.551	460.945.931.038
Itjen	75.393.908.501	73.628.916.137
Ditjen PT	820.377.622.108	702.618.173.780
Ditjen PB	1.085.122.366.948	944.650.891.776
Ditjen PSDKP	1.119.216.743.475	775.747.148.360
Ditjen PDSPKP	339.604.537.406	314.324.616.688
Ditjen PKRL	389.126.971.951	358.776.773.111
BPPSDMKP	1.333.354.518.437	1.247.824.133.039
BPPMHKP	497.626.943.467	442.582.912.332
TOTAL	**6.179.932.863.044**	**5.311.287.537.261**

Berdasarkan tabel di atas, BPPSDMKP merupakan eselon I dengan realisasi belanja terbesar dibanding yang lain senilai Rp1.333.354.518.437,00.

Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer keluar/transfer masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk yang bersaldo positif akan menambah saldo Ekuitas Akhir sedangkan Transfer Keluar yang bersaldo negatif akan mengurangi Ekuitas Akhir.

Rincian saldo transfer keluar/transfer masuk pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel E.12
Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk Pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023

Nama Eselon I	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
Setjen	175.517.408.853	176.909.203.301	(1.391.794.448,00)
Itjen	0	0	0,00
Ditjen PT	11.285.406.214	11.295.520.714	(10.114.500,00)
Ditjen PB	182.785.031.724	181.984.368.724	750.983.000,00
Ditjen PSDKP	12.494.295.464	11.659.285.254	834.980.210,00
Ditjen PDSPKP	46.636.634.186	46.673.130.052	(36.495.937,00)
Ditjen PKRL	1.494.950.723	2.548.996.911	(1.054.046.190,00)
BPPSDMKP	137.599.220.218	135.857.774.115	1.741.596.103,00
BPPMHKP	1.137.466.912	1.137.466.912	0,00
TOTAL	**568.670.504.394**	**567.835.523.984**	**834.980.210,00**

Selisih TK-TM antar masing-masing Eselon I senilai Rp834.980.210,00. Selisih TK-TM terbesar terdapat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan senilai Rp1.741.596.103,00.

Selisih transfer keluar dan transfer masuk pada Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disebabkan karena adanya Transfer Keluar dan Masuk aset dari Kementerian/Lembaga lain.

Adapun rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk dari Kementerian Lain disajikan sebagai berikut:

Tabel E.13
Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk dari Kementerian Lainnya pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023

Kementerian/Lembaga		Transfer Keluar	Transfer Masuk	Total
Nama Kementerian/ Lembaga	Nama Eselon I			
PENGADILAN NEGERI NATUNA	Ditjen PSDKP	1.165.365.676	0	1.165.365.676
TOTAL		**1.165.365.676**	**0**	**1.165.365.676**

Transfer Keluar kepada kementerian lainnya terdapat pada Ditjen PSDKP pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam diterima oleh Pengadilan Negari Natuna, Mahkamah Agung RI berupa 1 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dan 1 unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan BMN Nomor 201/SI/PL.750/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023.

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan hibah-hibah yang disahkan di tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu.

Rincian saldo pengesahan hibah langsung pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel E.14

Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung pada Masing-Masing Unit Eselon I

Per 31 Desember 2023 dan 2022

Unit Eselon I	31 Desember 2023			31 Desember 2022
	Pengesahan Hibah Langsung	Pengesahan Hibah Langsung TKDL	Jumlah	Pengesahan Hibah Langsung
Setjen	1.024.512.566	0	1.024.512.566	4.235.108.586
Itjen	0	0	0	0
Ditjen PT	65.907.666.397	0	65.907.666.397	32.723.829.274
Ditjen PB	26.777.888.455	0	26.777.888.455	1.888.711.072
Ditjen PSDKP	229.237.372.833	0	229.237.372.833	2.419.393.805
Ditjen PDSPKP	11.971.647.952	0	11.971.647.952	2.282.344.356
Ditjen PKRL	0	0	0	223.603.906
BPSDMKP	18.323.898.129	18.229.916.786	36.553.792.915	94.273.608.196
BPPSIMKP	600.000.000	0	600.000.000	5.631.833.570
TOTAL	**355.868.133.332**	**18.229.916.786**	**374.070.066.116**	**113.619.849.993**

Pengesahan Hibah Langsung yang signifikan terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap senilai Rp65.907.666.397,00 dan Ditjen PSDKP senilai Rp229.237.372.833,00.

Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat 3 hibah luar negeri dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah *Global Environmental Facilities* (GEF) V merupakan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa dari *Global Environmental Facilities* (GEF) melalui FAO untuk periode tahun 2019-2023. Nama Hibah tersebut adalah *Enabling transboundary cooperation for sustainable management of the Indonesian Seas*, dengan Nilai hibah sebesar USD 2.700.320
- Hibah GEF VI merupakan Hibah Langsung dalam bentuk Uang dari *Global Environmental Facilities* (GEF) melalui *World Wildlife Fund Inc* (WWF US). Nama Hibah tersebut adalah *The Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) in Eastern Indonesia Fisheries Management Area (FMA) 715,717 & 718 *Component A, B and D*, dengan Nilai hibah sebesar USD 7.375.690 selama 4 tahun (2020-2024). Tujuan hibah ini adalah untuk memberikan kontribusi pada perikanan pesisir di WPPNRI 715, 717 dan 718 memberikan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi

yang berkelanjutan dan menunjukkan model pengelolaan perikanan pesisir yang efektif, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat ditiru yang ditandai oleh pemerintahan yang baik dan insentif yang efektif. Saldo awal Januari 2023 adalah Rp1.643.160.026,00 dengan pendapatan hibah sebesar Rp19.133.833.970,00 dan belanja terkait hibah sebesar Rp.18.730.520.000,00 sehingga saldo akhir Rp.2.045.673.996,00

- FAO melalui WAP menginisiasi kegiatan *Abandoned, Lost and Discarded FishingGear (ALDFG)* antara lain dengan kegiatan penandaan alat penangkapan ikan(API). Penandaan ini bertujuan untuk mengenali/memberikan identitas daripemilik API. Indonesia sebagai lokasi *pilot project* dari kegiatan penandaan telahmelaksanakan kegiatan tersebut melalui kerjasama WAP dengan Balai Riset Perikanan Laut BRSDMKP (BPRL) yaitu Pilot Project Gear Marking Phase1 pada tahun 2017. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi alat/sistem penandaan yang efektif dan dapat digunakan di Indonesia. Tindak lanjut dari kegiatan *Gear Marking Phase I* tersebut WAP akan melaksanakan project *Gear Marking Phase II: Gear Marking Retrieval and Recycling in Indonesian Small Scale Fisheries*. Project phase II direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019 – 2020 dengan total pembiayaan EUR 40.000 atau senilai IDR 696.000.000 dari WAP. Tujuan dari proyek ini antara lain untuk implementasi hasil rekomendasi pilot Gear Marking Phase I, peningkatan kesadaran dalam menanggulangi atau mengatasi sampah API melalui *gear recycling and removal*.

Pada Ditjen PSDKP terdapat 6 hibah luar negeri dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah Jasa Luar Negeri sebesar Rp310.671.232,00 berupa hibah luar negeri bentuk jasa antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan perjanjian hibah yang ditandatangani pada 17 Januari 2019 sesuai nomor register hibah 28QRTF2A dengan nama kegiatan *"Enabling Transboundary Cooperation for the Sustainable Management of the Indonesian Seas"*.
- Hibah Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.408.480.000,00 berupa hibah luar negeri bentuk jasa antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization* (CSIRO) dengan perjanjian hibah yang ditandatangani pada 26 April 2023 sesuai nomor register hibah 2783AHBA dengan nama kegiatan *"Improving Efforts to Reduce IUU Fishing Through Expanding Human Capacity and Implementing New Tools to Improve Maritime Surveillance"*.

- Hibah Barang Luar Negeri sebesar Rp75.919.022.400,00 merupakan hibah luar negeri bentuk barang berupa kapal patroli perikanan dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia sesuai nomor register hibah 2520GNXA berupa Perjanjian Hibah Exchange of Notes antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia tanggal 14 Februari 2023 dengan nama kegiatan "*Fisheries Patrol Vessel the Development of Outer Islands and the Enhancement of Fisheries Surveillance Capacity*". Hibah tersebut merupakan hibah kapal pertama dari dua unit kapal yang dihibahkan.
- Hibah Barang Luar Negeri sebesar Rp82.316.341.000 merupakan hibah luar negeri bentuk barang berupa kapal patroli perikanan dari Pemerintah Jepang (KF. Orca 06) kepada Pemerintah Indonesia sesuai nomor register hibah 2520GNXA berupa Perjanjian Hibah *Exchange of Notes* antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia tanggal 14 Februari 2020 dengan nama kegiatan *Fisheries Patrol Vessel the Development of Outer Islands and the Enhancement of Fisheries Surveillance Capacity*. Hibah tersebut merupakan hibah kapal kedua dari dua unit kapal yang dihibahkan.
- Hibah Barang Luar Negeri sebesar Rp67.934.332.502 merupakan hibah luar negeri bentuk barang berupa Pengadaan Pekerjaan Perbaikan KP. Orca 05 dan KP. Orca 06 kepada Pemerintah Indonesia sesuai nomor register hibah 2520GNXA berupa Perjanjian Hibah *Exchange of Notes* antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia tanggal 14 Februari 2020 dengan nama kegiatan *Fisheries Patrol Vessel the Development of Outer Islands and the Enhancement of Fisheries Surveillance Capacity*. Hibah tersebut merupakan hibah kapal kedua dari dua unit kapal yang dihibahkan.
- Hibah Jasa Luar Negeri sebesar Rp348.725.699 berupa hibah luar negeri bentuk jasa antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan perjanjian hibah yang ditandatangani pada 17 Januari 2019 sesuai nomor register hibah 2RGRTF2A dengan nama kegiatan "*Enabling Transboundary Cooperation for the Sustainable Management of the Indonesian Seas*".

Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL senilai Rp18.229.914.704,00 merupakan hibah langsung bentuk uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima sebelum TAB belum diselesaikan proses administrasinya oleh satker pada TAB sehingga menjadi hibah TAYL. Pengesahan Hibah Langsung TAYL ini terdapat pada Satker BPPP Banyuwangi senilai Rp3.285.164.763,00 dan Pusat Riset Perikanan senilai Rp14.944.750.021,00 yang merupakan penerimaan dan sisa dana Hibah Langsung Luar

Negeri (TAYL) program kerjasama Indonesia ACIAR, CSIRO, Tahun Anggaran 2016. WPEA-ITM Tahun 2022.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo awal Ekuitas, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar, Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas dan Transaksi Antar Entitas.

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp25.529.221.392.262,00 dan Rp25.420.240.996.441,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel E.15
Perbandingan Saldo Ekuitas Akhir
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Ekuitas Awal	25.420.240.996.441	25.764.812.932.139	(344.571.935.698)	(0,0007)
Surplus/Defisit LO	(4.891.114.765.419)	(3.095.503.349.355)	(893.611.406.064)	0,00
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	52.349.387.586	18.236.661.604	34.112.725.982	0,52
Transaksi Antar Entitas	4.942.745.783.674	3.632.094.652.057	1.310.651.131.617	0,00
Ekuitas Akhir	**25.529.221.392.262**	**25.420.240.996.441**	**108.980.395.821**	**0,43**

Dibandingkan tahun sebelumnya, Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp108.980.395.821,00 yang disebabkan unsur yang mengurangi nilai ekuitas yaitu defisit LO mengalami penurunan, sedangkan unsur yang menambah nilai ekuitas, yaitu koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.16
Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan / Penurunan
Setjen	2.581.348.734.235	2.565.068.116.315	(6.483.619.920,80)
Itjen	5.762.204.843	5.693.240.206	69.015.863,80
Ditjen PT	5.862.066.852.943	5.966.794.254.050	(103.917.432.906,90)

Unit Eselon I	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan / Penurunan
Ditjen PB	5.406.458.171.237	5.956.966.581.694	49.671.589.718,00
Ditjen PDKP	1.208.158.274.563	1.029.548.972.642	329.609.601.921,00
Ditjen PRSDKP	823.453.814.731	842.500.749.748	(19.047.935.017,00)
Ditjen PBL	817.822.061.097	847.116.239.121	(5.294.178.024,00)
BRSDMKP	7.899.796.695.636	7.964.370.647.272	(64.573.951.636,00)
BKIPM	745.154.664.299	770.753.081.452	(25.598.417.153,00)
Setber Konsolidasi	67.200.566.341	51.622.093.842	15.578.472.499,00
TOTAL	**25.529.331.593.362**	**25.428.340.996.841**	**100.990.596.521,00**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Lainnya atas Perubahan Entitas

F.1.1 Satker Konsolidasi

Satuan kerja konsolidasi adalah satker pada KKP yang dibentuk untuk menampung eliminasi dana BUN yang dikelola oleh BLU LPMUKP. Satker konsolidasi ini menggunakan kode 555032 dengan kode konsolidasi pelaporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) 032.55. Pada 31 Desember 2023, transaksi yang direkam di satker konsolidasi adalah sebagai berikut:

a) Jurnal transaksi resiprokal antara BLU LPMUKP terkait dengan Dana Bergulir per 31 Desember 2023;
b) Koreksi atas penyajian dana BUN yang dikelola oleh BLU berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU Yang Bersumber Dari Anggaran BUN.

F.1.2 Likuidasi Entitas di Lingkungan KKP Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka tindak lanjut implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran pada pelaksanaan tugas dan fungsi bagian anggaran KKP (BA 032) sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, dapat terjadi kondisi yang menyebabkan entitas akuntansi di likuidasi. Agar proses likuidasi entitas akuntansi pada UAPA KKP dapat terlaksana secara tertib dan menghasilkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta untuk mencatatkan dan mengamankan aset milik pemerintah pusat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi yang di likuidasi, oleh sebab itu diperlukan pencatatan atas proses likuidasi entitas akuntansi.

Likuidasi dilaksanakan terhadap entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang mengalami kondisi sebagai berikut:

a. tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan;
b. perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang antara lain disebabkan karena:
    1. penggabungan entitas akuntansi atau entitas pelaporan; atau
    2. pemecahan entitas akuntansi atau entitas pelaporan;
c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau

d. perubahan status menjadi BLU atau Badan Usaha Milik Negara dan sebaliknya, serta perubahan UBL satuan kerja menjadi UBL bagian satuan kerja atau UBL bukan satuan kerja.

Perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang disebabkan karena penggabungan entitas akuntansi atau entitas pelaporan berasal dari penggabungan beberapa entitas akuntansi atau entitas pelaporan menjadi 1 (satu) entitas akuntansi atau entitas pelaporan dengan:

a. menggunakan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan baru;
b. menggunakan salah satu identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang digabung.

Adapun entitas akuntansi yang di likuidasi terdiri dari:

Tabel F. 1
Rekapitulasi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi di Lingkungan KKP
Tahun 2023

No	Kode Satker	Nama Satker	Unit	Nama_Unit	Status
1	019062	Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	03	DJPT	NonAktif
2	029071	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu	07	DJPKIL	NonAktif
3	039062	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang	07	DJPKIL	NonAktif
4	039448	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Demak	07	DJPKIL	NonAktif
5	039405	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes	07	DJPKIL	NonAktif
6	039495	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati	07	DJPKIL	NonAktif
7	059190	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	03	DJPT	NonAktif
8	059459	Dinas Perikanan Kab. Sumenep	07	DJPKIL	NonAktif
9	069145	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	03	DJPT	NonAktif
10	079136	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	03	DJPT	NonAktif
11	089143	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	03	DJPT	NonAktif
12	139138	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	03	DJPT	NonAktif
13	169124	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	03	DJPT	NonAktif
14	189143	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah	02	DJPT	NonAktif
15	219098	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku	03	DJPT	NonAktif
16	239138	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Barat	03	DJPT	NonAktif
17	259107	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Papua	03	DJPT	NonAktif
18	289113	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	03	DJPT	NonAktif
19	329087	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	03	DJPT	NonAktif
20	339096	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat	03	DJPT	NonAktif

F.1.3 Kebijakan Likuidasi Satker Karantina Ikan KKP Menjadi Badan Karantina Nasional

Penyelenggaran karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, tetapi undang-undang tersebut tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional, memengaruhi penyelenggaraan karantina. Hal ini diikuti dengan berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan Karantina, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention of Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), mengatur mengenai ketentuan konvensi keanekaragaman hayati serta kerja sama pengembangan dan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia secara internasional dalam hal pengelolaan bioteknologi yang tepat guna, etis, dan aman, serta pengelolaan risiko untuk keamanan hayati.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Karantina tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, tetapi juga dituntut untuk melaksanakan fungsi Karantina dan keamanan hayati dari cemaran organisme hasil rekayasa genetik (*genetically modified organism*/GMo), *invasive alien species* (IAS), dan *food safety*.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mensyaratkan mutu hasil perikanan dalam pemeriksaan Karantina Ikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), mengatur mengenai terselenggaranya sistem multilateral mengenai akses terhadap SDG tanaman pangan dan pertanian sehingga diperlukan tindakan Karantina untuk mencegah masuknya organisme penggangu Tumbuhan, khususnya yang eksotis, yang

kemungkinan terbawa oleh pemasukan SDG tanaman Pangan dan pertanian tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur kewenangan otoritas veteriner yang harus disinergikan dengan fungsi Karantina serta pemberlakuan pulau Karantina bagi pemasukan Hewan yang bebas penyakit menular dari suatu zona dalam negara yang tidak bebas penyakit.
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang mengatur barang kiriman pos, baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri yang diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor harus diperlakukan sebagai objek Karantina.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat ketentuan mengenai pengawasan Keamanan Pangan berupa standar dan pedoman keamanan, mutu, dan gizi pangan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Penyelenggaraan kurantina mencakup pengaturan pemasukan, pengeluaran, dan transit media pembawa, pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya karantina. Lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; penetapan jenis HPHK, HPIK, dan OPTK, dan media pembawa; pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka; Kawasan karantina; Keterteluaran; sistem informasi karantina; jasa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan; kerja sama perkarantinaan; dan pendanaan.

F.2 PengungRapan Lainnya atas Transaksi Pengelolaan Keuangan

F.2.1 Pengelolaan Pinjaman dan Hibah di Lingkungan KKP TA 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, KKP menerima pinjaman dan hibah dari entitas lain (luar negeri). Pada pinjaman luar negeri kontrak yang ditandatangani dan teregister pada DJPPR Kementerian Keuangan diretus pada DIPA KKP dengan nilai Rp74.948.889.000,00 dan direalisasikan melalui belanja dengan nilai

Rp61,979,897,540.00 Pada hibah dalam dan luar negeri langsung yang ditandatangani dan teregister pada DJPPR Kementerian Keuangan, untuk kemudian direvisi pada DIPA KKP dengan nilai Rp106,918,052,000.00 dan direalisasikan melalui belanja dengan nilai Rp106,699,523,000.00.

Berdasarkan pengajuan SP3HL, pendapatan Rp23,736,558,282.00 dan belanja Rp422,892,561,785.00, terdapat perbedaan pengesahan, selisih tersebut terjadi antara aplikasi *e-span* dan aplikasi SAKTI pada data pinjaman dan hibah di lingkungan KKP, pada periode semester I 2024, akan dilakukan perbaikan data untuk melakukan sinkronisasi antara data realisasi dengan data pengajuan SP3HL yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Adapun rekapitulasi selisih *e-span* dan SAKTI terkait dengan pinjaman dan hibah luar negeri per unit Eselon I sebagaimana terlampir:.

Tabel F. 2
Rincian Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan KKP

Jenis	KODE & NAMA (ESELON I		Data Berdasarkan e-SPAN	
			DIPA	REALISASI
HIBAH LN KKP			74.848.000.000	81.879.887.160
	3201	DJPT	54.000.000.000	3.907.547.393
	3204	DJPB	20.848.000.000	58.079.356.047

Tabel F. 3
Rincian Hibah Dalam dan Luar Negeri Lingkup KKP

JENIS	KODE & NAMA ESELON I		Data Berdasarkan e-SPAN		Data SP3HL Berdasarkan SAKTI	
			DIPA	REALISASI	PENGAJUAN	SELISIH
HIBAH LN KKP			106.918.052.000	106.699.523.000	23.736.558.282	399.666.280.023
	3201	SETJEN	84.995.102.000	84.226.430.743	5.029.512.564	84.226.430.743
	3203	DJPT	22.902.017.000	22.902.092.257	20.707.045.718	48.561.099.217
	3204	DJPB	-	-	-	8.315.223.233
	3205	BPSDMKP	-	-	-	220.880.847.134
	3206	BPSIPSKP	-	-	-	11.971.647.852
	3207	DJPKRL	170.853.000	170.853.000	-	170.853.000
	3212	BPPSDMKP			-	19.445.570.021
HIBAH DN KKP					-	23.273.281.761
	3203	DJPT			-	21.407.117.000
	3212	BPPSDMKP			-	1.295.164.761
	3213	BPPRSDKP			-	571.000.000
HIBAH DALAM & LUAR NEGERI LINGKUP KKP			106.918.052.000	106.699.523.000	23.736.558.282	422.892.561.785

Daftar pengelola pinjaman dan hibah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

F.2.2 Monev Badan Layanan Umum pada BLU di Lingkungan KKP oleh PK BLU

Tujuan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum (Dit. PPK BKU) tahun 2020-2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi difokuskan untuk menciptakan tata kelola investasi dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern yang mengarah pada pencapaian tujuan pelaksanaan BLU. Monev PK BLU diharapkan mampu membuat organisasi BLU yang modern, ramping, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta senantiasa mampu mengantisipasi perubahan.

Tabel F. 4
Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Tahun 2023

No.	Uraian	LPMUKP	BPT Tegal	Politek KP Sidoarjo
1.	Kode Satker	660856	239188	622035
2.	Tahun Pendirian	2017	2022	2022
3.	Bidang/Rumpun	Dana Bergulir	Pelatihan	Pendidikan
4.	Direktif KAP	Srijadi Elly Sugeng dan Rekan	Indra Wijuna Marthanu CPA	Lutfi Muhammad dan Rekan
5.	Opini LK 2023	WTP	WTP	WTP
6.	Anggaran PNBP	60.943.937.000	7.191.508.000	4.340.501.000
7.	Realisasi PNBP	61.228.203.430	9.173.472.285	5.095.537.121
8.	Anggaran Belanja	57.174.996.000	98.433.429.000	36.643.805.000
9.	Realisasi Belanja	37.458.248.739	94.814.338.566	32.666.294.435
10.	Aset	1.417.438.003.007	206.702.304.655	63.150.252.847
11.	Kewajiban	1.350.246.643.863	225.944.089	120.810.020
12.	Ekuitas	67.191.439.224	206.556.359.766	63.029.442.827

Tabel F.5
Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Tahun 2023

No.	Uraian	BLU/PPB Karawang	BPBAP Situbondo	BBPBAP Jepara
1.	Kode Satker			
2.	Tahun Pendirian	2023	2023	2023
3.	Bidang/Rumpun	Barang dan Jasa	Barang dan Jasa	Barang dan Jasa
4.	Direktif KAP	Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Abdul Muntalib dan Yunus

No.	Uraian	BLUPPH Karawang	BPBAP Situbondo	BBPBAP Jepara
5.	Opini LK 2023	WTP	WTP	WTP
6.	Anggaran PNBP	1.124.725.000	3.375.000.000	4,240,599,000
7.	Realisasi PNBP	8.402.399.780	6.040.665.462	4.703.420.656
8.	Anggaran Belanja	105.515.796.000	59.970.525.000	69.826.117.000
9.	Realisasi Belanja	104.181.019.211	59.489.567.642	66.422.635.675
10.	Aset	819.031.206.526	331.894.910.276	1.824.442.605.902
11.	Kewajiban	1.082.901.515	184.736.005	207.203.896
12.	Ekuitas	817.948.305.011	330.973.559.005	1.424.155.462.006

Pada Tahun 2023, telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi oleh Dit PPK BLU Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan pada 3 (tiga) satker BLU di lingkungan KKP antara lain:

1. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang berdasarkan S-39/PB/PB.5/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Hasil Pembahasan Kinerja Layanan dan Keuangan BLU LPMUKP.
2. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo yang berdasarkan S-61/PB/PB.5/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi BLU Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
3. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo yang berdasarkan S-252/PB.5/2023 tanggal 29 September 2023 hal Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo.

Penjelasan proses monitoring dan evaluasi tahun 2023 PK BLU Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

1. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Sebagai tindak lanjut money yang Direktorat PKK BLU Kementerian Keuangan tahun 2022 terhadap BLU LPMUKP, ditemukan indikasi penurunan kinerja layanan maupun kinerja keuangan dari BLU LPMUKP, diantaranya sebagai berikut:

a) Realisasi penyaluran dana kelolaan pada BLU LPMUKP sejak penerapan pola pengelolaan keuangan BLU (2017-2022) secara rerata hanya dikisaran 26% dari target Rencana Strategi Bisnis (RSB). Hal ini mengakibatkan tingginya dana kelolaan *idle* pada BLU LPMUKP dengan rerata di kisaran 66%.

b) PNBP BLU LPMUKP dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) cenderung turun yang didominasi dari pendapatan layanan penunjang yang berasal dari

jasa perbankan (68% dari total PNBP), dan sisanya atau sebagian kecil berasal dari pendapatan layanan utama.

c) Sebagian besar PNBP (74%) tahun 2021-2022 digunakan untuk belanja remunerasi yang kecenderungannya semakin meningkat. Hal ini kurang sejalan dengan *nature* BLU bahwa PNBP BLU digunakan untuk peningkatan layanan. Trend peningkatan belanja remunerasi tersebut disebabkan penerimaan pegawai yang dilakukan oleh BLU LPMUKP yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

d) Terdapat penunjukan Pejabat Pengelola BLU yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.

Berdasarkan Pasal 17 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 jo. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) BLU:

1. Tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif;
2. Tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU; dan/atau
3. Berdasarkan hasil penilaian kinerja BLU dan/atau hasil penilaian tata kelola dan kinerja BLU dikelompokkan dalam kriteria buruk;

Maka berdasarkan hasil monev tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan surat peringatan kepada BLU dan memberi tenggat waktu paling lama satu tahun kepada BLU untuk melakukan perbaikan kinerja. Apabila setelah tenggang waktu tersebut BLU tidak dapat memperbaiki kinerja, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengusulkan pencabutan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU kepada Menteri Keuangan melalui tim penilai.

Direktorat PPK BLU telah menyampaikan surat peringatan kepada BLU LPMUKP untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.5/2022 tanggal 11 Juli 2022. Dalam surat tersebut, BLU LPMUKP diberi tenggat waktu sampai dengan 31 Desember 2022. Untuk mengetahui progress perbaikan kinerja yang dilaksanakan oleh BLU LPMUKP, Direktorat PPK BLU telah melaksanakan monev pada tahun 2023. Hasil monev tahun 2023 menunjukkan bahwa BLU LPMUKP masih perlu melakukan perbaikan tata kelola dan belum menunjukkan adanya peningkatan kinerja layanan.

Direktorat PPK BLU telah melaksanakan pembahasan terkait kinerja layanan dan keuangan BLU LPMUKP bersama Perwakilan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP selaku pembina teknis serta Dewan Pengawas BLU LPMUKP pada tanggal 26 Juni 2023. Rapat tersebut dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait arah

kebijakan pembina teknis BLU LPMUKP dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja layanan BLU LPMUKP sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 jo. PMK Nomor 202/PMK.05/2022. Berdasarkan rapat tersebut, terdapat beberapa hal yang kiranya dapat menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Pembina Teknis merupakan pengambil kebijakan (regulator) yang menentukan penyelenggaraan teknis layanan yang dilakukan oleh Satker BLU selaku operator. Pembinaan yang dilakukan oleh Pembina Teknis meliputi seluruh aspek teknis penyelenggaraan layanan BLU LPMUKP, tidak hanya sebatas pada asistensi penyusunan Laporan Keuangan.
2. Pembina Teknis dan Dewas agar berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan kinerja layanan BLU LPMUKP terutama pada:
   a) Aspek Substansi, skema layanan yang sesuai dengan karakteristik UMKM sektor kelautan dan perikanan sebagai penerima layanan dan mandat utama pembentukan BLU LPMUKP, serta mendorong optimalisasi peran BLU LPMUKP sesuai mandat layanan. Selain itu, pengalihan dana kelolaan BLU LPMUKP ke BLU pengelola dana bergulir lainnya kiranya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu opsi lainnya, dengan kebijakan penyaluran dana bergulir tetap mengikuti kebijakan KKP sehingga UMKM sektor kelautan dan perikanan dapat tetap terlayani.
   b) Aspek Manajemen, pengelolaan SDM dan kesesuaian penunjukan pimpinan BLU LPMUKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait rangkap jabatan pejabat pengelola BLU.

2. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo

Dalam rangka pembinaan Badan Layanan Umum dengan Direktorat PPK BLU, melakukan rumer, 4 (empat) isu utama sebagai berikut:

a) Poltek KP Sidoarjo belum menjalankan fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara optimal sehingga masih terdapat temuan LKPP Tahun 2022.
b) Poltek KP Sidoarjo memiliki aset tetap yang sangat besar dengan potensi bisnis yang bagus, namun belum dapat dioptimalkan secara penuh untuk menghasilkan PNBP.
c) Poltek KP Sidoarjo belum memiliki sistem dan aplikasi keuangan terintegrasi dengan layanan sehingga sebagian besar transaksi masih dilakukan secara manual dan non-cashless.
d) Pengembangan kualitas layanan pendidikan pada Poltek KP Sidoarjo masih mengalami kendala dikarenakan adanya kebijakan moratorium pembukaan

program studi oleh Kemendikbud dan pembatasan pengadaan program-program diklat oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi dalam penyelesaian isu diatas sebagai berikut:

a) Poltek KP Sidoarjo agar menguatkan fungsi SPI di setiap lini layanan dan keuangan.

b) Poltek KP Sidoarjo segera mengembangkan sistem dan aplikasi keuangan yang modern dan terintegrasi, serta menyusun dan menyempurnakan pedoman dan SOP baik proses bisnis layanan maupun keuangan.

c) Poltek KP Sidoarjo agar mengembangkan potensi bisnis dari optimalisasi aset tetap, meningkatkan program kerja sama dengan pihak industri, serta mengembangkan strategi bisnis berbasis digital.

d) Poltek KP Sidoarjo agar meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana pendukung layanan, baik pada ruang kelas, laboratorium, maupun asrama taruna.

e) Untuk mendukung terwujudnya rekomendasi di atas, BPPSDMKP KKP agar memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya tata kelola BLU yang baik dan akuntabel, penganggaran yang fleksibel dan suportif, peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana penunjang layanan pendidikan, serta pengembangan bisnis dari optimalisasi aset tetap pada BLU Poltek KP Sidoarjo.

2. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo

Hasil monev Dit. PKK BLU Kemenkeu, merekomendasikan antara lain sebagai berikut:

1) Aspek Penerapan Tata Kelola Yang Baik

BLU BPBAP Situbondo direkomendasikan membuat SOP:

a) Pengeluaran/belanja dengan sumber dana BLU yang memuat: bagan *flow chart* proses transaksi pengeluaran atas belanja BLU termasuk norma waktu, penanggung jawab dan dokumen sumber yang diperlukan, dan format dokumen atas proses pengeluaran belanja BLU beserta penjelasannya

b) Membuat SOP kerja sama pemanfaatan aset dan SOP perencanaan dan optimalisasi kas

c) Membuat kajian terkait kebutuhan uang muka kerja

BLU BPBAP Situbondo direkomendasikan membuat Sistem Pengendalian Intern dengan berpedoman pada PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

Dalam rangka percepatan pelaksanan Sistem Pengendalian Intern Pimpinan BLU dapat menunjuk salah satu pegawai, untuk menjalankan fungsi SPI sesuai PMK No. 129/PMK.05/2020. Pemimpin BLU BPIAP Situbondo agar berkoordinasi dengan Pembina teknis terkait pembentukan Satuan Pengendalian Intern (SPI) sesuai PMK No. 129/PMK.05/2020, terutama terkait SDM

Berkoordinasi dengan Pembina Teknis untuk melakukan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

2) Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, agar membuat *time line* atas rencana inovasi/pengembangan layanan
3) Aspek Optimalisasi aset tetap, melakukan *mapping* atas kondisi aset yang dimiliki sehingga dapat dioptimalisasikan dan membuat kajian untuk pemanfaatan aset yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4) Aspek Pelaksanaan Anggaran, berkoordinasi dengan KPPN Mitra untuk dapat melakukan penarikan atas sisa PNBP tahun berjalan untuk menjadi saldo kas BLU dan melakukan pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja apabila telah melakukan belanja yang bersumber PNBP BLU
5) Aspek Pengelolaan Kas dan Rekening, menyusun SOP pelaksanaan *beauty contest* atas mekanisme pembukaan rekening

F.2.3 Rekapitulasi Piutang Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif diurus oleh PUPN/DJKN

Jumlah Piutang Negara yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara kepada DJKN per 31 Desember 2023 adalah 36 (tiga puluh enam) Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebesar Rp32.878.908.134,00. Sedangkan realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.749.678.229,00. Dengan koreksi pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 dan keringanan pembayaran sebesar Rp129.482.789,00.

Daftar rinci piutang yang telah diserahkan kepada PUPN dan telah dicatat pada LK KKP tahun 2023 *Audited* adalah sebagai berikut:

Tabel F.6
Nilai Piutang Negara yang Diserahterimakan PUPN
Per 31 Desember 2023

No.	KPKNL	Unit Eselon I/Satker	Nama Debitur	Nilai Piutang (Rp)
1.	Jakarta II	BPPSDMKP-Pusriskan	PT Cerita Boat Indonesia	1.428.485.977,00

No.	KPKNL	Unit Eselon I/Satker	Nama Debitur	Nilai Piutang (Rp)
2.	Jakarta II	DJPB5-Direktorat Pakan dan Obat Ikan	PT Tirtan Karya Mandiri/Jabar	258.735.763,35
3.	Kendari	DJPKSL-DKP Kab Buton	CV. Putra Rafi Mandiri (Dikuasai)	17.450.000,00
4.	Kendari	DJPKSL-DKP Kab Buton	CV. Yasrib Jaya (Rinaldy)	88.500.000,00
5.	Kendari	DJPKSL-DKP Kab Buton	CV. Lande Bersaudara (Wa Ode Aisyah)	14.000.000,00
6.	Kendari	DJPKSL-DKP Kab Buton	CV. Lagusdi (Buteworo)	28.000.250,00
7.	Cirebon	DJPDSPKP (Direktorat Akses Pasar dan Promin (pada Satker Sekretariat DJPDSPKP)	CV Adem Ayem (Idah Faridah)	127.827.217,02
8.	Tangerang	DJPT-Dit. KAPI (Satker Sekretariat DJPT)	PT Khariena Mister Marina	114.709.720,00
9.	Jakarta II	DJPT- Dit. KAPI (Satker Sekretariat DJPT)	PT Kurnia Marina	597.936.000,00
10.	Makasar	DJPT- Dit. KAPI (Satker Sekretariat DJPT)	CV. Sumber Pratama	1.473.008.572,00
11.	Makasar	DJPT- Dit. KAPI (Satker Sekretariat DJPT)	CV Indomulut Fiberboat Tahunnarina	435.420.000,00
12.	Purwokerto	DJPT- Dit. KAPI (Satker Sekretariat DJPT)	PT Anang Erafindo Group	386.574.400,00
13.	Kendari	DJPT-PPS Kendari	CV Buna Colelias	11.526.295,00
14.	Pekanbaru	DJPT-DKP Riau	PT. Lion Fiber Glass/ Wiky Theny	280.964.200,00
			Jumlah	5.457.201.393,37

Selain itu terdapat piutang yang telah diserahkan kepada PUPN dan telah dicatat kembali pada LK KKP tahun 2023 *Audited*. Daftar piutang yang telah diserahkan kepada PUPN dan telah dicatat pada LK KKP dapat dilihat pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Daftar Barang Jaminan

Jumlah barang jaminan per 31 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) unit. Jaminan tersebut berupa barang tidak bergerak berupa sertifikat tanah a.n. almarhum BP. Jaminan tersebut diterima dan disimpan oleh satker Pusat Data dan Informasi unit Eselon I Sekretariat Jenderal dengan BAST No. B 2772/S1.7/PL.450/VII/2022 berupa Sertifikat (Tanda Bukti) Hak Milik No. 537 tertanggal 13 Agustus 2002 dengan luasan

980 m^3 sebagai jaminan inalikasi kerugian negara atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu pada Satker Pusdatin atas belanja tahun 2012.

F.2.4 Penganglapan Kebijakan Akuntansi terkait Transaksi Perpajakan KKP

KKP telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 *Audited*. Terkait dengan penerapan PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan terhadap transaksi terkait pengakuan pendapatan dan kewajiban perpajakan, Pemerintah memedomani PSAP No. 12 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Buletin Teknis No. 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Dalam rangka perbaikan penyajian Laporan Keuangan terkait hak dan kewajiban negara secara lengkap yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai basis akuntansi akrual ke depan, saat ini KKP berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyelesaikan draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran yang akan diimplementasikan setelah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran disahkan oleh KSAP.

KKP melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.05/2023 telah membentuk Tim *Task Force* untuk mendukung percepatan penyelesaian pernyataan standar akuntansi pemerintah mengenai pendapatan dari transaksi nonpertukaran.

F.2.4.a Sisa BBM Operasional Kapal Pengawas pada Ditjen PSDKP

Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai realisasi BBM Kapal Pengawas dengan menggunakan belanja bahan (kode akun 521211), atas pembelian realisasi BBM tersebut terdapat sisa BBM penggunaan Kapal Pengawas sebagai berikut:

Sisa BBM Akhir Bulan Desember Tahun 2023

No.	Nama Kapal	Tanggal BA	Lokasi	Sisa BBM (Liter)
1.	ORCA 01	31/12/2023	Jakarta	32.000
2.	ORCA 02	31/12/2023	Batam	66.000
3.	ORCA 03	31/12/2023	Batam	55.600
4.	ORCA 04	31/12/2023	Bitung	48.000
5.	ORCA 05	29/12/2023	Ambon	47.850
6.	ORCA 06	29/12/2023	Ambon	37.950
7.	HIU MACAN TUTUL 01	28/12/2023	Makassar	19.100

No.	Nama Kapal	Tanggal BA	Lokasi	Nilai (Rp) (Ribu)
8.	HIU MACAN TUTUL 02	29/12/2023	Batam	18.700
9.	PAUS 01	29/12/2023	Jakarta	36.700
10.	ARAH BARAT 01	31/12/2023	Jakarta	230
11.	HIU MACAN 01	29/12/2023	Batam	39.440
12.	HIU MACAN 03	29/12/2023	Maumere	24.300
13.	HIU MACAN 04	29/12/2023	Sorong Papua Barat	40.306
14.	HIU MACAN 05	31/12/2023	Batam	22.600
15.	HIU MACAN 06	31/12/2023	Tual	36.765
16.	HIU 01	31/12/2023	Dermaga BPPP Medan	4.680
17.	HIU 02	29/12/2023	Makassar	8.223
18.	HIU 03	29/12/2023	Batam	3.320
19.	HIU 04	31/12/2023	Pelabuhan BBPI Semarang	2.120
20.	HIU 05	31/12/2023	Bitung	3.940
21.	HIU 06	29/12/2023	Jakarta	6.900
22.	HIU 07	29/12/2023	Kwaburni	2.009
23.	HIU 08	29/12/2023	Medan	4.560
24.	HIU 09	30/12/2023	Pelabuhan Perikanan Majangan Probolinggo	4.009
25.	HIU 10	29/12/2023	Jakarta	4.000
26.	HIU 11	29/12/2023	Pontianak	58.270
27.	HIU 12	29/12/2023	pelabuhan perikanan bungus	5.570
28.	HIU 13	01/12/2023	Bitung	13.000
29.	HIU 14	31/12/2023	Tual	13.570
30.	HIU 15	29/12/2023	Bitung	11.000
31.	HIU 16	29/12/2023	Medan	12.832
32.	HIU 17	31/12/2023	Batam	9.453
TOTAL				421.300

F.2.4.b Pengelolaan Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Belanja 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah) di lingkungan KKP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku perikanan di Indonesia. Pada T.A. 2023 KKP menganggarkan Belanja 526 senilai Rp618.130.671.000,00 dengan realisasi senilai Rp614.231.981.000,00 atau sekitar 93,37% dari pagu anggaran. Pokok-pokok Pengelolaan Belanja untuk Disosialisasikan Kepada Masyarakat/Pemda pada KKP adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal melalui Pusat Data, Informasi dan Statistik, akan mengoptimalkan laman satudata.kkp.go.id dalam mendukung pelaksanaan bantuan pemrintah di lingkungan KKP untuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan/penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja 525.
2. Bantuan pemerintah pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain dialokasikan pada Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan berupa bantuan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) dan telah terealisasi senilai Rp9.900.000.000,00, namun sampai dengan pemeriksaan BPK, bukti pertanggungjawaban yang diberikan penerima dan telah diverifikasi Itjen senilai Rp585.184.000,00 atau terdapat kekurangan senilai Rp332.816.000,00. Terhadap kekurangan senilai Rp332.816.000,00 tersebut dicatat dalam Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai Belanja Dibayar Dimuka.
3. Bantuan pemerintah pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKPRL) antara lain dialokasikan pada Direktorat P4K berupa bantuan sarana usaha ekonomi produktif T.A. 2023 telah dilaksanakan melalui mekanisme swakelola senilai Rp26.368.232,00 dengan rincian penanaman mangrove senilai Rp7.830.000,00 dan pengembangan pesisir tangguh senilai Rp18.535.232,00. Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan mencatat jurnal koreksi Beban Dibayar Dimuka senilai Rp26.365.232,00 pada Beban Persediaan Hewan/Tanaman yang diserahkan ke Masyarakat senilai Rp7.830.000,00 dan Beban Persediaan Tanah yang diserahkan ke Masyarakat senilai Rp18.535.232,00.

F.3. Pengungkapan Lainnya atas Kejadian Masa Lampau Yang Belum Terselesaikan

F.3.1. Pencatatan atas Penyelesaian Dana Ex Bergulir 2003-2023

Dana bergulir pada KKP merupakan pengalihan bantuan barang pada program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pada tahun 2003 s.d. 2005. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP) mengatur bahwa seluruh akun Investasi Jangka Panjang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (BA 999.03). Pengaturan tersebut memberikan konsekuensi bahwa pelaporan Investasi Jangka Panjang – Dana Bergulir yang sebelumnya merupakan bagian dari Laporan Keuangan KKP dipindahkan ke dalam Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2011 (*Unaudited*).

Berkenaan dengan rekomendasi BPK RI pada proses pemeriksaan Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2011, pada periode pelaporan *Audited* 2011 dilakukan reklasifikasi pencatatan akun Investasi jangka Panjang – Dana Bergulir menjadi akun Aset Lain-Lain (Aset eks Dana Bergulir) untuk seluruh bantuan peralatan tangkap program PUPTSK.

Pertimbangan BPK atas hal tersebut, diantaranya adalah program perguliran yang telah diterminasi/berakhir sehingga sudah tidak memenuhi kriteria pengakuan dan penyajian untuk akun Dana Bergulir. Atas Aset eks Dana Bergulir yang dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-265/MK.06/2012 tanggal 16 April 2012 menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan aset tetap berada di Kementerian yang bersangkutan. Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit konsolidator pelaporan yang tidak dalam kapasitas untuk melakukan tindakan penyelesaian pengelolaan.

Selanjutnya mempertimbangkan hasil inventarisasi dan verifikasi atas Aset eks Dana Bergulir serta rekomendasi BPK RI, pada tahun 2013 kami telah meminta pertimbangan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) terkait pengalihan pencatatan Aset eks Dana Bergulir ke dalam Laporan Keuangan KKP. Dalam hal ini, Direktur APK melalui Surat Nomor S-8120/PB.6/2013 menyatakan sependapat bahwa Aset eks Dana Bergulir dicatatkan oleh KKP. Seiring dengan perkembangan pengaturan SAIP, Aset eks Dana Bergulir disajikan pada Laporan Keuangan UAIP. Penyajian tersebut dilakukan berdasarkan surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KKP. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Nomor B-1369/SJ.2/TU.210/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Penyampaian Data untuk Penyusunan Laporan Keuangan BUN 999.03 Tingkat UAIP Tahun 2022 *Audited*, diperoleh informasi bahwa Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan reviu atas aset dan kas eks dana bergulir lingkup DJPT. Berdasarkan hasil reviu tersebut, dilakukan pemutakhiran nilai Aset eks Dana Bergulir KKP pada Laporan Keuangan UAIP Semester I 2023 menjadi sebesar **Rp13.783.148.145**.

Sebagai tindak lanjut pencatatan Aset eks Dana Bergulir, telah dilaksanakan rapat pembahasan antara Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP pada tanggal 14 Desember 2023. Rapat dimaksud dilanjutkan dengan melibatkan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN pada tanggal 27 Desember 2023.

Berdasarkan hasil rapat, diperoleh kesepakatan terkait pemindahbukuan pencatatan Aset eks Dana Bergulir dari Laporan Keuangan UAIP (BA 999.03) kepada Laporan Keuangan satker Sekretariat DJPT, KKP.

Pemindahbukuan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Program PUPTSK telah berakhir,
2. Aset eks dana bergulir dalam kondisi rusak berat dan usang sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali,
3. Pengendalian atas aset eks dana bergulir berada pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
4. Substansi akun Aset Lain-Lain (Aset eks Dana Bergulir) sudah tidak mewakili suatu transaksi investasi sesuai PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang SAIP,
5. Penyelesaian aset akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan.

Kemudian pada tanggal 29 Desember 2023 telah ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Pemindahbukuan Aset eks Dana Bergulir antara Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan. Berdasarkan BAST tersebut KKP telah menyajikan Aset eks Dana Bergulir tersebut sebagai Aset Lain-Lain pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 *Audited*.

Daftar penyelesaian dana bergulir s.d. T.A. 2023 dapat dilihat pada lampiran VIII yang merupakan bagian terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

F.3.2 Penjelasan atas Informasi Progress KJA *Offshore*

Adapun perkembangan Tindak Lanjut Temuan *KJA Offshore* (KJA 05) sebagai berikut:

A. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak antara Direktorat Pakan dan Obat Ikan dengan PT Perinus pada tanggal 20 Juli 2017 di untuk paket KJA 05 di Sabang serta antara Direktorat Perbenihan dengan PT. Perinus pada tanggal 16 Desember 2017 untuk paket KJA 05 di Pangandaran dan Karimunjawa.

B. Proses Pembayaran Progress

3 (tiga) KJA 05 ini merupakan pengadaan barang bukan konstruksi, namun dalam rangka membantu PT. Perinus agar pengadaan KJA 05 ini cepat selesai, KKP mengambil inisiatif melakukan pembayaran berdasarkan progres. Pembayaran pengadaan barang berdasarkan progres, tidak diatur dan tidak dilarang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Kronologis progress Pangandaran dan Karimunjawa

1. Tanggal 29 Desember 2017 pembayaran sebesar 06 % dari nilai kontrak sebesar Rp73.844.878.103,00 (perhitungan progress 91%, dikurangi biaya retensi 5%).
2. Tanggal 31 Maret 2018 pemberian kesempatan kepada PT. Perinus untuk menyelesaikan pekerjaan KJA 05 sampai dengan 30 April 2018, karena pekerjaan belum dapat diselesaikan.
3. Tanggal 14 April 2018 perhitungan bersama antara PT. Perinus, Direktorat Perbenihan, dan didampingi tim Itjen dengan hasil penilaian progress Pangandaran 91,27% dan Karimunjawa 88,845%.
4. Tanggal 29 April 2018 PT. Perinus menolak perpanjangan jaminan pelaksanaan karena merasa pekerjaan sudah selesai 100%.
5. April s.d. Mei 2018 pemeriksaan spesifikasi Kapal *Workboat* (WB) oleh pihak Ketiga (PT. Binocal dan BKI). Pemeriksaan spesifikasi dilakukan atas Kapal WB buatan galangan di Batam dan impor dari *Norwegia* dengan hasil sebagai berikut:
   1) bahwa kedua jenis kapal bukan *sister ship* artinya tidak sama dari segi spesifikasi.
   2) Selain itu terdapat selisih harga antara kedua jenis kapal tersebut sekitar Rp 2,1 Milyar. Disamping itu, semua jenis kapal belum bisa dinyatakan selesai karena:
      - Tidak ditemukannya Berita Acara *Sea Trial*.
      - Ditemukannya Berita Acara Serah Terima Kapal (dari Produsen Kapal/ galangan ke Pembeli);
      - Sertifikat-sertifikat kapal.
6. September 2018 KKP memberikan opsi kepada PT. Perinus dalam hal penyelesaian KJA 05 yaitu:
   a) Segera menyelesaikan pekerjaan KJA 05 di 2 lokasi, atau
   b) Menerbitkan akta pernyataan hutang terhadap pekerjaan yang dilakukan
7. November 2018 sampai dengan bulan ini, PT. Perinus tidak menjalankan dua opsi yang ditawarkan, sehingga di lakukan pemutusan kontrak dan memasukkan PT. Perinus ke dalam daftar (*black list*). Pemutusan kontrak ini diikuti klausul bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Perinus tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:
   1) KJA 05 belum teruji dan belum memenuhi kelengkapan Norwegian Standard (NS) 9415.

2) Sertifikat/Dokumen kelaikan dan kelayakan untuk Kapal WB belum bisa diusahakan oleh PT. Perinus sehingga fungsi kapal untuk operasional KJA belum dapat dilakukan.

C. Proses Peradilan dan Penyelidikan Pangandaran dan Karimunjawa

1. PT.Perinus mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan terdaftar dengan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. (terkait pekerjaan KJA 05 di Pangandaran dan Karimunjawa) dan Nomor 127/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst (terkait pekerjaan KJA 05 di Sabang) tanggal 17 Januari 2019.
2. Didalam Petitum Gugatan Perkara nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Januari 2019 Penggugat (PT.Perinus) menjelaskan telah melaksanakan 100% perjanjian tersebut, sehingga Tergugat (KKP) harus membayar kerugian Penggugat (PT.Perinus) sebesar Rp. 13.906.006.863 (tiga belas miliar sembilan ratus enam juta enam ribu delapan ratus ena puluh tiga rupiah), yang terdiri dari sisa pembayaran yang masih ditahan oleh Tergugat (KKP) ditambah dengan biaya perbaikan Keramba Jaring Apung (KJA) baik di Karimunjawa maupun di Pangandaran, namun sebaliknya Tergugat (KKP) mendalilkan bahwa Penggugat (PT.Perinus) tidak melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga Penggugat (PT.Perinus) harus membayar uang sejumlah Rp.86.792.352.499 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh dua empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari realisasi pembayaran yang telah diterima Penggugat (PT.Perinus) ditambah dengan kekurangan penerimaan Negara serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan.
3. Berdasarkan penelitian dan kajian PPK Satker Direktorat Perbenihan, sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 PT Perinus belum menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat dikenakan denda minimal selama 90 hari (31 Desember 2017 s.d. 31 Maret 2018) atau sebesar Rp6.211.434.935,35 (1/1.000 x Rp 69.015.943.726,10 x 90 hari), dimana pengenaan denda dihitung dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai *feed barges*. Selain itu PPK juga menjelaskan bahwa pekerjaan KJA Karimunjawa dan Pangandaran masih dilanjutkan. PT Perinus telah melakukan pembayaran denda atas sisa pekerjaan selama 90 hari sebesar Rp.1.001.913.377,00 pada tanggal 28 Maret 2018 melalui NTPN 19E0I5ACORNB1B9. Atas hal ini terdapat kekurangan pembayaran denda keterlambatan minimal sebesar Rp 5.129.521.558,35 (Rp 6.211.434.935,35 - Rp1.081.913.377,00).

4. Didalam Petitum Gugatan Perkara nomor 127 Penggugat (PT.Perinus) mendalilkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18-19 April 2018 adalah keadaan kahar (*force majeure*). Tergugat (KKP) melakukan wanprestasi dengan tidak mau melakukan BAST. Sehingga Penggugat (PT.Perinus) mengalami kerugian sebesar Rp.6.159.553.784 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
   a) sisa pembayaran yang masih ditahan KKP kontrak Sabang sebesar Rp 4.558.510.000.
   b) biaya perbaikan KJA Sabang sebesar Rp 1.601.043.784. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi yaitu belum dibayarnya pekerjaan Penggugat (PT.Perinus) yang telah diselesaikan 100% dan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Penggugat karena adanya kerusakan-kerusakan.
5. Berdasarkan penelitian dan kajian PPK Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan, bahwa fakta pekerjaan tidak selesai 100%, dan sampai dengan saat ini meskipun telah berkali-kali diberikan kesempatan berupa 2 kali *addendum*, penambahan waktu sampai dengan 30 April 2018 Penggugat (PT.Perinus) tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100% sehingga komitmen yang disampaikan oleh penggugat (PT.Perinus) kepada tergugat (KKP) sudah tidak dapat lagi diterima karena penggugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Maka sesuai dengan perjanjian yang tertuang di dalam kontrak penggugat (PT.Perinus) dikenakan denda keterlambatan yaitu sebesar Rp 3.692.393.100. Dan denda tersebut belum dibayarkan sama sekali oleh penggugat (PT.Perinus) kepada Direktorat Pakan dan Obat Ikan.
6. Putusan 2 (dua) gugatan tersebut dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke), putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian Pekerjaan KJA 05

Berdasarkan surat PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berasal ekspose dari PT. Perinus Nomor DIR/1/Unit02/2021 tanggal 16 Januari 2021:

1. PT. Perikanan Nusantara (Persero) berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan instalasi percontohan budidaya ikan lepas pantai (KJA 05) sampai selesai dan selanjutnya kiranya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dapat menerima pekerjaan tersebut.

2. Melalui alokasi anggaran tahun 2019, DJPB Bersama dengan DJPRL dan BRSDM(KP telah melakukan survei lokasi untuk rencana pemindahan penempatan KJA OS ke Teluk Semangka Provinsi Lampung.
3. Telah ditandatanganinya nota kesepakatan atas keberlanjutan penyelesaian KJA OS berdasarkan surat Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) Nomor DIR/Dirut/217/IV/2021 tanggal 28 April 2021 hal tindak lanjut penyelesaian pembangunan KJA OS.

E. Rapat Pembahasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pencatatan Aset

Notulensi rapat pembahasan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap aset yang dicatat pada LK sebagai KDP tanggal 26 Januari 2022 dengan kesimpulan:

1) Pihak BPK meminta pihak DJPB membuat surat perjanjian dengan PT. Perindo untuk kelanjutan pekerjaan KJA OS serta menetapkan sanksi apabila PT. Perindo tidak menepati janji;
2) Menurut Kementerian Keuangan, KDP tidak dapat dipindahkan menjadi aset lainnya, sehingga lebih baik menjadi aset tetap peralatan dan mesin dan sesuai KSAP, terdapat 6 (enam) variasi pencatatan KDP, kemungkinan perlakuan KDP DJPB tetap dicatat sebagai KDP atau KDP dapat dihapuskan
3) Pihak DJPB menghendaki KJA OS tetap dicatat sebagai KDP, karena berkeyakinan bahwa KJA OS tersebut akan dikerjakan hingga selesai oleh PT. Perindo pada tahun 2022;
4) Menurut Inspektur III, Inspektorat Jenderal KKP berpendapat bahwa perlu adanya langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan KDP. Timeline perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak.
   a) Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan KJA, akan direlokasi ke lokasi yang potensial untuk pengembangan budidaya laut. Beberapa lokasi potensial tersebut telah dilakukan survei oleh pihak independen yaitu PT.Sucofindo (laporan terlampir).
   b) Adapun lokasi tersebut yaitu Teluk Sabang-Provinsi Aceh dan Teluk Semangka-Provinsi Lampung.
   c) Adapun pengelola KJA dimasing-masing lokasi yaitu BBPBL Lampung untuk KJA di Teluk Semangka dan BPBAP Ujung Batee untuk KJA di Teluk Sabang.

F. Inventarisasi dan penilaian kembali

Pada tanggal 19 Januari 2023 secara serentak dilakukan inventarisasi dan penilaian kelayakan atas KDP berupa KJA OS yang terletak di 3 (tiga) wilayah yakni Sabang, Karimunjawa, dan Pangandaran, yang dalam pelaksanaannya DJPB melibatkan PT. SUCOFINDO sebagai ahli dalam melakukan inventarisasi dan penilaian kelayakan atas KJA tersebut, dalam inventarisasi didampingi oleh Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Perbenihan, Sekretariat DJPB, Inspektorat III, Biro Keuangan, PT. Perindo.

Dalam kegiatan inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi yang ditandatangani oleh pendamping dan PT. Sucofindo (terlampir). Hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh PT. Sucofindo didampingi oleh tim DJPB, Inspektorat III, Biro Keuangan, dan PT. Perindo sebagai berikut:

1. Pada KJA OS Sabang, Unit *Cages* sebagian besar terangkai lengkap dan secara visual terlihat baik, akan tetapi beberapa komponen dari unit barang sebagian besar banyak yang tidak diketahui keberadaannya di antaranya *Mooring System for Cages, Net Cleaner, Camera system, Mooring System for Barge*, dan *Feed Pipe* tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan pada unit *Workboat* dan *Feed Barge* beberapa komponen dari unit tersebut sebagian besar banyak yang mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi.
2. Pada KJA OS Pangandaran, sebagian besar komponen dari unit *Cages, Mooring System for Cages, Net For Cages, Camera system, Mooring System for Barge* yang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan untuk unit *Feed Barge* dan *Feed Pipe* tidak ketahui keberadaannya. Sedangkan pada unit *Workboat* beberapa komponen dari unit tersebut tidak dapat berfungsi dikarenakan mengalami kerusakan, sehingga *Workboat* tidak dapat berfungsi, dan untuk unit *Net Cleaner* kondisinya masih bisa berfungsi, namun perlu dilakukan perbaikan ringan.
3. Pada KJA OS Karimunjawa, sebagian besar komponen dari unit *Cages, Net For Cages, Net Cleaner, Workboat, Camera system Feed Barge*, dan *Feed Pipe* mengalami kerusakan dan sebagian komponen dari unit tersebut juga tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan untuk unit *Mooring System for Cages* dan *Mooring System for Barge* yang tidak diketahui keberadaannya.

Hasil inventarisasi dan penilaian menunjuk kondisi (terlampir) yaitu KDP KJA OS yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa yang akan datang senilai Rp47.253.136.520,00 dan dalam keadaan rusak senilai Rp67.618.331.783,00.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sudah melakukan aseni terkait barang-barang KJA 05, dimana barang yang dapat diterima dan memiliki potensi manfaat dimana yang akan datang sesuai tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp36.753.188.174,00 sedangkan yang tidak dapat diterima sebesar Rp78.118.280.129,00. KDP KJA 05 yang memiliki potensi manfaat di masa datang akan dituangkan sebagai aset KKP c.q. Ditjen Perikanan Budi Daya dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Selanjutnya barang yang rusak akan dibebankan kepada PT Perindo dan dituangkan sebagai Piutang Jangka Panjang BUMN dalam suatu Surat Pengakuan Utang BUMN. DJPB bersurat kepada BPKP dengan Surat Nomor S-720/DJPB/PB.150/1/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal permohonan reviu inventarisasi dan penilaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) KJA 05. Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam (BPKP) mengundang DJPB dengan Surat Nomor PE.09.00/S-23/D102/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Eksposi kronologis Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) KJA 05.

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Perbendaharaan DJPB, Inspektur III Inspektorat Jenderal KKP, Koordinator Keuangan dan Umum DJPB, Bagian Hukum DJPB dan auditor Inspektorat III KKP. Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. BPKP tidak dapat mereviu dokumen yang diberikan oleh KKP dan Perindo dikarenakan kedua belah pihak masih belum ada kesepakatan terkait porsi aset.
2. Untuk menentukan penilaian terkini disarankan agar KKP bersurat ke KPKNL Jakarta.
3. Atas Reviu Oleh BPKP telah terbit Laporan Hasil Reviu Nomor PE.09.03/LHP-84/D102/2023 tanggal 11 April 2023 (terlampir) dengan rekomendasi sebagai berikut:
    a. Menetapkan apakah pekerjaan KJA 05 tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan secara permanen;
    b. Mencatat pekerjaan KJA 05 sebagai KDP dengan nilai sesuai yang tercantum dalam kontrak apabila atas KJA 05 tersebut ditetapkan untuk dilanjutkan;
    c. Memindahkan pencatatan KJA 05 dari akun Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) ke dalam akun Aset Lain-lain apabila KJA 05 tersebut ditetapkan untuk dihentikan secara permanen;
    d. Melakukan penelaahan dan penataan terhadap hasil inventarisasi atas KJA 05 yang dilakukan oleh PT. Sucofindo terkait kondisi barang yang

sebagian sudah dalam kondisi rusak ringan, rusak berat, dan tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Menindaklanjuti LHR BPKP tersebut pimpinan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mengambil sikap untuk menghentikan secara permanen proses Pengerjaan KDP KJA 05 yang dituangkan dalam surat pernyataan Nomor B.2109/DJPB/KU.110/IV/2023 tanggal 27 April 2023 (terlampir). Hal itu sejalan dengan adanya surat dari PT. Periodo Nomor 0041/Dir.A/IV/2023 tanggal 26 April 2023 hal Komitmen Penghentian Permanen KJA 05.

G. Finalisasi Tindak Lanjut KDP KJA 05 dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited*.

1. Melakukan reklasifikasi menjadi aset tetap atas KDP yang sudah dilakukan inventarisasi masing masing menjadi 1 unit Keramba (Jaring Apung) yang tercatat pada UAPKPB Direktorat Perbenihan dan UAPKPB Direktorat Pakan dan Obat Ikan.
2. Melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya/penghentian penggunaan aset atas Keramba (Jaring Apung) untuk selanjutnya pimpinan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan menempuh proses penghapusan atas KDP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

H. Langkah-langkah penyelesaian penghapusan KJA 05

1. Inventarisasi ulang aset pembentuk KJA 05.

   Pelaksanaan Inventarisasi ulang atas Aset, kondisi dan pengaman atas Pengadaan KJA 05 berupa aset bentukan yang dihasilkan dari pengadaan KJA 05 pada 3 (tiga) lokasi yang melibatkan Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP, Tim dari Direktorat Teknis dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dilakukan secara serempak pada tanggal 18 s.d. 22 September 2023.

2. Reklasifikasi Aset pembentuk KJA 05.

   Atas Hasil inventarisasi dilapangan dilakukan koreksi/reklasifikasi Keramba Jaring Apung (KJA 05) menjadi beberapa aset sesuai dengan aset yang terbentuk yang direkam sebagai koreksi saldo awal.

   Rincian aset terbentuk pada masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

   a) KJA 05 Sabang (Direktorat Pakan dan Obat Ikan)

Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Nilai
3040109050	Keramba (Jaring Apung)	7.444.314.647	1	7.444.314.647

Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Nilai
3040108007	Receiving Gill Net (Jaring Insang Lingkar)	7.390.089.900	1	7.390.089.900
3040102006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	925.547.250	2	1.851.094.500
3060102127	Camera Under water	5.791.340.000	1	5.791.340.000
3020403001	Pontoon	7.448.198.000	1	7.448.198.000
3120204002	Drill Pipe	1.651.680.063	1	1.651.680.063
3010204001	Kapal Tarik	7.459.802.890	1	7.459.802.890
3060347002	GENSET	1.989.360.000	2	1.989.360.000
			Jumlah	9	41.026.590.000

b) KJA 05 Pangandaran (Direktorat Perbenihan)

Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Nilai
3040108010	Keramba Jaring Apung	7.444.314.647	1	7.444.314.647
3040108007	Receiving Gill Net (Jaring Insang Lingkar)	6.901.252.050	1	6.901.252.050
3040102006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	743.048.177	2	1.486.096.354
3060102127	Camera Under water	6.209.073.018	1	6.209.073.018
3020403001	Pontoon	7.356.990.774	1	7.356.990.774
3120204002	Drill Pipe	1.190.731.962	1	1.190.731.962
3010204001	Kapal Tarik	7.459.802.890	1	7.459.802.890
3060347002	GENSET	1.748.354.913	1	1.748.354.913
			Jumlah	9	37.796.816.608

c) KJA 05 Karimunjawa (Direktorat Perbenihan)

Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Nilai
3040108010	Keramba Jaring Apung	7.444.314.647	1	7.444.314.647
3040108007	Receiving Gill Net (Jaring Insang Lingkar)	6.901.252.050	1	6.901.252.050
3040102006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	743.048.177	2	1.486.096.354
3060102127	Camera Under water	6.209.073.018	1	6.209.073.018
3020403001	Pontoon	7.356.990.774	1	7.356.990.774
3120204002	Drill Pipe	1.190.731.962	1	1.190.731.962
3010204001	Kapal Tarik	7.459.802.890	1	7.459.802.890
Jumlah			8	38.048.261.695

3. Perubahan Kondisi dan penghentian penggunaan Aset.

   Hasil koreksi masuk atas aset tersebut telah dilakukan perubahan kondisi menjadi rusak berat dan ditindaklanjuti dengan reklasifikasi ke aset lainnya (penghentian penggunaan aset).

4. Akan dilakukan terlebih dahulu usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas 26 (dua puluh enam) NUP tersebut diatas (KJA OS Karimun Jawa, Pangandaran, Sabang) kepada KPKNL Jakarta II di semester I TA. 2024.
5. Setelah Penetapan Status Penggunaan sudah disetujui/terbit SK PSP akan dilakukan usulan penghapusan atas 25 (dua puluh lima) NUP kepada Kanwil DJKN Jakarta pada Semester II TA. 2024.
6. Untuk Aset berupa pontoon kode barang 302040300] sebanyak 1 (satu) NUP yang berada di KJA OS Pangandaran akan dilakukan TGR dikarenakan asset tersebut tidak diketahui keberadaannya pada saat tim inventarisasi ke lapangan, dimana proses TGR akan dilakukan pada T.A. 2024 dengan melibatkan Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP.
7. Atas aset yang berlokasi di KJA OS Sabang telah terbit SK Penetapan status penggunaan dengan nomor 32/KM.6/KNL.0702/2024 tanggal 7 Februari 2024 dan untuk yang berlokasi di KJA OS Pangandaran dan Karimunjawa terbit SK Penetapan Status Penggunaan Nomor 52/KM.6/KNL.0702/2024 tanggal 26 Februari 2024
8. Saat ini telah di lakukan pengusulan penghapusan atas 2 (dua) unit Penyemprot Mesin (Power Sprayer) yang berlokasi di Kab. Pangandaran kepada KPKNL Jakarta II dikarenakan pencatatan aset tercatat di Direktorat Perbenihan.

F.3.3 Penjelasan atas Informasi Sengketa Tanah Segoro Tambak

Tindak lanjut penyelesaian perjanjian *ruilslag* tanah Segoro Tambak dengan PT. Semeru Cemerlang adalah sebagai berikut:

1. Telah mengirimkan 2 (dua) somasi kepada PT. Semeru Cemerlang
2. PT. Semeru Cemerlang berkitikad baik menghadiri 3 (tiga) pertemuan/negosiasi yang diinisiasi KKP
3. Mengingat hasil revaluasi tanah Segoro Tambak pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp100.246.056.750,00. KKP meminta permohonan revaluasi kepada Kemkeu berdasarkan surat Kepala Biro Hukum Nomor B.697/SJ.4/TU.210/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023 hal Permohonan Penilaian atas BMN Tanah Negara (berupa Tanah Tambak) dalam rangka tindak lanjut penyelesaian perjanjian tukar menukar (*ruislag*)

4. Plh. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kemkeu menyampaikan balasan berdasarkan surat Nomor S-2033/KN.4/2023, tanggal 30 November 2023, yang pada intinya mengembalikan surat dimaksud dan dapat disampaikan kembali apabila telah terdapat kejelasan objek dan permasalahan hukum dengan dokumen terkait
5. Telah dilakukan pembahasan dengan Kemkeu dan disepakati bahwa
   a. Kementerian Keuangan belum dapat melakukan penilaian ulang atas aset dimaksud dan disarankan untuk sementara penilaian kepada hasil revaluasi pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp180.246.056.758,00
   b. Terkait penilaian aset pengganti yang telah diberikan oleh PT. Semeru Cemerlang dapat dilakukan oleh Tim Penilai/Akuntan Publik
   c. Salah satu alternatif solusi yang dapat disampaikan yaitu setelah adanya penilaian aset pengganti maka dapat diperhitungkan terhadap lahan tanah di Segoro Tambak dimaksud
   d. Diharapkan KKP dapat melakukan negosiasi ulang dengan PT. Semeru Cemerlang dan diharapkan mendapatkan alternatif solusi terbaik bagi para pihak.
6. Pada Periode Tahun 2024, KKP mengundang kembali Kemenkeu dalam pembahasan dengan PT. Semeru Cemerlang

F.4 Penanganan Lain-Lain Terkait dengan Pengelolaan BMN

F.4.1 Properti Investasi pada Ditjen PKPRL

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor 32/KKP/LK-KKP/04/2024 tanggl 23 April 2024 terkait aset properti investasi pada Laporan Keuangan KKP belum memadai yaitu berupa Aset Tanah yang berlokasi di Pulau Nipa NUP 4 seluas 24 Ha dengan nilai sebesar Rp110.346.287.172,00 pada Ditjen PKRL Satker Sekretariat Ditjen PKRL.

Pada LK TA 2023 Audited belum dicatat sebagai properti investasi dikarenakan pencatatan properti investasi senilai Rp110.346.287.172,00 baru akan dilakukan pencatatan pada Semester I Tahun 2024. Pertimbangannya dikarenakan aset tanah yang direklasifikasikan menjadi properti investasi adalah bagian dari saldo Kemitraan Pihak Ketiga senilai Rp214.231.398.172,00. Selain Aset Tanah senilai Rp110.346.287.172,00 terdapat aset lain yaitu Bangunan Lainnya (Prasasti) NUP 1 senilai Rp9.107.000,00, Jalan Khusus Inspeksi NUP 1 senilai Rp13.121.597.000,00 dan Tanggul Keliling NUP 1 senilai Rp90.754.497.000,00, sehingga sisa aset bagian dari

Kemitraan Pihak Ketiga agar lebih tepat dicatat. Jika tidak menjadi bagian properti investasi maka perlu dilakukan inventarisasi/identifikasi di lapangan dengan tim dari Biro Keuangan KKP, tim dari Kementerian sebagai Pengelola Barang dan tim dari Inspektorat Jenderal KKP untuk dilakukan asersi manajemen selanjutnya untuk dituangkan ke dalam kertas kerja.

F.3. Upaya Hukum Pada Lingkungan KKP

F.3.1 Proses Hukum, Sengketa Hukum, Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali di Lingkungan KKP

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa hukum adalah keseluruhan pengajuan upaya administratif, gugatan baik melalui perdata maupun tata usaha negara permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan yang dapat mempengaruhi nilai tuntutan keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Upaya administratif, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan (Pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan/UU AP)
2. Upaya Administratif terdiri atas (Pasal 75 ayat (2) UU AP)
   a. keberatan; dan
   b. banding;
3. Selanjutnya terkait upaya administratif di lingkungan KKP diatur dalam Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Permen KP Nomor 26 Tahun 2022, yang mengatur upaya administratif terdiri atas:
   a. keberatan administratif; dan
   b. Banding Administratif.
4. Keberatan administratif diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif (Pasal 47B ayat (1) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permen KP 26 Tahun 2022);
5. Banding administratif diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan administratif diterima (Pasal 47B ayat (1) Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permen KP 26 Tahun 2022);

6. Gugatan perdata mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih, permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak.
7. Gugatan yang diajukan ke PTUN sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke peegadilan untuk mendapatkan putusan;
8. Banding yaitu salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan ini putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi
9. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan ini putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung;

Daftar kasus hukum sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

F.3.2 Penegakan Hukum Pada Ditjen PSDKP

Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan paradigma penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang semula berorientasi pada sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Sedangkan pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*). Paradigma ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Tata cara pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 dan diatur lebih teknis dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam tata cara pengenaan sanksi administratif ini diatur hak pelaku usaha untuk mengajukan keberatan dan banding

administratif apabila merasa tidak puas dengan putusan sanksi administratif yang dikenakan.

Selain melalui proses penegakan hukum, perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya dan/atau lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan juga dapat dikenakan pertanggungjawaban melalui mekanisme penyelesaian sengketa/ganti kerugian bidang kelautan dan perikanan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 64, 65, 66 dan 67 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta pasal 184 Undang Undang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan uraian tersebut terhadap perbuatan pelaku usaha yang mengakibatkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dikenakan tindakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa/ganti kerugian dikenakan terhadap pelaku usaha yang dalam kegiatan berusahanya mengakibatkan kerusakan sumber daya dan/atau lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan namun perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan pertaiman berusaha bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyelesaian sengketa sebanyak 4 (empat) kasus, dimana 3 (tiga) kasus telah selesai prosesnya dengan total pembayaran ganti kerugian sebesar Rp3.581.799.102,52 (tiga miliar lima ratus juta delapan puluh satu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua koma lima puluh dua rupiah), sedangkan 1 (satu) kasus masih dalam proses penelaahan oleh Kemenkomarves untuk menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk penanganan lebih lanjut.
2. Sanksi administratif dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan administratif bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2023 sanksi administratif telah dikenakan terhadap 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) pelanggaran dengan rincian:
    a. Pelanggaran di bidang pengelolaan sumber daya kelautan sebanyak 51 (lima puluh satu) pelanggaran, 7 (tujuh) pelanggaran dikenakan surat peringatan 1 (satu) dan 44 (empat puluh empat) pelanggaran dikenakan sanksi denda administratif.
    b. Pelanggaran di bidang pengelolaan sumber daya perikanan sebanyak 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) pelanggaran, 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) dikenakan surat peringatan 1 (satu), 243 (dua ratus empat puluh tiga)

dikenakan surat peringatan 2 (dua), dan 150 (seratus lima puluh) dikenakan denda administratif.

c. Total denda administratif yang telah dibayarkan pada tahun 2023 sebesar Rp23.908.541.774 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

II. Sanksi pidana dikenakan tertutup pelaku usaha yang melakukan pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dan upaya pengenaan sanksi administratif dan penyelesaian sengketa terbukti tidak dapat menciptakan keparahan.

Pada tahun 2023 terdapat 56 (lima puluh enam) kasus pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang diproses secara pidana.

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut, berasal dari 19 (sembilan belas) pelaku usaha berasal dari:

1. Sulawesi Tenggara terdapat 1 (satu) pelaku usaha pembangunan terminal khusus
2. Sulawesi Tengah terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi dan 1 (satu) pelaku usaha pembangunan terminal khusus
3. Jawa Tengah terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi
4. Lampung terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi
5. Jawa Barat terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi
6. Sulawesi Utara terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi
7. Kepulauan Riau terdapat 1 (satu) pelaku usaha pembangunan terminal khusus, 5 Pelaku usaha reklamasi, 1 (satu) pelaku usaha wisata dan 1 pelaku usaha budidaya

II. Riau terdapat 1 (satu) pelaku usaha reklamasi, dan 3 (satu) pelaku usaha penambangan pasir di laut. Pelanggaran sedimentasi di laut terdiri dari:

a. 4 (empat) Kapal, berasal dari 3 (tiga) kapal di Provinsi Riau dikenakan sanksi denda administratif dan 1 (satu) kapal di Provinsi Banten dikenakan sanksi denda administratif

b. 1 (satu) kapal di Provinsi Kep. Riau dalam tahap pengenaan sanksi administratif penyelesaian sengketa WPJK dengan penetapan ganti kerugian senilai Rp3.581.799.102,00, terdiri:

- TB Nusana III/BG SMS Barito 214 kandas di Nusa Penida, Bali, Ganti kerugian kerusakan lingkungan Rp 1.439.414.741,62 sudah lunas dibayarkan
- KM Sabuk Nusantara 62 kandas di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Ganti kerugian kerusakan lingkungan Rp 845.734.649,90, sudah lunas dibayarkan

– KM Sicimau kandas di Perairan Adonara, NTT, Ganti kerugian kerusakan lingkungan Rp 1.296.649.711,00, sudah lunas dibayarkan

– MT AASHI kandas di Nias Utara, Sumatera Utara. Dalam tahap negosiasi Penelaahan oleh Kemenkomarves hal instansi yang akan menyelesaikan penanganan sengketa.

Pengenaan sanksi administratif sebanyak 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) kasus :

Bidang	Jumlah Kasus	Jumlah Administratif			Keterangan
		SP1	SP2	Denda	
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	51	7	0	44	18 dari 44 kasus yang dikenakan denda juga diberikan paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.126	785	241	150	- 127 kasus sail operasi pengawasan - 709 kasus hasil analisis SPKP
Jumlah	1.177	792	241	194	

Penanganan tindak pidana Kelautan dan Perikanan berasal dari total kasus TPKP yang ditangani 56 (lima puluh enam) kasus

Proses Hukum	Jumlah (Kasus)
Penyidikan	5
P-21	5
Tahap II	2
Proses sidang	1
Banding	2
Kasasi	1
Inkrah	40

Penanganan awal kapal yang ditangani:

NO	UPT	ABK WNA			ABK WNI		
		JUMLAH TERSANGKA	DIPULANGKAN	BELUM DIPULANGKAN	JUMLAH TERSANGKA	DIPULANGKAN	BELUM DIPULANGKAN
1	Lan PSDKP Lampulo				97	93	4
2	Lan PSDKP Belawan	179	169	64			
3	Lan PSDKP Jakarta						
4	Lan PSDKP Bitung	43	43		101	97	4
5	Lan PSDKP Benoa						
6	Lan PSDKP Tual						
7	Bal. PSDKP Belawan	64	60	4	13	12	1
8	Bal. PSDKP Pontianak	10	10		6	6	
9	Bal. PSDKP Tarakan	4		4	41	33	8
10	Bal. PSDKP Cilacap						
11	Bal. PSDKP Tahuna	16	15	1	5	5	
12	Bal. PSDKP Kupang						
13	Bal. PSDKP Ambon						
14	Bal. PSDKP Tual						
TOTAL		344	169	73	111	97	14

Awak kapal yang masih di UPT PSDKP yang ditangani :

NO	KEWARGA-NEGARAAN	TERSANGKA/ TERDAKWA/ TERPIDANA	NON JUSTITIA		JUMLAH
			SAKSI	SIAP DIPULANGKAN	
1	INDONESIA	22	6	-	54
2	MYANMAR	2	-	-	2
3	VIETNAM	4	52	47	64
5	LAOS	1	-	-	1
6	MALAYSIA	5	-	-	5
7	FILIPINA	2	5	1	8
TOTAL		33	59	48	89

Penanganan kesielayaan pelintas batas yang ditangani:

NO	NEGARA ASAL	JUMLAH YANG DITANGANI		JUMLAH KELUAR YANG DITANGANI		JUMLAH KAPAL YANG DITANGANI	KET
		TERTANGKAP BERDASARKAN BERITA PROSES HUKUM	TERTANGKAP TAHUN 2022	TERTANGKAP BERDASARKAN BERITA PROSES HUKUM	TERTANGKAP TAHUN 2022		
1	MALAYSIA	156	98	6	6	162*	*10 unit yang tidak ditemukan (hanya ada 1 orang dan dikenakan sanksi Proses Hukum a. Pangkat 10 orang b. Pangkat 36 orang c. Pangkat 1 orang d. Lanjutan 13 orang e. Bebaskan 2 orang f. Tidak Ada 2 orang
2	THAILAND	1	89	1	-	90*	*Dikarenakan terdapat alat bukti Video untuk proses hukum di Pengadilan
3	AUSTRALIA	-	64	-	60	47	*14 orang sedang/telah proses hukum di Pengadilan (2 Unit 2021 (Pidana Jalur dan PNS 11)
4	PAPUA NUGINI	21	28	32	28	27	*5 orang sedang proses hukum di Pengadilan
JUMLAH		178	279	39	94	326	
JUMLAH TOTAL		457		133		326	

Hasil pengawasan pada tahun 2023 adalah:

Melakukan pemantauan terhadap 10.843 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) kapal tergantau memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) aktif. Pesawat *airborne surveillance* berhasil melakukan pemantauan terhadap 1.119 (seribu seratus sembilan belas) kapal, terdiri dari 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kapal ikan berbendera Indonesia dan 124 (seratus dua puluh empat) kapal ikan berbendera asing dari hasil operasi selama 150 (seratus lima puluh) hari operasi (614,96 jam terbang) dengan daerah jangkauan (*coverage area*) seluas 1.127.947,2 (satu juta seratus dua puluh tujuh sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua) NM2. Capaian Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan berhasil melaksanakan total 2.977 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hari operasi, memeriksa 6.525 (enam ribu lima ratus dua puluh lima) kapal dan menangkap 269 (dua ratus enam puluh sembilan) kapal terdiri dari 252 (dua ratus lima puluh dua) kapal ikan berbendera Indonesia dan 17 (tujuh belas) kapal ikan berbendera asing.

Hasil pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan sebanyak 2.519 (dua ribu lima ratus sembilan belas) pelaku usaha dari target 2.442 (dua ribu empat ratus empat puluh empat dua). Pemeriksaan Kapal Perikanan sebanyak 1.626 (seribu enam ratus dua puluh enam) kapal, Pengawasan unit pengolahan ikan sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) UPI, Pengawasan distribusi hasil perikanan sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) UPI, Pengawasan pembudidayaan ikan sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) unit usaha budidaya.

Verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Patuh/Telah memenuhi Syarat = 1.616
2. Rekomendasi berupa perbaikan dan pembinaan = 4
3. Rekomendasi berupa Pencabutan Non Liquidasi = 5
4. Rekomendasi pengenaan Sanksi Aaministratif = 1

Hasil pengawasan pembudidayaan ikan, sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) pelaku usaha budidaya ikan yang diperiksa, terdiri dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) pelaku usaha budidaya ikan yang diperiksa, 73 (tujuh puluh tiga) rekomendasi sanksi administratif (peringatan/teguran dan pencabutan non likuidasi), dan 104 (seratus empat) rekomendasi pembinaan/perbaikan. Tindaklanjut hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Telah memenuhi persyaratan 61 (enam puluh satu) pelaku usaha
2. Belum memiliki perizinan berusaha (NIB) sebanyak 40 (empat puluh) pelaku usaha
3. Belum menerapkan CBIB sebanyak 42 (empat puluh dua) pelaku usaha.
4. Belum menerapkan CPIB sebanyak 1 (satu) pelaku usaha

Rekomendasi:

a) Pendampingan sosialisasi dan gerai perizinan di lokasi kampung perikanan budidaya;
b) Perizinan berusaha menjadi persyaratan dalam penetapan kampung perikanan budidaya;
c) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksikan pemeriksaan di kampung perikanan budidaya.

Hasil pengawasan distribusi hasil perikanan, terdiri dari 318 (tiga ratus delapan belas) hasil pengawasan berasal dari 264 (dua ratus enam puluh empat) hasil verifikasi dan 54 (lima puluh empat) proses verifikasi. Terdiri dari 159 (seratus lima puluh sembilan) patuh/memenuhi persyaratan, 50 (lima puluh) rekomendasi sanksi administratif (peringatan/teguran dan pencabutan non likuidasi), 42 (empat puluh dua) rekomendasi pembinaan/perbaikan dan 13 (tiga belas) rekomendasi Sanksi.

Pengawasan *Destructive Fishing* terdiri dari:

1. 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kapal Perikanan (pemeriksaan muatan kapal perikanan < 10 GT) Tidak ditemukan muatan kapal yang mengindikasikan *destructive fishing*, terdiri dari a) Patroli pengawasan menemukan indikasi penyetruman di Kepulauan Riau, pelaku melarikan diri b) Patroli pengawasan menangkap 1 (satu) *longboat* berbendera Malaysia (3 nalayan) pengeboman di Tarakan
2. 46 (empat puluh enam) orang nelayan penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing lokasi penegakan hukum: Buton, Morowali, Lusuk, Kep. Banggai, Maluku Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Ketapang, Kep. Sangihe, Pontianak, Inhragiri Hilir

Penyelenggaraan Pengadilan Adhoc Perikanan.

Berdasarkan amanat Pasal 71 dan Pasal 71A Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dibentuk 10 (sepuluh) Pengadilan Perikanan di Jakarta Utara dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc, Medan dengan 5 (lima) Hakim Ad Hoc, Pontianak dengan 5 (lima) Hakim Ad Hoc, Bitung dengan 4 (empat) Hakim Ad Hoc, Tual dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc, Ranai dengan 5 (lima) Hakim Ad Hoc, T). Pinang dengan 7 (tujuh) Hakim Ad Hoc, Ambon dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc, Sorong dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc, dan Merauke dengan 3 (tiga) Hakim Ad Hoc.

Pengadilan Perikanan berada di bawah pengadilan umum. Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Untuk daerah yang belum terdapat Pengadilan Perikanan, tindak pidana perikanan dapat diperiksa dan diadili di pengadilan negeri setempat (Pasal 106 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

F.5. Pengungkapan Lainnya terkait Penyelesaian Kerugian Negara Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal Pada Kasus BPPSMKP

Terdapat temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal IOP Nomor R.020/ITJ.5/HP.230/VII/2021 tanggal 31 Juli 2023 hal Laporan Hasil Audit Investigasi pada Sekretariat BKIPM sebesar Rp. 905.982.039,00 (Kas Negara sebesar Rp.865.982.000,00 dan ke Pihak ke III sebesar Rp. 40.000.000,00). Penyetoran per 30 April 2024 sebesar Rp.439.016.016,00 (Kas Negara sebesar Rp. 431.911.946,00 dan ke

Pihak ke III sebesar Rp.7.104.870,00]. Sehingga sisa temuan sebesar Rp. 466.965.223,00 [Kas negara sebesar Rp.434.070.093,00 dan Pihak ke III sebesar Rp.32.895.130,00] dengan rincian dan bukti NTPN terlampir. Penjelasan informasi diatas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Temuan			Setoran			Sisa		
Kas Negara	Pihak ke III	Total	Kas Negara	Pihak ke III	Total	Kas Negara	Pihak ke III	Total
891.963.000	40.000.000	931.963.000	457.892.907	7.104.870	464.997.777	434.070.093	32.895.130	466.965.223

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN TIDAK DIPUBLIKASI KARENA MERUPAKAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
TAHUNAN
Tahun Anggaran 2023
AUDITED


BIRO KEUANGAN & BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN